BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b. bahwa sesuai hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 02 Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
Dan
BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
memuat analisis permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2020-2024.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKANDAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
memuat strategi, arah kebijakan pembangunan serta program pembangunan prioritas berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, dan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IX : PENUTUP
memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

(2) Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
Pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI PADANG LAWAS,

AHMAD ZAINAWI PASARIBU

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,

SEKDAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS, PROVINSI SUMATERA UTARA : (7-206 / 2021)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati, sekaligus juga menjadi instrumen pengukuran kinerja pemerintahan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan Tahun 2024. Dalam pencapaian target pembangunan PRPJMD melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas, mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi, serta mendorong peran aktif masyarakat termasuk dunia usaha maupun akademisi. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Sibuhuan, Desember 2021

Plt. BUPATI PADANG LAWAS

drg. H. AHMAD ZARNAWI PASARIBU, CHT, MM, M.Si

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **I**

DAFTAR TABEL ..... **IV**

DAFTAR GAMBAR ..... **XIII**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1. LATAR BELAKANG **I-1**

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN **I-9**

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN **I-12**

1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan RPJMN I-12

1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara I-13

1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan RPJPD,RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD I-14

1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan RTRW Kabupaten Padang Lawas I-14

1.3.5. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas I-15

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN **I-15**

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN **I-16**

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II-1**

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI **II-1**

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah II-18

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana II-20

2.1.4. Demografi II-21

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT **II-24**

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-24

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat II-35

2.2.3. Angka Rata – rata Lama Sekolah II-43

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM II-48
2.3.1. Urusan Pemerintah Wajib dengan Pelayanan Dasar . II-48
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar .. II-89
2.3.3. Layanan Urusan Pilihan..... II-104
2.3.4. Layanan Penunjang Urusan II-105
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH II-109
2.4.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)..... II-109
2.4.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) II-110
2.4.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja II-111
2.4.4. Nilai Tukar Petani II-111
2.4.5. Angka Kriminalitas II-112
2.4.6. Jumlah Demonstrasi..... II-112
2.4.7. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)..... II-112
2.5. HASIL EVALUASI TERHADAP RPJMD KABUPATEN PADANG LAWAS..... II-113
2.5.1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran Tahun 2020..... II-113
2.6. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD DAN REALISASI RPJMD TAHUN 2020 ..... II-119
2.6.1. Capaian Indikator Kinerja Utara (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2020..... II-119
2.6.2. Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan II-119
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU..... III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III-2
3.1.2. Neraca Daerah III-6
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU III-9
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran III-10
3.2.2. Analisis Pembiayaan III-11
3.3. KERANGKA PENDANAAN III-15
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja III-15
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan..... III-21
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-1
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH **IV-2**
4.2. ISU-ISU STRATEGIS..... IV-20

4.2.1. Isu Internasional.....IV-20
4.2.2. Isu atau Kebijakan Nasional IV-26
4.2.3. Isu atau Kebijakan Daerah.....IV-36
4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Padang Lawas IV-49
BAB V VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1. VISI V-1
5.2. MISI V-2
5.3. TUJUAN DAN SASARAN V-3
5.4. SINKRONISASI PRPJMD KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2020-2024 ..... V-8
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1 STRATEGI VI-1
6.2. ARAH KEBIJAKAN PRPJMD KABUPATEN PADANG LAWAS VI-6
6.3. KEGIATAN UNGGULAN VI-9
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH..... VII-1
7.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1
8.1. INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN..... VIII-2
8.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA..... VIII-4
8.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI..... VIII-6
8.4. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) VIII-47
BAB IX PENUTUP IX-1
9.1. PEDOMAN TRANSISI IX-1
9.2. Kaidah Pelaksanaan IX-1

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas .. II-3

Tabel 2.2 Potensi Pertambangan di Kabupaten Padang Lawas II-7

Tabel 2.3 Kondisi DAS Terhadap Lahan Kritis di SWP Asahan Barumun Berdasarkan Daerah Administrasi Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara II-8

Tabel 2.4 Curah Hujan, Jumlah Hujan dan Penyinaran Matahari Setiap Bulan di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020 ..... II-10

Tabel 2.5 Rata-Rata Suhu Udara dan Kelembaban Relatif Setiap Bulan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020 ..... II-12

Tabel 2.6 Sektor Pariwisata Kabupaten Padang Lawas II-17

Tabel 2.7 Rencana Sistem Pusat Kegiatan II-19

Tabel 2.8 Wilayah Rawan Bencana yang pernah terkena bencana alam di Kabupaten Padang Lawas II-20

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020 ..... II-21

Tabel 2.10 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020 ..... II-22

Tabel 2.11 Presentase Umur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 ..... II-22

Tabel 2.12 Persentase Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 ..... II-23

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 .... II-23

Tabel 2.14 Nilai dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020 ..... II-26

Tabel 2.15 Nilai dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020(Juta) II-27

Tabel 2.16 Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2020.....II-28
Tabel 2.17 Pertumbuhan Ekonomi Menurut atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2020 .....II-29
Tabel 2.18 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Dan Kabupaten Sekitar tahun 2020 .....II-30
Tabel 2.19 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas II-30
Tabel 2.20 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020 .....II-32
Tabel 2.21 PDRB per kapita atas dasar konstan di kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020 .....II-32
Tabel 2.22 PDRB Laju Pertumbuhan Atas Harga Konstan Wilayah Pantai Barat Tahun 2016-2020.....II-33
Tabel 2.23 Laju Inflasi Menurut Kelompok Komoditi Kota Padangsidimpuan Tahun 2016-2020.....II-33
Tabel 2.24 Gini Cofficient Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020.....II-34
Tabel 2.25 Gini Cofficient Wilayah Pantai Barat 2018-2020.....II-34
Tabel 2.26 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020 .....II-35
Tabel 2.27 Perbandingan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Lawas dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2016-2020 .....II-37
Tabel 2.28 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020 .....II-39
Tabel 2.29 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020.....II-39
Tabel 2.30 Kemiskinan Wilayah Pantai barat Tahun 2018-2020 .....II-39
Tabel 2.31 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020 .....II-40
Tabel 2.32 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 .....II-41

Tabel 2.33 Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Pantai Barat Tahun 2018 - 2020 ..... II-42
Tabel 2.34 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 ..... II-42
Tabel 2.35 Persentase Kondisi Harapan Lama Sekolah wilayah Pantai Barat Tahun 2018-2020..... II-43
Tabel 2.36 Persentase Usia Harapan Hidup Wilayah Pantai Barat Tahun 2018-2020 ..... II-44
Tabel 2.37 Persentase Cakupan Gizi Buruk Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020..... II-45
Tabel 2.38 Persentase Angka stunting Wilayah Pantai Barat Tahun 2018-2020 ..... II-45
Tabel 2.39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 - 2020..... II-46
Tabel 2.40 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020 ..... II-47
Tabel 2.41 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020 ..... II-47
Tabel 2.42 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020..... II-48
Tabel 2.43 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020 ..... II-49
Tabel 2.44 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020 ..... II-51
Tabel 2.45 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020 ..... II-53
Tabel 2.46 Rasio Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2016– 2020 Kabupaten Padang Lawas II-54
Tabel 2.47 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020 ..... II-54
Tabel 2.48 Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020 ..... II-55
Tabel 2.49 Realisasi SPM Bidang Pendidikan II-56
Tabel 2.50 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020..... II-66

Tabel 2.51 Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016– 2020 ..... II-67
Tabel 2.52 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 ..... II-67
Tabel 2.53 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 ..... II-68
Tabel 2.54 Jumlah tenaga medis kabupaten padang lawas tahun 2016-2020 ..... II-68
Tabel 2.55 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020 ..... II-69
Tabel 2.56 Data Balita Stunting Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 ..... II-69
Tabel 2.57 Status Gizi Bayi Usia 0-59 Bulan berdasarkan Hasil Pemantauan Status Gizi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020 ..... II-70
Tabel 2.58 Realisasi SPM Bidang Kesehatan II-71
Tabel 2.59 Rekapitulasi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Kabupaten Padang LawasTahun 2016 – 2020 ..... II-73
Tabel 2.60 Jumlah Jembatan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020 ..... II-73
Tabel 2.61 Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020 ..... II-74
Tabel 2.62 Persentase Fungsi Layanan Irigasi Kewenangan Dalam Keadaan Optimal Tahun 2016-2020 ..... II-74
Tabel 2.63 Penyediaan Air Baku Dalam BentukWaduk/Embung/Situ Tahun 2016-2020 ..... II-75
Tabel 2.64 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum II-76
Tabel 2.65 Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Padang Lawas II-79
Tabel 2.66 Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Perhubungan II-81
Tabel 2.67 Indikator Capaian Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020 ..... II-84
Tabel 2.68 Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-85

Tabel 2.69 Capaian Indikator Capaian Urusan Sosial Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020.....II-86
Tabel 2.70 Realisasi SPM Bidang Sosial.....II-87
Tabel 2.71 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020 .....II-89
Tabel 2.72 Jumlah Angkatan Kerja Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang di Tamatkan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2020.....II-90
Tabel 2.73 Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020.....II-90
Tabel 2.74 Rasio Kekerasan Perempuan Dan Anak di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020.....II-91
Tabel 2.75 Capaian Indikator Urusan Pangan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020 .....II-91
Tabel 2.76 Banyaknya Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 .....II-92
Tabel 2.77 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020 .....II-93
Tabel 2.78 Penanganan Sampah Tertangani Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020 .....II-93
Tabel 2.79 Perkiraan Jumlah Timbunan Sampah Per Hari Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020.....II-93
Tabel 2.80 Capaian Indikator Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020 .....II-94
Tabel 2.81 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020.....II-95
Tabel 2.82 Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020.II-96
Tabel 2.83 Capaian Indikator Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020.....II-98
Tabel 2.84 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020.....II-99
Tabel 2.85 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020 .....II-100

Tabel 2.86 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020.....II-100
Tabel 2.87 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2020 .....II-101
Tabel 2.88 Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020 .....II-102
Tabel 2.89 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020.....II-103
Tabel 2.90 Potensi Pariwisata Kabupaten Padang Lawas II-104
Tabel 2.91 Capaian Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020.....II-104
Tabel 2.92 Capaian Indikator Urusan Perdagangan da Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020.....II-105
Tabel 2.93 Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020 .....II-105
Tabel 2.94 Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020.....II-107
Tabel 2.95 Capaian Indikator Bidang Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020 .....II-108
Tabel 2.96 Capaian Indikator Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020.....II-109
Tabel 2.97 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020.....II-110
Tabel 2.98 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020.....II-110
Tabel 2.99 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020.....II-111
Tabel 2.100 Angka Kriminalitas Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020.....II-112
Tabel 2.101 Jumlah Demo Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016- 2020 .....II-112
Tabel 2.102 Rasio Ketergantungan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020.....II-113
Tabel 2.103 Capaian Indikator Kinerja dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Lawa II-114

Tabel 2.104 Capaian Indikator Kinerja Utam Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 ..... II-119
Tabel 2.105 Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 ..... II-120

BAB III

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas III-3
Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Padang Lawas III-7
Tabel 3.3 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Padang Lawas III-9
Tabel 3.4 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Padang Lawas III-10
Tabel 3.5 Defisit Anggaran Riil Anggaran Kabupaten Padang Lawas III-12
Tabel 3.6 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2022 ..... III-12
Tabel 3.7 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Padang Lawas III-14
Tabel 3.8 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas tahun III-16
Tabel 3.9 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas III-21
Tabel 3.10 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas III-21

BAB IV

Tabel 4.1 Permasalahan Kabupaten Padang Lawas Per Aspek Pembangunan IV-16
Tabel 4.2 Program Utama Pembangunan Wilayah Berdasarkan RTRW Tahun 2018-2038 ..... IV-39

BAB V

Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 ..... V-4

Tabel 5.2 Perbandingan Visi RPJPN dengan RPJMN, RPJMD Provinsi RPJPD dan PRPJMD Kabupaten Padang Lawas V-8
Tabel 5.3 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan NAWACITA..... V-9
Tabel 5.4 Keterkaitan Misi RPJMD dengan NAWACITA, RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kabupaten Padang Lawas V-10
Tabel 5.5 Keterkaitan RTRW Kabupaten Padang Lawas dengan PRPJMD V-14

BAB VI

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2022-2024 ..... VI-3
Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 ..... VI-8
Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020–2024 ..... VI-12

BAB VII

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024 Kabupaten Padang Lawas VII-2
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 ..... VII-4
Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020–2024..... VII-7
Tabel 7.4 Realisasi RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 ..... VII-45
Tabel 7.5 Proyeksi Program Untuk Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Padang Lawas..... VII-69
Tabel 7.6 Program Pendanaan Untuk Penanganan *Corona Virus Desease*-19 Kabupaten Padang Lawas VII-76
Tabel 7.7 Program dan Kegiatan Untuk Pencapaian Sdg's Kabupaten Padang Lawas VII-77

BAB VIII

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 ..... VIII-3
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 ..... VIII-5
Tabel 8.3 Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020 dan Proyeksi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2021-2024 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas..... VIII-7
Tabel 8.4 Standart Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Padang Lawas..... VIII-48
Tabel 8.5 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Padang Lawas VIII-52

DAFTAR GAMBAR

BAB I

Gambar 1.1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 ..... I-9
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan I-14

BAB II

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Padang Lawas II-2
Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Padang Lawas II-4
Gambar 2.3 Persentase Kemiringan Lahan di Kabupaten Padang Lawas II-5
Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Padang Lawas II-9
Gambar 2.5 Peta Potensi Kawasan Hutan Kabupaten Padang Lawas II-13
Gambar 2.6 Ilustrasi Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Padang Lawas II-20
Gambar 2.7 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera utara dan Kabupaten Padang Lawas Tahu 2016-2020 ..... II-31
Gambar 2.8 Perbandingan Indeks Pembangunan manusia Kabupaten padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2020 ..... II-36
Gambar 2.9 Perbandingan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Lawas Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2020 ..... II-38
Gambar 2.10 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas Dan Provinsi Sumatera Utara II-41
Gambar 2.11 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas Dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020 ..... II-43
Gambar 2.12 Angka Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020 ..... II-44

Gambar 2.13 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020 ..... II-111

BAB III

Gambar 3.1 Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Lawas 2016-2020 ..... III-6

Gambar 3.2 Selisih antara Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparaturdengan Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) Kabupaten Padang Lawas..... III-10

BAB V

Gambar 5.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah..... V-16

BAB VI

Gambar 6.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah..... VI-11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Lebih lanjut, Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa sesuai dengan kewenangannya daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Pasal 264 Ayat (4) bahwa RPJMD disusun dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Mengesahkan H. ALI SUTAN HARAHAP sebagai Bupati Kabupaten Padang Lawas dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.12-8386 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, mengesahkan drg. H. AHMAD ZARNAWI PASARIBU, C.Ht. MM, M.Si. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas dengan masa Jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan 11 Februari 2019, telah melaksanakan kewajibannya menyusun Dokumen RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020–2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2019.

Dokumen Perubahan RPJMD ini memuat visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih yang menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Lawas dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi. Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga diharapkan terjalin kolaborasi yang intensif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Padang Lawas ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang memengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), RPJMD harus selaras dengan RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020–2024 telah diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005–2025 dan RPJMN 2020–2024. Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Padang Lawas 2020–2024, dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang memengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 adalah adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan di Kabupaten Padang Lawas diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian,telah ditetapkan lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Kabupaten Padang Lawas. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap prioritas nasional tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintahdaerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-0378 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terbit pula beberapa peraturan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024. Peraturan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaran pemerintah daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini terbit untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas 2020-2024 adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Corona Virus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Padang Lawas memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Kebijakan ini diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Pergeseran anggaran telah dilakukan beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19.

Memerhatikan perkembangan kondisi nasional dan Kabupaten Padang Lawas akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU pemda), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) tingkat dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak tahun 2020 ini.

Substansi Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang

disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0378 Tahun 2020 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 diterapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 juga memerhatikan pemenuhan pendekatan substansi, yaitu:

a. Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan *Pentahelix*-ABCGM *(Academic, Business, Community, Government, and Media);*

b. Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dana masyarakat/umat, pinjaman daerah, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan obligasi daerah, dan hibah;

c. Penerapan *Dynamic Government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

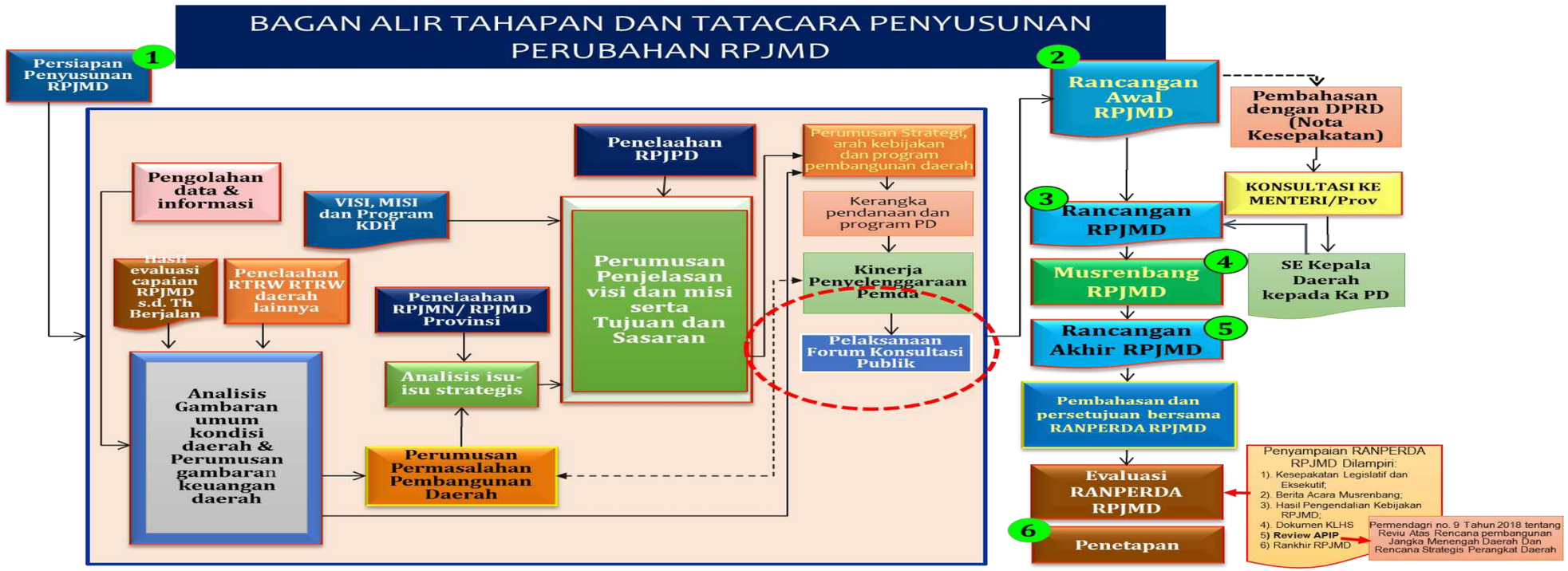
d. Pendekatan Spasial dan a-Spasial melalui 4 (empat) Wilayah Pengembangan (WP);

e. Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 dilakukan mutatis dan mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD. Alur tahapan pelaksanaan perubahan RPJMD digambarkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Tahapan dan Tatacara Penyusunan
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD)
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024



Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025 periode/tahap keempat;
3. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038;
4. Pedoman arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Kabupaten Padang Lawas;
5. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
6. Instrumen pengukuran tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun;
7. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda.

Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022 dan 2023 serta Perubahan RKPD Tahun 2021. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 serta Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 dengan perencanaan strategis di kabupaten/kota dan perencanaan operasional di perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

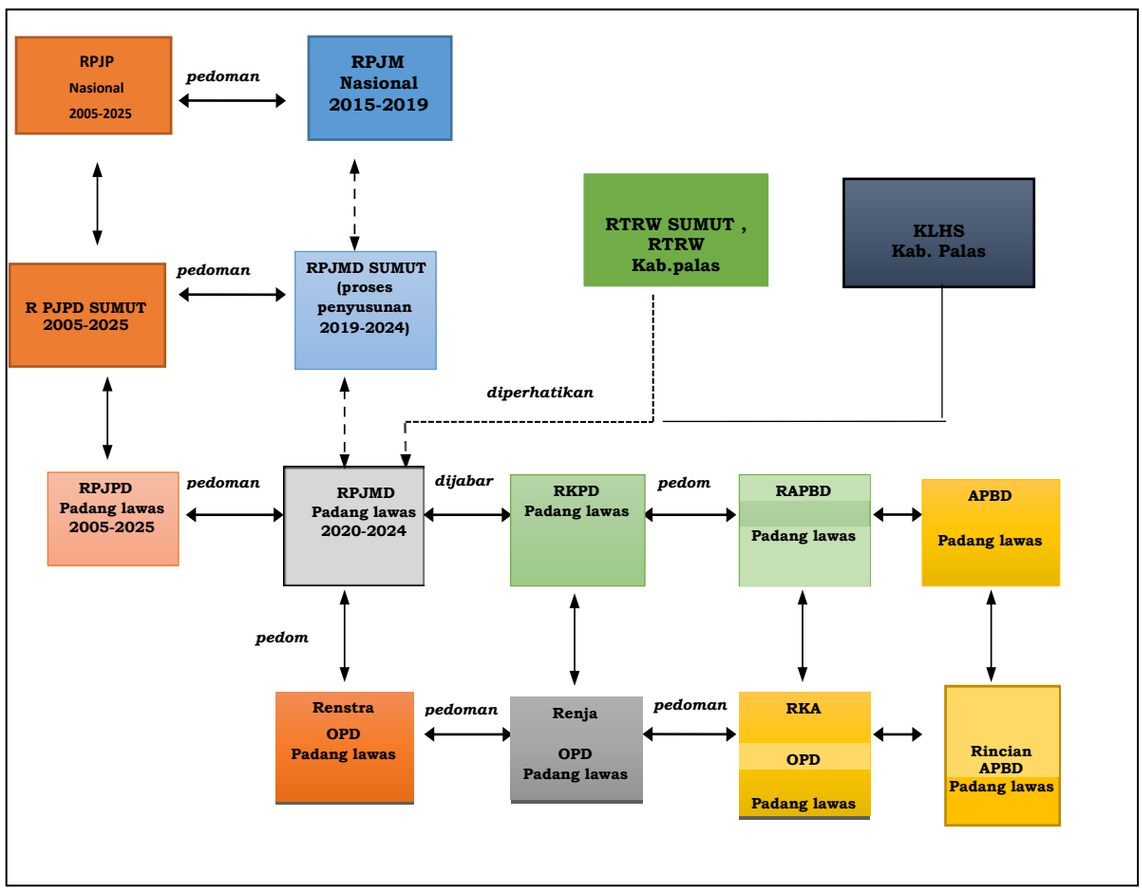
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2018 Lawas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 19 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan RPJMN

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 juga memerhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 dengan arah

kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, pembangunan Kabupaten Padang Lawas diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Padang Lawas. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah.

1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 juga memerhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020- 2024 dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provisi Sumatera Utara Tahun Nomor 10 Tahun 2019, pembangunan Kabupaten Padang Lawas diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tersebut lokasi prioritas pembangunan yang berlokasi di Padang Lawas.

Dengan 5 prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yaitu:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;

4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Provinsi Sumatera Utara dalam Perencanaan Tahunan (RKPD) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota se Sumatera Utara.

1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Dokumen RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun kedepan merupakan salah satu pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025.

Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Perubahan Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Perubahan RPJMD ini serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun, berdasarkan Renstra PD.

1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan RTRW Kabupaten Padang Lawas

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 memerhatikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Padang Lawas dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

1.3.5. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas

Salah satu dokumen penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dilakukan dengan memerhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Ayat (1); “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program”, dan Ayat (2) yaitu KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau mengevaluasi:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJPD Provinsi, RPJP Daerah, RPJM Nasional, RPJMD Provinsi dan RPJM Daerah;
b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 adalah memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Lawas 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil

RPJMD serta percepatan penanganan pendemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan;
2. Merumuskan gambaran pengelola keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentu kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun kedepan
3. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJMD pada masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan urusan dan kewenangan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
5. Menyediakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
6. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 terdiri dari 9 (sembilan) Bab, secara garis besar tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Perubahan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan

umum dan aspek daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi hasil RPJMD periode lalu, pencapaian *Sustainable Development Goals (SDG's)* dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan isu strategis daerah memerhatikan isu internasional, nasional, dan regional Provinsi Sumatra Utara.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang pada periode berkenaan. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Kabupaten Padang Lawas, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target serta pendanaannya yang bersifat indikatif.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disajikan beserta target setiap tahun, mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Selain itu, bab ini juga memuat arahan target indikator kinerja makro dari seluruh kabupaten/kota untuk pencapaian target indikator kinerja makro provinsi.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD untuk menjamin pelaksanaan dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan Kabupaten Padang Lawas memasuki babak pertama dimana berbagai program dan kegiatan pembangunan tahun 2020 telah dilaksanakan Dengan dilaksanakannya pembangunan pada tahun tersebut tentu saja berbagai capaian pembangunan telah diraih baik memiliki rapor positif maupun sebaliknya Berbagai capaian tersebut diharapkan mampu menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perubahan perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Lawas.

Sebagian besar alasan perumusan perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas tahun 2020-2024 dikarenakan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat maupun merebaknya Pandemi COVID-19 Namun sebagai bentuk peningkatan kualitas perencanaan, tentu saja berbagai hasil dari monitoring dan evaluasi pembangunan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan selanjutnya, Dalam perumusan berbagai kebijakan dalam perubahan perencanaan pembangunan tersebut, berbagai tahapan dilakukan untuk ketepatan dan relevansi perumusan kebijakan terhadap berbagai permasalahan pembangunan yang sedang mengiringi Oleh karena itu, dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan tersebut perlu melihat potret hasil pembangunan pada periode pembangunan yang telah berjalan yang terangkum dalam gambaran umum kondisi daerah sebagai berikut.

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

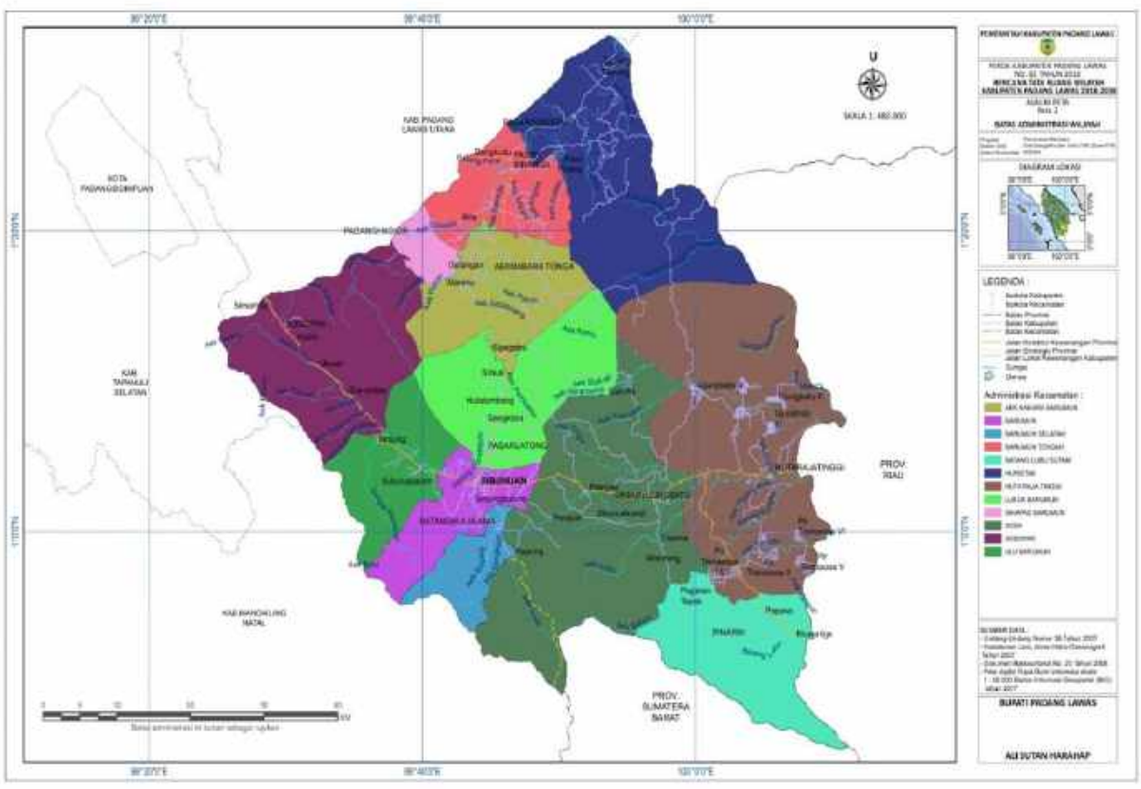
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Padang Lawas merupakan pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Lahirnya Kabupaten Padang Lawas melalui pertimbangan dan proses yang panjang disamping memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Penetapan Kabupaten Padang Lawas didasarkan pada diundangkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Barumun Kelurahan Sibuhuan yang terdiri dari 17 kecamatan. Data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 luas wilayah Kabupaten Padang Lawas adalah 3.912.18 km^2. Wilayah Kabupaten Padang Lawas bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, bagian selatan

berbatasan dengan Kabupaten Pasaman (Provinsi Sumatera Barat) dan Kecamatan Siabu (Kabupaten Mandailing Natal), dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Malintang (Kabupaten Mandailing Natal), Kecamatan Sayur Matinggi (Kabupaten Tapanuli Selatan) dan Kecamatan Batang Angkola (Kabupaten Tapanuli Selatan). Peta Administrasi Kabupaten Padang Lawas sebagaimana pada berikut ini.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Padang Lawas



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 303 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan Hutaraja Tinggi termasuk bagian dari wilayah di Kabupaten Padang Lawas yang paling luas sebesar 663,24 Km², sementara Kecamatan Barumun Baru adalah kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya yaitu sebesar 13,73 Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)	Distribusi Luas (%)
1	Sosopan	22	-	435,18	11,12
2	Ulu Barumun	15	-	207,43	5,30
3	Barumun	16	1	126,10	3,22
4	Barumun Baru	13	-	13,73	0,36
5	Barumun Selatan	11	-	109,87	2,80
6	Lubuk Barumun	24	-	289,58	7,40
7	Sosa	16	-	283,52	7,24
8	Sosa Julu	12	-	155,95	3,99
9	Ulu Sosa	11	-	211,67	5,42
10	Sosa Timur	13	-	159,55	4,08
11	Batang Lubu Sutam	20	-	184,75	4,72
12	Hutaraja Tinggi	26	-	663,24	16,95
13	Huristak	27	-	523,59	13,38
14	Barumun Tengah	29	-	119,4	3,05
15	Aek Nabara Barumun	25	-	329,36	8,41
16	Sihapas Barumun	13	-	48,25	1,23
17	Barumun Barat	10	-	51,01	1,33
Kabupaten Padang Lawas		**303**	**1**	**3.912,18**	**100,00**
Provinsi Sumatera Utara		**25 Kabupaten**	**8 Kotamadya**	**72.981,23**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka tahun 2021

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

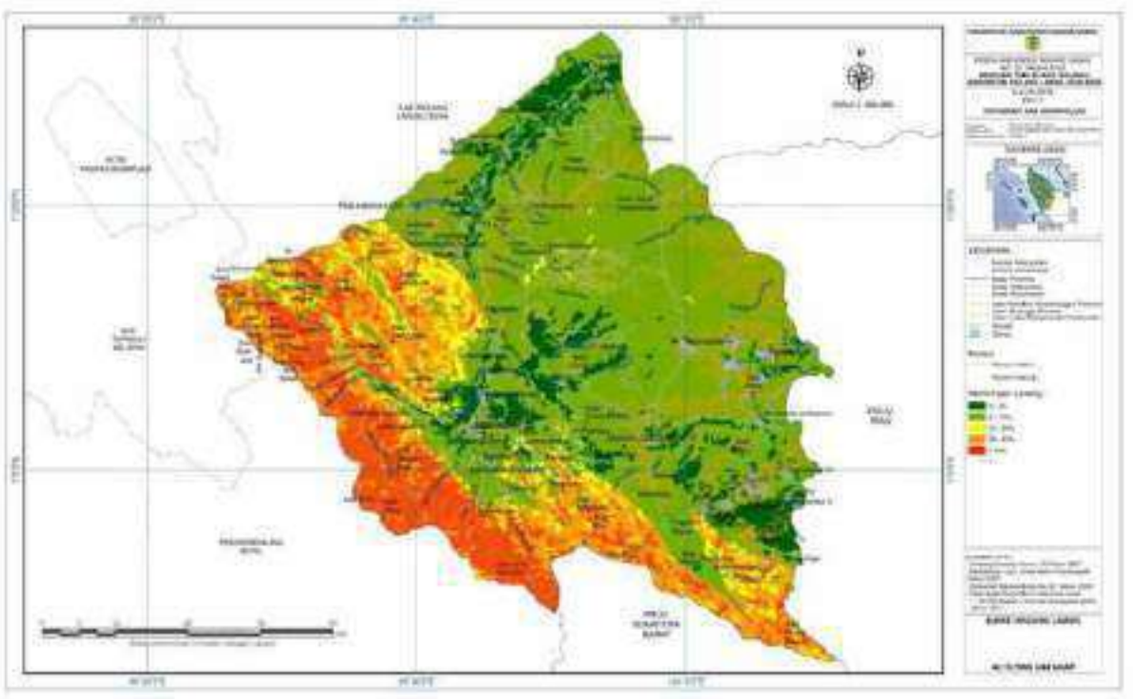
Secara geografis, posisi Kabupaten Padang Lawas terletak pada 0° 45' - 1° 33' Lintang Utara dan 99° 24' - 100° 11' Bujur Timur.

2.1.1.3. Topografi

A. Kemiringan Lahan

Wilayah Kabupaten Padang Lawas terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur di bagian barat yang membujur dari utara ke selatan. Kemiringan tanah datar seluas 26.863 Ha (6,35 persen) dari luas wilayah, landai seluas 48.739 Ha (11,52 persen) dari luas wilayah, berbukit-bukit seluas 67.664 Ha (16 persen) dan bergunung seluas 279.733 Ha (66.13 persen) dari luas wilayah. Wilayah Kabupaten Padang Lawas terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu bagian timur dengan keadaan relatif datar sampai dengan bergelombang, bagian barat berbukit sampai bergunung.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Padang Lawas

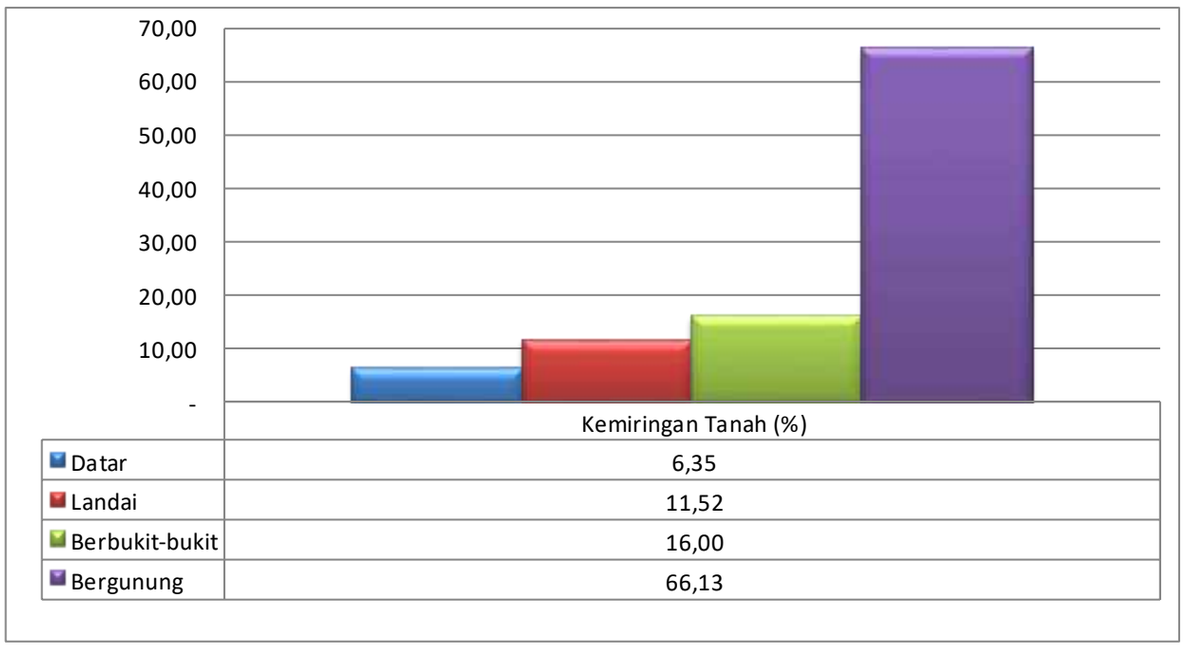


Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Wilayah Bagian Timur Kabupaten Padang Lawas yang merupakan daerah dengan kategori datar sampai dengan landai adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis.

Wilayah bagian barat sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa sungai dan air terjun dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya merupakan daerah konservasi yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumun. Untuk lebih jelasnya, persentase kemiringan tanah wilayah dapat ditampilkan dalam gambar berikut.

Gambar 2.3
Persentase Kemiringan Lahan di Kabupaten Padang Lawas



	Kemiringan Tanah (%)
Datar	6,35
Landai	11,52
Berbukit-bukit	16,00
Bergunung	66,13

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

B. Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan di Kabupaten Padang Lawas bervariasi mulai dari 0–1.915 mdpl. Ketinggian permukaan daratan Kabupaten Padang Lawas bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 34,4^{o}C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 17,7^{o}C.

2.1.1.4. Geologi

A. Struktur dan Karakteristik

Secara geologis, wilayah Kabupaten Padang Lawas secara umum terdiri atas 3 (tiga) formasi antara lain; formasi pra-tertier, formasi tertier, dan formasi kwarter, memiliki struktur dan batuan yang kompleks. Pada formasi pra-tertier berupa batuan Permokarbon yang merupakan inti dari pegunungan bukit barisan adalah formasi tertua yang ditemukan. Sebahagian dari formasi ini telah ditutupi oleh endapan yang lebih muda dari zaman tertier (sedimen-sedimen) dan zaman kwarter (bahan vulkanis atau endapan alluvium). Formasi pra-tertier ini ditemukan antara lain; Kecamatan Sosa bagian selatan, Kecamatan Barumun bagian selatan, Kecamatan Ulu Barumun bagian selatan dan Kecamatan Sosopan bagian selatan.

Formasi Tertier dibedakan atas formasi paleogen dan neogen. Formasi paleogen (tertier tua) ditemukan di wilayah tengah ke barat Kabupaten Padang

Lawas, antara lain; Kecamatan Sosa ke sebelah barat, Kecamatan Barumun tepatnya di Kota Sibuhuan, Kecamatan Lubuk Barumun ke sebelah barat, Kecamatan Barumun Tengah ke sebelah barat, Kecamatan Ulu Barumun ke sebelah timur dan Kecamatan Sosopan ke sebelah timur. Daerah pada tertier ini telah mengalami gejala lipatan okling sehingga banyak tempat-tempat lapisan yang semula datar (endapan) telah menjadi miring keberbagai arah. Sedangkan formasi neogin (tertier muda) dapat ditemukan antar lain; Kecamatan Huristak, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kecamatan Batang Lubu Sutam, sebahagian Kecamatan Sosa, sebahagian Kecamatan Barumun, sebahagian Kecamatan Lubuk Barumun dan sebahagian Kecamatan Barumun Tengah.

Formasi Kwarter memiliki dua jenis batuan penyusun yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas, yaitu granit dan liparit. Artinya masih terdapat formasi geologi (kwarter) yang menyusun daerah Kabupaten Padang Lawas. Formasi ini ditunjukkan pada wilayah perbatasan bagian selatan Kecamatan Sosa, wilayah perbatasan bagian selatan Kecamatan Barumun dan wilayah perbatasan bagian selatan Kecamatan Ulu Barumun.

Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan potensial menimbulkan tanah longsor. Kabupaten Padang Lawas memiliki beberapa lokasi rawan bencana longsor, antara lain di sebahagian besar Kecamatan Sosopan. Selain itu, kondisi struktur geologi yang kompleks tersebut dapat menyimpan bahan tambang dan galian yang cukup potensial dikembangkan seperti timah, batu bara dan bahan bakar fosil.

B. Potensi

1) Sumber Energi

Kabupaten Padang Lawas memiliki potensi energi berupa panas bumi berdasarkan peta energi Provinsi Sumatera Utara sebagai energi alternatif bersama dengan beberapa wilayah lain di Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Mandailing Natal. Sumber panas bumi ini berpotensi sebagai pembangkit energi listrik di Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas juga memiliki potensi minyak bumi dengan cadangan 2000 MSTB yang telah terbukti keberadaannya dan telah mulai diproduksi yang terletak di Kecamatan Barumun Tengah. Kabupaten Padang Lawas juga merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki cadangan batubara yang terdapat di 15 (lima belas) titik. Cadangan batubara di wilayah

Kabupaten Padang Lawas terdapat di Kecamatan Sosopan, Kecamatan Ulu Barumun dan Kecamatan Batang Lubu Sutam. Selain itu terdapat juga timah putih yang merupakan bahan galian yang berfungsi sebagai bahan industri dan konstruksi.

2) Bahan tambang mineral logam dan bukan logam

Kabupaten Padang Lawas mempunyai berbagai jenis bahan galian mineral yang potensial untuk dimanfaatkan dan dikembangkan, yaitu : mineral logam : emas, timah, dan mineral non logam : dolomit, bentonit, marmer, pasir kwarsa, kapur tohor serta bahan galian energi : batubara, panas bumi (geothermal) serta minyak dan gas bumi. Secara umum telah diketahui besarnya cadangan geologi (perkiraan) dan mutu sumber daya mineral, namun untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan masih memerlukan penyelidikan eksplorasi secara detail, guna mengetahui cadangan terukur (pasti). Berikut disajikan tabel potensi pertambangan di wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.2
Potensi Pertambangan di Kabupaten Padang Lawas

No	Kecamatan	Pertambangan
1	Sosa	Batu Bara
2	Batang Lubu Sutam	Batu Bara, Timah, Emas
3	Hutaraja Tinggi	-
4	Lubuk Barumun	-
5	Ulu Barumun	Batu Bara, Batu Pasir, Timah, Emas
6	Sosopan	Batu Bara, Marmer, Kapur Tohor, Emas, Bentonite
7	Barumun Tengah	Minyak Bumi, Pasir Kuarsa, Laterit
8	Huristak	Laterit, Pasir Kuarsa

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Selain bahan galian tersebut terdapat pula potensi bahan tambang seperti minyak bumi, namun hingga saat ini baru tahap explorasi dan belum dieksploitasi. Hal ini terkait lokasi pertambangan banyak yang berada dikawasan lindung. Untuk masa depan hal ini dapat dipertimbangkan untuk dieksploitasi.

2.1.1.5. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Padang Lawas terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau dan air bawah tanah dimana secara keseluruhan wilayah terbagi atas 2 (dua) DAS yaitu DAS lintas provinsi dan DAS lintas kabupaten/kota. Secara umum wilayah Padang Lawas terletak di Wilayah Sungai Barumun-Kualu dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke arah timur yang meliputi DAS Barumun dan DAS Aek Sosa.

Tabel 2.3
Kondisi DAS terhadap Lahan Kritis
di SWP Asahan Barumun Berdasarkan Daerah Administrasi
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara

No	Wilayah	Kelas Kekritisan Lahan					Tubuh Air
		Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
1	Kabupaten Padang Lawas	102.521,64	82.679,32	26.026,61	18.755,46	2.515,11	1.016,07
2	Provinsi Sumatera Utara	1.605.118,20	1.023.269,34	1.015.544,40	538.930,28	235.628,02	141.910,42

Sumber: BPDAS Asahan Barumun (Riview Lahan Kritis di SWP DAS Asahan Barumun) Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Padang Lawas memiliki lahan tidak kritis yang cukup luas sebesar 102.521,64 Ha dan lahan sangat kritis adalah lahan yang paling sedikit yaitu sebesar 2.515,11 Ha.

A. Sungai, danau dan rawa

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di Provinsi Sumatera Utara dapat dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) Satuan Wilayah Sungai berdasarkan lintas wilayahnya yaitu WS Strategis Nasional adalah WS Belawan – Ular – Padang dan WS Toba – Asahan, WS Lintas provinsi yaitu WS Alas Singkil lintas provinsi dengan Provinsi Aceh, WS Batang Natal – Batang Batahan lintas provinsi dengan Sumatera Barat dan WS Rokan lintas provinsi dengan Riau. Sementara WS Batang Angkola – Batang Gadis, WS Wampu – Besitang, WS Bah Bolon, WS Barumun – Kualuh adalah WS Pulau Nias, dan WS Sibundong – Batang Toru merupakan WS lintas kabupaten/kota.

B. Debit Air

Beberapa sungai utama di Kabupaten Padang Lawas memiliki debit air rata-rata yang cukup besar seperti Sungai Barumun dan Sungai Sosa, yang dapat dimanfaatkan untuk sumber air irigasi dan bahan baku air bersih serta air minum untuk keperluan rumah tangga dan industri. Namun disisi lain dapat menimbulkan ancaman bahaya banjir dimusim penghujan, akibat mulai terdegradasinya lahan pada daerah hulu yang merupakan daerah tangkapan air.

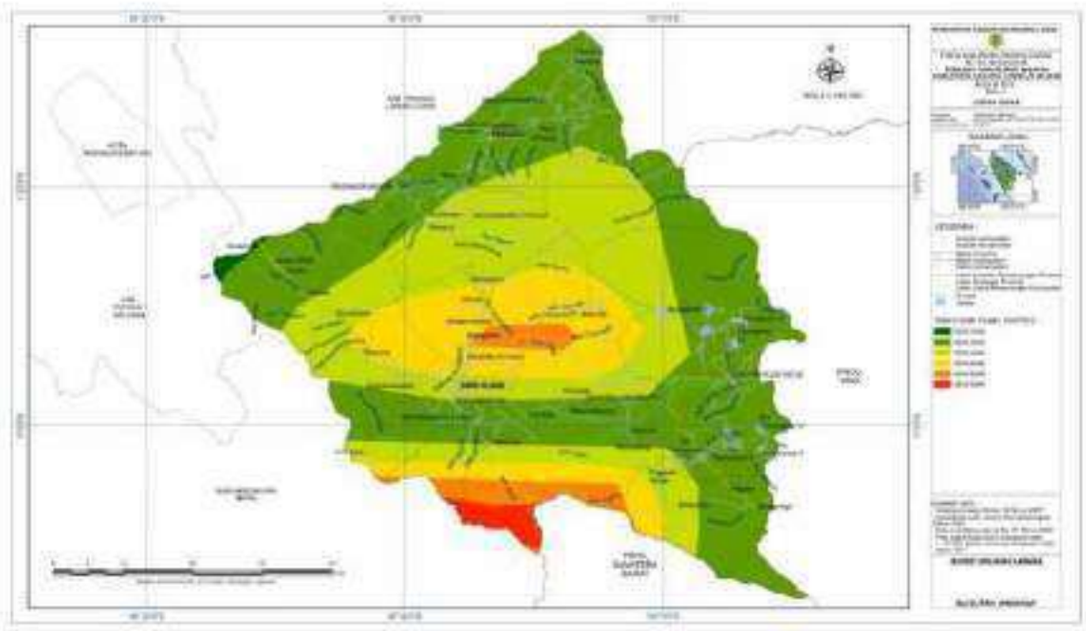
2.1.1.6. Klimatologi

A. Tipe

Iklim di Kabupaten Padang Lawas termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Sebagaimana Kabupaten lainnya di Indonesia, Kabupaten Padang Lawas mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan

September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Padang Lawas



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Tabel 2.4
Curah Hujan, Jumlah Hujan dan Penyinaran Matahari Setiap Bulan di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

Bulan	Curah Hujan (mm)					Jumlah Hujan (Hari)					Penyinaran Matahari (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Januari	78,3	295,7	134,0	134,0	316,7	19	20	14	14	22	30	34	32	34	51,73
Februari	153,5	159,8	102,7	102,7	95,4	17	21	19	19	19	44	44	51	44	43,28
Maret	140,5	320,2	192,4	192,4	178,1	14	23	21	21	19	51	59	44	59	66,98
April	192,8	240,3	212,0	212,0	230,1	16	21	19	19	21	65	32	44	32	43,29
Mei	159,9	136,9	171,3	171,3	73,0	22	13	27	27	16	40	46	31	46	54,56
Juni	19,8	108,4	71,0	71,0	189,7	7	8	8	8	12	48	46	45	46	54,21
Juli	69,9	17,1	25,6	25,6	174,5	10	6	11	11	18	61	79	48	79	59,11
Agustus	28,0	229,3	74,7	74,7	98,4	11	21	11	11	16	52	39	55	39	63,79
September	24,4	88,9	171,7	171,7	236,1	9	19	23	23	21	51	28	32	28	51,71
Oktober	47,1	149,7	295,0	295,0	41,8	20	13	23	23	13	31	60	38	60	52,06
November	177,1	127,9	207,2	207,2	357,2	23	23	27	27	24	25	25	33	25	36,58
Desember	145,3	159,4	281,1	281,1	166,3	21	23	17	17	18	30	44	33	44	38,63
Jumlah	**1236,6**	**2033,6**	**1938,7**	**1938,7**	**2157,3**	**189**	**211**	**220**	**220**	**219**	**528**	**536**	**486**	**536**	**615,93**

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka Tahun 2021

B. Suhu dan Kelembaban Udara

Pada tahun 2020, suhu udara di Kabupaten Padang Lawas rata-rata 26 °C dengan rata-rata kelembaban udara 80 persen. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Padang Lawas yang paling tinggi terdapat pada bulan Mei dan yang paling rendah bulan Januari dan November. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Rata-Rata Suhu Udara dan Kelembaban Relatif Setiap Bulan
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Bulan	2016				2017				2018				2019				2020			
		Suhu Udara (°C)			Rata-rata Kelembaban Udara	Suhu Udara (°C)			Rata-rata Kelembaban Udara	Suhu Udara (°C)			Rata-rata Kelembaban Udara	Suhu Udara (°C)			Rata-rata Kelembaban Udara	Suhu Udara (°C)			Rata-rata Kelembaban Udara
		Min	Max	Rata-rata		Min	Max	Rata-rata		Min	Max	Rata-rata		Min	Max	Rata-rata		Min	Max	Rata-rata	
1	Januari	22,3	31,1	26,0	84	21,6	30,0	25,2	79	21,6	30,0	25,2	79	21,6	30,0	25,2	79	20,3	31,8	25,4	85
2	Februari	21,5	31,1	26,3	79	21,5	30,5	25,3	81	21,5	30,5	25,3	81	21,5	30.5	25,3	81	21,0	32,7	25,5	84
3	Maret	22,7	32,1	27,6	77	21,5	31,7	25,8	79	21,5	31,7	25,8	79	21,5	31,7	25,8	79	21,0	33,9	26,2	82
4	April	22,6	32,8	27,9	77	22,3	31,6	26,3	78	22,3	31,6	26,3	78	22,3	31,6	26,3	78	18,9	33,2	26,3	83
5	Mei	22,8	32,2	27,6	76	22,6	32,3	26,8	77	22,6	32,3	26,8	77	22,6	32,3	26,8	77	21,4	33,8	27,2	76
6	Juni	21,5	31,8	27,5	69	22,4	32,2	26,7	73	22,4	32,2	26,7	73	22,4	32,2	26,7	73	20,8	33,3	26,3	78
7	Juli	21,0	32,6	27,6	67	22,2	31,9	26,6	69	22,2	31,9	26,6	69	22,2	31,9	26,6	69	20,6	33,1	25,6	82
8	Agustus	21,8	31,7	27,5	66	21,9	31,5	26,0	76	21,9	31,5	26,0	76	21,9	31,5	26,0	76	21,5	34,0	26,4	77
9	September	21,9	32,0	27,5	66	21,9	31,0	25,8	77	21,9	31,0	25,8	77	21,9	31,0	25,8	77	21,3	34,5	25,9	79
10	Oktober	22,5	31,2	26,9	70	22,4	32,0	26,7	71	22,4	32,0	26,7	71	21,4	32,0	26,7	71	21,4	32,8	26,1	75
11	November	22,5	31,3	26,5	76	22,1	30,5	25,5	79	22,1	30,5	25,5	79	22,1	30,5	25,5	79	20,7	33,1	25,4	84
12	Desember	22,4	30,1	26,1	76	21,6	30,5	25,5	80	21,6	30,5	25,5	80	21,6	30,5	25,5	80	20,8	32,7	25,7	80
Rata-rata per Bulan		**22,1**	**31,7**	**27,1**	**74**	**22,0**	**31.3**	**26,0**	**77**	**22,0**	**31,3**	**26,0**	**77**	**23,0**	**31.3**	**26,0**	**77**	**20,8**	**33,2**	**26,0**	**80**

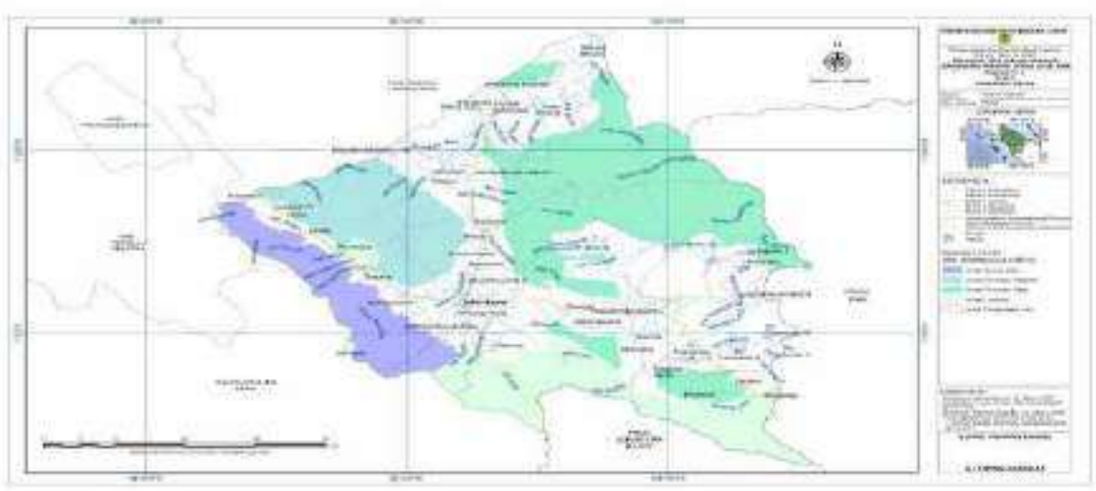
Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka Tahun 2021

2.1.1.7. Penggunaan lahan

A. Kawasan Lindung

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan di Kabupaten Padang Lawas adalah seluas 43.791 ha. Kabupaten Padang Lawas yang termasuk dalam kawasan lindung terdiri dari Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, Kawasan Lindung Geologi dan kawasan lindung lainnya.

Gambar 2.5
Peta Potensi Kawasan Hutan Kabupaten Padang Lawas



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

1) Hutan lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Padang Lawas adalah seluas 43.791 Hektar. Kawasan hutan lindung ini terdapat di:

- Kecamatan Barumun dengan luas ± 2.692 ha;
- Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan luas ± 17.047 ha;
- Kecamatan Sosa dengan luas ± 21.422 ha;
- Kecamatan Sosopan dengan luas ± 2.025 ha;
- Kecamatan Ulu Barumun dengan luas ± 605 ha.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Padang Lawas adalah kawasan resapan air. Kawasan resapan air ini umumnya terdapat di bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kualuh Barumun dan sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan, yang terdapat di Kecamatan Sosopan, Kecamatan Huristak, Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan Lubuk Barumun, Kecamatan Ulu Barumun,

Kecamatan Barumun, Kecamatan Sosa, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kecamatan Barumun Selatan, Kecamatan Batang Lubu Sutam dan Kecamatan Aek Nabara Barumun.

2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah berupa kawasan resapan air yang terdapat di bagian hulu daerah aliran sungai yang tersebar di seluruh kecamatan.

3) Kawasan perlindungan setempat

Kabupaten Padang Lawas terdapat 2 (dua) DAS yaitu DAS Kualuh Barumun dan DAS Rokan. Sungai ini memberi kemakmuran bagi masyarakat di sekitarnya untuk bercocok tanam dan sebagai sumber air minum atau air baku. Kawasan perlindungan setempat yaitu :

a. Kawasan sempadan sungai, kawasan ini meliputi sungai-sungai yang berada di kabupaten, dengan ketentuan:
   - Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
   - Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan
   - Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

b. Kawasan sekitar mata air, kawasan sekitar mata air juga meliputi ketentuan yang sama dengan kawasan sempadan sungai yang berada di kawasan hutan lindung.

4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas :

a. Kawasan suaka margasatwa;

   Kawasan Suaka Alam di wilayah Kabupaten Padang Lawas mempunyai luas sebesar ±31.658 ha. Kawasan Suaka Alam ini terdapat di Kecamatan Barumun, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Ulu Barumun dan Kecamatan Barumun Selatan. Sedangkan kawasan suaka margasatwa yaitu Suaka Marga Satwa Barumun.

b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

   Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :

- Candi meliputi Candi Simaputung di Kecamatan Barumun Tengah, Candi Tandihat (Jorang Balanga I, II, III) di Kecamatan Barumun Tengah, Candi Sisangkilon di Kecamatan Lubuk Barumun dan Candi Muara Gambaran di Kecamatan Batang Lubu Sutam;
- Rumah adat meliputi Bagas Godang Hasahatan Julu di Kecamatan Barumun, Bagas Godang Janjilobi di Kecamatan Barumun, Bagas Godang Unte Rudang di Kecamatan Barumun Tengah dan Bagas Godang Huta Nopan di Kecamatan Lubuk Barumun;
- Kearifan lokal meriputi Makam Parmata Sapihak di Kecamatan Barumun, Makam Bujing Sambilan Jogi di Kecamatan Lubuk Barumun, Makam Jired I, II, III di Kecamatan Sosopan.

5) Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam Kabupaten Padang Lawas terdiri atas kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan kebakaran lahan dan kawasan rawan bencana angin puting beliung tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Lawas.

6) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah CAT (Cekungan Air Tanah) Pekanbaru dan CAT (Cekungan Air Tanah) Pasar Sibuhuan.

B. Kawasan Budidaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038, kawasan budidaya terdiri atas :

1) Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi :
   - Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas Kabupaten Padang Lawas seluas ±39.249 ha (tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan hektar), tersebar di Kecamatan Sihapas Barumun, Kecamatan Lubuk Barumun, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kecamatan Sosopan dan Kecamatan Ulu Barumun;
   - Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan luas ±99.511 ha (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sebelas hektar), tersebar di Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Huristak, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kecamatan Lubuk Barumun dan Kecamatan Sosa.

2) Kawasan peruntukan pertanian meliputi :
   - Kawasan peruntukan pertanian lahan basah seluas ±8.782 ha (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua hektar), tersebar di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Barumun Selatan, Kecamatan Barumun, Kecamatan Ulu Barumun, Kecamatan Sosa, Kecamatan Sihapas Barumun, Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Huristak, Kecamatan Aek Nabara Barumun dan Kecamatan Lubuk Barumun;
   - Kawasan peruntukan pertanian lahan kering seluas ±17.502 ha (tujuh belas ribu lima ratus dua hektar) tersebar di Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Barumun Selatan, Kecamatan Barumun, Kecamatan Ulu Barumun, Kecamatan Sosa, Kecamatan Sihapas Barumun, Kecamatan Barumun Tengah, Kecamatan Sosopan, Kecamatan Huristak, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kecamatan Hutaraja Tinggi dan Kecamatan Lubuk Barumun;
   - Kawasan pertanian bagi komoditas tanaman pangan serta didukung prasarana irigasi teknis diarahkan menjadi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang terdiri dari lahan basah, termasuk rawa dan pertanian lahan kering;
   - Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3) Kawasan peruntukan perkebunan seluas ±119.848 ha (seratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh delapan hektar) tersebar di seluruh kecamatan.
4) Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Padang Lawas tersebar di seluruh kecamatan.
5) Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap dikembangkan di seluruh kecamatan dan kawasan peruntukan budidaya perikanan dikembangkan di seluruh kecamatan.
6) Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan pertambangan mineral dan kawasan pertambangan minyak bumi tersebar di seluruh kecamatan sedangkan untuk kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Padang Lawas berada di Kecamatan Sosa, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kecamatan Ulu Barumun dan Kecamatan Sosopan.

7) Kawasan peruntukan industri terdiri dari industri besar, industri kecil dan mikro tersebar di seluruh kecamatan.

8) Kawasan pariwisata Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Sektor Pariwisata Kabupaten Padang Lawas

No	Nama Objek	Lokasi		Jenis Wisata
		Kecamatan	Desa/Kelurahan	
1	Candi Sipamutung	Kecamatan Barumun	Desa Siparahu	Wisata Cagar Budaya/Religi
2	Candi Tandihat (Jorang Balanga I)		Desa Tandihat	
3	Candi Tandihat (Jorang Balanga II)		Desa Tandihat	
4	Candi Tandihat (Jorang Balanga III)		Desa Tandihat	
5	Candi Sisangkilon	Kecamatan Lubuk Barumun	Desa Sisangkilon	
6	Candi Muara Gambaran	Kecamatan Batang Lubu Sutam	Desa Manggis	
7	Sungai Siraisan	Kecamatan Ulu Barumun	Desa Siraisan	Wisata Alam
8	Aek Milas/Air Panas		Desa Paringgonan	
9	Sappuran/Air Terjun Sipatabung	Kecamatan Batang Lubu Sutam	Desa Botung	
10	Air Terjun Sikatobung		Desa Papaso	
11	Air Terjun Aek Sialang	Kecamatan Sosopan	Desa Aek Bargot	
12	Air Terjun Aek Oruon		Desa Hutabaru Siundol	
13	Danau Sosopan		-	
14	Air Terjun Batu Bintang	Kecamatan Ulu Sosa	Desa Hapung	
15	Danau Gayambang	Kecamatan Sosa	Desa Ujung Batu	
16	Simandi Angin	Kecamatan Sosa Julu	Jalan Lintas Sibuhuan-Riau	
17	Batu Nadua	Kecamatan Lubuk Barumun	Desa aek Lancat	
18	Liang Namuap	Kecamatan Ulu Sosa	Desa Horuon	
19	Makam Permata Sapihak	Kecamatan Barumun Baru	Desa Siolip	Wisata Sejarah
20	Makam Jired I,II,III	Kecamatan Sosopan	Desa Pagaranbira	
21	Makam Bujing Sambilan Jogi	Kecamatan Lubuk Barumun	Desa Siali-ali	
22	Bagas Godang Hasatan Julu	Kecamatan Barumun	Desa Hasatan Julu	
23	Bagas Godang Utte Rudang	Kecamatan Barumun Tengah	Utte Rudang	
24	Bagas Godang Huta Nopan	Kecamatan Lubuk Barumun	Huta Nopan	
25	Bagas Godang Janji Lobi	Kecamatan Barumun	Janji Lobi	
26	Waterpark Dova	Kecamatan Ulu Barumun	Desa Tandihat	Wisata Buatan
27	Pemandian Aek Lakkut	Kecamatan Sosa	Desa Pandio	

No	Nama Objek	Lokasi		Jenis Wisata
		Kecamatan	Desa/Kelurahan	
28	Alwansyah	Kecamatan Ulu Barumun	Desa Paringgonan	
29	Swim Park	Kecamatan Barumun	Kelurahan Pasar Sibuhuan	

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2021

9) Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas permukiman perkotaan seluas ± 9.262 ha (Sembilan ribu dua ratus enam puluh dua hektar) dan permukiman perdesaan seluas ±17.994 ha (tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat hektar) tersebar di seluruh kecamatan.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Kabupaten Padang Lawas berpotensi untuk dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik geografis dan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah. Pengembangan potensi kewilayahan tersebut dilakukan berbasiskan kawasan sesuai dengan regulasi perencanaan, yaitu melalui penetapan kawasan-kawasan strategis kabupaten serta mendorong perwujudan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Koridor pembangunan kewilayahan dikembangkan dengan mengacu pada sistem wilayah atau sistem kota-kota di Kabupaten Padang Lawas yang diwujudkan dalam penetapan pusat-pusat kegiatan Lokal dan mendorong terwujudnya pusat-pusat kegiatan nasional dan pusat-pusat kegiatan wilayah saling terkoneksi.

Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Padang Lawas ditetapkan berdasarkan kepentingan: (a) pertumbuhan ekonomi; (b) sosial dan budaya; dan (c) fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berdasarkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional sistem perkotaan di Kabupaten Padang Lawas adalah:

1. Tidak terdapat PKN di Kabupaten Padang Lawas;
2. Tidak terdapat PKW di Kabupaten Padang Lawas;
3. Kota Sibuhuan sebagai PKL.

Disamping itu untuk mengefektifkan pengembangan Kabupaten Padang Lawas, maka hirarki sistem kota atau pusat-pusat pelayanan tersebut dikelompokkan menjadi wilayah pengembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perwilayahan pengembangan tersebut, antara lain yaitu:

- Kedudukan dan peran wilayah yang dicerminkan oleh keterkaitan masing-masing bagian wilayah;
- Sistem jaringan transportasi yang memungkinkan terbentuknya aksesibilitas antar bagian-bagian wilayah;
- Daya tarik-menarik kota, yang diperlihatkan oleh fungsi dan peranan kota terhadap kota-kota lainnya;
- Homogenitas (kesamaan) potensi sumber daya yang dapat didaya gunakan;
- Kondisi fisik dan faktor administrasi dan pendeliniasian batas wilayahnya;
- Pertimbangan rencana struktur perwilayahan yang sudah ada;

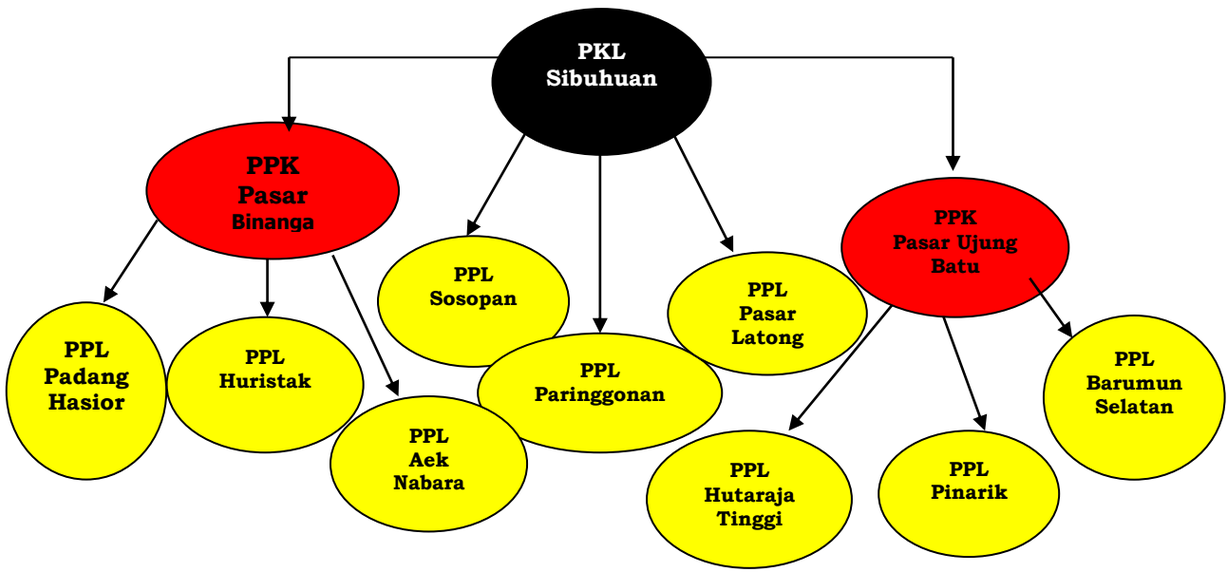
Dengan demikian rencana sistem perkotaan dan wilayah pengembangan Kabupaten Padang Lawas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rencana Sistem Pusat Kegiatan

	Ibukota Kecamatan/Kabupaten	Hirarki/ Peran	Jenis Pusat Kegiatan	Fungsi Utama
1	Kota Sibuhuan (Kecamatan Barumun)	PKL	Sistem Perkotaan	▪ Sebagai pusat Pemerintahan ▪ Pusat Koleksi dan Distribusi
2	Kota Binanga (Kecamatan Barumun Tengah)	PPK	Sistem Perkotaan	▪ Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala kecamatan ataubeberapa desa ▪ Kota Binanga sebagai simpul transportasi udara
3	Pasar Ujung Batu (Kecamatan Sosa)	PPK	Sistem Perkotaan	▪ Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa ▪ Pasar Ujung Batu sebagai pusat pengembagan Perdagangan dan jasa
4	Kota Sosopan (Kecamatan Sosopan)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
5	Pasar Paringgonan (Kecamatan Ulu Barumun)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
6	Pasar Latong (Kecamatan Lubuk Barumun)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
7	Kota Huristak (Kecamatan Huristak)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
8	Kota Hutaraja Tinggi (Kecamatan Huta Raja Tinggi)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa
9	(Kota Pinarik) (Kecamatan Batang Lubu Sutam)	PPL	Sistem Pedesaan	Sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar desa

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

Gambar 2.6
Ilustrasi Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Padang Lawas



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan puting beliung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Wilayah Rawan Bencana Yang Pernah Terkena Bencana Alam di Kabupaten Padang Lawas

No	Kecamatan	Jenis Bencana Yang Pernah Terjadi
1	Barumun	Banjir, Kebakaran
2	Barumun Tengah	Pergerakan Tanah, Banjir, Angin Puting Beliung, Kebakaran Hutan dan Lahan
3	Batang Lubu Sutam	Banjir, Longsor
4	Huristak	Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan
5	Hutaraja Tinggi	Longsor, Kebakaran dan Angin Puting Beliung
6	Lubuk Barumun	Banjir, Kebakaran Hutan dan Hutan dan Lahan
7	Sosa	Banjir, Longsor, Kebakaran
8	Sosopan	Gempa Bumi, Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir
9	Ulu Barumun	Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan
10	Barumun Selatan	Angin Puting Beliung, Kebakaran Hutan dan Lahan
11	Aek Nabara Barumun	Longsor, Banjir
12	Sihapas Barumun	Banjir, Longsor
13	Barumun Baru	-
14	Barumun Barat	-
15	Ulu Sosa	Kebakaran
16	Sosa Julu	-
17	Sosa Timur	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.1.4 Demografi

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri. Aspek demografi atau kependudukan menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Gambaran kondisi aspek demografi antara lain mencakup jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan komposisi penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 setiap tahunnya mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan, sebagaimana lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sosopan	10.683	10.927	11.158	11.389	10.389
2	Ulu Barumun	16.309	16.681	17.034	17.388	16.700
3	Barumun	51.218	52.386	53.496	54.607	53.200
4	Barumun Selatan	7.887	8.067	8.238	8.409	7.954
5	Lubuk Barumun	18.844	19.274	19.682	20.091	20.024
6	Sosa	36.944	37.786	38.587	39.389	38.858
7	Batang Lubu Sutam	13.943	14.262	14.564	14.866	12.383
8	Hutaraja Tinggi	46.027	47.077	48.075	49.074	43.605
9	Huristak	23.021	23.586	24.044	24.544	18.652
10	Barumun Tengah	21.112	21.592	22.051	22.508	20.454
11	Aek Nabara Barumun	12.473	12.757	13.027	13.298	13.107
12	Sihapas Barumun	5.323	5.444	5.559	5.676	5.685
13	Sosa Julu	-	-	-	-	-
14	Ulu Sosa	-	-	-	-	-
15	Sosa Timur	-	-	-	-	-
16	Barumun Baru	-	-	-	-	-
17	Barumun Barat	-	-	-	-	-
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas		**263.784**	**269.839**	**275.515**	**281.239**	**261.011**
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara		**14.102.911**	**14.262.147**	**14.415.391**	**14.562.549**	**14.799.361**

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka Tahun 2021
Provinsi Sumatera Utara dalam Angka Tahun 2021

Rasio Pertumbuhan penduduk Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 setiap tahunnya mengalami penurunan dari 2,42 persen menjadi 1,91 persen, sebagaimana lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Lawas 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Penduduk	2,42	2,27	2,22	2,20	1,91

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Jika dilihat dari data jumlah dan struktur umur penduduk, distribusi penduduk Kabupaten Padang Lawas terbesar terdapat dalam kelompok umur 5-9 tahun sebesar 11,12 persen, sementara distribusi penduduk terkecil terdapat dalam kelompok umur 75+ sebesar 0,66 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Persentase Umur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Distribusi Penduduk (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-4	13.592	13.207	26.799	10,27
2	5-9	14.873	14.157	29.030	11,12
3	10-14	14.280	13.310	27.590	10,57
4	15-19	13.598	12.702	26.300	10,08
5	20-24	13.185	12.489	25.674	9,84
6	25-29	11.593	11.471	23.064	8,84
7	30-34	10.939	10.862	21.801	8,35
8	35-39	8.897	8.644	17.541	6,72
9	40-44	7.918	7.728	15.646	5,99
10	45-49	6.679	6.679	13.358	5,12
11	50-54	5.234	5,585	10.819	4,15
12	55-59	4.115	4.461	8.576	3,29
13	60-64	2.893	3.365	6.258	2,40
14	65-69	1.912	2.396	4.308	1,65
15	70-74	1.080	1.453	2.533	0,97
16	75+	688	1.026	1.714	0,66
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas		**131.476**	**129.535**	**261.011**	**100,00**
Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara		**7.422.046**	**7.377.315**	**14.799.361**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, 2021
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2021

Jika dilihat dari agama yang dianut oleh penduduk maka masyarakat Kabupaten Padang Lawas paling banyak memeluk agama Islam yakni sebesar 94,98 persen dan diikuti oleh agama dan Kristen Protestan dengan total

sebesar 4,78 persen dan Kristen Katolik dengan total sebesar 0,17 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Persentase Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

No	Wilayah	Umat Agama (Persen)								Jumlah
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya	TT/TD	
1	Kabupaten Padang Lawas	94,98	4,78	0,17	-	-	-	0,07	-	100
2	Provinsi Sumatera Utara	63,29	26,66	7,33	0,09	2,43	0,18	-	-	100

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka,Tahun 2021
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Tahun 2021

Rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kabupaten Padang Lawas tertinggi terdapat di Kecamatan Huristak sebesar 104,27 persen kemudian Kecamatan Barumun merupakan rasio jenis kelamin terendah yaitu sebesar 99,67 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut
Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (ribu)		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Sosopan	5,24	5,15	10,39	101,88
2	Ulu Barumun	8,36	8,34	16,70	100,17
3	Barumun	26,56	26,64	53,20	99,67
4	Barumun Selatan	4,02	3,93	7,95	102,39
5	Barumun Baru	-	-	-	-
6	Lubuk Barumun	10,14	9,89	20,02	102,57
7	Sosa	19,46	19,40	38,86	100,36
8	Ulu Sosa	-	-	-	-
9	Sosa Julu	-	-	-	-
10	Batang Lubu Sutam	6,26	6,12	12,38	102,37
11	Huta Raja Tinggi	22,24	21,36	43,61	104,13
12	Sosa Timur	-	-	-	-
13	Huristak	9,52	9,13	18,65	104,27
14	Barumun Tengah	10,25	10,20	20,45	100,53
15	Aek Nabara Barumun	6,57	6,53	13,11	100,60
16	Sihapas Barumun	2,84	2,85	5,69	99,68
17	Barumun Barat	-	-	-	-
Kabupaten Padang Lawas		**131.476**	**129.535**	**261.011**	**100,00**
Provinsi Sumatera Utara		**7.422.046**	**7.377.315**	**14.799.361**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka Tahun 2021
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2021

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Padang Lawas utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Padang Lawas. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Padang Lawas antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Berdasarkan data nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2020 atas dasar harga konstan, sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB adalah sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan sebesar 52,96 persen sehingga sangat masuk akal jika Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas memperhatikan sektor ini. Selain itu sektor Konstruksi sebesar 14,62 persen dan Industri Pengolahan sebesar 14,50 persen juga memiliki nilai kontribusi yang cukup besar dan bisa lebih dikembangkan lagi. Adapun sektor yang paling rendah adalah sektor Jasa Lainnya sebesar 0,03 persen. Sementara nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB tahun 2020 atas dasar harga konstan terbesar adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp 844.000,52 juta, sementara terkecil adalah sektor Konstruksi yaitu Rp 1.915,11 juta. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Nilai dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.534,91	52,56	3.719,94	52,32	3.922,76	52,07	4.122,57	51,80	4.264, 91	52,96
2	Pertambangan dan Penggalian	34,16	0,51	36,90	0,52	40,07	0,53	43,17	0,54	42,48	0,53
3	Industri Pengolahan	977,44	14,16	1.022,34	14,38	1.087,00	14,43	1.155,32	14,52	1.167,50	14,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17,74	0,27	18,93	0,27	20,13	0,01	21,28	0,27	23,15	0,29
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	992,67	14,76	1.075,99	15,13	1.157,45	15,36	1.241,94	15,60	1.177,64	14,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	448,34	6,65	477,73	6,72	504,54	6,70	528,63	6,64	526,76	6,54
8	Trasportasi dan Pergudangan	79,58	1,18	86,75	1,22	92,02	1,22	97,29	1,22	88,99	1,10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	68,87	1,01	73,65	1,02	79,49	1,06	84,30	1,06	83,70	1,04
10	Informasi dan Komunikasi	46,80	0,70	50,45	0,71	54,59	0,72	58,74	0,74	64,14	0,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	57,50	0,86	57,74	0,81	58,45	0,78	59,33	0,75	59,77	0,74
12	Real Estate	200,87	2,99	212,11	2,98	223,47	2,97	234,73	2,95	243,43	3,02
13	Jasa Perusahaan	3,57	0,05	3,75	0,05	3,93	0,05	4,11	0,05	4,05	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	197,92	2,94	204,96	2,90	217,51	2,89	231,29	2,91	230,11	2,86
15	Jasa Pendidikan	27,19	0,41	28,26	0,40	29,96	0,40	31,49	0,40	32,15	0,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,30	0,54	38,49	0,54	40,56	0,54	42,66	0,54	42,25	0,52
17	Jasa Lainya	2,13	0,03	2,25	0,03	2,36	0,03	2,47	0,03	2,46	0,03
PDRB Kabupaten Padang Lawas		6.725,98	100,00	7.110,25	100,00	7.534,30	100,00	7.959,31	100,00	8.053,50	100,00
PDRB Provinsi Sumatera Utara		463.775,46	100,00	491.922,92	100,00	518.313,14	100,00	546.166,96	100,00	541.540,08	100,00

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka Tahun 2021
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.15
Nilai dan Kontribusi Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020 (Juta)

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.229,30	4.622,30	4.956,00	5.249,10	5.712,49
2	Pertambangan dan Penggalian	46.761,20	50.522,40	55.897,40	61.124,10	61.000,17
3	Industri Pengolahan	1.443,70	1.633,80	1.818,90	1.969,40	2 .100,77
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15.827,20	18.523,30	20.855,30	22.135,60	24.000,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	1.409,40	1.572,50	1.762,20	1.953,90	1.915,11
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	642.520,40	692.198,00	768.920,40	815.018,50	844.000,52
8	Trasportasi dan Pergudangan	117.859,20	128.501,40	136.917,30	147.440,10	139.000,76
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	95.610,60	103.764,90	115.036,60	123.789,90	124.000,12
10	Informasi dan Komunikasi	48.886,20	55.276,40	60.876,40	66.676,70	74.003,26
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	84.428,40	88.861,40	92.348,50	93.754,20	94.000,10
12	Real Estate	321.537,30	356.624,30	393.887,90	422.379,70	447.000,38
13	Jasa Perusahaan	5.254,80	5.738,20	6.175,30	6.625,80	6.000,88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	263.659,30	289.109,10	311.697,40	335.851,70	343.000,60
15	Jasa Pendidikan	35.424,80	37.080,00	40.284,40	43.454,00	45.000,68
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	43.810,00	47.107,70	51.783,90	56.508,00	58.000,89
17	Jasa Lainya	3.195,60	3.559,20	3.841,40	4.189,70	4.000,26
PDRB Kabupaten Padang Lawas		**8.808,43**	**9.704,50**	**10.595,00**	**11.371,50**	**11.997,10**
PDRB Provinsi Sumatera Utara		**626.062,91**	**684.634,43**	**741.347,43**	**799.608,95**	**811.282,84**

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka Tahun 2021
PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020

Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku dengan nilai tertinggi pada tahun 2020 berada pada sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai sebesar 47,62 persen, sedangkan distribusi paling kecil terdapat pada sektor lapangan usaha Jasa Lainnya dengan nilai sebesar 0,04 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.16
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2020

No	Sektor	Distribusi PDRB ADHB (Peren)		
		2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	46,77	46,17	47,62
2	Pertambangan dan Penggalian	0,53	0,54	0,51
3	Industri Pengolahan	17,16	17,32	17,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,2	0,19	0,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi	16,64	17,18	15,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,26	7,17	7,04
8	Trasportasi dan Pergudangan	1,29	1,3	1,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,09	1,09	1,03
10	Informasi dan Komunikasi	0,57	0,59	0,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87	0,82	0,78
12	Real Estate	3,72	3,71	0,73
13	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,94	2,95	2,86
15	Jasa Pendidikan	0,38	0,38	0,38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,49	0,5	0,49
17	Jasa Lainya	0,04	0,04	0,04
PDRB Kabupaten Padang Lawas		**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan dengan nilai tertinggi pada tahun 2020 terdapat pada sektor lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dengan nilai sebesar 9,19 persen, sedangkan pertumbuhan paling kecil terdapat pada sektor lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan nilai sebesar -8,53 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.17
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2020

No	Sektor	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,45	5,09	3,45
2	Pertambangan dan Penggalian	8,59	7,74	-1,59
3	Industri Pengolahan	6,32	6,29	1,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,34	5,67	8,82
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi	7,57	7,3	-5,18
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,61	4,77	-0,35
8	Trasportasi dan Pergudangan	6,07	5,73	-8,53
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,93	6,05	-0,70
10	Informasi dan Komunikasi	8,21	7,60	9,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,24	1,50	0,75
12	Real Estate	5,36	5,03	3,71
13	Jasa Perusahaan	4,83	4,43	-1,55
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,12	6,34	-0,51
15	Jasa Pendidikan	6,00	5,13	2,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,37	5,17	-0,96
17	Jasa Lainya	4,92	4,95	-0,62
PDRB Kabupaten Padang Lawas		5,96	5,64	1,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Kabupaten Padang Lawas berada pada Wilayah Pantai Barat. Adapun Kabupaten yang termasuk di dalamnya adalah : Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang lawas Utara dan Kabupaten Padang lawas. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota disekitarnya yaitu dengan nilai pertumbuhan sebesar 1,18 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dengan pertumbuhan ekomoni sebesar -1,07 persen, maka Kabupaten Padang Lawas masih berada dalam nilai positif, jika di bandingkan dengan nasional sebesar -2,07 persen.

Meskipun demikian realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 jauh di bawah target hal tersebut merupakan dampak dari pandemic Covid-19. Pertumbuhan Ekonomi terendah ada di Kota Sibolga sebesar -1,36 persen, Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Lawas pada masa pandemi Covid–19 masih dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya dengan nilai positif.

Tabel 2.18
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020

Kabupaten / Kota	2020
Kota Padangsidimpuan	-0,73
Kabupaten Tapanuli Selatan	0,39
Kabupaten Mandailing Natal	-0,94
Kabupaten Padang Lawas Utara	1,14
Kota Sibolga	-1,36
Kabupaten Tapanuli Tengah	-0,76
Kabupaten Padang Lawas	1,18
Provinsi Sumatera Utara	-1,07
Nasional	-2,07

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka 2020

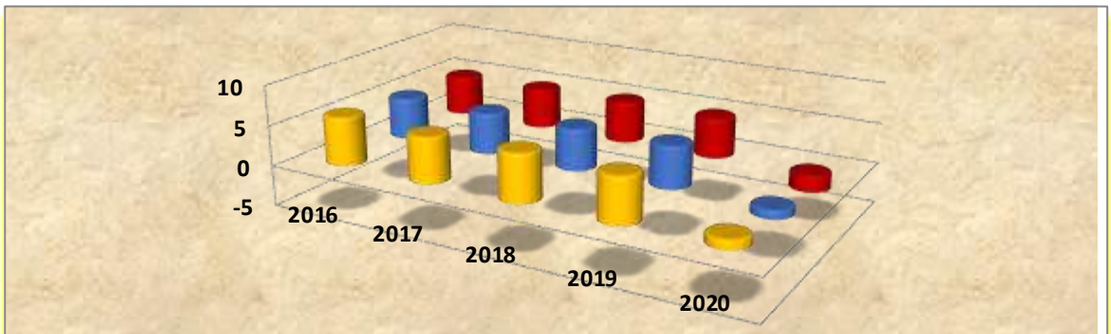
Tabel 2.19
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas

Indikator	Target	Realisasi	Target Setelah Perubahan			
	2020	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	5,04	1,18	6,50	6,50	6,50	6,75

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021, diolah

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Lawas terus mengalami fluktuasi, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Lawas yang terendah terdapat pada tahun 2020 sebesar 1,18 persen, sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 6,06 persen. Hal serupa terjadi pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, dimana pertumbuhan ekonomi yang terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar -1,07 persen, dan yang tertinggi terjadi di tahun 2019 sebesar 5,22 persen, dan pada pertumbuhan ekonomi Nasional yang terendah terjadi pada tahun 2020 yakni dengan nilai sebesar -2,07 persen sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Hal ini dapat di lihat pada gambar berikut.

Gambar 2.7
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Padang Lawas	6,06	5,71	5,96	5,64	1,18
Provinsi Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07
Ekonomi Nasional	5,02	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020
Badan Pusat Stastik Indonesia Tahun 2020
RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

2.2.1.2. PDRB perkapita

Pendapatan per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Asumsi awal adalah semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Hal ini dikarenakan peningkatan PDRB per kapita merupakan sinyal awal adanya peningkatan perekonomian daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak secara langsung.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Padang Lawas yang tertinggi terjadi di tahun 2020 dengan jumlah Rp 41,86 juta dengan persentase sebesar 3,51 persen, sedangkan yang terendah terdapat pada tahun 2016 dengan jumlah Rp 33,39 juta dengan persentase -18,58 persen. Berikut adalah tabel PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.20
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	%	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	%	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	%	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	%	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	%
1	Kabupaten Padang Lawas	33,39	-18,58	35,97	7,73	38,46	6,92	40,44	5,15	41,86	3,51
2	Provinsi Sumatera Utara	44,56	8,63	48,00	7,72	51,43	7,15	54,91	6,77	55,18	0,49

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2021, diolah

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas yang tertinggi terjadi di tahun 2019 dengan jumlah Rp 28,30 juta dengan persentase sebesar 3,47 persen, sedangkan yang terendah terdapat pada tahun 2016 dengan jumlah Rp 25,50 juta dengan persentase -19,41 persen. Sedangkan untu Provinsi Sumatera Utara yang tertinggi terjadi di tahun 2019 dengan jumlah Rp 37,05 juta dengan persentase sebesar 4,16 persen, sedangkan yang terendah terdapat pada tahun 2016 dengan jumlah Rp 32,89 juta dengan persentase 3,89 persen. Berikut adalah tabel PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.21
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan
di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	%	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	%	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	%	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	%	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)	%
1	Kabupaten Padang Lawas	25,50	-19,41	26,35	3,33	27,35	3,80	28,30	3,47	28,10	-0,71
2	Provinsi Sumatera Utara	32,89	3,98	34,18	3,92	35,57	4,07	37,05	4,16	36,30	-2,02

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2021, diolah

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Padang Lawas setiap tahunnya mengalami fluktuatif, laju pertumbuhan Kabupaten Padang Lawas tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,06 persen dan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 1,18 persen. Jika di bandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Wilayah Pantai Barat laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan Kabupaten Padang Lawas pada Tahun 2020 berada pada tingkatan ke 2 (dua), tepatnya di bawah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel 2.22
PDRB Laju Pertumbuhan Atas Harga Konstan Wilayah Pantai Barat
Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/ Kota	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Kota Padangsidimpuan	5,29	5,32	5,45	5,51	-0,37
2	Kabupaten Padang Lawas	6,06	5,71	5,96	5,64	1,18
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	5,12	5,21	5,19	5,23	0,39
4	Kabupaten Mandailing Natal	6,18	6,09	5,79	5,3	-0,94
5	Kabupaten Padang Lawas Utara	5,96	5,54	5,58	5,61	5,14
6	Kota Sibolga	5,15	5,27	5,25	5,22	-1,36
7	Kabupaten Tapanuli Tengah	5,12	5,24	5,2	5,18	-0,76
Rata-rata		**5,55**	**5,48**	**5,49**	**5,38**	**0,47**

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2021, diolah

2.2.1.3. Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi merupakan salah satu indikator dalam perencanaan pembangunan satu daerah atau wilayah. Dengan inflasi dapat diukur persentase kenaikan harga barang/jasa yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat.

Kabupaten Padang Lawas bukan merupakan salah satu kota tempat survei inflasi. Inflasi di Kabupaten Padang Lawas mengacu pada Kota Padangsidimpuan. Pada tahun 2020 laju inflasi Kota Padangsidimpuan menurut kelompok komoditi yang tertinggi terdapat pada komoditi Makanan Jadi, Minuman, Rokok/ Tembakau sebesar 5,70 persen, sementara kelompok komoditi terendah terdapat pada komoditi Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yaitu sebesar -7,76 persen. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.23
Laju Inflasi Menurut Kelompok Komoditi
Kota Padangsidimpuan Tahun 2016-2020

Kelompok	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi Umum	4,28	3,82	2,22	2,15	3,27
Bahan Makanan	8,84	2,15	-1,92	-0,68	3,18
Makanan Jadi, Minuman, Rokok /Tembakau	6,39	3,20	4,64	2,10	5,70
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	1,48	6,97	2,03	1,99	0,14
Sandang	2,90	4,59	4,12	5,51	0,28
Kesehatan	2,17	3,28	2,65	8,77	1,03
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	2,19	-0,29	2,66	9,73	-0,30
Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,57	4,64	5,52	0,28	-7,76

Sumber : Kota Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2021

2.2.1.4. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah adalah indeks gini (gini ratio), dimana berkisar antara 0 sampai 1.

Berdasarkan data BPS menunjukkan gini ratio Kabupaten Padang Lawas selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 termasuk dalam kategori ketimpangan yang merata. Gini ratio Kabupaten Padang Lawas yang terkecil terdapat pada tahun 2017 yakni sebesar 0,2482 poin, sedangkan yang tertinggi terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 0,3256 poin. Sementara gini ratio Provinsi Sumatera Utara gini ratio yang tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,3190 poin sedangkan untuk yang terkecil terdapat di tahun 2017 yaitu sebesar 0,3150 poin. Ketimpangan tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Padang Lawas masih dalam tingkat kesenjangan yang baik. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan tabel perbandingan Gini Cofficient Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.24
Gini Cofficient Kabupaten Padang Lawas
dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

No	Tahun	Kabupaten Padang Lawas	Provinsi Sumatera Utara
1	2016	0,3256	0,3190
2	2017	0,2482	0,3150
3	2018	0,2990	0,3180
4	2019	0,2940	0,3170
5	2020	0,2890	0,3160

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Sedangkan jika dibandingkan dengan data capaian Kabupaten/Kota Wilayah Pantai Barat Tahun 2020 gini rasio Kabupaten Padang Lawas berada pada urutan ke 3 (tiga) setelah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nilai sebesar 0,289 poin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Gini Cofficient Wilayah Pantai Barat Tahun 2018-2020

No	Kab/Kota	Gini Ratio (Poin)		
		2018	2019	2020
1	Kota Padangsidimpuan	0,359	0,359	0,359
2	Kabupaten Padang Lawas	0,299	0,294	0,289
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,273	0,272	0,272
4	Kabupaten Mandailing Natal	0,257	0,257	0,257
5	Kabupaten Padang Lawas Utara	0,299	0,298	0,298
6	Kota Sibolga	0,303	0,303	0,303
7	Kabupaten Tapanuli Tengah	0,317	0,317	0,317
Rata-rata		**0,301**	**0,300**	**0,300**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, diolah

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan Padang Lawas dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan serta kemiskinan. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut analisis lebih lanjut dalam melihat fokus kesejahteraan sosial Kabupaten Padang Lawas.

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Keberhasilan pembangunan daerah dapat terwujud apabila selaras dengan pembangunan manusia. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index (HDI)* yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programes (UNDP)* sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan IPM, kita bisa melakukan analisis pembandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan 4 (empat) dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Usia Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan) serta Pengeluaran Rill Per Kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

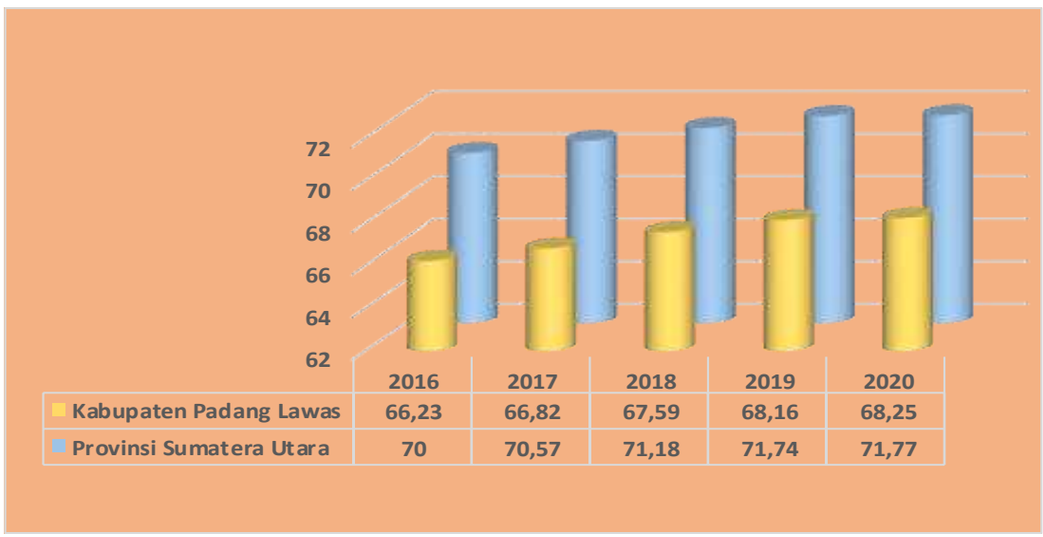
Tabel 2.26
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

Komponen	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	Tahun	66,4	66,5	66,69	66,98	67,09
Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	12,92	12,99	13,00	13,02	13,03
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,41	8,43	8,67	8,69	9,01
Pengeluaran Rill Perkapita	Rupiah	8.094	8.445	8.772	9.100	8.807
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang lawas	Poin	66,23	66,82	67,59	68,16	68,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, diolah

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara walapun terjadi peningkatan Pandemi Covid-19 membawa pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Padang Lawas tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Padang Lawas tertinggi terjadi ditahun 2020 sebesar 68,25 poin dan terendah di tahun 2016 sebesar 66,23 poin. Perkembangan capaian IPM Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2.8
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016-2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Padang Lawas	66,23	66,82	67,59	68,16	68,25
Provinsi Sumatera Utara	70	70,57	71,18	71,74	71,77

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2021

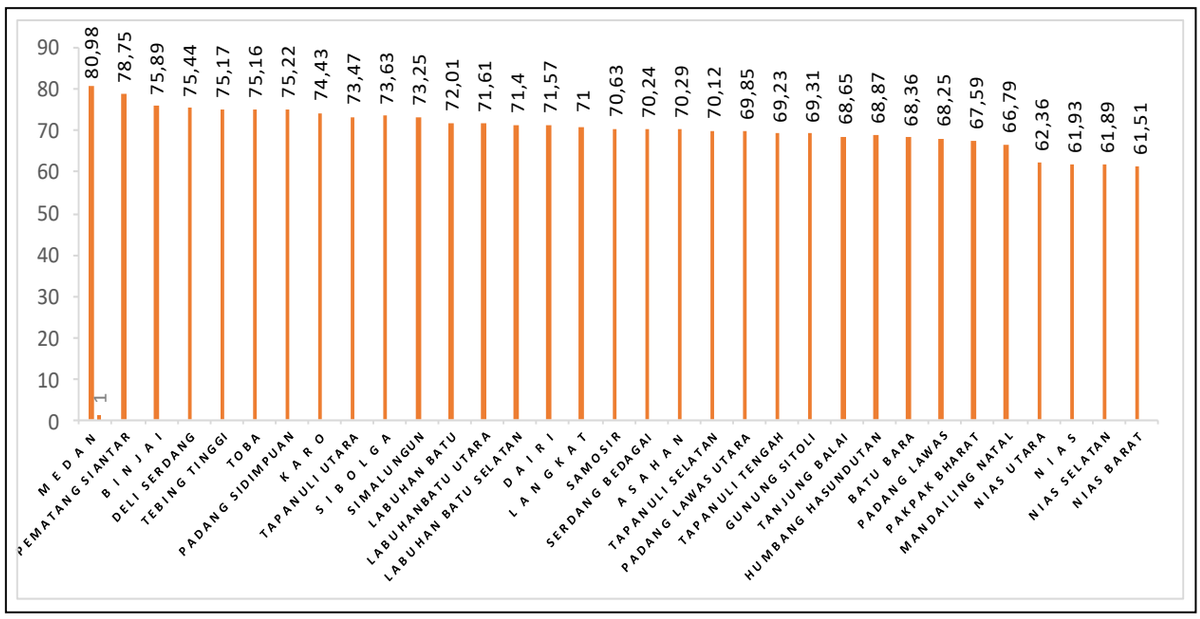
Jika dibandingkan dengan data capaian kabupaten/kota Se-Sumatera Utara, maka capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2020 berada pada urutan ke 27 setelah Kabupaten Batubara yakni dengan tingkat capaian indeks IPM sebesar 68,25 poin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.27
Perbandingan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Padang lawas Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2016-2020

NO	Kabupaten / Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	M e d a n	79,34	79,98	80,65	80,97	80,98
2	Pematang Siantar	76,90	77,54	77,88	78,57	78,75
3	B i n j a i	74,11	74,65	75,21	75,89	75,89
4	Deli Serdang	73,51	73,94	74,92	75,43	75,44
5	Tebing Tinggi	73,58	73,90	74,50	75,08	75,17
6	Toba	73,61	73,87	74,48	74,92	75,16
7	Padang sidimpuan	73,42	73,81	74,38	75,06	75,22
8	K a r o	73,29	73,53	73,91	74,25	74,43
9	Tapanuli Utara	71,96	72,38	72,91	73,33	73,47
10	S i b o l g a	72,00	72,28	72,65	73,41	73,63
11	Simalungun	71,48	71,83	72,49	72,98	73,25
12	Labuhan Batu	70,50	71,00	71,39	71,94	72,01
13	Labuhan Batu Utara	70,26	70,79	71,08	71,43	71,61
14	Labuhan Batu Selatan	70,28	70,48	70,98	71,39	71,4
15	D a i r i	69,61	70,36	70,89	71,42	71,57
16	L a n g k a t	69,13	69,82	70,27	70,76	71,00
17	Samosir	68,82	69,43	69,99	70,55	70,63
18	Serdang Bedagai	68,77	69,16	69,69	70,21	70,24
19	A s a h a n	68,71	69,10	69,49	69,92	70,29
20	Tapanuli Selatan	68,04	68,69	69,10	69,75	70,12
21	Padang Lawas Utara	68,05	68,34	68,77	69,29	69,85
22	Tapanuli Tengah	67,27	67,96	68,27	68,86	69,23
23	Gunung Sitoli	66,85	67,68	68,33	69,30	69,31
24	Tanjung Balai	67,09	67,41	68,00	68,51	68,65
25	Humbang Hasundutan	66,56	67,30	67,96	68,83	68,87
26	Batu Bara	66,69	67,20	67,67	68,35	68,36
27	Padang Lawas	66,23	66,82	67,59	68,16	68,25
28	Pakpak Bharat	65,81	66,25	66,63	67,47	67,59
29	Mandailing Natal	64,55	65,13	65,83	66,52	66,79
30	Nias Utara	60,23	60,57	61,08	61,98	62,36
31	N i a s	59,75	60,21	60,82	61,65	61,93
32	Nias Selatan	59,14	59,85	60,75	61,59	61,89
33	Nias Barat	59,03	59,56	60,42	61,14	61,51

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.9
Perbandingan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Padang lawas Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2020



Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2021

2.2.2.2. Perkembangan Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua daerah tak terkecuali Kabupaten Padang Lawas. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin yaitu menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Padang Lawas dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami perubahan dari setiap tahunnya, dapat dilihat jelas bahwa tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten Padang Lawas sebesar 8,37 persen dengan jumlah penduduk 23,87 ribu jiwa. Dari data angka tabel dibawah ini dapat kita lihat bahwa ditahun 2020 merupakan jumlah penduduk miskin dengan persentase yang cukup besar, hal ini dikarena kan setiap tahunnya jumlah penduduk semakin bertambah maka berbanding lurus dengan tingkat persentasenya juga. Berikut adalah tabel jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.28
Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Wilayah	Jumlah (000 jiwa) /Persentase Penduduk Miskin (%)									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
1	Kabupaten Padang Lawas	8,69	22,80	99,10	24,42	8,41	23,05	8,28	23,17	8,37	23,87

Sumber : Kabupaten Padang Lawas dalam Angka Tahun 2021

Perkembangan Indeks kedalaman Kemiskinan Kabupaten Padang Lawas tertinggi pada tahun 2019 sebesar 1,64 persen dan terendah pada tahun 2018 sebesar 1,07 persen. Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi juga pada tahun 2019 sebesar 0,47 persen dan terendah 2018 sebesar 0,23 persen, hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 2.29
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan(P2)
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,36	1,17	1,07	1,64	1,19
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,30	0,32	0,23	0,47	0,29

Sumber: Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan data capaian Kabupaten/Kota Wilayah Pantai Barat, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2020 berada pada urutan ke 2 (dua) terendah setelah Kota Padang Sidempuan dengan persentase 8,37 persen.

Tabel 2.30
Kemiskinan Wilayah Pantai Barat Tahun 2018-2020

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2018	2019	2020
		ribu orang			%		
1	Kota Padangsidimpuan	16,79	16,06	16,56	7,69	7,26	7,40
2	Kabupaten Padang Lawas	23,05	23,17	23,87	8,41	8,28	8,37
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	25,63	24,22	23,96	8,41	8,28	8,47
4	Kabupaten Mandailing Natal	42,39	40,64	41,31	9,58	9,11	9,18
5	Kabupaten Padang Lawas Utara	26,82	26,06	26,79	10,06	9,6	9,70
6	Kota Sibolga	10,81	10,82	10,49	12,38	12,36	11,95
7	Kabupaten Tapanuli Tengah	45,53	46,99	47,19	13,17	12,53	12,38
	Rata-rata	**27,29**	**26,85**	**27,17**	**9,96**	**9,63**	**9,64**

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2021, diolah

2.2.2.3. Angka Melek Huruf

Salah satu kebutuhan dasar penduduk untuk berkomunikasi adalah

kemampuan membaca dan menulis. Hal ini merupakan kemampuan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk bermasyarakat, sehingga penduduk dapat berperan aktif dalam pembangunan berkesinambungan di Kabupaten Padang Lawas.

Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk:

1. Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernahbersekolah atau tidak tamat SD;
2. Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media;
3. Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Semakin besar angka melek huruf berarti semakin banyak penduduk yang mampu dan mengerti baca tulis yang akan berpengaruh terhadap penerimaan informasi dan ilmu pengetahuan, sebab langsung yang mempengaruhi angka melek huruf dan buta huruf orang dewasa adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana belajar di masyarakat, sedangkan sebab tidak langsung yang mempengaruhi angka melek huruf adalah status sosial ekonomi yang rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat akan arti dan makna buta huruf. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 - 2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	12.129	10.211	9.420	6.105	16.760
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	12.291	10.268	9.481	6.105	16.782
Angka Melek Huruf Kabupaten Padang Lawas		98	99	99	99	99
Angka Melek Huruf Provinsi Sumatera Utara		98	99	99	99	99

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

2.2.3. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi

sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Lawas tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 9,01 persen sementara terendah terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 8,41 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Padang Lawas masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.32
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

No	Wilayah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Padang Lawas	8,41	8,43	8,67	8,69	9,01
2	Provinsi Sumatera Utara	9,12	9,25	9,34	9,45	9,54

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2021

Berikut ini gambar perbandingan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Padang Lawas dengan Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2.10
Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2021, diolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 9,01 persen, hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas khususnya di bidang Urusan Pendidikan terus membaik hal ini juga dapat dilihat dari tingkat capaian target-target SPM Bidang Pendidikan.

Jika Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas tahun 2020 di bandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah Pantai Barat maka posisi Kabupaten Padang Lawas berada pada urutan ke 5 (lima) setelah Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33

Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Pantai Barat Tahun 2018 - 2020

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (Persen)		
		2018	2019	2020
1	Kota Padangsidimpuan	10,46	10,90	11,00
2	Kota Sibolga	9,91	10,20	10,40
3	Kabupaten Padang Lawas Utara	9,06	9,30	9,37
4	Kabupaten Tapanuli Selatan	8,70	9,30	9,28
5	Kabupaten Padang Lawas	8,67	8,69	9,01
6	Kabupaten Mandailing Natal	8,11	8,80	8,62
7	Kabupaten Tapanuli Tengah	8,29	8,60	8,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, diolah

2.2.2.5. Harapan Lama Sekolah

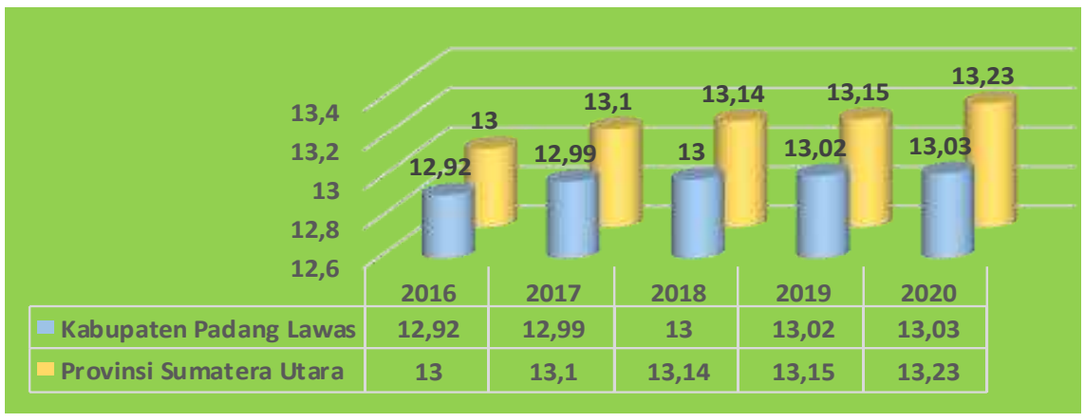
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Padang Lawas mencapai 13,03 persen, sedangkan yang terkecil berada pada tahun 2016 dengan Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,92 persen. Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana Angka Harapan Lama Sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 13,23 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.34
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas
dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 – 2020

No	Wilayah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Padang Lawas	12,92	12,99	13,00	13,02	13,03
2	Provinsi Sumatera Utara	13,00	13,10	13,14	13,15	13,23

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2.11
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas
Dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020



Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2021, diolah

Jika dibandingkan dengan kondisi pendidikan di wilayah Pantai Barat khususnya indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Lawas di tahun 2020 sebesar 13,03 persen dan berada pada urutan ke 6 (enam) setelah Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.35
Persentase Kondisi Harapan Lama Sekolah Wilayah Pantai Barat
Tahun 2018 - 2020

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (%)		
		2018	2019	2020
1	Kota Padangsidimpuan	14,51	14,51	14,54
2	Kabupaten Mandailing Natal	13,15	13,15	13,32
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	13,10	13,10	13,24
4	Kota Sibolga	13,13	13,13	13,16
5	Kabupaten Tapanuli Tengah	12,66	12,66	13,06
6	Kabupaten Padang Lawas	13,00	13,02	13,03
7	Kabupaten Padang Lawas Utara	12,42	12,42	12,87

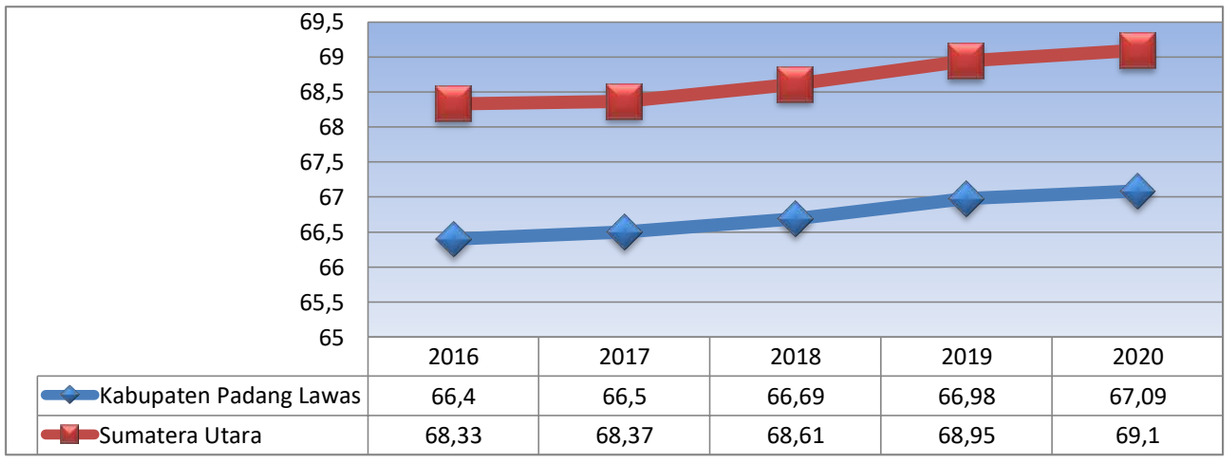
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, diolah

2.2.2.6. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Perkembangan Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.12
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016 – 2020



	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Padang Lawas	66,4	66,5	66,69	66,98	67,09
Sumatera Utara	68,33	68,37	68,61	68,95	69,1

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Pada tahun 2020 Angka Harapan Hidup Kabupaten Padang Lawas juga terus meningkat dengan capaian sebesar 67,09 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Peningkatan tersebut salah satunya terjadi karena terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat Sumatera Utara dengan komponen pembangunan Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Rill Per Kapita.

Jika dibandingkan dengan kondisi kesehatan di wilayah Pantai Barat khususnya indikator Usia Harapan Hidup di tahun 2020 maka posisi Kabupaten Padang Lawas berada pada urutan ke 5 (lima) dengan nilai sebesar 67,09 persen setelah Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Persentase Usia Harapan Hidup
Wilayah Pantai Barat Tahun 2018 – 2020

No	Kab/Kota	Usia Harapan Hidup (%)		
		2018	2019	2020
1	Kota Padangsidimpuan	68,73	62,51	69,41
2	Kota Sibolga	71,95	68,77	69,01
3	Kabupaten Padang Lawas Utara	68,69	67,06	67,17
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	71,31	67,08	67,15
5	Kabupaten Padang Lawas	68,24	66,98	67,09
6	Kabupaten Tapanuli Selatan	68,22	64,82	64,91
7	Kabupaten Mandailing Natal	66,77	62,51	62,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

2.2.2.7. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun) yang umumnya terjadi pada anak-anak. Gizi buruk pada anak sering kali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang. Sedangkan persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Data cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.37
Persentase Cakupan Gizi Buruk
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020

No	Kabupaten/ Kota	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Kabupaten Padang Lawas	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Cakupan gizi buruk di Kabupaten Padang Lawas 100 persen setiap tahunnya, jika dilihat dari indikator angka stunting tahun 202 angka stunting Kabupaten Padang Lawas sebesar 15,42 persen, dan pada tahun 2020 sebesar 41,95 persen. Jika di bandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah pantai barat pada tahun 2020, Kabupaten Padang Lawas berada pada urutan ke 3 (tiga) tertinggi setelah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel 2.38
Persentase Angka Stunting Wilayah Pantai Barat Tahun 2018 – 2020

No	Kabupaten/Kota	Stunting (%)		
		2018	2019	2020
1	Kota Sibolga	10,70	11,70	24,00
2	Kabupaten Padang Lawas	27,38	15,42	41,95
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	16,30	26,96	23,80
4	Kota Padangsidimpuan	27,20	27,40	32,29
5	Kabupaten Mandailing Natal	25,30	36,50	49,91
6	Kabupaten Tapanuli Tengah	22,00	41,89	36,32
7	Kabupaten Padang Lawas Utara	27,80	45,73	49,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021
Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021
Studi Status Gizi Balita Indonesia Tahun 2020

2.2.2.8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator untuk melihat perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin

besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Padang Lawas paling tinggi pada tahun 2020 sebesar 76,93 persen sedangkan yang terendah pada tahun 2016 sebesar 67,56 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Utara yang tertinggi pada tahun 2018 sebesar 71,82 persen dan terendah pada tahun 2016 sebesar 65,99 persen. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Lawas tertinggi pada tahun 2016 sebesar 5,55 persen dan terendah pada tahun 2018 sebesar 4,10 persen. Untuk Provinsi Sumatera Utara, Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) paling tinggi pada tahun 2020 sebesar 6,91 persen dan terendah pada tahun 2019 sebesar 5,41 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

No	Wilayah	TPAK (%)					TPT (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Padang Lawas	67,56	70,21	70,05	76,10	76,93	5,55	4,24	4,10	4,24	4,11
2	Provinsi Sumatera Utara	65,99	68,88	71,82	70,19	68,67	5,84	5,60	5,56	5,41	6,91

Sumber : Provinsi Sumatera Utara dalam Angka Tahun 2021

2.2.2.9. Opini BPK

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan suatu daerah dapat dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah berusaha secara maksimal agar memperoleh Opini BPK yang baik terhadap kualitas laporan keuangan, sampai dengan tahun 2018 Kabupaten Padang Lawas memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sedangkan tahun 2019 untuk pertama kalinya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2020 kualitas

laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut ini adalah hasil perolehan Opini BPK terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 2.40
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.2.2.10. Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Padang Lawas baru mulai berkembang dan akan terus maju, hal ini dikarenakan minat yang semakin meningkat dari masyarakat sehingga perlu dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Peningkatan minat masyarakat terhadap perkembangan seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari jumlah capaian pembangunan di Kabupaten Padang Lawas yang terus meningkat. Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk di Kabupaten Padang Lawas terus meningkat sejak tahun 2016 sebanyak 15 klub menjadi 24 klub di tahun 2020. Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 penduduk di Kabupaten Padang Lawas juga terus meningkat, pada tahun 2016 sebanyak 1 gedung dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 4 gedung. Capaian Pembangunan Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016–2020

No.	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	-	-	-	-	438
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	-	-	-	-	-
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	15	18	21	24	24
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	1	1	2	3	4

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk terbanyak di kecamatan Barumun yaitu sebanyak 97 grup dan paling sedikit di Kecamatan Hulu Sosa dan Barumun Barat sebanyak 6 grup. Jumlah Klub Olahraga per 10.000

penduduk yang terbayak di kecamatan Barumun yaitu sebesar 10 klub. Perkembangan seni, budaya dan olahraga tahun 2020 per kecamatan di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1.	Sosopan	23	-	2	-
2.	Ulu Barumun	26	-	2	-
3.	Barumun	97	-	10	1
4.	Barumun Selatan	19	-	2	-
5.	Lubuk Barumun	33	-	5	-
6.	Sosa	57	-	6	-
7.	Batang Lubu Sutam	13	-	1	-
8.	Hutaraja Tinggi	16	-	6	-
9.	Huristak	22	-	1	-
10.	Barumun Tengah	37	-	1	-
11.	Aek Nabara Barumun	29	-	1	-
12.	Sihapas Barumun	23	-	1	-
13.	Sosa Julu	7	-	2	-
14.	Hulu Sosa	6	-	1	-
15.	Sosa Timur	7	-	2	-
16.	Barumun Baru	17	-	4	-
17.	Barumun Barat	6	-	1	-
Jumlah		**438**	**-**	**48**	**1**

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Urusan Pemerintah Wajib dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yang terbagi atas Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar.

2.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas, karena pendidikan menjadi penentu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah.

1. Angka Partisipasi Sekolah

Berikut merupakan perkembangan Angka Partisipasi Sekolah menurut jenjang pendidikan. Tahun 2020 perkembangan angka pertisipasi sekolah Kabupaten Padang Lawas adalah yang tertinggi menurut jenjang pendidikan PAUD/TK pada jumlah murid usia <6 tahun sebesar 9,134 persen sedangkan yang terendah ditahun 2016 sebesar 3,838 persen. Untuk jumlah murud usia 7-12 tahun tingkat pendidikan SD/MI yang tertinggi terdapat pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 39,512 persen sedangkan yang terendah pada tahun 2018 yakni sebesar 32,806 persen. Selain itu, perkembangan angka partisipasi sekolah dijenjang SMP/MTs pada jumlah murid usia 13-15 tahun terlihat tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 17,086 persen sedangkan yang terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,641 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Padang Lawas (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020*)
1	PAUD/ TK					
1.1	Jumlah Murid Usia <6 Tahun	3,838	3,947	3,939	8,534	9,134
1.2	Jumlah Penduduk Usia <6 Tahun	3,938	4,047	4,112	28,51	24,075
1.3	APS PAUD	97,5	97,5	96	99,3	-
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Murid Usia 7-12 Tahun	37,168	37,529	32,806	39,512	37,442
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	36,843	36,522	37,112	37,997	32,153
2.3	Aps SD/MI	93	93,3	83,97	98	11,64
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Murid Usia 13-15 Tahun	6,641	6,759	10,666	17,086	14,34
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	5,334	5,632	13,741	18,385	16,894
3.3	APS SMP/MTs	90,1	90,37	76,22	9,2	8,48

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021
*) Data Sementara

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Tujuan mengukur APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan

atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Padang Lawas untuk jenjang pendidikan SD/MI yang tertinggi terdapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,53 persen, sedangkan yang terendah terdapat di tahun 2016 yaitu sebsesar 97,32 persen. Untuk Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Padang Lawas untuk jenjang pendidikan SMP/MTs yang tertinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu sebesar 98,42 persen, sedangkan yang terendah terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 91,73 persen. Sedangkan untuk angka partisipasi kasar tingkat SMA/SMK di Kabupaten tidak ada hanya saja merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 2.44
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

No	Wilayah	Angka Partisipasi Kasar (APK) %														
		2016			2017			2018			2019			2020		
		SD	SMP	SMA / SMK	SD	SMP	SMA / SMK	SD	SMP	SMA / SMK	SD	SMP	SMA / SMK	SD	SMP	SMA / SMK
1	Kabupaten Padang Lawas	97,32	91,73	81,63	94,82	92,56	95,72	97,36	94,25	95,72	98,71	98,42	-	99,53	95,62	-
2	Provinsi Sumatera Utara	109,56	104,29	93,81	109,5	90,74	93,64	109,5	90,74	93,64	109,49	90,38	94,04	109,46	94,72	88,54

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2021

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM Kabupaten Padang Lawas untuk jenjang pendidikan SD/MI yang tertinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu sebesar 95,60 persen, sedangkan yang terendah terdapat di tahun 2016 yaitu sebsesar 93,70 persen. Untuk APM Kabupaten Padang Lawas untuk jenjang pendidikan SMP/MTs yang tertinggi terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 92,70 persen, sedangkan yang terendah terdapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 84,40 persen. Sedangkan untuk APM tingkat SMA/SMK di Kabupaten tidak ada hanya saja merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.45
Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

No	Wilayah	Angka PartisipasiMurni (APM) %														
		2016			2017			2018			2019			2020		
		SD	SMP	SMA SMK	SD	SMP	SMA SMK	SD	SMP	SMA SMK	SD	SMP	SMA SMK	SD	SMP	SMA SMK
1	Kabupaten Padang Lawas	93,70	90,50	65,03	94,50	91,20	65,33	93,80	92,70	94,53	95,60	85,40	-	94,70	84,40	-
2	Provinsi Sumatera Utara	94,41	76,81	67,92	97,22	79,12	67,05	97,22	79,12	67,05	97,67	80,26	67,53	97,72	80,56	67,99

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021
Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2021

4. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Tahun 2020 rasio jumlah gedung sekolah dan jumlah penduduk kelompok usia Kabupaten Padang Lawas menurut jenjang pendidikan SD/MI sebesar 52,41 persen merupakan rasio tertinggi, sedangkan ditahun 2016 merupakan rasio terkecil yakni sebesar 35,73 persen. Sedangkan untuk tingkat jenjang pendidikan SMP/MTs rasio tertinggi terdapat pada tahun 2017 dengan nilai sebesar 133 persen, sedangkan tahun 2018 dengan rasio 57 persen adalah merupakan rasio terkecil.

Tabel 2.46
Rasio Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2016 – 2020 Kabupaten Padang Lawas

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020*
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah Gedung Sekolah	952,00	1,05	1,08	1,08	1,40
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	37,53	36,44	39,40	38,00	37,44
1.3	Rasio (%)	35,73	38,11	42,34	41,07	52,41
2	**SMP/Mts**					
2.1	Jumlah Gedung Sekolah	68,00	75,00	79,00	691,00	642,00
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	1 5,334	5,63	13,74	18,39	16,89
2.3	Rasio (%)	127	133	57	127	108

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021
*Data sementara

5. Rasio Guru/Murid

Rasio jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar SD/MI di Kabupaten Padang Lawas setiap tahun mengalami kenaikan. Tahun 2020 merupakan rasio paling tinggi yakni sebesar 98,02 persen, sedangkan yang terkecil terdapat di tahun 2017 dengan rasio 40,30 persen. Sementara itu, rasio jumlah guru dan murid untuk jenjang pendidikan dasar SMP/MTs di Kabupaten Padang Lawas mengalami fluktuatif. Tahun 2016 merupakan rasio paling tinggi yakni sebesar 77,10 persen, sedangkan yang terkecil 32,20 persen terdapat di tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.47
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016–2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah Guru	1,412	1,512	1,617	2,255	2,642
1.2	Jumlah Murid	37,168	37,529	32,806	39,512	37,442
1.3	Rasio (%)	38,00	40,30	49,30	89,09	98,92
2	**SMP/MTS**					
2.1	Jumlah Guru	512	565	1,442	1,885	1,6
2.2	Jumlah Murid	6,641	6,759	13,741	17,086	14,269
2.3	Rasio (%)	77,1	83,6	49	32,2	22,83

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Jumlah guru TK/PAUD yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV di Kabupaten Padang Lawas yang tertinggi terdapat pada tahun 2019 sebesar 562 orang, sedangkan yang terkecil pada tahun 2020. Hal ini mugkin dapat di pengaruhi bahwa jumlah guru TK/PAUD dapat berpindah ke sekolah dasar. untuk jumlah guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV tertinggi terdapat pada tahun 2020 yakni sebesar 2.095 orang, sedangkan yang terkecil terdapat pada tahun 2016 yakni sebesar 1.412 orang. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah guru TK/PAUD yang berkurang di tahun 2020. Sedangkan untuk jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV ditingkat jenjang pendidikan SMP/MTs yang tertinggi terdapat pada tahun 2020 yakni sebesar 1.496 orang, sedangkan yang terkecil pada tahun 2016 yakni sebesar 512 orang. Dari data tersebut dapat di lihat bahwa jumlah guru di SMP/MTs merupakan jumlah guru yang lebih banyak memenuhi kualifikasi S-1/D-IV.

Tabel 2.48
Jumlah Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016–2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	PAUD/ TK	410	415	540	562	402
2	SD/ MI	1,412	1,512	1,617	1,922	2,095
3	SMP/ MTs	512	565	1,442	1,285	1,496

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

6. Tingkat Capaian Target SPM Urusan Pendidikan

Tingkat capaian target SPM Urusan Pendidkan Kabupaten Padang Lawas mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.49
Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2016	2017	2018	2019	2020
I	**Pendidikan**								
	Pendidikan formal								
	SD/ MI (Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidayah)	Partisipasi Anak Bersekolah (PAB)	95%	2024	99,50%	99,50%	98,49%	99,96%	99,98%
		Angka Putus Sekolah (APS)	< 1%	2024	0,26%	0,21%	0,13%	0,30%	0,30%
		Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis	90%	2024	63%	65%	68%	60%	60%
		Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	90%	2024	60%	60%	70%	20%	20%
		Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	70%	80%	80%	82%	82%
		Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	95%	2024	80%	85%	90%	92%	92%
		Jumlah siswa per kelas	32 siswa/kelas	2024	34	34	34	32	32
		Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90%	2024	70%	75%	80%	50%	50%
		Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMP/MTs	95%	2024	85%	90%	90%	89%	89%

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020
	SMP/ Mts	Partisipasi Anak Bersekolah (PAB)	90%	2024	80%	80%	85%	80%	81%
		Angka Putus Sekolah (APS)	< 1%	2024	1,28%	1,22%	1,18%	1,22%	0,18%
		Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis	90%	2024	70%	70%	75%	70%	61%
		Kepemilikan sekolah terhadap tenaga kependidikan non guru	80%	2024	70%	70%	70%	70%	45%
		Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan	80%	2024	70%	70%	70%	70%	5%
		Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	80%	85%	90%	85%	90%
		Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa	90%	2024	90%	95%	100%	95%	98%
		Jumlah siswa per kelas	36 siswa	2024	36	36	36	36	36
		Jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional	90%	2024	85%	90%	90%	90%	60%
		Jumlah lulusan yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK	70%	2024	70%	70%	85%	88%	87%

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020
	Pendidikan Non Formal	Bisa membaca dan menulis	85%	2024	80%	80%	85%	98%	98%
		Orang buta aksara dalam kelompok usia 14 - 44 tahun	< 10%	2024	0,04%	0,04%	0,03%	0,02%	0,02%
	Kesetaraan SD (program Paket-A)	Peserta paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SD/ MI	< 10%	2024	1,43%	1,34%	1,29%	1,22%	1,12%
		Peserta didik Paket A yang tidak aktif	< 5%	2024	0,15%	0,14%	0,12%	0,10%	0,10%
		Kepemilikan modul	50%	2024	78,50%	79,50%	79,87%	80,50%	85,87%
			<1%	2024	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%
		Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	95%	2024	98,78%	98,80%	99,80%	98,78%	99,90%
		Jumlah lulusan Program Paket A dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi (SMP/ MTs) atau Program Paket B	90%	2024	98,50 %	99,87%	99,70%	99,80%	90,00%
		Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	100%	2024	80%	80%	80%	80%	80%
		Pemenuhan jumlah tutor Program Paket A yang diperlukan	90%	2024	20%	20%	20%	20%	80%

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2016	2017	2018	2019	2020
		Kualifikasi tutor Program Paket A yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	78%	78%	78%	78%	78%
		Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90%	2024	50%	50%	50%	50%	35%
		Jumlah peserta yang memiliki sarana belajar	100%	2024	60%	60%	60%	60%	60%
	Kesetaraan SMP (Program Paket B)	Peserta didik Program Paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMP/ MT	<10%	2024	1,28%	1,22%	1,18%	0,18%	0,18%
		Peserta didik Program Paket B yang tidak aktif	<5%	2024	10%	10%	10%	0,2%	0,2%
		Kepemilikan Modul	100%	2024	50%	60%	70%	30%	30%
		Program paket B oleh peserta didik	<2%	2024	2%	2%	2%	2%	2%
		Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	50%	2024	70%	70%	70%	90%	90%
		Jumlah lulusan Program Paket B yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMA, SMK, MA	50%	2024	70%	70%	70%	80%	80%

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2016	2017	2018	2019	2020
		atau Program Paket C)							
		Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	90%	2024	80%	80%	90%	70%	70%
		Pemenuhan jumlah tutor Program Paket B yang diperlukan	100%	2024	60%	70%	70%	20%	20%
		Kualifikasi tutor Program Paket B yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	70%	70%	70%	60%	60%
		Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90%	2024	40%	40%	50%	40%	40%
	Kasetaraan SMA (Program Paket C)	Peserta didik Program Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMA/ MA/ SMK	<10%	2024	3,08%	2,68%	2,34%	0,80%	0,80%
		Peserta didik Program Paket C yang tidak aktif	< 5%	2024	20%	20%	20%	1,50%	1,50%
		Kepemilikan Modul	60%	2024	50%	50%	60%	20%	20%

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020
		Program paket C oleh peserta didik	<5%	2024	2%	2%	2%	2%	2%
		Jumlah kelulusan peserta didik yang mengikuti ujian kesetaraan	60%	2024	80%	90%	90%	98,50%	98,50%
		Jumlah lulusan Program Paket C dapat memasuki dunia kerja	10%	2024	20%	20%	20%	10%	10%
		Jumlah lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi	90%	2024	40%	40%	50%	2%	2%
		Jumlah peserta didik yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan yang mendapatkan nilai memuaskan	100%	2024	80%	80%	90%	98,50%	98,50%
		Kualifikasi tutor yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	60%	70%	80%	60%	60%
		Jumlah pusat belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar teknis pembelajaran	90%	2024	40%	40%	40%	30%	30%

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020
	Pendidikan Keterampilan dan Bermata-pencaharian	Prosentase jumlah anggota masyarakat putus sekolah, pengangguran, dan dari keluarga pra sejahtera yang menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang	25%	2024	5%	5%	5%	10%	10%
		Kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah	100%	2024	50%	50%	50%	65%	60%
		Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi	10%	2024	1%	1%	1%	1%	1%
		Kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang dibina secara terus menerus	50%	2024	10%	10%	10%	40%	40%
		Lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha yang dapat memasuki dunia kerja	20%	2024	0,05%	0,05%	0,05%	0,08%	0,08%

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020
		Pemenuhan jumlah tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek dari kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang diperlukan	100%	2024	30%	30%	30%	50%	50%
		Kualifikasi tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan	90%	2024	60%	60%	60%	60%	60%
		Jumlah peserta ujian kursus-kursus yang memperoleh ijazah atau sertifikat	100%	2024	90%	90%	95%	98%	95%
		Jumlah kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan	70%	2024	40%	40%	40%	50%	50%
		Tersedianya data dasar kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang yang diperbarui terus	100%	2024	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2016	2017	2018	2019	2020
		menerus							
	Pendidikan Taman Kanak-kanak	Jumlah anak usia 4 - 6 tahun yang mengikuti program TK/ RA	20%	2024	40%	50%	55%	95%	95%
		Guru yang layak mendidik TK/ RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional	90%	2024	30%	30%	30%	35%	40%
		TK/ RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain	90%	2024	78%	78%	78%	78%	80%
		TK/ RA yang telah menerapkan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh Menteri	60%	2024	30%	32%	35%	35%	35%
	Pendidikan di Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau yang sederajat	Jumlah anak 0 – 4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain atau sederajat	65%	2024	60%	60%	60%	60%	60%

No.	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian					
					2016	2017	2018	2019	2020
		Jumlah Anak usia 4 - 6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikutii program PAUD jalur non formal	50%	2024	10%	10%	10%	10%	10%
		Guru PAUD jalur non formal yang telah mengikuti pelatihan di bidang PAUD	50%	2024	20%	30%	40%	50%	50%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Padang Lawas, karena kesehatan menjadi salah satu penentu yang paling utama dari daya saing suatu negara atau daerah.

1. Jumlah Kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 (satu) tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi secara garis besar dari sisi penyebabnya kematian bayi ada 2 (dua) macam yaitu endogen dan eksogen. Dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, jumlah kematian bayi di Kabupaten Padang Lawas mengalami fluktuasi. Nilai kematian bayi yang paling tinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 53 jiwa, sedangkan kematian bayi yang terendah terdapat pada tahun 2020 yaitu 21 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan dalam rangka pencegahan kematian bayi di Kabupaten Padang Lawas berjalan dengan baik, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu Peningkatan cakupan akreditasi puskesmas dan rumah sakit; Meningkatnya pemahanan, keterampilan dan kemampuan tenaga kesehatan di fasyankes melalui pembinaan, bimbingan teknis dan pelatihan pelatihan yang telah dilaksanakan seperti penanganan kasus kegawat daruratan bayi baru lahir sudah semakin baik setelah dilakukan Pelatihan Gadar Maternal Neonatal; Kecukupan gizi yang semakin baik; Pelayanan kesehatan terhadap bayi semakin berkualitas.

Tabel 2.50
Jumlah Kematian Bayi
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016–2020

No	Wilayah	Jumlah Kematian Bayi (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Padang Lawas	53	37	32	45	21

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu adalah jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah tertentu selama 1 (satu) tahun. Perkembangan Jumlah Kematian Ibu dapat dilihat pada tabel berikut ini dimana jumlah kematian ibu tertinggi pada tahun 2018 sebanyak 8 jiwa sedangkan jumlah kematian ibu terendah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 3 jiwa. Keberhasilan ini disebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Semakin giatnya upaya untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan pencatatan pelaporan kematian ibu secara online melalui aplikasi MDN (Maternal Death Notification), dimana seluruh

fasilitas kesehatan yang ada baik dari Puskesmas maupun Rumah Sakit dapat langsung melaporkan kematian ibu secara online sehingga sistem pencatatan dan pelaporan kematian ibu dan anak sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

2. Dinas Kesehatan semakin banyak melakukan upaya untuk mencari data kematian yang sebenarnya terjadi dengan mengikutsertakan stakeholder terkait.
3. Kemampuan bidan mendeteksi kasus resiko tinggi dan kepatuhan melakukan rujukan secara terencana ke Rumah Sakit masih harus ditingkatkan.
4. Sistem dan alur rujukan kasus gawat darurat maternal neonatal masih harus diatur lebih lanjut serta semua fasyankes juga harus patuh.
5. Tenaga kesehatan terlatih kemampuan kegawat daruratan maternal neoanatal masih kurang.

Tabel 2.51
Jumlah Kematian Ibu
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016–2020

No	Wilayah	Jumlah Kematian Bayi (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Padang Lawas	7	5	8	6	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

3. Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Rumah sakit

Banyaknya Puskesmas di Kabupaten Padang Lawas tahun 2020 berjumlah 16 unit, dan untuk Poliklinik berjumlah 7 unit sedangkan jumlah pustu yang berada di Kabupaten Padang Lawas tahun 2020 sebanyak 37 unit. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

Wilayah	Jumlah Penduduk	Puskesmas	Poliklinik	Pustu
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
Kabupaten Padang Lawas	286,627	16	7	37

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Banyaknya rumah sakit di Kabupaten Padang Lawas tahun 2020 berjumlah 1 rumah sakit daerah dan 1 rumah sakit swasta. untuk Provinsi Sumatera Utara jumlah rumah sakit daerah sebanyak 33 rumah sakit dan untuk rumah sakit swasta sebanyak 147 rumah sakit. Provinsi Sumatera Utara juga memiliki rumah sakit umum pemerintah sebanyak 17 rumah sakit, 3 rumah sakit jiwa/paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah dan 8

rumah sakit AD/AU/AL/POLRI. Sedangkan Kabupaten Padang Lawas tidak memiliki rumah sakit umum pemerintah, rumah sakit jiwa/paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah dan rumah sakit AD/AU/AL/POLRI. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.53
Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

No	Wilayah	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	Rumah Sakit Daerah	Rumah Sakit Swasta	Total
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	Kabupaten Padang Lawas	–	–	–	1	1	2
2	Provinsi Sumatera Utara	17	3	8	33	147	208

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

4. Jumlah Tenaga Medis

Jumlah tenga medis tersebar di seluruh Kabupaten Padang Lawas terdiri dari Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, dan Tenaga Kefarmasian mengalami kenaikan pada tahun 2020. Tenga medis Dokter Pada tahun 2016 sebanyak 32 jiwa berkurang menjadi 15 jiwa pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 bertambah menjadi 108 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54
Jumlah Tenaga Medis
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016–2020

No	Tenaga Medis	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokter	32	23	16	15	108
2	Dokter Gigi	7	6	2	-	11
3	Perawat	136	146	107	95	215
4	Bidan	588	410	584	546	693
5	Tenaga Kefarmasian	52	15	13	9	33

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Tahun 2021

5. Cakupan Balita Gizi Buruk

Data cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kabupaten Padang Lawas yang tertinggi terdapat pada tahun 2018 yaitu sebanyak 100 jiwa balita gizi buruk yang mendapat perawatan, sedangkan yang terendah pada tahun 2016 sebanyak 34 jiwa balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.55
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020

No	Wilayah	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten PadangLawas	34	89	100	83	82

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

6. Cakupan Balita Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Intervensi stunting dengan jumlah balita status sangat pendek di Kabupaten Padang Lawas terbanyak terdapat pada Kecamatan Batang Lubu Sutam yaitu sebanyak 66 jiwa dari 673 jiwa balita, Sedangkan yang paling sedikit terdapat pada beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Barumun 1 jiwa balita, Kecamatan Ulu Sosa 1 jiwa balita, Kecamatan Sosa Julu sebanyak 1 jiwa balita dan Kecamatan Barumun Tengah berjumlah 2 jiwa balita. Selain itu, di Kabupaten Padang Lawas juga ada beberapa Kecamatan yang tidak mempunyai angka intervensi stunting dalam penurunan terintegrasi balita dengan status sagat pendek yaitu terdapat pada Kecamatan Ulu Barumun, Barumun Barat, Sihapas Barumun dan Kecamatan Barumun Baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.56
Data Balita Stunting Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Balita	Balita Dengan Status "Sangat Pendek"	Balita Dengan Status "Pendek"	Total	%
1	Sosopan	Sosopan	766	30	90	120	15,67
2	Ulu Barumun	Paringgonan	1.523	-	30	30	1,97
3	Barumun	Sibuhuan	1.405	14	20	34	2,42
		Tanjung Botung	594	8	90	98	16,50
4	Barumun Selatan	Batang Bulu	625	28	77	105	16,80
5	Sosa	Pasar Ujung Batu	1.398	7	26	33	2,36
6	Huta Raja Tinggi	Huragi	1.905	7	39	46	2,41
		Ujung Batu III	382	26	42	68	17,80
		Ujung Batu I	774	51	123	174	22,48
7	Batang Lubu Sutam	Pinarik	673	66	103	169	25,11
8	Lubuk Barumun	Latong	1.319	1	6	7	0,53
9	Aek Nabara Barumun	Padang Garugur	1.228	6	19	25	2,04
10	Barumun Tengah	Binanga	1.346	2	9	11	0,82
11	Barumun Barat	Gading	401	-	8	8	2,00
12	Huristak	Huristak	1.361	8	87	95	6,98
13	Sihapas Barumun	Sihapas	491	-	2	2	0,41
14	Barumun Baru	Sibuhuan	1.105	-	7	7	0,63

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Balita	Balita Dengan Status "Sangat Pendek"	Balita Dengan Status "Pendek"	Total	%
15	Ulu Sosa	Pasar Ujung Batu	822	1	5	6	0,73
16	Sosa Julu	Pasar Ujung Batu	738	1	14	15	2,03
17	Sosa Timur	Pinarik	793	24	73	97	12,23
Kabupaten Padang Lawas			**19.649**	**280**	**870**	**1.150**	**5,85**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Status gizi bayi normal usia 0-59 bulan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 92,60 persen, terendah tahun 2018 sebesar 73,50 persen. Sementara status gizi bayi gemuk usia 0-59 bulan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 17,00 persen, terendah tahun 2020 sebesar 1,10 persen. Untuk status gizi bayi sangat kurus+kurus usia 0-59 bulan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 17,60 persen, terendah tahun 2020 sebesar 2,40 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.57
Status Gizi Bayi Usia 0-59 Bulan berdasarkan Hasil Pemantauan Status Gizi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016–2020

No	Tahun	Persentase				
		Sangat Kurus	Kurus	Normal	Gemuk	Sangat Kurus+Kurus
1	2016	4,00	13,60	76,70	5,60	17,60
2	2017	5,40	8,70	81,80	4,20	14,10
3	2018	3,10	6,30	73,50	17,00	9,40
4	2019	1,20	3,50	81,30	13,80	4,70
5	2020	0,04	2,36	92,60	1,10	2,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

7. Tingkat Capaian Target SPM Urusan Kesehatan

Tingkat capaian target SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Padang Lawas mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.58
Realisasi SPM Bidang Kesehatan

Bidang/JenisLayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kesehatan									
Pelayanan Kesehatan Dasar	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%	2020	95	74	63	45,0	54	95%
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	2020	80	12,5	4,9	51,9	38,2	80%
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	2020	57	87	68,5	42,6	10,9	90%
	Cakupan pelayanan nifas	90%	2020	90	88,7	62,8	58,2	43,2	90%
	Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	80%	2020	80%	22	21	14,9	12,42	80%
	Cakupan kunjungan bayi	90%	2020	90%	81	95	89,3	70,73	90%
	Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	2020	36%	27	27	29,9	78	100%
	Cakupan pelayanan anak balita	90%	2020	90	74,7	80	80	40	90%
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100%	2020	100%	89	98	98	_	100%
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	2020	100%	100	100	100	100	100%
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	2020	70%	52	98	61	100	100%
	Cakupan peserta KB aktif	70%	2020	85%	54	64	81,2		70%

Bidang/JenisLayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%	2020	100%	100	100	100	100	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	2020	100	100	100	100	100	100%
Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	2020	100	100	100	100	100	100%
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/ Kota	100%	2020	100%	100	100	100	100	100%
Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	2020	100%	100	100	100	100	100%
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	2020	80	71	31	31	86,5%	80%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1. Pekerjaan Umum

1) Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan dapat dilihat dari panjangnya jalan kabupaten dalam kondisi baik lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah panjang seluruh jalan kabupaten. Tahun 2020 kondisi jalan yang paling banyak terdapat pada kondisi jalan dengan status rusak berat sebesar 26,91 persen, sedangkan kondisi jalan baik merupakan kondisi jalan yang persentasenya paling kecil yaitu sebesar 17,74 persen. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi panjang jaringan jalan kabupaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.59
Rekapitulasi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016–2020

Tahun	Kondisi Jalan Kabupaten (Km)									
	Baik	%	Sedang	%	Rusak Ringan	%	Rusak Berat	%	Jumlah	%
2016	102.551	9,29	108.695	9,84	475.918	43,10	416.939	37,76	1.104.103	100
2017	137.044	12,41	106.939	9,69	458.983	41,57	401.138	36,33	1.104.104	100
2018	159.165	14,42	106.413	9,64	446.730	40,46	391.796	35,49	1.104.104	100
2019	163.069	14,77	124.815	11,30	403.988	36,59	412.232	37,34	1.104.104	100
2020	195.896	17,74	355.636	32,21	255.488	23,14	297.084	26,91	1.104.104	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan sedang di bangun dapat dilihat dari berapa banyaknya jumlah jembatan di Kabupaten Padang Lawas. Tahun 2020 kondisi jembatan yang baik merupakan jumlah jembatan yang paling banyak yaitu 55 unit jembatan, Sedangkan ada 4 unit jembatan di tahun 2020 yang sedang di bangun. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah jembatan serta kondisinya di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.60
Jumlah Jembatan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 – 2020

No	Kondisi	Jumlah Jembatan Provinsi (Unit)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik	31	44	47	49	55
2	Kondisi Sedang	32	36	39	39	38
3	Kondisi Rusak	24	20	18	18	22
4	Kondisi Sedang Dibangun	1	2	3	2	4
Total		72	88	102	107	108
Panjang Jembatan (M)		2.029,08	2.229,08	2.609,68	2.842,68	2.870,68

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2) Rasio Jaringan Irigasi

Indikator Kinerja Utama dalam pengelolaan sumber daya air khususnya dalam pengelolaan irigasi adalah Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang sumber daya air yakni terpenuhinya persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya sebesar 40 persen pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 45 persen.

Tahun 2020 jumlah jaringan irigasi di Kabupaten Padang Lawas dalam kondisi sedang yang terbanyak yaitu sebesar 126.154 meter, sedangkan dengan kondisi rusak berat merupakan yang paling terkecil yaitu sebesar 3.936 meter. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.61
Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Kondisi	Panjang Irigasi (meter)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kondisi Baik	10.851,5	28.092	35.605	51.458	54.517
2	Kondisi Sedang	56.778,0	56.778	145.067	129.213	126.154
3	Kondisi Rusak Ringan	18.926,0	18.926	5.995	5.995	9.174
4	Kondisi Rusak Berat	37.852,0	30.898	2.595	6.995	3.936
Jumlah (meter)		**124.407.5**	**134.697**	**189.262**	**193.661**	**193.781**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Pemanfaatan fungsi jaringan irigasi dalam keadaan baik dilihat berdasarkan persentase fungsi layanan irigasi yang optimal. Selama tahun 2016-2020 menunjukkan persentase yang fluktuatif. Adanya peningkatan, namun belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Perkembangan persentase fungsi layanan irigasi permukaan dalam keadaan optimal tahun 2020 sebesar 28,13 persen merupakan persentase tertinggi selama 5 tahun terakhir, dan 8,72 persen di tahun 2016 merupakan persentase paling sedikit dalam mengoptimalkan layanan irigasi di Kabupaten Padang Lawas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Persentase Fungsi Layanan Irigasi Kewenangan
Dalam Keadaan Optimal Tahun 2016 - 2020

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2016-2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Optimalisasi Layanan Irigasi Permukaan (%)	8,72	20,85	18,81	26,54	28,13
Optimalisasi Layanan Jaringan Irigasi Rawa (%)	-	-	-	-	-

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

3) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan

Penyediaan Air Baku bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampungan air untuk penyediaan air bagi kebutuhan pertanian, kebutuhan air rumah tangga (air minum dan air bersih) dan keperluan lainnya. Penyediaan air baku dalam bentuk Waduk/Embung/Situ di Kabupaten Padang Lawas dalam keadaan optimal selama 5 tahun terakhir adalah di tahun 2020 jumlah embung di rehabilitasi sebanyak 6 unit, sedangkan untuk embung yang terbangun dan sarana air baku dalam bentuk waduk/embung/situ terbangun/terehabilitasi sebanyak 1 unit. Namun meskipun demikian belum mencapai target sebagaimana yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Penyediaan Air Baku Dalam Bentuk Waduk/Embung/Situ
Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2014-2018				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sarana Air Baku dalam bentuk Waduk/Embung/Situ (Unit) terbangun/ terehabilitasi	-	1	2	3	1
Jumlah Embung terbangun	-	-	2	2	1
Jumlah Embung di rehabilitasi	3	5	4	2	6

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.1.3.2. Penataan Ruang

Indikator Kinerja Utama Sub Urusan Penataan Ruang adalah Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Sub bidang penataan ruang, yakni persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, capaian kinerja ini masih belum tercapai sesuai dengan target yang diharapkan dikarenakan hingga akhir tahun 2017 fokus penyelenggaraan penataan ruang adalah masih terkait proses legalisasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan target memiliki dokumen dan regulasi penataan ruang hingga rencana rinci tata ruang.

Tabel 2.64
Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

Bidang/JenisLayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
				2016	2017	2018	2019	2020
PekerjaanUmum								
Sumber Daya Air	Tersedianya air baku utk memenuhi kebutuhan pokok minimal setiap hari	40%	Setiap Tahun	7%	10%	12%	15%	30%
	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	50%	Setiap Tahun	10	20	30	40	45
Jalan								
Jaringan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kab/ kota (aksessibilitas)	100%	Setiap Tahun	60	70	85	92	99
	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per-individu melakukan perjalanan (mobilitas)	80%	Setiap Tahun	62,6	63,7	64,51	66	73
Ruas Jalan	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan)	60%	Setiap Tahun	19,13	22,1	24,1	26,07	49,95
	Tersedianya jalan yang menjamin kenderaan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	60%	Setiap Tahun	19,13	22,1	24,1	26,07	49,95
	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	25%	Setiap Tahun	9,3	12,41	14,42	16,02	17,74
Air Minum	Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan	25%	Setiap Tahun	5%	7%	10%	13%	15%

Bidang/JenisLayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
				2016	2017	2018	2019	2020
	bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari							
Sanitasi lingkungan								
Air limbah	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai		Setiap Tahun	-	-	-	-	
	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota		Setiap Tahun	-	-	-	-	
Pengelolaan sampah	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		Setiap Tahun	-	-	-	-	
	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan		Setiap Tahun	-	-	-	-	
Drainase	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm, selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali dalam setahun	35%	Setiap Tahun	10%	15%	20%	25%	30%
Permukiman Kumuh Perkotaan	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		Setiap Tahun	-	-	-	-	
Penataan bangunan dan lingkungan	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kab/ Kota		Setiap Tahun					
	Tersedianya pedoman Harga standard Bangunan Gedung Negara di kab/ kota	100%	Setiap Tahun	100%	-	-	-	100%
Jasa Konstruksi	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyarakat lengkap		Setiap Tahun	-	-	-	-	
	Tersedianya sistem informasi Jasa Konstruktur		Setiap Tahun	-	-	-	-	
Penataan Ruang	Tersedianya informasi mengenai RTRW Kab/ Kota beserta rencana rincinya		Setiap Tahun	-	-	-	-	

Bidang/JenisLayanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
				2016	2017	2018	2019	2020
	melalui peta analog dan peta digital							
	Terlaksananyaa penjaringan masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukaan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang		Setiap Tahun	-	-	-	-	
	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTRW kab/ kota beserta rencana rincinya		Setiap Tahun	-	-	-	-	
	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran dibidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja		Setiap Tahun	-	-	-	-	
	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan		Setiap Tahun					

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.1.3 Perumahan Rakyat

Konteks pembangunan perumahan dan permukiman secara tersirat telah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain UUD 1945, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut diantaranya meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 648.II/058-3/KPTS/2018 tanggal 06 Februari 2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Padang Lawas dengan total luas sebesar 234,42 Ha. Tingkat kekumuhan di Kabupaten Padang Lawas secara umum dikategorikan dengan kekumuhan sedang. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Kabupaten Padang Lawas

No	Nama Lokasi		Luas Kawasan (KM²)	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Kependudukan		Legalitas Lahan	Tingkat Kekumuhan
	Kel/Desa	Kecamatan			Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ KM²)		
1	Kel, Pasar Sibuhuan LK, I	Barumun	1	7,24	3,071	3,701	Masyarakat	Sedang
2	Kel, Pasar Sibuhuan LK, II	Barumun	1,5	7,02	3,924	2,616	Masyarakat	Sedang
3	Kel, Pasar Sibuhuan LK, III	Barumun	1,5	7,24	3,189	2,126	Masyarakat	Sedang
4	Kel, Pasar Sibuhuan LK, IV	Barumun	2	7,24	3,146	1,573	Masyarakat	Sedang
5	Kel, Pasar Sibuhuan LK, VI	Barumun	2	4,25	2,030	1,015	Masyarakat	Ringan
6	Binabo Julu	Barumun	7,33	7,33	536	73,12	Masyarakat	Sedang
7	Sibuhuan Julu	Barumun	9,00	9,19	1,640	182,2	Masyarakat	Sedang
8	Hasahatan Jae	Barumun	9,00	3,63	1,873	208,2	Masyarakat	Sedang
9	Siolip	Barumun	8,50	5,08	1,925	2265	Masyarakat	Sedang
10	Simaninggir	Barumun	9,00	5,08	88	9,77	Masyarakat	Sedang
11	Saba Hotang	Barumun	21,66	3,01	765	35,32	Masyarakat	Sedang
12	Bulu Sonik	Barumun	7,00	5,08	781	111,60	Masyarakat	Ringan
13	Hasahatan Julu	Barumun	18,00	7	1,692	94	Masyarakat	Sedang
14	Sigorbus Jae	Barumun	8,50	7,24	230	27,00	Masyarakat	Ringan
15	Janji Lobi	Barumun	12,00	8,91	3,090	25,750	Masyarakat	Sedang
16	Pagaran Bira Julu	Sosopan	24	2,36	719	29,96	Masyarakat	Sedang
17	Pagaran Bira Jae	Sosopan	26	6	1,627	62,58	Masyarakat	Sedang
18	Siundol Jae	Sosopan	22	3,99	912	41,45	Masyarakat	Berat

No	Nama Lokasi		Luas Kawasan (KM²)	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Kependudukan		Legalitas Lahan	Tingkat Kekumuhan
	Kel/Desa	Kecamatan			Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ KM²)		
19	Huta Baru Siundol	Sosopan	29	2,57	719	24,79	Masyarakat	Sedang
20	Aek Bargot	Sosopan	28	0,89	937	33,46	Masyarakat	Berat
21	Handang Kopo	Ulu Barumun	5	4,97	675	135	Masyarakat	Sedang
22	Pagaran Batu	Ulu Barumun	9	2,80	1,147	127,44	Masyarakat	Ringan
23	Siraisan	Ulu Barumun	10,5	2,95	1,920	182,86	Masyarakat	Sedang
24	Tanjung	Ulu Barumun	9	6,1	1,331	147,89	Masyarakat	Ringan
25	Paringgonan	Ulu Barumun	36,70	7,2	3,741	9458	Masyarakat	Sedang
26	Mananti Sosa Jae	Huta Raja Tinggi	5	6,94	3,101	620,20	Masyarakat	Sedang
27	Padang Matinggi	Barumun Tengah	7,65	3,4	190	24,84	Masyarakat	Ringan
28	Gunung Malintang	Barumun Tengah	25,96	4,2	315	12,13	Masyarakat	Sedang
29	Unte Rudang	Barumun Tengah	9,18	1,95	1,185	129,08	Masyarakat	Sedang
30	Bahal Batu	Barumun Tengah	6,75	3,08	212	31,41	Masyarakat	Sedang
31	Sibatu Loting	Barumun Tengah	8,4	8,31	699	83,21	Masyarakat	Sedang
32	Pasar Binanga	Barumun Tengah	15,51	9,08	3,143	202,64	Masyarakat	Sedang
33	Siolit	Barumun Tengah	8,55	8,55	343	40,12	Masyarakat	Sedang
34	Pp Makmur	Barumun Tengah	11,20	11,20	593	52,95	Masyarakat	Sedang
35	Bara-Batu	Barumun Tengah	6,68	5,89	217	32,49	Masyarakat	Sedang
36	Aek Nabara Tonga	Aek Nabara Barumun	9,76	4,5	1,512	50,81	Masyarakat	Sedang
37	Sayur Mahincat	Aek Nabara Barumun	27,18	5,01	598	22	Masyarakat	Sedang
38	Parsombahan	Lubuk Barumun	14	2,5	540	38,57	Masyarakat	Sedang
39	Sidomulio	Barumun Selatan	2,5	2,01	690	276	Masyarakat	Sedang
40	Sayur Mahincat	Barumun Selatan	17,5	5,86	1,729	98,80	Masyarakat	Sedang
41	Panarian	Barumun Selatan	15	2,05	778	51,87	Masyarakat	Sedang
42	Harang Jae	Sosa	6	3	316	52,67	Masyarakat	Sedang
43	Horuon	Sosa	20	3,02	494	24,70	Masyarakat	Sedang
44	Tanjung	Sosa	4	4,3	300	75	Masyarakat	Sedang
45	Aer Bale	Sosa	25	5,2	667	26,68	Masyarakat	Sedang

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Tabel 2.66
Realisasi SPM Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman Perhubungan

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi				
					2016	2017	2018	2019	2020
Perhubungan									
Angkutan Jalan	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	99%	2020	19,67	20,00	20,00	20	20
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota,	99%	2020	23,60	20,00	20,00	20	20
	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek,	99%	2020	13,64	13,64	13,64	13,36	13,36
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek,	99%	2020	-	-	-	-	-

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi				
					2016	2017	2018	2019	2020
	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota,	99%	2020		-	-		-
	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji,	99%	2020	-	-	-	-	-
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal,	99%	2020	-	-	-	-	-
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor,	99%	2020	-	-	-	1	1
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota,	99%	2020	50,00	-	-	-	-

Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas waktu Pencapaian	Realisasi				
					2016	2017	2018	2019	2020
		Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	99%	2020	33,33	33,33	33,33	40	40
	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota,	99%	2020	5,13	5,13	5,13	5,125	5,13
Perumahan									
Perumahan	Rumah Layak Huni Dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	60,900	100%	61	62	63	65	66
		Cakupan rumah layakhuniterjangkau	60,900	100%	61	62	63	65	66
	Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang di Dukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	55%	2020	50%	52%	53%	54%	55%

Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2021

2.3.1.4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian Indikator urusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 antara lain adalah cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas), tingkat penyelesaian pelanggaran k3, cakupan pelayanan bencana kebakaran, tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran dan persentase penegakan peraturan daerah. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 tingkat penyelesaian pelanggaran k3, tingkat waktu tanggap layanan wilayah manajemen kebakaran dan persentase penegakan peraturan daerah mempunyai nilai persentase yang sama. Sedangkan cakupan pelayanan bencana kebakaran mengalami nilai yang fluktiatif. Selain itu, cakupan petugas perlindungan masyarakat tidak ada nilainya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.67
Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	-	-	-	-	-
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100	100	100	100	100
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	90	85	80	79	78
Tingkat Waktu Tanggap Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	>15	>15	>15	>15	>15
Persentase Penegakan Peraturan Daerah	95%	95%	95%	95%	95%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Tabel 2.68
Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
				2016	2017	2018	2019	2020
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat								
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	-	-
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota	100	2020	92	96	93	94	97
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/ kota	100	Akhir Tahun	90	85	80	79	78
	(Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	>15	Sampai dilokasi	>15	>15	>15	>15	>15

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Padang Lawas 2021

2.3.1.5.6. Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS, pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalisme lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial guna untuk mendukung penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tahun 2020 terlihat jelas bahwa persentase PMKS yang tertangani masih sangat cukup rendah yaitu 0,24 persen. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel indikator kinerja urusan sosial di bawah ini :

Tabel 2.69
Capaian Indikator Urusan Sosial
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	3,18	3,23	4,29	1,89	0
PMKS yang tertangani (%)	5,81	5,78	6,84	2,01	0,24
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	0	0	0	70,13	77
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	0	0	0	0	0
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	2,63	2,55	2,55	0	0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Tabel 2.70
Realisasi SPM Bidang Sosial

No,	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2016	2017	2018	2019	2020
VI	**Sosial**								
	Pelaksanaan Program/ Keg bidang Sosial Skala Kab/ kota								
	Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesra (PMKS) Skala Kab/ Kota	Persentase (%) PMKS Skala Kab/ Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	2	2024	-	-	-	2	2,22
	Pelaksanaan kegiatan sosial bagi PMKS Skala Kab/ Kota	Persentase (%) PMKS skalaKab/ Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	1	2024	-	-	-	0	0
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Skala Kab/ kota								
	Penyediaansarana dan prasarana panti sosial skala Kab/ kota	Persentase (%) pantisosialskalakab/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	1	2024	-	-	-	0	0
	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala Kab/kota	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social	1	2024	-	-	-	0	0
	Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala kab/ kota								

No,	Bidang/Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi				
					2016	2017	2018	2019	2020
	Bantuan sosial bagi korban bencana skala kab/ kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/ kota yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	100	2024	-	-	-	70,13	100
	Evaluasi korban bencana skalakab/ kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana tanggap darurat lengkap	100	2024	-	-	-	0	0
	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kab/ kota								
	Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten/ kota	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	1	2024	-	-	-	1	0

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi bidang urusan; Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Indikator kinerja urusan tenaga kerja dari tahun 2016-2020 di Kabupaten Padang Lawas yang tidak ada angkanya yakni keselamatan dan perlindungan dan rasio kelulusan S1/S2/S3. Meskipun demikian ada beberapa Capaian Indikator kinerja urusan tenaga kerja yang nilainya fluktuatif. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pasa tabel di bawah ini :

Tabel 2.71
Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2	4	2	9	20
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	3	4	2	4	-
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	118	154	209	188	199
Keselamatan dan perlindungan	-	-	-	-	-
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	281	1.772	5.689	6.751	7.212
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	64	48	64	-	68
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	-	-	20	-	20
Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Total Jumlah angkatan kerja berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang di tamatkan Kabupaten Padang Lawas setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebanyak 123.783 orang meningkat menjadi 143.082 orang di Tahun 2020.

Tabel 2.72
Jumlah Angkatan Kerja berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2018 – 2020

PENDIDIKAN	2018	2019	2020
SD	42.027	49.476	50.951
SMP	33.735	31.181	36.152
SMA	31.111	28.264	32.699
SMK	6.806	7.721	8.647
D I/II/III	3.004	3.654	4.371
DIV/UNIVERSITAS	7.100	8.557	10.262
TOTAL	**123.783**	**128.853**	**143.082**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2021

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Proporsi kursi yang di duduki perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 1 orang, persentase pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Padang Lawas adalah sebanyak 21 persen. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.73
Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

No	Wilayah	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Persentase Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD
1	Kabupaten Padang Lawas	7	1	21%	0,0033

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun Rasio Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Padang Lawas adalah sebesar 0,03 persen dengan jumlah kekerasan sebesar 20 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.74
Rasio Kekerasan Perempuan Dan Anak
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

No	Wilayah	Jumlah Kekerasan	Jumlah Rumah Tangga	Rasio Kekerasan (%)
1	Kabupaten Padang Lawas	20	64.930	0,03

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.2.3. Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan. Ketersediaan pangan utama (Kg) Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan yang fluktuatif. Tahun 2020 ketersediaan pangan utama Kabupaten Padang Lawas sebesar 230.115,00 Kg, dengan jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita sebesar Rp 8.280.000 kapita per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.75
Capaian Indikator Urusan Pangan
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	200.090,00	205.060,00	230.115,00	224.646,75	230.115,00
Ketersediaan energi (kkl/kap/hr) dan protein perkapita (kap/hr)	E=1840 P=43,25	E=1774 P=40,37	E=2000 P=51,06	E=1900 P=55	E=2000 P=51,06
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	–	–	–	–	–
pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (rp/kap/thn)	7.500.000	7.812.000	8.118.000	8.172.000	8.280.000
konsumsi beras (rp/kap/thn)	1.276.000	1.276.000	1.245.440	1.276.500	1.276.500
konsumsi ikan (rp/kap/thn)	550.000	574.000	638.080	1.460.600	1.451.800

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.2.4. Pertanahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA), urusan pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan penataan dan tercapainya perumusan kebijakan dalam urusan pertanahan. Banyaknya jenis sertifikat menurut jenis hak atas tanah di Kabupaten Padang Lawas sangat mempengaruhi tingkat pembangunan dengan surat sertifikat yang sudah semakin berkembang. Tahun 2020 jenis hak milik di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 107 sertifikat, hal yang sama juga terdapat pada hak pakai sebesar 107 sertifikat. Sedangkan, untuk hak guna bangunan dan hak guna usaha sebanyak 2 sertifikat, dan untuk hak pengelola belum ada data jenis hak sertifikat tersebut di Kabupaten Padang Lawas. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Banyaknya Sertifikat Tanah yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

Wilayah	Hak Milik	Hak Guna Bangunan	Hak Pakai	Hak Pengelola	Hak Guna Usaha
Kabupaten Padang Lawas	107	2	107	0	2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Tahun 2020 persentase penanganan sampah yang tertangani di Kabupaten Padang Lawas sebesar 6,09 persen, persentase tersebut merupakan angka tertinggi selama 5 tahun terakhir. Sedangkan, untuk jumlah timbunan sampah yang di daur di Kabupaten Padang Lawas masih belum ada, hal ini di sebabkan untuk perkembangkan dan proses industri tersebut di Kabupaten Padang Lawas masih belum ada. Pada tahun 2020 status pencemaran air sungai di Kabupaten Padang Lawas sebesar 77,78 persen, hal ini menunjukkan bahwa masih belum sadarnya masyarakat melakukan pencemaran air sungai. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016–2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Status Pencemaran Air Sungai (%)	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78
2	Tutupan Lahan (Lahan Kritis) *%)	25	-	-	-	-
3	Persentase Sampah Kabupaten Yang Tertangani (%)	5,03	4,92	5,67	6,09	6,09
4	Jumlah Ruang Terbuka Hijau	-	-	-	-	-
5	Jumlah Peserta Proper Yang Mencapai Minimal Ranking BIRU	2	2	2	2	2
6	Jumlah Timbunan Sampah Yang Di Daur Ulang	-	-	-	-	-
7	Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi GRK	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Jumlah penanganan sampah di Kabupaten Padang Lawas setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Jumlah sampah yang tertangani tertinggi terdapat di tahun 2020 yaitu sebesar 4.380 ton atau 6,09 persen. Sedangkan yang terendah terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 3.390 atau 4,92 persen. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Penanganan Sampah Tertangani
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016–2020

Wilayah	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah (ton)	Persen	Jumlah (ton)	Persen	Jumlah (ton)	Persen	Jumlah (ton)	Persen	Jumlah (ton)	Persen
Kabupaten Padang Lawas	3, 390	5,03	3,390	4,92	3,990	5,67	4,380	6,09	4,380	6,09

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Tahun 2020 perkiraan jumlah penanganan timbunan sampah di Kabupaten Padang Lawas per harinya sebesar 196.867 kg/jiwa/hari, sedangkan jika setahun 71.856.564,50 kg/tahun. Hal tersebut dapat di pengaruhi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Padang Lawas yakni 281.239 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79
Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

Wilayah	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (kg/ jiwa/ hari)	Total Timbulan Sampah (kg/thn)
Kabupaten Padang Lawas	281.239 Jiwa	196.867	71.856.564,50

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan juga diakomodir melalui pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat ditindak lanjuti melalui pembinaan, pengawasan sampai ke penegakan hukum.

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Padang Lawas semakin maningkat. Tahun 2020 penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional berbasis NIK di Kabupaten Padang Lawas sebesar 262.846 jiwa, sedangkan yang terkecil terdapat pada tahun 2016 yaitu sebesar 164.451 jiwa. Untuk cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertinggi di Kabupaten Padang Lawas di tahun 2020 sebesar 152.501 jiwa dan yang terkecil di tahun 2016 sebesar 127.349 jiwa. Sedangkan untuk cakupan penerbitan akta lahir di Kabupaten Padang Lawas tahun tertinggi terdapat di tahun 2020 yaitu 111.483 jiwa dan yang terendah terdapat di tahun 2016 sebesar 68.652 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	51,02	50,12	54,85	88,28	88,04
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	66,66	64,02	75,01	79,44	85,78
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	08,33	17,29	19,05	26,03	50,69
4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	164.451	168.136	169.693	262.059	262.846
6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	127.349	128.910	147.291	150.724	152.501
7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	68.652	72.141	99.109	109.104	111.483

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara keseluruhan, Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik dari realisasi tahun 2016 sebesar 0,23 persen menjadi 10 persen di tahun 2020. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan di tahun 2016 sebesar 10 kelompok menjadi sebesar 16 kelompok di tahun 2020. Rata-rata jumlah kelompok

binaan PKK di tahun 2016 sebesar 10 kelompok menjadi 32 di tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.81
Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	0,23	0,35	0,55	0,67	10
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	10	10	10	10	16
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	10	10	10	10	32
4	Persentase LPM Berprestasi	0,95	0,95	0,90	0,6	10
5	Persentase PKK aktif	0,683	0,683	0,723	0,69	81
6	Persentase Posyandu aktif	1	1,01	1,03	0,69	81

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip "Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan" dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan pewujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk menskenario kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan.

Kuantitas penduduk meliputi jumlah, struktur komposisi, dan pertumbuhan penduduk yang ideal melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan persebaran penduduk yang merata. Jumlah penduduk, komposisi umur, dan laju pertambahan atau penurunan penduduk dipengaruhi oleh fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan tempat) karena ketiga variabel tersebut merupakan komponen - komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk (Lucas,1990:1).

Data terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Padang Lawas sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82
Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (%)	2,42	2,27	2,22	2,20	1,91
2	Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,41	2,33	2,30	2,20	3,77
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	40	40	50	50	100
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	50	45,83	57,89	60	65
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	-	-	-	-
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga (%)	5,2	4,3	3,7	5	4,2
9	Ratio Akseptor KB (%)	-	-	-	-	-
10	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah 15-49 (%)	54,2	86,10	75	78	48,5
11	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1,000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) (%)	13,25	13,10	11,5	12	84
13	Cakupan Pasangan Muda Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun (%)	3,7	12,5	10,2	10	56,6
14	Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	19,03	17,85	20,12	18	25
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	26	28,89	25	30	25
16	Persentasi Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (%)	33,99	24,34	35	41	65
17	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	78	85	90	91	75
18	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	71	86	89	98	65
19	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	76	67	90	91	65
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan	-	-	-	-	-
21	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	50	53	55	65	30
22	Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk (%)	27,7	21,79	30,5	35,5	100
23	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri (%)	9	10	20	50	10
24	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap	100	100	100	100	100

No	Indikator	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Desa/Kelurahan					
25	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Di Gedung Kabupaten/Kota (%)	-	6,21	15,76	78,8	100
26	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Di Faskes (%)	-	5,50	10,21	15	100
27	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan (%)	85	90	100	100	100
28	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa	-	-	100	100	35
29	Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	0,01	0,01	0	0	0
30	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi keluarga (%)	61	62	70	75	70
31	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (%)	51	53	69	76,8	75
32	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita (%)	22,7	25,8	25	30	18
33	Persentasi Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes (%)	-	-	-	-	50

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.2.9. Perhubungan

Sektor perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/atau barang baik dalam wilayah maupun antar wilayah. Pergerakan orang dan/atau barang tersebut merupakan wujud dan interaksi antar masyarakat, baik selaku pribadi maupun kelompok/golongan. Untuk mendukung mobilitas orang/barang harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan/atau barang. Jumlah arus penumpang angkutan umum pada 2016 sebanyak 14.153 jiwa meningkat di tahun 2020 menjadi 15.970 jiwa. Peningkatan ini juga di dukung dengan peningkatan Jumlah KIR angkutan umum dan peningkatan persentase layanan angkutan darat. Jumlah KIR angkutan umum pada tahun 2016 sebesar 3,25 persen menjadi 4,30 persen pada tahun 2020. Peningkatan persentase layanan angkutan darat pada tahun 2016 sebesar 25,927 persen menjadi 27,200 persen pada tahun 2020. Jumlah Orang/ barang yang terangkut angkutan umum juga terus mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sebanyak 15.975.000 jiwa/barang dan pada

tahun 2020 sebanyak 19.605.000 jiwa/barang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.83
Capaian Indikator Urusan Perhubungan
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	14.153	14.203	14.253	14.303	15.970
2	Rasio Ijin Trayek	0,00680	0,07600	0,00122	0,00114	0,00114
3	Jumlah KIR Angkutan Umum	3,25	3,45	3,65	3,85	4,30
4	Persentase Layanan Angkutan Darat	25,927	26,335	26,750	27,172	27,200
5	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	23,56	24,34	25,14	25,97	29,00
6	Pemasangan Rambu-rambu	100	100	40	50	55
7	Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	3,45	3,65	3,85	4,05	4,52
8	Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum	15.975.000	16.486.200	17.013.758	17.558.198	19.605.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Di era globalisasi ini teknologi menjadi kebutuhan untuk mengakses informasi dan meningkatkan kualitas komunikasi. Aktifitas network globalisasi ekonomi yang disebabkan oleh kemajuan dari teknologi informasi bukan hanya mengubah pola produktivitas ekonomi tetapi juga meningkatkan tingkat produktivitas dan pada saat bersamaan juga menyebabkan perubahan struktural dalam kehidupan politik, kebudayaan, kehidupan sosial masyarakat dan juga konsep waktu dalam berbagai lapisan masyarakat.

Sektor komunikasi dan informatika mempunyai peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas dalam upaya mendukung pencapaian clean goverment dan good goverment melalui e-goverment sesuai undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan pada tahun 2020 sebesar 11,10 persen masih lebih kecil dibandingkan dengan cakupan pelayanan telekomunikasi sebesar 81,40 persen. Keberhasilan Kabupaten Padang Lawas terkait dengan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.84
Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Indikator	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	-	3,30	8,58	11,10	11,10
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	-	34,88	58,14	81,40	81,40

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Usaha kecil merupakan peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Indikator keberhasilan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dari persentase jumlah koperasi aktif di kabupaten padang lawas yang terus meningkat dari 0,54 persen pada tahun 2016 menjadin 1,63 persen pada tahun 2020. Jumlah koperasi di Provinsi Sumatera Utara masih lebih besar di bandingkan dengan Kabupaten Padang Lawas dimana pada tahun 2016 sebanyak 5.977 koperasi dan pada tahun 2020 sebanyak 4.593 koperasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.85
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase koperasi aktif	0,54	1,6	3,16	1,02	1,63
2	Jumlah koperasi aktif	2	6	12	4	6
3	Jumlah koperasi Kabupaten Padang Lawas	367	374	380	392	396
4	Jumlah Koperasi di Provinsi Sumatera Utara	5.977	6.073	4.667	4.199	4.593

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Padang Lawas sehinga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di daerah sehingga dicapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Berikut ini disampaikan perkembangan realisasi indikator kinerja urusan penanaman modal dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tabel 2.86
Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)	6	3	3	15	10
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)	1	2	1	1	2
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)	4.186.949.437.662	4.710.477.321.575	306.2328.556.71,6 (Rp. PMDN) 1.276.822,55 ($ PMA)	306.232.855.671.60 (Rp. PMDN) 1.276.822,55 ($ PMA)	406.232.855.671.60 (PMDN) 1.276.822,55 ($ PMA)
4	Rasio daya serap tenaga kerja	0,64	1,16	1,85	1,85	1,95

Sumber :Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Jumlah atlet berprestasi dari tahun 2016 sebanyak 2 orang meningkat menjadi 5 orang pada tahun 2020. Capaian Perkembangan bidang Pemuda dan Olah raga dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.87
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	115	83	81	100	100
2	Persentase wirausaha muda	-	-	-	-	-
3	Cakupan pembinaan Olahraga	2	2	-	4	4
4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	-	-	2	5	5
5	Cakupan pembinaan atlet muda	2	2	2	-	-
6	Jumlah atlet berprestasi	2	5	5	5	5
7	Jumlah prestasi Olahraga	1	-	-	-	-

Sumber :Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.2.14. Statistik

Penyelenggaraan kegiatan statistik daerah selalu rutin dilaksanakan dalam rangka mendukung kebutuhan data-data sebagai informasi dalam pengambilan keputusan pada saat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program-program pembangunan di Kabupaten Padang Lawas. Produk-produk buku statistik disusun bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan yang sudah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2016-2020 adalah Buku Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, Buku Statistik Daerah, Buku Indeks Pembangunan Manusia, Buku Statistik Tenaga Kerja, BukuIndikator Gender, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat, Buku Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Buku Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran, Buku Statistik Penggunaan Lahan Sawah, Buku Analisis Hasil Listing Sensus Ekonomi, Buku Statistik Hotel dan Akomodasi Lain, Buku Indeks Harga Konsumen, Buku Statistik Tanaman Padi dan Palawija, dan BukuPotret Usaha Pertanian Menurut Sub Sektor.

2.3.2.15. Persandian

Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (Sisdina) di Kabupaten Padang Lawas belum berjalan optimal, untuk itu pada RKPD yang baru ini akan dioptimalkan sehingga Jaring Komunikasi Sandi (JKS) dapat berjalan.

2.3.2.16. Kebudayaan

Kabupaten Padang Lawas adalah salah satu daerah yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya yang sangat menarik. Beberapa capaian indikator urusan kebudayaan di Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu mengalami peningkatan dari 3 cagar budaya pada tahun 2016 menjadi 5 cagar budaya di tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.88
Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	1	2	2	2
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6	10	10	10	10
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3	3	3	5	5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.2.17. Perpustakaan

Pasal 2 Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia, pada umumnya yaitu bahwa: Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan atas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Sementara itu pasal 7 ayat 1b menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perpustakaan tidak lagi terbatas menghimpun dan mengelola hasil karya manusia, namun keberadaannya menjadi pusat sumber daya pengetahuan yang dinamis. Perpustakaan merupakan pintu gerbang pengetahuan, menyediakan kebutuhan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan kebebasan dan budaya bagi individu maupun kelompok.

Menurut penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu

orang yang berminat membaca). Berdasarkan World Bank dan International Association for the Evaluation of Education Achievement, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Hasil penelitian BPAD menyatakan bahwa indeks minat baca Provinsi Sumatera Utara berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk Provinsi Sumatera Utara hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasikan buku, menjadikan buku sebagai way of life dan aset negara).

Kabupaten Padang Lawas yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan minat baca yang juga relatif rendah, hal ini dapat dilihat dengan penurunan jumlah pengunjung perpustakaan pertahun sebesar 8.782 orang pada tahun 2016 menjadi 1.912 orang pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.89
Capaian Indikator Urusan Perpustakaan
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Orang)	8.782	47.904	69.457	180.078	1.912
2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah (Eksemplar)	1.763	5.207	5.742	6.656	6.718
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk (%)	0,54	1,75	1,90	1,98	2,59
4	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Thn (Orang)	732	3.992	5.788	16.124	191
5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan (Eksemplar)	5.690	7.605	20.346	24.083	27.157

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.2.18. Kearsipan

Penyelamatan arsip bertujuan untuk menyelamatkan arsip dari orang yang tidak berhak, agar arsip tidak rusak atau hal-hal lain yang menyebabkan hilangnya nilai guna arsip, sehingga tidak dapat disimpan secara berkelanjutan sebagai arsip statis. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis.

Penambahan khasanah arsip statis dilakukan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.Arsip statis diselamatkan dan dilestarikan di lembaga kearsipan, sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.Dengan

penyerahan arsip statis dari lembaga pencipta ke lembaga kearsipan, berarti bahwa tanggungjawab dan hak pengelolaan arsip statis akan berpindah dari lembaga pencipta ke lembaga kearsipan. Hal ini juga berarti akan mengurangi volume arsip yang semakin meningkat di setiap OPD. Itulah sebabnya manajemen kearsipan harus diterapkan agar tidak terjadi penumpukan arsip di tiap OPD. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahanjumlah lain beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yakni Belum optimalnya penataan tertib arsip, dan terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Pengelola Kearsipan.

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Urusan Pariwisata

Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Padang Lawas cukup banyak namun pemerintah daerah belum mengembangkannya secara optimal. Untuk itu pada periode RKPD ini kepariwisataan akan lebih dikembangkan dengan maksimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Potensi Pariwisata Kabupaten Padang Lawas

No	Potensi	Kecamatan
1	Makam Permata Sapihak	Barumun Baru
2	Aek Milas /Air Panas	Ulu Barumun
3	Candi Sipamutung	Siparahu

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas 2021

2.3.3.2. Pertanian

Pertanian merupakan sektor primer yang berkembang di Kabupaten Padang Lawas, hal ini dapat dilihat dari Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB yang terus mengalami peningkatan sebesar 33,73 persen pada tahun 2016 menjadi 34,73 persen pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.91
Capaian Indikator Urusan Pertanian
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	33,73	34,05	34,05	34,63	34,73
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	3,60	3,49	3,49	3,55	3,59
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	41,06	41,66	42,26	43,06	43,58
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)	34,14	37,60	37,60	39,73	45,50
5	Cakupan bina kelompok petani (%)	15,16	15,50	16,00	17,91	19,36

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.3.3. Perdagangan dan Perindustrian

Capaian indikator urusan Perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Padang Lawas salah satunya adalah peningkatan jumlah pedagang yaitu tahun 2016 sebanyak 1.227 pedagang menjadi 1.807 pedagang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92
Capaian Indikator Urusan Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%)	61,53	63,33	63,33	22,00	15,31
2	Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum (Perusahaan)	230	26	358	374	400
3	Jumlah Pedagang (Orang)	1.227	1.275	1.369	1.695	1.807

Sumber : Dinas Koperasi, Peridustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.3.4. Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Padang Lawas mengalami kenaikan, pada tahun 2016 sebanyak 83,7 persen meningkat menjadi 111,82 persen pada tahun 2020, sedangkan perikanan budidaya mengalami penurunan dari 3.690,00 budidaya pada tahun 2016 menjadi 2.899,70 budidaya pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93
Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016–2020

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Tangkap	83,7	219,22	177,45	94,7	111,82
Perikanan Budidaya	3.690,00	3.423,85	5.135,80	3.706,00	2.898,70

Sumber : Dinas Perikanan dan Perternakan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.4. Layanan Penunjang Urusan

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara, RPJMN serta RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025. RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi,

misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hasil capaian bidang perencanaan pembangunan, antara lain sebagai berikut :

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025;
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020–2024;
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD setiap tahun yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- Tersedianya dokumen RTRW Kabupaten Padang Lawas yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018.

2.3.4.2. Keuangan

Kabupaten Padang Lawas memantapkan komitmennya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan. Penetapan APBD Kabupaten Padang Lawas selalu tepat waktu. Tahun 2020 laporan keuangan Kabupaten Padang Lawas terhadap BPK mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.94
Capaian Indikator Urusan Keuangan
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan (Kategori)	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA Terhadap APBD (%)	4,21	4,15	4,17	4,15	4,12
3	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana (%)	6,59	7,45	8,31	9,17	10,03
4	Persentase Belanja Pendidikan (%)	22,4	22,6	22,8	23	23,1
5	Persentase Belanja Kesehatan (%)	13	12	11	11	10
6	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung (%)	74,51	74,28	74,04	73,81	73,57
7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa (Rp)	62.811.648.973,32	63.432.864.716.61	64.050.224.485.81	64.693.789.048,49	65.333.619.773,50
8	Penetapan APBD (Jadwal)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kompetensi merupakan salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja organisasi dan penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya, karena kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (*superior performer*).

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, pengertian dari Indeks Profesionalitas-ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Indeks Profesionalitas-ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang ASN telah memenuhi kewajibannya berdasarkan tugas dan jabatannya. 5 (lima) prinsip untuk mengukur Indeks Profesionalitas-ASN antara lain koheren, kelayakan, akuntabel, dapat ditiru dan multi dimensional. Tahun 2020 persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebesar 10 persen, sedangkan persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 6 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Capaian Indikator Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Bulan)	±4	±4	±4	±4	±4
2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	3,77	4	5	6	6
3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (%)	8,95	8,66	9,00	12,00	10,00
4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Orang)	30	32	32	29	32
5	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah (Orang)	149	151	151	141	153
6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah (Orang)	2.206	2.275	2.350	2.526	2.478

Sumber : Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Capaian indikator urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2016 sampai dengan 2020 semakin meningkat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.96
Capaian Indikator Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	SIPD (%)	85,05	85,17	85,35	90	100
2	E-Planning (%)	-	-	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.3.4.5. Pengawasan

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, sebenarnya pada titik akhirnya adalah kepentingan masyarakat. Untuk itu, aspirasi dan kepentingaan masyarakat harus di akomodasikan dalam setiap peraturan perundang undangan. Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dari tahun ketahun terus meningkat. Kondisi ini perlu ditingkatkan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

2.3.4.6. Sekretariat Dewan

Salah satu fungsi dari Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Anggota DPRD mengalami peningkatan.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Semenjak tahun 2016-2020, perkembangan jumlah investor di Kabupaten Padang Lawas mengalami perbaikan, meskipun belum optimal. Tahun 2020 PMA di Kabupeten Padang Lawas sebanyak 2 (dua) pemodal asing, hal ini menunjukkan bahwa pemodal asing bertambah dari tahun sebelumnya berjumlah 1 (satu) PMA. Untuk lebih jelasnya maka dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.97
Jumlah Investor PMDN/PMA
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016–2020

No	Tahun	PMDN	PMA	Total
1	2016	440	1	441
2	2017	510	1	511
3	2018	706	1	707
4	2019	720	1	721
5	2020	640	2	642

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.4.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN / PMA pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 terdapat 8 realisasi proyek meningkat menjadi 18 realisasi proyek di tahun 2020 sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.98
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016–2020

No	Tahun	Uraian	Persetujuan		Realisasi	
			Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
1	2016	Kabupaten Padang Lawas	6	2.612.570,73	8	4.186.949.437.662,00
		Provinsi Sumatera Utara				
		Nasional				
2	2017	Kabupaten Padang Lawas	3	4.710.477.321.575	3	4.710.477.321.575
		Provinsi Sumatera Utara				
		Nasional				
3	2018	Kabupaten Padang Lawas	2	8.710.477.321.575	2	5.710.477.321.575
		Provinsi Sumatera Utara				
		Nasional				
4	2019	Kabupaten Padang Lawas	15	7.000.000.000	15	7.000.000.000
		Provinsi Sumatera Utara				
		Nasional				
5	2020	Kabupaten Padang Lawas	18	8.244.000.000	18	8.244.000.000
		Provinsi Sumatera Utara				
		Nasional				

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.4.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan, pada tahun 2016 sebesar 0,64 persen menjadi 1,95 persen pada tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016–2020

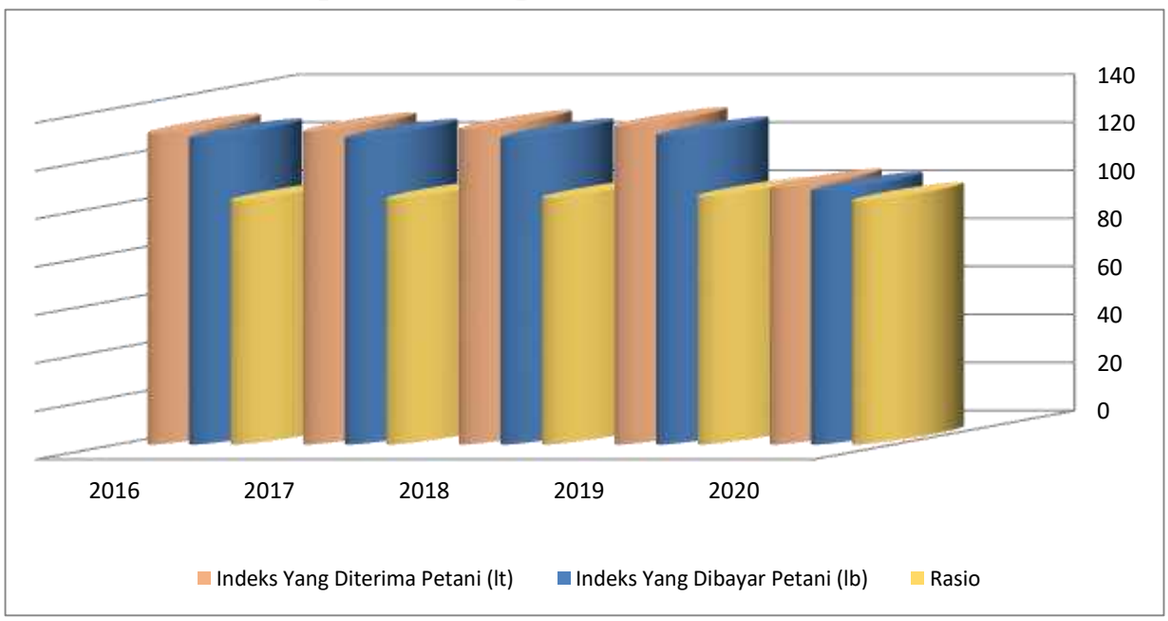
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Kerja Yang Berkerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	7.502	7.502	7.502	7.502	7.502
2	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	32	46	46	46	46
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	0,64	1,16	1,85	1,85	1,95

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.4.4. Nilai Tukar Petani

Untuk rasio perhitungan terhadap nilai tukar petani (NTP) Kabupaten Padang Lawas terbesar pada tahun 2019 yakni mencapai 103,22 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 101,26. dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Gambar 2.13
Nilai Tukar Petani (NTP)
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016–2020



Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Nilai Tukar Petani di Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 101,6 persen, hal ini menunjukkan bahwa petani-petani yang berada di Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2020 telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

2.4.5. Angka Kriminalitas

Data angka kriminalitas di Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan, hal ini merupakan hal baik. Jumlah tindak kriminal pada tahun 2016 sebanyak 782 kasus, mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 820 kasus dan kemudian terus mengalami penurunan kasus menjadi 1 kasus pada tahun 2020. Angka kriminalitas di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.100
Angka Kriminalitas Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016–2020

Noo	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus Narkoba	99	24	24	22	20
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	5	3	3	2	4
3	Jumlah Kejahatan Seksual	12	12	12	9	9
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	305	305	0	3	2
5	Jumlah Kasus Pencurian	313	20	20	11	8
6	Jumlah Kasus Penipuan	48	47	0	2	3
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0
8	Jumlah Tindak Kriminal	782	411	59	49	46
9	Jumlah Penduduk	263.784	269.799	275.515	281.239	261.011
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,003	0,0015	0,0002	0,0002	0,0002

Sumber : Kepolisian Resort Tapanuli Selatan Tahun 2021

2.4.6. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi yang pernah terjadi di Kabupaten Padang Lawas mengalami penurunan, pada tahun 2016 terdapat 19 pengunjuk rasa sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 9 pengunjuk rasa. Jumlah demonstrasi yang pernah terjadi di Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.101
Jumlah Demo Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Politik	14	2	4	6	3
2	Ekonomi	3	-	2	4	4
3	Kasus Pemogokan Kerja	2	2	2	2	2
4	Jumlah Unjuk Rasa	19	4	8	12	9

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

2.4.7. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan Kabupaten Padang Lawas mengalami peningkatan dari 0,534 persen pada tahun 2016 menjadi 0,690 persen pada tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.102
Rasio Ketergantungan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun (Jiwa)	80.006	77.400	77.760	77.760	105.137
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun (Jiwa)	6.922	8.526	9.600	9.600	9.651
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) Dan (2) (Jiwa)	86.928	85.926	87.360	87.360	114.788
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun (Jiwa)	162.678	171.268	172.125	172.125	166.451
5	Rasio Ketergantungan (3) / (4) (%)	0,534	0,502	0,508	0,508	0,690

Sumber : Kabupaten Padang Lawas Dalam Angka Tahun 2021

2.5. Hasil Evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Padang Lawas

2.5.1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2020

Pencapaian indicator kinerja sasaran RPJMD mencerminkan capaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas guna mengetahui pencapaian target indicator kinerja sasaran pada tahun 2020 dilakukan evaluasi terhadap RKPD Kabupaten Padang Lawas tahun 2020, Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RKPD tahun 2020 dapat dicapai, untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Padang Lawas, dan mencapai sasaran pembangunan RPJMD tahun 2020,Capaian indicator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.103
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas
"MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS"

MISI MISI		TUJUAN	SASARAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2018	TARGET 2020	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI
1	Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	1.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berorientasi pada pelayanan publik			Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	65	66	N/A	N/A	N/A
				1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WDP	WTP	-	-	-
						Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	Nilai	C	CC	C	C	<
				1.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik	100	=
				1.1.3	Mewujudkan sistem pengelolaan data informasi pembangunan berbasis teknologi informasi (e-Government)	Implementasi data center	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						Implementasi e-Goverment	Persen	50	70	70	100	=
2. .	Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata	2.1	Meningkatkan kualitas daya saing kehidupan masyarkat			IPM	Poin	67,59	67,65	68,25	100	=
				2.1.1	Pemberantasan buta huruf	Angka Melek Huruf	Persen	99	99	99	100	=

MISI MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2018	TARGET 2020	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI
		2.1.2.	Meningkatnya kualitas dan jangkau layanan jenjang pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,15	8,12	9,01	110	>
				Angka Usia Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,5	13,02	13,03	100	=
		2.1.3	Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	66,69	67,09	67.09	100	=
		2.1.4	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan bagi setiap masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	72,9	73,9	73,3	99,18	<
	2.2	Mewujudkan masyarakat yang memperoleh kehidupan yang layak		Persentase kemiskinan	Persen	8,3	8,25	8,37	101	>
				Indeks Pembangunan Gender	Poin	N/A	86,1	85,75	99,59	<
		2.2.1	Meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan kerja bagi masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5,6	5,5	4,11	74,72	<
		2.2.2	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman	Penurunan Angka kriminalitas	Persen	Menurun	Menurun	N/A	N/A	N/A
		2.2.3	Meningkatnya aksesibiltas dan kualitas penanganan bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	N/A	155	68,5	44.19	<

MISI MISI		TUJUAN	SASARAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2018	TARGET 2020	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI
3.	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah	3.1	Meningkatkan pembangunan ekonomi			Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,71	6	1,18	19,66	<
				3.1.1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	40,07	41,32	52,96	128	>
				3.1.2	Meningkatkan pertumbuhan industri kreatif lokal	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	14,89	15,9	14,62	91,94	=
4.	Meningkatkan pembangunaninfrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan public dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang	4.1	Meningkatkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan			Indeks Gini	Poin	0.2985	0.2585	0.2653	102	>
						Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	N/A	71	N/A	N/A	N/A
				4.1.1	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur, jalan dan transportasi public	Tingkat kemantapan jalan kabupaten (kondisibaik dan sedang)	Persen	27,89	37	49,96	135	>
						Konektifitas jalan	Persen	N/A	85	89	104	>
				4.1.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap	Rasio rumah layak huni	Persen	60,9	61	60.900	99,87	<

MISI MISI		TUJUAN	SASARAN			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2018	TARGET 2020	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI
					perumahan layak, air bersih dan sanitasi	Persentase rumah tangga bersanitasi	Persen	59	60	N/A	N/A	N/A
						Ratio elektrifikasi	Persen	76	97	N/A	N/A	N/A
						Persentase penduduk berakses air bersih/minum	Persen	32	97	15	100	=
				4.1.3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	47	50	48	96	<
5.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal	5.1	Meningkatkan kualitas kehidupanberagama dan kerukunan antar umat beragama			Indeks kerukunan umat beragam	Persen	79	80	80	100	=
				5.1.1	Terwujudnya Padang Lawas sebagai serambi mekah	Jumlah Kegiatan akbar keagamaan	Jumlah	30	30	N/A	N/A	N/A
		5.2	Meningkatkan penguatan budaya dan kearifan local dalam rangka meningkatkan potensi dan berdaya Tarik pariwisata			Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah	750	1.000	740	74	<
				5.2.1	Terwujudnya Penguatan budaya dan kearifan local sebagai bagian karakter sosial	Jumlah Desa Budaya	Jumlah	N/A	1	N/A	N/A	N/A
						Penyelenggan festival seni dan budaya	Jumlah	1	2	2	100	=

MISI MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2018	TARGET 2020	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI
			Jumlah sanggar seni dan budaya yang dibina	Jumlah	2	2	2	100	=
			Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan	Jumlah	N/A	10	10	100	=
			Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	3	5	5	100	=

Sumber :Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021, diolah

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD Tahun 2020

2.6.1 Capaian Indikator Kinerja Utara (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2020

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah dalam rangka pencapaian indicator kinerja tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Padang Lawas yang di sajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.104
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Interpretasi
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini	66,00	65	98,40	<
2	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,65	68,25	100,89	>
3	Persentase Kemiskinan	Persen	8,25	8,37	98,57	<
4	Indeks Pembangunan Gender	Poin	86,10	85,75	99,59	<
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,00	1,18	19,66	<
6	Indeks Gini	Poin	0,259	0,265	102,63	<
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	71	71	100,00	=
8	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	80	80	100,00	=
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	100,00	=
10	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Jenjang Pendidikan	Tahun	9,35	9,01	96,36	<
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,50	4,11	133,82	>
12	Indeks Resiko Bencana	Poin	155,00	68,50	226,28	>

Sumber :Bappeda Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021, diolah

2.6.2. Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Keberhasilan pencapaian target dari kegiatan dan program akan mendorong tercapainya target sasaran perangkat daerah dan lebih lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas tahun 2021 akan memberikan dampak pada pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Padang Lawas. Penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan digunakan untuk mengetahui:

a. Tingkat capaian kinerja yaitu dengan membandingkan antara realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD dengan rencana program dan kegiatandalam RKPD; dan
b. Tingkat capaian (penyerapan) anggaran yaitu membandingkan antara realisasi penyerapan dana/anggaran program dan kegiatan berdasarkan laporan realisasi APBD dengan paguanggaran yang direncanakan dalam RKPD.

Lebih lanjut Evaluasi Pelaksanaan program dan Kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RKPD dapat dilihat pada Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun 2020 Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 2.105
Capaian Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	5.96	6.50	1.18	18,15	<	Belum Tercapai	
2	PDRB Per Kapita	Rupiah	35.931.148	3.997.779.143	28.097.476	0,70	<	Belum Tercapai	48.071.078
3	Indeks Gini	Point	0.2985	0.2585	0.2653	97,44	<	Belum Tercapai	0.1985
4	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	Persen	91.59	90.77	23,87	26.29	<	Belum Tercapai	87.49
5	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	Persen	1.07	1.06	1.05	100,95	>	Melampaui	1.02
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67.59	67.65	68.25	100	=	Sesuai	68.05
7	Angka Melek Huruf	Persen	99	99	99.86	100	=	Sesuai	100
8	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.15	8.12	9,01	110,96	>	Melampaui	8.15
9	Angka Usia Harapan Sekolah	Tahun	12.5	13.02	13,03	100,1	>	Belum Tercapai	-
10	Persentase Balita Gizi	Persen	0.02	0.02	0.016	80	<	Belum Tercapai	0.01

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Buruk								
11	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Persen	0	2	-	-	-	-	1
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	80.2	83.2	86.5	104	>	Melampaui	90
13	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	-	12,71	0,88	6,92	<	Belum Tercapai	14.29
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71.78	74.31	76.93	103	>	Melampaui	83.61
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.1	5.5	4,11	133,82	>	Melampaui	4.90
16	Rasio Penduduk Yang Bekerja	Persen	95.9	96.45	95.34	98,85	<	Belum Tercapai	98.70
17	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 tahun Ke Atas	Persen	-	121.743	95,89	0,08	<	Belum Tercapai	137.020
18	Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I	Persen	50	40	44,91	89,06	<	Belum Tercapai	38
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Niai Index	70 (Baik)	75 (Baik)	75 (Baik)	100	=	Sesuai	Sangat Baik

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
20	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	5.73	6.59	4.25	64,49	<	Belum Tercapai	10.03
21	Pencapaian Skor Pola Pangan harapan (PPH)	Persen	72.9	73.9	73.3	99,19	<	Belum Tercapai	77.9
22	Penguatan Cadangan Pangan	Nilai	1	10	_	_	_	_	10
23	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	6.25	7.8	_	_	_	_	9.02
24	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	34.05	35	34.73	99.22	<	Belum Tercapai	39.00
25	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	Persen	3.49	4.1	3.59	87.56	<	Belum Tercapai	4.50
26	Produksi Sektor Pertanian								
26.1	Produksi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	Persen	42.26	44.26	43.58	98.46	<	Belum Tercapai	52.26
27	Produksi Sektor Perkebunan								
27.1	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap	Persen	1.54	1.56	1.55	99.35	<	Belum Tercapai	1.68

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	PDRB								
27.2	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	Persen	5.73	6	48.02	0.08	<	Belum Tercapai	6.28
27.3	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	Persen	0.52	0.53	0.53	100	=	Sesuai	0.45
27.4	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persen	0.29	0.32	48.02	15	<	Belum Tercapai	0.99
27.5	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	7.14	7.14	7.04	98.59	<	Belum Tercapai	7.30
27.6	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	14.89	15.9	14.5	91.19	<	Belum Tercapai	5.01
27.7	Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri	Persen	17.16	20.00	17.51	87.55	<	Belum Tercapai	67.259.88
27.8	Pertumbuhan Industri	Persen	4.59	5.04	6.25	124	>	Melampaui	5.95
B.	ASPEK DAYA SAING DAERAH								

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Ribu Rupiah	947.257	950.111	992.813	104	>	Melampaui	960.979
2	Nilai Tukar Petani	Nilai	102	105	101	96.19	<	Belum Tercapai	110.42
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkpita	Persen	43.19	44.19	-	-	-	-	48.24
4	Rasio Ketergantungan	Persen	68.99	68.5	54.41	125,90	>	Melampaui	66.00
C.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	Pendidikan								
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	133	135	67.5	50	<	Belum Tercapai	138
1.2	Angka Partisipasi Kasar	Persen	98.32	99.54	106,32	106,81	>	Melampaui	98.52
1.3	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan	Persen	39.89	40.89	37.93	10.78	<	Belum Tercapai	44.03
1.4	Angka Partisipasi Murni								
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	94.2	94.7	98,98	105	>	Melampaui	94.7

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	84.2	84.4	84,74	100,4	>	Melampaui	92.2
1.5	Angka Partisipasi Sekolah								
1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	92.5	94.2	109,67	116,42	>	Melampaui	98.4
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	92.4	92.6	102,96	111,19	>	Melampaui	92.5
1.5.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	98.78	96,2	93.2	96.88	<	Belum Tercapai	
1.6	Angka Putus Sekolah								
1.6.1	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0.1	0.1	0.05	50	<	Belum Tercapai	0.1
1.6.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	1.1	0.5	0.2	9.43	<	Belum Tercapai	0.2
1.6.3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	Persen	2.34	2.12	2.12	2.12	<	Belum Tercapai	2.25
1.7	Angka Kelulusan								
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	Persen	99.99	100	98.83	98.83	<	Belum Tercapai	100

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	Persen	99.8	99.8	97.07	97.26	<	Belum Tercapai	99.9
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	Persen	92.5	92.5	92.5	100	=	Sesuai	95.5
1.8	Angka Melanjutkan (AM)								
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	97.82	98.85	89,5	90,54	<	Belum Tercapai	92.95
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	92.5	92.51	87,35	94,42	<	Belum Tercapai	95.50
1.9	Fasilitas Pendidikan								
1.9.1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Unit	912	952	808	84,87	<	Belum Tercapai	973
1.9.2	Fasilitas Pendidikan	Unit	260	272	147	54,04	<	Belum Tercapai	342
1.9.3	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Nilai	55	190	49	25,79	<	Belum Tercapai	219
1.9.4	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Nilai	112	60	60	60	=	Sesuai	65

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1.9.5	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Nilai	493	412	356	86,41	<	Belum Tercapai	402
1.9.6	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Nilai	932	852	887	104,11	>	Melampaui	984
1.9.7	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Dasar	Nilai	55	50	73.13	146.26	>	Melampaui	53
1.9.8	Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	Nilai	493	494	485	98.17	<	Belum Tercapai	498
1.9.10	Proposi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	Nilai	99	99	99	100	=	Sesuai	99
1.9.11	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki	Persen	48.44	49.871	29.15	58.45	<	Belum Tercapai	53.225
1.9.12	Penduduk Yang Berusi >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	Jiwa	9.420	10.120	6.203	61,29	<	Belum Tercapai	10.243
1.9.13	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	29.41	30.20	34,41	114	>	Melampaui	34,55

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2	Kesehatan								
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	Persen	10.61	10.31	2.75	26,67	<	Belum Tercapai	9.11
2.2	Jumlah Kelangsungan Hidup Bayi	Persen	67.47	67.47	67.09	99,44	<	Belum Tercapai	67.7
2.3	Jumlah Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup	Nilai	25	25	0.3	7,50	<	Belum Tercapai	25
2.4	Jumlah Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup	Nilai	12	12	1.8	15,00	<	Belum Tercapai	12
2.5	Jumlah Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Nilai	70	70	65.6	93,71	<	Belum Tercapai	70
2.6	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Persen	13.5	15.5	0.93	6,00	<	Belum Tercapai	22.8
2.7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	Persen	0.24	0.28	0.02	7,14	<	Belum Tercapai	0.42
2.8	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Persen	0.02	0.02	0,0008	3,83	<	Belum Tercapai	0.04
2.9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Persen	0.35	0.4	0.003	0.13	<	Belum Tercapai	0.5

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.10	Rasio Tenaga Medis Per Sartuan Penduduk	Persen	0.01	0.01	0.2	2.7	<	Belum Tercapai	0.18
2.11	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	Persen	15.7	15.9	18,3	10.9	<	Belum Tercapai	16.7
2.12	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Persen	89.2	100	100	10.9	<	Belum Tercapai	100
2.13	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	51.3	51.5	30	-	-	-	52.3
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen	100	100	100	-	-	-	100
2.15	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar Yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Kapita/Hari)	Persen	100	100	100	100	=	sesuai	100
2.16	Persentase Anak usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	Persen	90.2	93.5	12.6	12.6	<	Belum Tercapai	95.5
2.17	Non Polio AFF Rate Per	Persen	100	100	100	100	=	Sesuai	100

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	100.000 Penduduk								
2.18	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani	Persen	100	100	100	100	=	Sesuai	100
2.19	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	Nilai	70	70	558	100	=	Sesuai	70
2.20	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Nilai	326	373	558	100	=	Sesuai	520
2.21	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Persen	0.02	0.2	-	-	-	-	0.1
2.22	Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	Persen	0.02	0.03	-	-	-	-	0.07
2.23	Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS	Nilai	95	95	0.19	100	=	Sesuai	95
2.24	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	=	Sesuai	100

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.25	Penderita Diare Yang Ditangani	Persen	100	100	100	100	=	Sesuai	100
2.26	Proporsi Anak Balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektidisa	Persen	100	100	-	-	-	-	100
2.27	Proporsi Anak Balita Dengan Deman Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat	Persen	100	100	-	-	-	-	100
2.28	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi	Persen	100	100	0.002	100	=	Sesuai	100
2.29	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir	Persen	100	100	-	-	-		100
2.30	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS	Persen	100	100	100	100	=	Sesuai	100
2.31	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Persen	7.08	7.09	7.09	100	=	Sesuai	17.14
2.32	Cakupan Kunjungan Bayi	Persen	75.1	75.18	3974	70.7	=	Sesuai	75.55

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.33	Cakupan Puskesmas	Persen	133,3	100	94,11	94,11	=	Belun Sesuai	118.67
2.34	Cakupan Pembantu Puskesmas	Persen	13.07	13.27	41	41	=	Sesuai	14.07
2.35	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persen	100	100	4008/54	54	<	Belum Tercapai	100
2.36	Cakupan Pelayanan Nifas	Persen	100	100	3928/43.2	43.2	<	Belum Tercapai	100
2.37	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	Persen	100	100	100	100	=	Sesuai	100
2.38	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	100	100	14737/40	40	<	Belum Tercapai	100
2.39	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	Persen	100	100	-	-	-	-	100
2.40	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat	Persen	100	100	100	100	=	Sesuai	100
2.41	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Persen	100	100	100	100	=	Sesuai	100

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.42	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	Persen	100	100	100	100	=	Sesuai	100
2.43	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	100	100	=	Sesuai	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Pekerjaan Umum								
3.1.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	KM	201.52	242.88	1958.96	80.65	<	Belum Tercapai	552
3.1.2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	Persen	4	3.93	2.85	72.52	<	Belum Tercapai	3.5
3.1.3	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	Persen	24	26	23	88.46	<	Belum Tercapai	50
3.1.4	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	Persen	0.7	0.73	0.7	95.89	<	Belum Tercapai	1.01

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
3.1.5	Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar	Persen	0.17	0.18	0.16	88.89	<	Belum Tercapai	0.22
3.1.6	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	89	92	30	32.61	<	Belum Tercapai	100
3.1.7	Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun	Nilai	23782	29989	27.43	91.46	<	Belum Tercapai	38821
3.1.8	Persentase Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor	Persen	63.29	66.49	10	10	<	Belum Tercapai	79.91
3.1.9	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	39	43	30	30	<	Belum Tercapai	67
3.1.10	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	22.5	26.7	35	35	<	Belum Tercapai	43.50
3.1.11	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	65	75	15	15	<	Belum Tercapai	100
3.1.12	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak,	Persen	35	25	10	10	<	Belum Tercapai	0

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Perkotaan Dan Perdesaan								
3.1.13	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	Persen	92	90	-	-	-	-	82
3.1.14	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Persen	0.15	0.17	0.25	147	=	Sesuai	0.25
3.2	Penataan Ruang								
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	Persen	32	35.45	34.55	97.46	<	Belum Tercapai	49.25
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman								
4.1	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	60.9	61	60.90	99.83	<	Belum Tercapai	66
4.2	Fasilitas Pendidikan	Persen	12.33	12.28	-	-	-	-	11.88
4.3	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	Unit	150	200	12489	6.2	<	Belum Tercapai	200

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Jiwa	606	1450	1201	83	-	-	1450
5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	97	100	=	Sesuai	100
5.3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	100	100	78	67	<	Belum Tercapai	100
5.4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Timee Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	Persen	> 15	> 15	>15	100	>	Melampaui	> 15
5.5	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	Persen	100	100	0,95	100	=	Sesuai	100
6	Sosial								
6.1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	Persen	1.89	1	2.2	220	>	Melampaui	1

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6.2	Persentase PMKS Yang Tertangani (%)	Persen	10	1	2.22	222	>	Melampaui	1
6.3	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%)	Persen	1.75	2	2.22	220	>	Melampaui	2
6.4	Persentas Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya (%)	Persen	2	1	0	0	0	0	1
6.5	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (%)	Persen	100	100	100	100	=	Sesuai	100
6.6	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap (%)	Persen	100	100	0	0	0	0	100

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6.7	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial (%)	Persen	1.84	1	0	0	0	0	1
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
1	Tenaga Kerja								
1.1	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	Kasus	2	3	20	666	>	Melampaui	3
1.2	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	2	2	-	-	-	-	5
1.3	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Jiwa	204	450	199	44,22	<	Belum Mencapai	1000
1.4	Keselamatan Dan Perlindungan (%)	Persen	98	98	-	-	-	-	99
1.5	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Persen	6,422	8,185	7.212	7,35	-	-	10.910

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1.6	Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	Kasus	-	5	-	-	-	-	5
1.7	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Jiwa)	Jiwa	48	68	68	100	=	Sesuai	108
1.8	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan (Jiwa)	Jiwa	20	20	-	-	-	-	27
1.9	Rasio Lulusan S1/S2/S3	Persen	47	52	-	-	-	-	72
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah (%)	Persen	6	7	37	528	>	Melampauii	8
2.2	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR (%)	Persen	0.03	3	3	100	=	Sesuai	3
2.3	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta (%)	Persen	96.5	96	30	31.2	<	Belum Tercapai	96.70
2.4	Rasio KDRT	Persen	0.002	0.003	0.003	100	=	Sesuai	0.001

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.5	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)	Persen	0.5	0.5	20	2.5	<	Belum Tercapai	0.50
2.6	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Persen	49.5	50	66.17	132	=	Sesuai	55
2.7	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100	100	=	Sesuai	100
2.8	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A Dan PPT/PKT Di Rumah Sakit (%)	Persen	48	48.2	55.5	115	>	Melampauii	50
2.9	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Dalam Unit Pelayanan	Persen	95	97	95	97.9	<	Belum Tercapai	98

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Terpadu (%)								
2.10	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (%)	Persen	95	97	95	97.9	<	Belum Tercapai	98
2.11	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (%)	Persen	91	92	100	108	>	Melampaui	97
2.12	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (%)	Persen	86	86.5	100	115	>	Melampaui	88.50
2.13	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (%)	Persen	91	92	133	144	>	Melampaui	97

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.14	Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di SD (%)	Persen	2.5	2.5	2.38	95.2	<	Belum Tercapai	3
2.15	Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di SMP (%)	Persen	1.5	2	1.75	87.5	<	Belum Tercapai	2
2.16	Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di SMA (%)	Persen	1	1.5	1.5	100	=	Sesuai	2
2.17	Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di Perguruan Tinggi (%)	Persen	2	2	2	100	=	Sesuai	2.20
2.18	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun (%)	Persen	1.5	1	1	100	=	Sesuai	1
2.19	Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di Sektor Non Pertanian (%)	Persen	5	5.5	20	27.5	<	Belum Tercapai	6
3	Pangan								
3.1	Ketersediaan Bahan Pangan	Unit	230.115.00	235.717.30	_	_	_	_	255.147.66

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
3.2	Ketersediaan Energi (kkl/kap/hr;) Dan Protein (gram/kab/hr) Perkapita	Energi= kkl/kap/hr Protein = gram/kab/hr	energi = 2000 protein=51.06	energi = 2003 protein=52.00	energi = 2000 protein=51	Tidak Mencapai	<	Belum Tercapai	energi = 2650 protein=78.00
3.3	Pencapaian Skor Pola Pangan harapan (PPH)	Persen	86.4	87	73.3	Tidak Mencapai	<	Belum Tercapai	91
3.4	Penguatan Cadangan Pangan (%)	Persen	5	20	_	_	_	_	100
3.5	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	6.25	7.8	_		_	_	9.02
3.6	Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan (desa)	Desa	30	32	_	_	_	_	40
4	Pertanahan								
4.1	Penyelesaian Izin Lokasi	Izin	4	5	_	_	_	_	7
5	Lingkungan Hidup								
5.1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	IKA	80	80.5	80	94.11	<	Belum Tercapai	79.5

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
5.2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	IKU	60	62	8.2	8.2	<	Belum Tercapai	66
5.3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	Persen	30	31	-	-	-	-	35
5.4	Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketataan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	Persen	100	100	80	80	<	Belum Tercapai	100
5.5	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan	Ada / Tidak Ada	Tidak ada	1	-	-	-	-	3
5.6	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana	Ada / Tidak Ada	Tidak ada	1	-	-	-	-	3
5.7	Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup (penghargaan)	Ada / Tidak Ada	Tidak ada	1	-	-	-	-	1

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
5.8	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota (%)	Persen	100	100	11.11	11.11	<	Belum Tercapai	100
5.9	Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R (%)	Persen	0.75	1	6.09	609	>	Melampauii	3
5.10	Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)	Persen	50	5.3	5.88	110	>	Melampauii	5.70
6	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil								
6.1	Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	Persen	54.69	78.97	88.04	1.11	>	Melampauii	88.88
6.2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Persen	77.44	79.77	80.78	1.01	>	Melampauii	89.78
6.3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Persen	19.96	20.96	50.69	1.04	>	Melampauii	25.48

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
6.4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada Tersedia	-	-	-	-	Ada Tersedia	Ada Tersedia
6.5	Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK	Ada / Tidak Ada	Sudah	-	-	-	-	Sudah	Sudah
6.6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jiwa	149447	156919	152501	0.97	<	Belum Tercapai	190736
6.7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Jiwa	104064	109268	111483	1.02	<	Belum Tercapai	132816
7	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa								
7.1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik	Persen	9.21	10.3	10	97.08	<	Belum Tercapai	24
7.2	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	16	18.3	16	87.43	<	Belum Tercapai	22
7.3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	32	34	32	94.00	<	Belum Tercapai	44
7.4	Persentase LSM Aktif	Persen	5	10	5	50	<	Belum Tercapai	18

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
7.5	Persentase LPM Berprestasi	Persen	10	15	10	66.66	<	Belum Tercapai	19
7.6	Persentase PKK Aktif	Persen	81	81	81	100	=	Sesuai	85
7.7	Persentase Posyandu Aktif	Persen	81	81	81	100	=	Sesuai	85
7.8	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	22.2	23	22.2	97.52	<	Belum Tercapai	27
7.9	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	5	7.2	5	69.44	<	Belum Tercapai	18
8	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	Persen	2.2	2.17	1.91	88	<	Belum Tercapai	2.5
8.2	Total Fertility Rate (TFR) (%)	Persen	2.26	2.21	3.77	58.6	<	Belum Tercapai	2.09
8.3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Dengan 5 Aspek (%)	Persen	50	65	100	153,8	>	Melampauii	85

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB (%)	Persen	50	65	65	100	>	Melampauii	85
8.5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendali Penduduk (%)	Persen	60	70	65	92,9	<	Belum Tercapai	80
8.6	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga (%)	Persen	3	2	4.2	47.6	<	Belum Tercapai	2
8.7	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah 15-49 (%)	Persen	78	80	48.5	60	<	Belum Tercapai	85
8.8	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) (%)	Persen	12	10	84	11.9	>	Melampauii	5
8.9	Cakupan Pasangan Muda Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun (%)	Persen	10	8	56.6	142	>	Melampauii	5

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
8.10	Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	Persen	18	15	25	166	>	Melampauii	10
8.11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	Persen	30	50	25	50	<	Belum Tercapai	70
8.12	Persentasi Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (%)	Persen	41.08	50	65	130	>	Melampauii	65
8.13	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	Persen	92	95	75	78,9	<	Belum Tercapai	100
8.14	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	Persen	90	92	65	70,7	<	Belum Tercapai	100
8.15	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	Persen	92	95	65	68,4	<	Belum Tercapai	100
8.16	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	Persen	65	68	30	44,1	<	Belum Tercapai	80

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
8.17	Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk (%)	Persen	35.5	38	100	263,2	>	Melampauii	65
8.18	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri (%)	Persen	20	25	10	40	<	Belum Tercapai	45
8.19	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan (%)	Persen	100	100	100	100	=	Sesuai	100
8.20	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Di Gedung Kabupaten/Kota (%)	Persen	78.8	80	100	125	>	Melampauii	90
8.21	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Di Faskes (%)	Persen	15	20	100	500	>	Melampauii	40

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
8.22	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan (%)	Persen	100	100	100	100	>	Melampauii	100
8.23	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa (%)	Persen	100	100	35	35	<	Belum Tercapai	100
8.24	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi keluarga (%)	Persen	75	80	70	87,5	<	Belum Tercapai	95
8.25	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (%)	Persen	76.8	80	75	93,8	<	Belum Tercapai	92
8.26	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita (%)	Persen	30	23	18	78,3	<	Belum Tercapai	27

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
8.27	Persentasi Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD Dan APBDes (%)	Persen	N/A	5	10	200	>	Melampauii	50
9	Perhubungan								
9.1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Jiwa	14.303.00	14.621.00	15.970.00	109	>	Melampauii	15.970.00
9.2	Rasio Ijin Trayek	Persen	0.00114	0.00115	0.00114	99.13	<	Belum Tercapai	0.00119
9.3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	3.85	3.94	430	109	>	Melampauii	4.30
9.5	Persentase Layanan Angkutan darat	Persen	27172	27.778.02	27.200	97.91	<	Belum Tercapai	30.339.95
9.6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	25.97	26.55	29	109	>	Melampauii	29.00
9.7	Pemasangan Rambu-rambu	Unit	50	51.12	55	107	>	Melampauii	55.83
9.8	Rasional Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Persen	4.05	4.14	4.52	109	>	Melampauii	4.52

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
9.9	Jumlah Jiwa/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Jiwa/Unit	17.558.198	17.9449.745.00	19.605	1.09	<	Belum Tercapai	19.605.221
10	Komunikasi Dan Informatika								
10.1	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan (%)	Persen	12	16	12	75	<	Belum Tercapai	30
10.2	Cakupan layanan Telekomunikasi (%)	Persen	53	77	53	78	<	Belum Tercapai	100
10.3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon (%)	Persen	28	33	28	84	<	Belum Tercapai	58
10.4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet (%)	Persen	14	19	14	73.68	<	Belum Tercapai	44
10.5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi (%)	Persen	12	17	12	70.58	<	Belum Tercapai	42
10.6	jumlah KIM	Unit	36	48	36	75	<	Belum Tercapai	91
10.7	jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Padang Lawas	Desa/Kelurahan	303	303	303	100	=	Sesuai	303

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
10.8	Jumlah Kantor OPD yang terkoneksi jaringan fiber optik milik pemda	Unit	5	5	5	100	=	Sesuai	9
10.9	Jumlah Kantor OPD yang terkoneksi jaringan fiber optik sewa	Unit	10	9	10	111	>	Melampaui	0
10.10	jumlah kantor OPD d Kabupaten Padang Lawas yang terkoneksi jaringan radiolink	Unit	19	24	19	79.16	<	Belum Tercapai	31
10.11	jumlah SMP di ibu kota kecamatan terkoneksi jaringan	Unit	-	6	-	-	-	-	12
10.12	jumlah Puskemas di ibukota kecamatan terkoneksi jaringan	Unit	-	6	-	-	-	-	12
10.13	kapasitas bandwidth internet berlangganan (mbps)	Mbps	150	180	150	83,33	<	Belum Tercapai	244
10.14	jumlah data center	Unit	1	1	1	100	=	Sesuai	1
10.15	jumlah comand center	Unit	-	1	-	-	-	-	1
10.16	jumlah kantor OPD, Puskesmas di ibukota	Unit	64	69	64	92.75	<	Sesuai	69

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	kecamatan dan SLTP ibu kota kecamatan								
11	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah								
11.1	Persentase Usaha Miko Dan Kecil	Persen	81.25	81.4	0.56	0.68	<	Belum Tercapai	90.00
11.2	persentasi koperasi aktif	Persen	0.09	1.03	1.63	158	>	Melampaui	3
12	Penanaman Modal								
12.1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	CV/PT	3	5	4	80	<	Belum Tercapai	25
12.2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	306.232.855.671.60 (PMDN)	406.232.855.671.60 (PMDN)	406.232.855.671.60	100	=	Sesuai	806.232.855.671.60 (PMDN)
		US	US 1.276.822.55 (PMA)	US 1.326.822.55 (PMA)	1.326.84.55	10	<	Belum Tercapai	US 1.526.822.55 (PMA)
12.3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Persen	1.85	1.95	1.95	100	=	Sesuai	2.35
12.4	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Rupiah	1.254.904.943.876	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	100	=	Sesuai	4.500.000.000.000
13	Kepemudaan Dan Olahraga								

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
13.1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%)	Persen	100	100	100	83	<	Belum Tercapai	100
13.2	Cakupan Pembinaan Olahraga	Jiwa	4	6	0	2	<	Belum Tercapai	14
13.3	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat	Jiwa	5	8	0	0	<	Belum Tercapai	16
13.4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Jiwa	5	7	0	2	<	Belum Tercapai	15
13.5	Jumlah Atlet Berprestasi	Jiwa	5	8	2	5	<	Belum Tercapai	12
13.6	Jumlah Prestasi Olahraga	Jiwa	3	5	1	0	<	Belum Tercapai	17
14	Statistik								
14.1	Tersedianya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi	-	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	-	-	-	Tidak Tersedia
14.2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	100	=	Sesuai	Ada
14.3	Buku "PDRB"	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	100	=	Sesuai	Ada
15	Persandian								

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
15.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah (%)	Persen	_	_	_	_	_	_	9
15.2	Jumlah opd yang memiliki kegiatan (Aplkas) yang disandikan	OPD	_	_	_	_	_	_	4
15.3	Jumlah OPD di Kabupaten Padang Lawas	OPD	41	43	44	102	>	Melampaui	43
16	Kebudayaan								
16.1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Kegiatan	2	2	2	2	<	Belum Tercapai	2
16.2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Situs	10	10	10	10	<	Belum Tercapai	10
16.3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Lokasi	3	5	5	5	<	Belum Tercapai	5
17	Perpustakaan								
17.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Jiwa	69461	111909	1912	0.02	<	Belum Tercapai	607461

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	(Jiwa)								
17.2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah (%)	Unit	60	65	0	0	<	Belum Tercapai	85
17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk (%)	Persen	198	238	0	0	<	Belum Tercapai	3.18
17.4	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun (Jiwa)	Jiwa	5.789	9.326	191	0.02	<	Belum Tercapai	133.955
17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan (examplar)	Unit	1413	2567	0	0	<	Belum Tercapai	6726
17.6	Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan PeNilai Yang Memiliki Sertifikat (Jiwa)	Jiwa	0	1	0	0	<	Belum Tercapai	5
18	Kearsipan								
18.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku (%)	Persen	13	14	14	100	=	Sesuai	18

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (kegiatan)	Kegiatan	1	5	5	100	=	Sesuai	10
	Layanan Urusan Pilihan								
1	Kunjungan Wisata								
1.1	Lama Kunjungan Wisata (hari)	Hari	1	1	1	1	1	Wisatawa Lokal	1
1.2	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	2.000.000	6.500.000	2.400.000	36.92	<	Belum Tercapai	3500000
2	Pertanian								
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	34.05	35	34.73	99.22	<	Belum Tercapai	39.00
2.2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	Persen	3.49	4.1	3.59	87.56	<	Belum Tercapai	4.50
2.3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	Persen	42.26	43.86	43.58	99.36	<	Belum Tercapai	47.26
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap	Persen	1.54	1.64	1.59	96.95	<	Belum Tercapai	2.00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	PDRB								
2.5	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	Persen	37.6	50	45.5	91.00	<	Belum Tercapai	55.00
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	Kelompok	16	20	19.36	96.80	<	Belum Tercapai	40.00
3	Energi Dan Sumber Daya Mineral								
3.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	75.6	78.3	75	95.78	<	Belum Tercapai	81.90
3.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persen	67.98	72.65	70	96.35	<	Belum Tercapai	91.33
3.3	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	Persen	34.56	29.26	-	-	-	-	0.06
4	Perdagangan								
4.1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Persen	63.33	63.45	15.9	25	<	Belum Tercapai	63.70

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
4.2	Revitalisasi Pasar tradisional	Unit	5	5	-	-	-	-	5
5	Perindustrian								
5.1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Kelompok	0.02	0.04	43.75	175	>	Melampaui	1.06
6	Kelautan dan Perikanan								
6.1	Produksi Perikanan	Kg	35685	4138.45	3010.52	72.75	<	Belum Tercapai	5030.2
6.2	Konsumsi Ikan	Persen	39.1	39.8	39.8	1	=	Sesuai	40.7
6.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	220	210	210	1	=	Sesuai	300
6.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/Pembudidaya	Kg	3941.4	4138.45	3010.52	72.75%	<	Belum Tercapai	4820.2
6.5	Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman (%)	Persen	70	70	70	100%	=	Sesuai	70

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Penunjang Urusan								
1	Perencanaan Pembangunan								
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	100	=	Sesuai	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	100	=	Sesuai	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	100	=	Sesuai	Ada
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	100	=	Sesuai	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Persen	98.16	98.54	87.64	88.94	<	Belum Tercapai	99.10

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9		-10
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	Persen	98.16	98.5	100	101	>	Melampaui	100	
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	Persen	95	100	95	95	<	Belum Tercapai	100	
2	Keuangan									
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WDP	WTP	WTP	100	=	Tercapai		WTP
2.2	Persentase SILPA Terhadap APBD	Persen	5	4.21	412	97.86	<	Belum Tercapai		4.12
2.3	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	5.9	6.59	10.03	152	>	Melampaui		10.03
2.4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	22.27	22.4	23.1	103	>	Melampauii		23.1
2.5	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	11.16	13	10	76.92	<	Belum Tercapai		10

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.6	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	Persen	77.64	74.51	73.57	98.65	<	Belum Tercapai	73.57
2.7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Rupiah	54.862.126.800.00	62.811.648.973.32	65.333.619.773.50	104	>	Melampaui	65.333.619.773.25
2.8	Penetapan APBD	Tahun	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	=	Sesuai	Tepat Waktu
3	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan								
3.1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	Bulan	+ 4 Bulan	+4 Bulan	+4 Bulan	100	=	Sesuai	20 JP
3.2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Persen	5	6	6	100	=	Sesuai	43
3.3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	Persen	8	10	10	100	=	Sesuai	10.00
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instasi Pemerintah	Jabatan	32	32	32	100	=	Sesuai	33
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instasi	Jabatan	151	153	153	100	=	Sesuai	162

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Pemerintah								
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instasi Pemerintah	Orang	2497	2597	2478	0,95	<	Belum Tercapai	3610
4	Pengawasan								
4.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	68	80	81.69	102	>	Melampaui	100
4.2	Jumlah Temuan BPK	Point	112	142	116	81.69	<	Belum Tercapai	100
5	Sekretariat Dewan								
5.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	100%	=	Sesuai	Ada
5.2	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	100%	=	Sesuai	Ada

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	INTERPRETASI	KETERANGAN	KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)								
5.3	Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Peraturan Daerah, Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	100	100%	=	Sesuai	Ada

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan. Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan selanjutnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, yang dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan akuntansi, dimana sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah juga harus berpedoman kepada peraturan perundangan yang mengatur tentang keuangan negara dan daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan dimasa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan Kabupaten Padang Lawas mencakup kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan neraca daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD), keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Asumsi dasar sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan memperkirakan faktor ekonomi makro antara lain:

1. Adanya rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM);
2. Pemulihan ekonomi internasional yang berdampak pada pemulihan perekenomian nasional yang berimbas ke daerah;
3. Terjadinya laju inflasi;
4. Stabilitas harga bahan dasar.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sementara struktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Untuk pembiayaan sendiri terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.

Tabel 3.1

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENDAPATAN	**997.570.855.152,43**	**1.023.852.818.104,21**	**1.028.746.082.335,49**	**1.134.441.839.324,78**	**1.036.704.391.445,44**	**1,19**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**39.341.382.403,43**	**46.509.729.525,21**	**47.455.308.607,49**	**52.067.312.090,78**	**44.055.621.274,44**	**3,65**
Pendapatan Pajak Daerah	7.854.190.341,90	10.749.935.751,30	10.140.623.479,00	9.908.848.158,30	12.861.852.315,11	14,68
Pendapatan Retribusi Daerah	4.333.082.609,50	3.299.212.549,00	2.213.843.310,43	2.308.214.347,92	2.467.318.627,00	-11,4
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.044.681.919,00	2.886.630.438,00	2.807.390.794,00	6.526.583.214,00	2.347.617.748,00	9,27
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.109.427.533,03	29.573.950.786,91	32.293.451.024,06	33.323.666.370,56	26.378.832.584,33	4,88
PENDAPATAN TRANSFER	**958.229.472.749,00**	**961.343.088.579,00**	**728.499.463.726,00**	**813.079.155.434,00**	**722.028.634.171,00**	**-5,87**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	895.218.964.219,00	924.467.201.464,00	706.290.658.171,00	759.871.292.490,00	674.300.166.920,00	-6
Bagi Hasil Pajak	39.091.590.204,00	24.242.392.702,00	22.942.664.002,00	17.934.864.181,00	23.619.873.670,00	-8,37
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.764.130.296,00	2.979.914.826,00	4.321.042.897,00	6.014.952.283,00	3.800.824.088,00	13,8
Dana Alokasi Umum	525.047.157.000,00	520.974.737.000,00	521.562.942.000,00	541.104.708.000,00	496.576.468.000,00	-1,29
Dana Alokasi Khusus	150.283.047.778,00	148.093.785.936,00	157.464.009.272,00	194.816.768.026,00	150.303.001.162,00	1,44
Dana Desa	178.033.038.941,00	228.176.371.000,00	0	0	0	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0	0	0	0	8.538.533.000,00	-
Dana Penyesuaian	0	0	0	0	8.538.533.000,00	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**63.010.508.530,00**	**36.875.887.115,00**	**22.208.805.555,00**	**53.207.862.944,00**	**39.189.934.251,00**	**8**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	63.010.508.530,00	36.875.887.115,00	22.208.805.555,00	53.207.862.944,00	39.189.934.251,00	8
Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0	0	0	0	0	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0**	**16.000.000.000,00**	**252.791.310.002,00**	**269.295.371.800,00**	**270.620.136.000,00**	**-**
Pendapatan Hibah	0	16.000.000.000,00	34.462.845.202,00	40.089.160.000,00	40.457.840.000,00	-

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Lainnya	0	0	218.328.464.800,00	229.206.211.800,00	230.162.296.000,00	-
BELANJA	**967.359.285.757,45**	**1.033.385.759.505,16**	**1.066.982.641.459,09**	**1.142.744.160.431,03**	**1.035.264.004.104,00**	**0,49**
BELANJA OPERASI	**517.634.878.101,83**	**531.751.980.476,16**	**603.333.113.387,09**	**618.834.305.509,00**	**582.197.337.553,00**	**3,21**
Belanja Pegawai	326.748.633.087,00	283.715.291.000,00	336.995.248.224,00	340.358.287.656,00	365.904.697.961,00	2,01
Belanja Barang dan Jasa	183.285.645.764,83	225.513.950.460,16	228.011.058.925,09	264.398.388.649,00	199.908.800.677,00	5,89
Belanja Hibah	6.025.200.000,00	20.938.560.000,00	35.488.225.284,00	11.925.185.500,00	13.531.958.915,00	66,02
Belanja Bantuan Sosial	1.575.399.250,00	1.584.179.016,00	2.838.580.954,00	2.152.443.704,00	2.851.880.000,00	22,02
BELANJA MODAL	**218.859.096.615,62**	**221.963.650.135,00**	**204.458.003.516,00**	**241.420.449.752,03**	**143.366.541.808,00**	**-7,25**
Belanja Modal Tanah	1.000.000.000,00	0	1.800.000.000,00	1.700.000.000,00	0	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.609.776.729,62	26.027.738.750,00	26.768.657.976,00	38.733.547.399,00	69.463.521.001,00	19,33
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.955.202.384,00	55.163.815.937,00	46.975.317.699,00	47.116.025.967,00	18.982.874.265,00	-1,72
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	129.825.015.337,00	138.477.096.857,00	126.351.677.271,00	146.046.527.205,03	50.848.553.219,00	-12,92
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.469.102.165,00	2.294.998.591,00	2.562.350.570,00	7.824.349.181,00	4.071.593.323,00	33,8
BELANJA TAK TERDUGA	**175.445.000,00**	**280.226.200,00**	**430.000.000,00**	**386.664.268,00**	**13.983.940.146,00**	**904,91**
Belanja Tak Terduga	175.445.000,00	280.226.200,00	430.000.000,00	386.664.268,00	13.983.940.146,00	904,91
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.597.417.308,00**	**-**
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0	0	0	0	1.299.507.288,00	-
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	297.910.020,00	-
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**230.689.866.040,00**	**279.389.902.694,00**	**258.761.524.556,00**	**282.102.740.902,00**	**294.118.767.289,00**	**6,75**
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0	0	0	0	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	230.689.866.040,00	279.389.902.694,00	258.761.524.556,00	281.083.591.961,00	294.118.767.289,00	6,75
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0	0	1.019.148.941,00	0	-
SURPLUS/(DEFISIT)	**30.211.569.394,98**	**-9.532.941.400,95**	**-38.236.559.123,60**	**-8.302.321.106,25**	**1.440.387.341,44**	**-6,52**

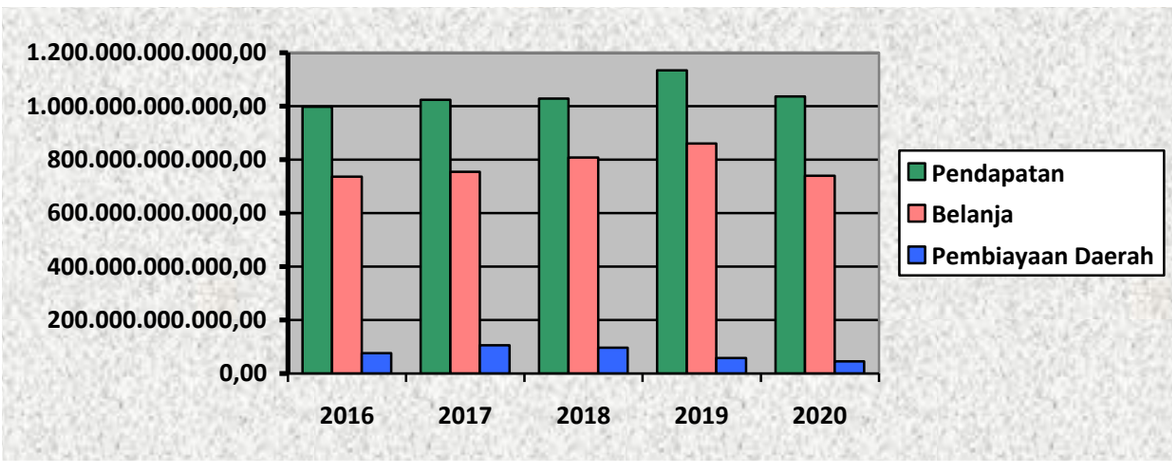
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**75.872.368.365,04**	**105.711.016.931,59**	**96.178.075.535,64**	**58.519.806.415,13**	**45.698.121.223,88**	**-7,69**
Penggunaan SILPA	75.863.413.365,04	105.711.016.931,59	96.178.075.535,64	58.519.806.415,13	45.698.121.223,88	-7,68
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0	-
Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0	-
Penerimaan Kembali Piutang	8.955.000,00	0	0	0	0	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**372.920.829,00**	**0**	**0**	**4.519.364.085,00**	**0**	**-**
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	-
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0	0	0	4.519.364.085,00	0	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	372.920.829,00	0	0	0	0	-
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	-
PEMBIAYAAN NETTO	**75.499.447.536,04**	**105.711.016.931,59**	**96.178.075.535,64**	**54.000.442.330,13**	**45.698.121.223,88**	**-7,06**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**105.711.016.931,02**	**96.178.075.530,64**	**57.941.516.412,04**	**45.698.121.223,88**	**47.138.508.565,32**	**-16,69**

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah, dikelola Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Sumber pendapatan terbesar tahun 2020 diperoleh dari Pendapatan Transfer dengan angka rata-rata pertumbuhan sebesar -5,87 persen, kemudian Pendapatan Asli Daerah dengan angka rata-rata pertumbuhan sebesar 3,65 persen dan terakhir lain-lain dengan Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata pertumbuhan tak terhingga. Ini menunjukkan bahwa pendapatan yang bersumber dari dana pusat dan propinsi sangat besar kontribusinya untuk Kabupaten Padang Lawas. Dari sisi belanja, Belanja Operasi dengan angka rata-rata pertumbuhannya 3,21 persen, sedangkan Belanja Modal menunjukkan angka rata-rata pertumbuhan sebesar -7,52 persen, sementara Belanja Tak Terduga angka rata-rata pertumbuhannya 904,91 persen. Untuk Transfer sendiri angka rata-rata pertumbuhan pada transfer bagi hasil pendapatan sebesar 6,75 persen, dan untuk transfer bantuan keuangan angka rata-rata pertumbuhannya tidak terhingga. Pada Pembiayaan sendiri angka rata-rata pertumbuhan -7,69 persen terdapat pada Penerimaan Pembiayaan, sementara Pengeluaran Pembiayaannya tidak ternilai.

Gambar 3.1

Pendapatan, Belanja dan Pembiayan Daerah
Kabupaten Padang Lawas 2016-2020



Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah, dikelola Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2021

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Neraca Kabupaten Padang Lawas memberikan informasi mengenai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, asset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas dana.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Padang Lawas

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET	**1.273.064.700.908,25**	**1.332.727.214.237,49**	**1.519.781.773.300,17**	**1.675.570.118.253,86**	**1.659.536.046.932,65**	**7,00**
ASET LANCAR	**139.864.658.942,01**	**135.256.101.420,07**	**121.173.734.179,67**	**99.175.711.697,65**	**91.697.918.605,29**	**-9,85**
Kas di Kas Daerah	105.670.436.515,59	96.177.960.777,64	56.674.298.875,99	45.240.813.262,88	47.098.821.306,32	-16,53
Kas di Bendahara Penerimaan	464.000,00	0,00	4.089.054,14	8.074.275,00	4.356.395,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	40.116.416,00	76.025.609,00	484.000,00	331.153.686,00	0,00	17.052,58
Kas di BLUD	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	1.262.644.481,91	0,00	0,00	-
Kas Lainnya	1.589.808.060,00	933.010.702,09	933.010.702,09	76.536.760,00	35.330.864,00	-46,74
Setara Kas	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Piutang Pendapatan	32.932.893.990,40	33.386.043.318,39	53.029.549.893,51	44.428.703.815,28	38.463.518.352,57	7,64
Piutang Lainnya	480.039.465,56	475.483.973,96	475.483.973,96	769.886.822,00	171.579.348,00	-4,19
Penyisihan Piutang	-14.101.879.891,84	-15.478.216.221,98	-19.168.231.415,21	-11.360.976.709,64	-11.086.300.740,38	-2,39
Beban Dibayar Dimuka	110.250.000,00	112.750.000,00	112.750.000,00	0,00	0,00	-
Persediaan	13.142.530.386,30	19.573.043.260,97	27.849.654.613,28	19.681.519.786,13	17.010.613.079,78	12,08
INVESTASI JANGKA PENDEK	**9.593.965.500,00**	**9.409.230.000,00**	**9.304.260.000,00**	**13.823.624.085,00**	**13.823.624.085,00**	**11,38**
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**289.705.500,00**	**104.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Dana Bergulir	289.705.500,00	104.970.000,00	0,00	0,00	0,00	-
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	**9.304.260.000,00**	**9.304.260.000,00**	**9.304.260.000,00**	**13.823.624.085,00**	**13.823.624.085,00**	**12,14**
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.304.260.000,00	9.304.260.000,00	9.304.260.000,00	13.823.624.085,00	13.823.624.085,00	12,14
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET TETAP	**1.071.105.069.125,15**	**1.126.695.518.941,23**	**1.320.160.829.343,24**	**1.475.110.073.520,14**	**1.455.163.322.888,31**	**8,19**
Tanah	178.595.359.933,00	177.068.321.933,00	178.359.191.933,00	205.426.329.337,00	208.894.897.331,00	4,18
Peralatan dan Mesin	191.153.961.675,00	213.550.299.549,00	233.287.055.495,00	263.159.899.732,00	323.080.630.643,00	14,13
Gedung dan Bangunan	365.160.645.772,15	357.848.350.392,29	401.434.729.787,39	499.122.982.763,79	492.308.974.205,79	8,29
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	620.800.184.888,00	766.821.827.995,61	887.407.171.150,70	1.042.417.745.095,73	1.115.611.554.192,70	15,93
Aset Tetap Lainnya	30.277.030.514,00	31.392.325.923,00	39.377.090.655,00	46.206.038.023,00	48.817.714.400,00	13,03
Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.043.121.960,00	48.293.002.554,15	84.396.345.063,15	30.584.823.341,00	18.723.064.439,00	22,82
Akumulasi Penyusutan	-336.925.235.617,00	-468.278.609.405,82	-504.100.754.741,00	-611.807.744.772,38	-752.273.512.323,18	22,74
DANA CADANGAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASET LAINNYA	**52.501.007.341,09**	**61.366.363.876,19**	**69.142.949.777,26**	**87.460.708.951,07**	**98.851.181.354,05**	**17,27**
Tagihan Jangka Panjang	0,00	2.680.885.145,70	903.744.876,17	587.707.559,98	367.008.363,93	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Aset Tidak Berwujud	182.170.872,00	185.220.872,00	185.220.872,00	185.220.872,00	72.911.000,00	-14,74
Aset Lain-lain	52.318.836.469,09	58.500.257.858,49	68.053.984.029,09	86.687.780.519,09	98.411.261.990,12	17,26
KEWAJIBAN	**10.484.290.140,00**	**13.292.742.326,00**	**17.039.142.842,00**	**8.783.741.558,00**	**6.184.195.067,66**	**-5,77**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**10.484.290.140,00**	**13.292.742.326,00**	**17.039.142.842,00**	**8.783.741.558,00**	**6.184.195.067,66**	**-5,77**
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	158.906.826,00	175.443.128,00	99.532.277,00	176.069.037,00	0,00	-13,99
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	147.456.801,00	129.950.368,00	193.194.501,00	143.224.691,00	200.445.880,00	12,72
Utang Beban	3.235.417.607,00	7.751.433.513,00	10.038.734.049,00	4.711.188.597,00	3.122.663.509,66	20,58
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.942.508.906,00	5.235.915.317,00	6.707.682.015,00	3.753.259.233,00	2.861.085.678,00	-16,07
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
EKUITAS	**1.262.580.410.768,25**	**1.319.434.471.911,49**	**1.502.742.630.458,17**	**1.666.786.376.695,86**	**1.653.351.851.864,99**	**7,13**
EKUITAS	**1.262.580.410.768,25**	**1.319.434.471.911,49**	**1.502.742.630.458,17**	**1.666.786.376.695,86**	**1.653.351.851.864,99**	**7,13**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.273.064.700.908,25**	**1.332.727.214.237,49**	**1.519.781.773.300,17**	**1.675.570.118.253,86**	**1.659.536.046.932,65**	**7,00**

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah, dikelola Kabupaten Padang Lawas,Tahun 2021

Dapat dijelaskan bahwa Aset dari tahun 2016–2019 mengalami peningkatan, dan di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dengan angka rata-rata pertumbuhan sebesar 7,00 persen. Ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas kegiatan dalam bentuk investasi terhadap pengadaan barang dan jasa. Sementara Kewajiban dari tahun 2016–2018 mengalami peningkatan, di tahun 2019–2020 mengalami menurunan dengan angka rata-rata tumbuhan sebesar -5,77 persen, ini menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Lawas belum banyak memenuhi kewajibannya. Selain di Ekuitas juga mengalami meningkatan dari tahun 2016–2020 dengan angka rata-rata pertumbuhan sebesar 7,13 persen.

Dalam mencermati neraca keuangan Pemerintah Daerah, diperlukan perhitungan rasio. Dimana tahun 2016–2019 rasio total hutang terhadap total asset dan rasio hutang terhadap modal dengan nilai yang sama yakni sebesar 0,01 persen, sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 0,00 persen. Untuk itu dalam perhitungannya, analisis rasio keuangan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dapat ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3
Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Padang Lawas

Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020(%)
Rasio Lancar	13,34	10,18	7,11	11,29	14,83
Rasio Quick	12,09	8,70	5,48	9,05	12,08
Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Rasio Hutang terhadap Modal	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
Rata-rata Umur Piutang	16,51	11,82	15,33	15,68	14,59
Rata-rata Umur Persediaan	281,81	305,04	310,76	440,74	393,66

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah, dikelola Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bagian ini akan menjelaskan tentang gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan sebagai berikut :

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

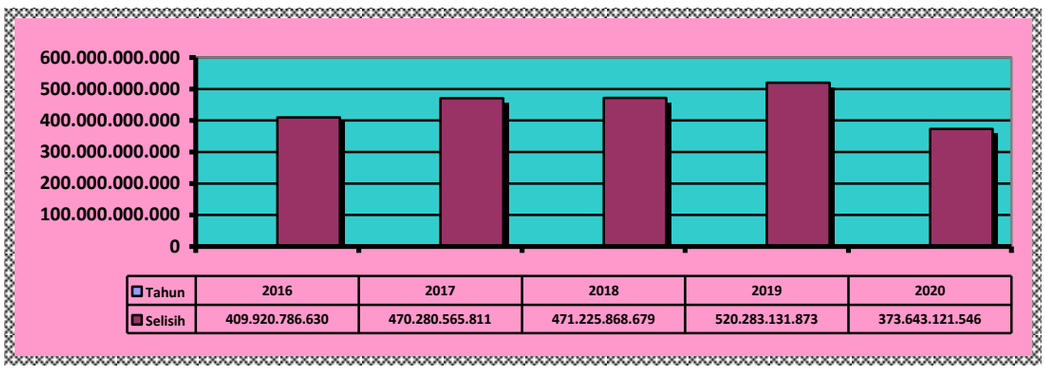
Pada tabel berikut terlihat bahwa perbandingan antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total pengeluaran (belanja+pembiayaan) yang tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan persentase 49,48 persen sedangkan yang terendah pada tahun 2017 dengan persentase 37,63 persen.

Tabel 3.4
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Padang Lawas

Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Presentase
2016	326.748.633.087,00	736.669.419.717,45	44,35
2017	283.715.291.000,00	753.995.856.811,16	37,63
2018	336.995.248.224,00	808.221.116.903,09	41,70
2019	340.358.287.656,00	860.641.419.529,03	39,55
2020	365.904.697.961,00	739.547.819.507,00	49,48

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah, dikelola Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Gambar 3.2
Selisih antara Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dengan Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) Kabupaten Padang Lawas



Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Dari gambar terlihat jelas bahwa selisih antara proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total pengeluaran (belanja+pembiayaan pengeluaran) dari tahun 2016–2018 mengalami peningkatan yang signifikan, sementara tahun 2019–2020 mengalami penurunan yang signifikan.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pemerintah daerah berupaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pembiayaan daerah dari pembiayaan utang daerah dengan selektif dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah atasan, sehingga pemanfaatan penerimaan pembiayaan dapat mendanai infrastruktur yang prioritas.

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Padang Lawas tahun 2016 - 2020 adalah mencegah seminimal mungkin terjadinya Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penggunaan SiLPA dilakukan secara cermat untuk mempertahankan kesinambungan fiskal dan menjaga keberlanjutan pelayanan umum.

Tabel 3.5
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Padang Lawas

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Realisasi Pendapatan Daerah	997.570.855.152,43	1.023.852.818.104,21	1.028.746.082.335,49	1.134.441.839.324,78	1.036.704.391.445,44
Dikurangi Realisasi :					
Belanja Daerah	736.669.419.717,45	753.995.856.811,16	808.221.116.903,09	860.641.419.529,03	739.547.819.507,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	372.920.829,00	0,00	0,00	4.519.364.085,00	0,00
Defisit Riil	30.211.569.394,98	-9.532.941.400,95	-38.236.559.123,60	-8.302.321.106,25	1.440.387.341,44

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah, dikelola Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Tabel 3.6
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Padang Lawas

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	105.711.016.931,02	96.178.075.530,64	57.941.516.412,04	45.698.121.223,88	47.138.508.565,32
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	8.955.000,00	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah, dikelola Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Dapat dijelaskan bahwa komposisi penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Padang Lawas adalah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Tabel 3.7
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Padang Lawas

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	105.711.016.931,02	100	96.178.075.530,64	100	57.941.516.412,04	100	45.698.121.223,88	100	47.138.508.565,32	100
Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Dana Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas, dikelola Tahun 2021

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Padang Lawas dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dan pembangunan Kabupaten Padang Lawas dari tahun ke tahun yang cenderung terus meningkat dimana peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berikut ini disajikan tabel proyeksi pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 3.8

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas

Uraian	Proyeksi			
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
PENDAPATAN	**1.097.733.413.677,00**	**1.047.429.030.125,00**	**1.076.104.593.605,00**	**1.107.600.728.429,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**85.013.950.964,00**	**84.986.980.964,00**	**87.849.536.844,00**	**92.242.013.688,00**
Pendapatan Pajak Daerah	23.466.913.817,00	23.462.913.817,00	15.441.663.555,00	16.213.746.733,00
Pendapatan Retribusi Daerah	18.533.195.400,00	18.732.460.400,00	5.749.148.224,00	6.036.605.636,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.955.458.551,00	6.955.458.551,00	11.321.599.997,00	11.887.679.997,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.058.383.196,00	35.836.148.196,00	55.337.125.068,00	58.103.981.322,00
PENDAPATAN TRANSFER	**975.989.962.713,00**	**962.442.049.161,00**	**988.255.056.761,00**	**1.015.358.714.741,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**941.970.719.597,00**	**927.549.881.752,00**	**953.362.889.352,00**	**980.466.547.332,00**
Bagi Hasil Pajak	24.739.710.813,42	25.424.528.000,00	26.695.754.400,00	28.030.542.120,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.027.394.783,58	6.481.009.000,00	6.481.009.000,00	6.481.009.000,00
Dana Alokasi Umum	506.486.046.000,00	490.835.624.000,00	515.377.405.200,00	541.146.275.460,00
Dana Alokasi Khusus	152.106.227.000,00	181.910.569.752,00	181.910.569.752,00	181.910.569.752
DID	24.336.141.000,00	3.595.403.000,00	3.595.403.000,00	3.595.403.000
Dana Desa	230.275.200.000,00	219.302.748.000,00	219.302.748.000	219.302.748.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**34.019.243.116,00**	**34.892.167.409,00**	**34.892.167.409,00**	**34.892.167.409,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.019.243.116,00	34.892.167.409,00	34.892.167.409,00	34.892.167.409,00
Bantuan Keuangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**36.729.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Perundang-undangan	36.729.500.000,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA		**1.135.946.055.126,00**	**1.082.369.232.003,00**	**1.111.044.795.483,00**	**1.142.540.930.307,00**
	BELANJA OPERASI	**659.485.406.726,00**	**641.858.294.349,00**	**661.858.294.349,00**	**681.858.294.349,00**
	Belanja Pegawai	375.063.202.648,00	381.662.889.393,00	401.662.889.393,00	421.662.889.393,00
	Belanja Barang dan Jasa	229.877.855.163,00	204.283.441.970,00	204.283.441.970,00	204.283.441.970,00
	Belanja Hibah	51.759.398.915,00	52.688.754.994,00	52.688.754.994,00	52.688.754.994,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.784.950.000,00	3.223.207.992,00	3.223.207.992,00	3.223.207.992,00
	BELANJA MODAL	**170.406.401.871,00**	**148.996.577.340,00**	**157.672.140.820,00**	**169.168.275.644,00**
	Belanja Modal Tanah	6.140.000.000,00	0	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.934.523.724,00	14.090.292.340,00	14.090.292.340,00	14.090.292.340,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.441.601.647,00	52.741.303.000,00	52.741.303.000,00	52.741.303.000,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.885.276.500,00	82.137.907.000,00	90.813.470.480,00	102.309.605.304,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	27.075.000,00	27.075.000,00	27.075.000,00
	BELANJA TAK TERDUGA	**4.280.270.755,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
	Belanja Tak Terduga	4.280.270.755,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	TRANSFER BAGI HASIL	**4.203.502.522,00**	**4.203.502.522,00**	**4.203.502.522,00**	**4.203.502.522,00**
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.203.502.522,00	4.203.502.522,00	4.203.502.522,00	4.203.502.522,00
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**297.570.473.252,00**	**285.310.857.792,00**	**285.310.857.792,00**	**285.310.857.792,00**
	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	297.570.473.252,00	285.310.857.792,00	285.310.857.792,00	285.310.857.792,00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)		**-38.212.641.449,00**	**-34.940.201.878,00**	**-34.940.201.878,00**	**-34.940.201.878,00**
PEMBIAYAAN					

PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**40.000.000.000,00**	**34.940.201.878,00**	**34.940.201.878,00**	**34.940.201.878,00**
	Penggunaan SILPA	40.000.000.000,00	34.940.201.878,00	34.940.201.878,00	34.940.201.878,00
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**1.787.358.551,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.787.358.551,00	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		**38.212.641.449,00**	**34.940.201.878,00**	**34.940.201.878,00**	**34.940.201.878,00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas, dikelola Tahun 2021

Untuk mendukung kebutuhan pembiayaan, maka pendapatan daerah Kabupaten Padang Lawas diproyeksikan mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun dalam berbagai sektor. Asumsi yang digunakan dalam mendukung proyeksi pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun antara lain dilatar belakangi oleh:
    a. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi;
    b. Perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada subjek pajak PBB dan BPHTB;
    c. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Daerah;
    d. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi;
    e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan OPD Penghasil;
    f. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
    g. Menggali potensi pajak dan retribusi daerah secara optimal berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat, terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun.
3. Sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat menganggarkan defisit.

Selanjutnya asumsi yang digunakan dalam proyeksi belanja daerah adalah sebagai berikut.

1. Kebutuhan belanja pegawai yang selalu meningkat setiap tahunnya;
2. Kebutuhan Belanja Publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi misi Kabupaten Padang Lawas 2020-2024;
3. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja;
4. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja, Pengeluaran belanja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan akuntabilitas

perencanaan anggaran, memperjelas efektifitas, dan efisiensi penggunaan anggaran;

5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh OPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. Terselenggaranya pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis harus ditunjang dengan tersedianya sarana, prasarana perkantoran;
7. Bidang infrastruktur memiliki porsi yang paling besar dalam rencana anggaran belanja terutama pada awal-awal tahun perencanaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Padang Lawas;
8. Pada bidang pendidikan dan kesehatan, direncanakan anggaran bidang pendidikan sudah sesuai dengan amanat Undang-undang yaitu sebesar 20% dari total anggaran, dan pada bidang kesehatan minimal sebesar 10% dari total anggaran belanja yanga akan diprioritaskan untuk penambahan tenaga medis, pendirian rumah sakit, puskesmas, maupun puskesmas pembantu, demikian pula anggaran kesehatan untuk keluarga miskin akan terus ditingkatkan. Arah kebijakan diprioritaskan untuk tercapainya target kenaikan IPM sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJP;
9. Pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud apabila ada persamaan persepsi diantara seluruh pemangku kepentingan, sehingga harus ditumbuhkan rasa memiliki dan kebersamaan;
10. Peningkatan kesejahteraan masyarakat KBB melalui pembangunan yang berkelanjutan harus dilaksanakan tanpa merusak kelestarian lingkungan hidup. Pengalihan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku;

Pemilihan lokasi untuk kawasan industri harus dilakukan secara cermat, terutama untuk industri yang polutif dengan pemakaian air tinggi. Industri polutif bisa diterima asal penggunaan airnya dilakukan secara daur ulang, sehingga tidak ada pembuangan air limbah keluar pabrik dan pengambilan air bawah tanah bisa dibatasi.

Asumsi yang digunakan dalam proyeksi pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban penyertaan modal pada Bank Sumut;
2. Defisit sebagai akibat kebutuhan belanja yang lebih besar dari potensi pendapatan.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas

Uraian	Proyeksi			
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan	1.097.733.413.677	1.047.429.030.125	1.076.104.593.605	1.107.600.728.429
Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	-	-	-	-
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	40.000.000.000	34.940.201.878	34.940.201.878	34.940.201.878
Total penerimaan	1.137.733.413.677	1.082.369.232.003	1.111.044.795.483	1.142.540.930.307
Dikurangi:				
Belanja Operasi	659.485.406.726	641.858.294.349	661.858.294.349	681.858.294.349
Pengeluaran Pembiayaan	1.787.358.551	-	-	-
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	478.248.006.951	440.510.937.654	449.186.501.134	460.682.635.958

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas,Tahun 2021

Dari tabel yang disajikan di atas dapat dijelaskan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Padang Lawas semakin membaik.

Tabel 3.10
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Lawas

Uraian	APBD 2021 (Rp)	Proyeksi		
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Kapasitas riil kemampuan keuangan	478.248.006.951,00	440.510.937.654,00	449.186.501.134,00	460.682.635.958,00
Prioritas I	105.200.500.500,00	108.191.970.628,00	111.189.539.919,00	115.300.906.160,00
Prioritas II	247.910.752.448,08	216.408.556.480,80	219.632.657.974,00	222.518.729.900,00
Prioritas III	125.136.754.002,92	115.910.410.545,20	118.364.303.241,00	122.862.999.898,00

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas, Tahun 2021

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sebagai berikut:

a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah.
c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Gambaran kondisi Kabupaten Padang Lawas yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, isu strategis serta visi dan misi pembangunan jangka menengah yang telah dirumuskan oleh Bupati Kabupaten Padang Lawas dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas terpilih merupakan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah yang didukung dengan arah kebijakan. Pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Pembangunan daerah secara sederhana diartikan sebagai sebuah perubahan tingkat kesejahteraan secara sengaja dan terukur. Perencanaan daerah juga diharapkan mampu menepis ketidakpastian dalam proses merubah tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Hakikat perencanaan itu adalah memperkecil peluang munculnya ketidakpastian.

Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, nasional dan provinsi akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas dalam lima tahun kedepan. Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah merupakan dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan PRPJMD Kabupaten Padang Lawas periode pembangunan 2020-2024 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut berbagai permasalahan dan isu strategis yang telah dikembangkan dan dijabarkan dalam peruntukannya sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan, permasalahan utama Kabupaten Padang Lawas adalah **"Belum meratanya kesejahteraan pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Padang Lawas"**. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan pokok dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

1. Masih rendahnya kualitas daya saing SDM;
2. Belum meratanya pembangunan daerah;
3. Belum meratanya Pembangunan infrastruktur dasar dan Aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan; dan
4. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengelolaan potensi sumber daya daerah merupakan realisasi pengejawantahan dirumuskannya sistem pemerintahan desentralisasi atau otonomi daerah dalam efisiensi pembangunan nasional. Oleh sebab itu, setiap hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan-permasalahan yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional.

Permasalahan pokok pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas, dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Kualitas Daya Saing SDM

Pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Terkait dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Padang Lawas berperan diberbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat. Mengurai dari bahasan di atas, permasalahan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia memiliki hubungan bahwa sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan menyebabkan rendahnya daya saing sumber daya manusia tersebut.

Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas terus meningkat, ditunjukkan bahwa IPM Kabupaten Padang Lawas dari tahun 2016 sebesar 66,23 persen mengalami kenaikan ditahun 2020 sebesar 68,25 persen. IPM Kabupaten Padang Lawas berada pada posisi ke 27 dari 33 Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, nilai IPM Kabupaten Padang Lawas ini lebih rendah dan masih tertinggal jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 71,77 maupun Nasional sebesar 71,94.

Dari masalah utama rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia, terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah utama, antara lain:

a. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak bagi seluruh masyarakat dan pelayanan pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah, dengan ini dapat dikatakan bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan hasil dari kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kualitas pendidikan di Kabupaten Padang Lawas masih relatif rendah, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam mencapai pendidikan yang berkualitas dan diharapkan dapat mencetak SDM daerah yang berdaya saing tinggi. Sulitnya aksessibillitas terhadap sekolah antar wilayah kecamatan merupakan keterbatasan yang ada dalam menempuh Pendidikan di Kabupaten Padang Lawas, hal ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah kabupaten Padang Lawas.

Salah satu rangkaian dalam pelayanan pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar. Melihat kondisi saat ini, sarana dan prasarana pendidikan masih belum merata tersedia pada seluruh sekolah. Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal. Selain itu kualitas tenaga pendidik dan pendistribusian yang tepat merupakan salah satu hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kualitas manajemen pendidikan pada sekolah untuk mampu membentuk sistem pendidikan yang sesuai dan tepat dalam menerapkan pembelajaran pada siswa, sehingga proses pendidikan yang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

b. Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama dalam kehidupan manusia, dengan tubuh yang sehat maka manusia dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat yang sakit. Melihat kondisi saat ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, selain itu keterbatasan akses menambah kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan. Pendistribusian tenaga medis belum mampu merata pada seluruh lapisan wilayah Kabupaten Padang Lawas, mempengaruhi dalam pemberian pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat. Salah satu indikator yang mampu mengukur kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan adalah Angka Harapan Hidup yang juga merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, Angka harapan hidup Kabupaten Padang Lawas semakin meningkat, tahun 2016 Angka Harapan Hidup 66,01 meningkat ditahun 2020 menjadi 67,09 masih jauh tertinggal, jika dibandingkan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara sebesar 69,10 dan untuk Nasional sebesar 73,46.

Ketersediaan pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Padang Lawas masih dalam keterbatasan yang minim, dapat dilihat dari kondisi daerah Kabupaten Padang Lawas yang memiliki rumah sakit, puskesmas, pustu, dan klinik masih dalam jumlah yang minim serta dengan jumlah ketersediaan dokter dan tenaga medis yang masih sedikit. Pada tahun 2017 Kabupaten

Padang Lawas ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi salah satu lokasi khusus (Lokus) percepatan penurunan Stunting, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penanganan gizi buruk dan kurang sangat dibutuhkan di Kabupaten Padang Lawas.

c. Belum Maksimalnya Kualitas Pembangunan Berbasis Gender

Perempuan dan anak tidak jarang menjadi target yang rentan mengalami tindakan yang tidak menyenangkan berbasis gender. Dengan hal ini perlu perhatian pemerintah untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak. Selain itu pemberdayaan akan kaum perempuan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam mencapai pembangunan daerah. Berdasarkan data yang ada prioritas penduduk pekerja Kabupaten Padang Lawas adalah laki-laki, jika diperbandingkan nilainya mempunyai range yang cukup jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesenjangan gender yang relatif cukup kuat. Sehingga perempuan-perempuan Kabupaten Padang Lawas tidak mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang cukup sebagai bekal peningkatan produktivitas diri. Melihat hal ini prioritas pemerintah adalah melakukan penanganan dan pencegahan serta advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta pemberdayaan, terutama pemberdayaan ekonomi perempuan, dan meningkatkan partisipasi perempuan sebagai agen perubahan dan subjek dalam pembangunan nasional konflik kekerasan menjadi saat ini. Rendahnya tingkat perlindungan perempuan dan anak, rendahnya pemberdayaan perempuan dan anak, minimnya kualitas pendidikan dan keterampilan bagi kaum perempuan. Dengan ini diperlukan fasilitasi yang lebih dari pemerintah daerah untuk mengajak dan memberdayakan perempuan agar lebih memiliki kegiatan produktif, sehingga dengan adanya peran perempuan dalam pembangunan diharapkan akan memberikan sumbangsih dalam mencetak generasi-generasi penerus yang berkualitas. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta begitu juga dengan lembaga pemerintahan.

2. Belum Meratanya Pembangunan Daerah

Pembangunan yang merata keseluruh daerah merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan daerah dan meningkatkan produktivitas daerah. Dengan pemerataan pembangunan dalam berbagai sektor perlu dilakukan pemerintah daerah, terutama dalam sektor ekonomi. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan daerah yang berdaya saing dan

masyarakat yang produktif, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih sejahtera. Permasalahan pokok ini dipicu oleh beberapa permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Belum Optimalnya Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

Pembangunan ekonomi adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan, serta didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Kemiskinan merupakan salah satu indikasi dan cermin dari capain pembangunan yang berorientasikan pada kesejahteraan masyarakat.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Padang Lawas sampai dengan tahun 2020 sebesar 1,19 dengan jumlah dan persentase penduduk miskin sampai dengan 2020 sebesar 23,87.000 jiwa atau 8,37 persen. Selaras dengan pernyataan tersebut, salah satu indikator berhasilnya pemerintah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Meskipun secara umum terlihat angka kemiskinan cukup rendah, namun dari sisi pemerataan kesejahteraan masih sangat fluktuatif.

b. Masih Rendahnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja

Salah satu faktor yang cukup kuat dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah pekerjaan. Kualitas daya saing tenaga kerja sangat mempengaruhi bagaimana, macam dan jenis pekerjaan masyarakat yang kemudian akan memberi dampak pada penghasilan masyarakat dan kesejahteraannya. Melihat hal tersebut maka kualitas daya saing tenaga kerja merupakan permasalahan yang perlu dipecahkan oleh pemerintah bersama masyarakat agar masyarakat Kabupaten Padang Lawas dapat hidup dengan lebih layak dan sejahtera.

Kualitas tenaga kerja Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat dengan nilai Tingkat Pengangguran Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Lawas berdasarkan data yang ada TPT Kabupaten Padang Lawas berdasarkan usia 15 tahun ke atas pada tahun 2020 sebesar 4,11 persen, sedangkan Persentase TPAK pada tahun 2020 sebesar 68,67 persen.

Rendahnya pendidikan angkatan kerja juga menjadi sorotan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk lima belas tahun ke atas menurut Ijazah/STTB tertinggi dimana pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Padang Lawas yang tidak atau

tamat Sekolah Dasar sebanyak 52.722 jiwa, tamat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 37.495 Jiwa, tamat Sekolah Menengah Atas sebanyak 34.045 Jiwa, tingkat D1-D3 sebanyak 4.559 Jiwa, tingkat D4-S3 sebesar 10.852 Jiwa. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kualitas tingkat pendidikan penduduk. Hal tersebut juga mempengaruhi angkatan kerja di Kabupaten Padang Lawas dalam hal pencari pekerja.

c. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal

Setiap daerah mempunyai potensi kekhasan dan karakteristik tersendiri terhadap sumberdaya lokal daerah. Dengan adanya potensi sumber daya lokal daerah yang dikelola dengan optimal maka akan memberikan dampak peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal Kabupaten Padang Lawas dikarenakan adanya keterbatasan kompetensi koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk lokal daerah.. Dalam hal ini koperasi sebagai penunjang perekonomian mikro merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat.

Pariwisata di Kabupaten Padang Lawas sangat perlu dikembangkan. Pengembangkan tersebut tidak cukup pada objeknya saja tetapi nilai norma, adat istiadat dan budayanya juga, hal ini dikarenakan objek wisata di Kabupaten Padang Lawas cukup banyak dan dapat menarik perhatian pengunjung lokal dan mancanegara. Untuk meningkatkan potensi pariwisata tersebut perlu adanya perhatian pemerintah dan dukungan masyarakat setempat. Salah satu pengembangan parisiwata dilakukannya pembangunan sarana dan prasarana dalam hal ini dapat menunjang perekonomian masyarakat setempat. Keindahan suatu objek wisata tidak cukup untuk menarik pengunjung apabila tidak didukung oleh keramahtamahan masyarakatnya. Masyarakat yang sadar wisata akan menciptakan kondisi yang nyaman dan memberikan ruang informasi serta pelayananan secara maksimal kepada wisatawan yang berkunjung.

d. Belum Optimalnya Pemanfaatan Investasi Daerah

Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Padang Lawas sehinga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di daerah sehingga dicapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Masih belum optimalnya kondusifitas investasi di Kabupaten

Padang Lawas menjadi salah satu alasan kuat minimnya penanaman modal yang ditanamkan di daerah. Ketersediaan jumlah sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang penawaran investor menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya investor dan perusahaan yang tercatat di Kabupaten Padang Lawas. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan haruslah benar profesional. Keterbatasan jumlah SDM yang memiliki pemahaman dan pengetahuan di bidang investasi secara langsung mempengaruhi perkembangan investasi.

e. Belum Stabilnya Tingkat Inflasi Daerah

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara maka nilai inflasi Kabupaten Padang Lawas sementara masih mengikuti nilai inflasi yang terjadi pada Provinsi Sumatera Utara.

Perkembangan laju inflasi di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi. Laju inflasi tinggi mengakibatkan daya beli turun dan daya saing juga menurun. Laju inflasi tinggi terjadi karena pemerintah daerah tidak mampu menekan lonjakan kenaikan harga. Kondisi ini akan mengakibatkan peningkatan kemiskinan di suatu daerah dan tidak terkecuali di Kabupaten Padang Lawas. Laju inflasi rendah dan stabil harus di pertahankan terus menerus supaya dapat menstabilkan laju pertumbuhan ekonomi makro di Kabupaten Padang Lawas.

f. Belum Optimalnya Pertumbuhan Sektor Pertanian (dalam arti luas)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Berdasarkan data nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB dari tahun 2016 sampai dengan 2020, sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perhitungan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga sangat masuk akal jika pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas memperhatikan sektor ini. Selain itu sektor konstruksi dan industri pengolahan juga memiliki nilai konstribusi yang cukup besar dan bisa lebih dikembangkan lagi. Adapun sektor yang paling rendah adalah sektor jasa perusahaan dan jasa lainnya. Sedangkan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang belum ada di Kabupaten Padang Lawas. Pertumbuhan sektor pertanian belum berkembang secara optimal dikarenakan masih rendahnya pengembangan industri olahan produk yang bisa lebih dikembangkan lagi. Pengembangan produk mentah manjadi barang jadi merupakan suatu proses untuk meningkatkan nilai tambah pada produk lokal daerah. Selain itu adanya keterbatasan sarana dan prasarana untuk melakukan aktivitasnya tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas harus terus berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusianya, yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dalam pengembangan sektor-sektor tersebut dengan optimal.

g. Lambatnya Pergerakan Aktifitas Perekonomian Daerah

Persentase laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Padang Lawas tahun 2020 adalah 1,91 persen. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi dalam laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah tingkat kebangkitan pembangunan desa, nilai investasi yang beredar di daerah, munculnya pebisnis baru yang kreatif dan inovatif yang menambah pemain dalam pasar ekonomi dimana laju pertumbuhan konsumen tidak secepat pertumbuhan usaha sejenis, bergesernya pola bisnis konvensional menjadi digital sehingga pertumbuhan pengusaha makro dan mikro melalui media digital tumbuh cepat, industri besar yang ada di Kabupaten Padang Lawas, mutu tenaga kerja dan penduduk, pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan pekerjaan, barang modal dan tingkat teknologi, dan sistem sosial dan sikap masyarakat.

Lemahnya pergerakan ekonomi dipengaruhi oleh masih tingginya tingkat ketimpangan kesejahteraan antara penduduk pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan ini terjadi karena pembangunan yang masih belum meratanya pada seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara makro berdasarkan PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun setidak-tidaknya dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

3. Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting bagi sarana pendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah maka percepatan pembangunan akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur pembangunan Kabupaten Padang Lawas sedang dalam *on progress* dikerjakan. Dengan hal ini kedepannya pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi infrastruktur dari berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Padang Lawas.

1. Belum Terpenuhinya Layanan Transportasi Yang Berkualitas

Tahun 2016 jumlah kendaraan di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 16.166 kendaraan menurun di tahun 2020 menjadi 8.025 kendaraan. Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa meskipun mengalami penurunan jumlah kendaraan bermotor, jumlah kendaraan di tahun 2020 masih diangka yang cukup besar. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum, masih belum didukung oleh penataan kawasan secara optimal yang seringkali membuat kemacetan khususnya dibeberapa titik aktivitas perekonomian. Berdasarkan informasi dan data diatas, pemerintah daerah perlu memerhatikan infrastruktur perhubungan yang menjadi salah satu pendukung dalam transportasi yang digunakan oleh masyarakat dalam berkendara dijalan.

2. Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan bagian utama dari tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, salah satu tugas pokok aparatur pemerintah daerah adalah pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana

pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur yang berperan sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas telah membangun jalan sepanjang 1104.104 km. Kondisi jalan di Kabupaten Padang Lawas masih dalam mengkhawatirkan yang artinya masih jauh dari kata baik. Tahun 2016 kondisi jalan mengalami rusak dan rusak berat sebesar 892,86 km sedangkan tahun 2020 kondisi jalan mengalami rusak dan rusak berat sebesar 552,57 km. Perlu adanya upaya dan kerja keras pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas untuk meningkatkan kualitas jalan untuk memudahkan aksesibilitas antar wilayah sebagai salah satu motor penggerak pemerataan pembangunan dapat menjadi lebih mudah, selain itu pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah lainnya adalah jembatan. Jembatan di Kabupaten Padang Lawas tahun 2016 sebesar 102 jembatan dengan panjang jembatan 2.609,68 meter sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 108 jembatan dengan panjang jembatan sebesar 2.870,68 meter. Meskipun demikian perlu ditingkatkan kualitas dari infrastruktur demi meningkatkan pembangunan daerah agar berkembang agar akses maupun perekonomian masyarakat dapat sejahtera.

3. Belum Optimalnya Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Acuan Dalam Pembangunan Daerah

Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah juga terkendala dengan belum optimalnya penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dimana sebagian RDTR belum terealisasi optimal sampai saat ini meliputi kawasan strategis Pertahanan dan Keamanan, kawasan pertumbuhan ekonomi (bidang pariwisata dan budidaya pertanian, perikanan, serta kegiatan pendukung lainnya), kawasan sosial budaya, dan kawasan perbatasan menyebabkan terkendalanya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan lingkungan dan SDA secara tepat akan dapat mendorong untuk penerapan prinsip pembangunan yang berwawasan pelestarian lingkungan.

4. Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan kawasan hutan karena belum terselesaikannya tata batas kawasan hutan dengan baik. Eksploitasi kawasan hutan yang dilakukan masyarakat terus meningkat untuk perkembangan perkebunan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata

batas kawasan ini memberikan ancaman pada pengelolaan kawasan hutan terutama di kawasan konservasi yang menyebabkan meningkatnya luas lahan kritis, yang dapat memicu terjadinya tumpang tindih kawasan hutan dengan kegiatan sektor lain serta alih fungsi kawasan hutan untuk penggunaan lain di luar kehutanan yang tidak terkendali selain itu masih tingginya kawasan hutan berstatus *open access* juga merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan. Namun, disisi lain muncul permasalahan baru, yakni masih terjadi penebangan kayu dan pembakaran untuk dijadikan lahan pertanian dan peruntukan lainnya.

Belum ditetapkannya zonasi untuk pemanfaatan hutan menyebabkan terjadinya pembalakan liar yang merusak hutan sehingga hutan tidak mampu menampung debit air hujan yang turun dan menyebabkan banjir. Kondisi lingkungan hidup dan pengelolaan SDA belum optimal dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan cenderung menurun dan ketersediaan SDA menurun. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang sehat dan masalah persampahan dan limbah, khususnya berkaitan dengan cara-cara penanganan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum ada. Persentase penanganan sampah yang tertangani di Kabupaten Padang Lawas sampai dengan tahun 2020 hanya sebesar 6,09 persen. Pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi kualitas air yang semakin menurun, akibat pembuangan limbah yang tidak memperdulikan lingkungan dan mengindahkan peraturan. Terdapat tantangan yang dihadapi saat ini yakni terkait dengan upaya mewujudkan pengelolaan sampah secara terintegrasi berbasis kearifan lokal. Selain itu, minimnya ruang terbuka hijau diruas jalan utama ibu kota yang data meningktkan pencemaran udara.

Permasalahan lainnya mencakup upaya-upaya yang terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan potensi perikanan dan ekowisata dalam prinsip pengelolaan sumber daya dan rehabilitasi tambang rakyat, sumber daya air, konservasi biodiversitas secara terpadu. Berdasarkan uraian di atas dan data informasi yang dikaji dan dianalisis, maka salah satu akar masalah dari permasalahan daerah adalah “Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan” di Kabupaten Padang Lawas.

4. Belum Optimalnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability, transparancy, predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja "tata kelola pemerintahan yang baik" di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas yang belum maksimal, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum maksimalnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang taat terhadap rambu-rambu hukum atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga belum maksimalnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat serta mengakibatkan pula menurunnya partisipasi atau peran serta aktif masyarakat terutama dalam proses pembangunan termasuk semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan aparatur pemerintah yang seharusnya berpihak sepenuhnya kepada masyarakat/ rakyat. Dari masalah belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik menyebabkan beberapa permasalahan turunan yaitu:

a. Masih Rendahnya Kualitas Layanan Publik

Permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Padang Lawas terkait dengan isu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sampai saat ini belum maksimal diwujudkan. Kendala utama penerapan SPM di Kabupaten Padang Lawas adalah belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan serta kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur daerah yang belum memadai. Disamping itu, belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama pada OPD yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah serta masih rendahnya skil dan kemampuan Aparatur Sipil Negara dibidang tertentu serta belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif, pelayanan publik masih sangat kurang terutama yang berhubungan kesehatan, penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana dan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan Akte

Kelahiran. Kemudian masih terbatasnya implementasi pelaksanaan *E-Government* dan penerapan penggunaan sarana dan prasarana informatika dilingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas ini menjadi salah satu pemicu lambatnya pelayanan kepada masyarakat, sehingga kualitas pelayanan juga masih lemah.

Dalam penyelenggaraan pembangunan kinerja OPD tidak lain untuk mendukung capaian pembangunan daerah. Oleh sebab itu, permasalahan ini merupakan permasalahan prioritas daerah yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam menangani urusan kepegawaian.

b. Masih Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Peningkatan kinerja aparatur daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang memiliki kapasitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah merupakan tantangan dan permasalahan utama kurun waktu lima tahun kedepan. Permasalahan lainnya adalah terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif, meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD yang profesional, terlaksananya standar pelayanan minimal, serta penetapan dan pelaksanaan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disisi lain, dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi, sangat memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai inovasi dan kreasi sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Walaupun demikian, berdasarkan realitas yang ada, pengelolaan pemerintahan daerah di Kabupaten Padang Lawas belum berjalan secara optimal. Hal ini antara lain terlihat dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Lawas yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Implikasi yang ditimbulkan antara lain adalah masih adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh kapasitas sumberdaya aparatur daerah yang masih terbatas dan tidak sesuai dengan kompentensinya. Kemudian belum optimalnya transparansi dalam penyelengaaraan pemerintahan, prinsip-prinsip *good governance* belum diterapkan sebagaimana yang diharapkan.

Terkait dengan kinerja SDM aparatur, melihat penyelenggaran pemerintah sekarang ini belum bekerja dengan maksimal. Selain itu distribusi

dan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi dan analisis kebutuhan jabatan belum sesuai dengan skil yang dimiliki oleh aparatur.

c. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem pengawasan dan audit internal terhadap APBD merupakan salah satu pengawasan pada bidang keuangan daerah. Sistem pengawasan dan audit internal terhadap APBD telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sehingga hasil pengawasan dan audit dapat dipertanggung jawabkan secara relevan. Pengawasan terhadap audit internal terhadap APBD Kabupaten Padang Lawas belum dilakukan sebagai mana mestinya sehingga pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Padang Lawas belum optimal. Sistem pengelolaan keuangan yang belum dilakukan sesuai aturan terbukti memperlambat jalannya pembangunan Kabupaten Padang Lawas beberapa tahun ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan keuangan yang paling dominan adalah pengelolaan asset yang masih belum optimal dan sistem penatausahaan keuangan daerah belum terintegrasi dengan sistem perencanaan maupun sistem-sistem yang lainnya. Dengan pengelolaan keuangan yang handal diharapkan Kabupaten Padang Lawas mampu memanfaatkan sebaik-baiknya segala aset daerah untuk dikelola dan dikembangkan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 4.1

Permasalahan Kabupaten Padang Lawas
Per Aspek Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
1.	Masih rendahnya kualitas daya saing SDM	Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	masih belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, selain itu keterbatasan akses menambah kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan
		Belum Maksimalnya Kualitas Pembangunan Berbasis Gender	Belum tersedianya sistem manajemen penilaian kinerja ASN yang komprehensip yang sesuai dengan permenpan RB no 35 tahun 2012	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Organisasi dan Tata Kerja Inspektur Inspektorat
			Belum Maksimalnya Pelaksanaan Kesetaraan Gender	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Belum Meratanya Pembangunan Daerah	Belum Optimalnya Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan	Masih terbatasnya usaha/unit penyedia lapangan kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Masih Rendahnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tidak tersedianya balai Latihan Kerja (BLK)	Dinas Tenaga Kerja
			Rata-rata tingkat pendidikan tenaga kerja masih relatif rendah	
			Tenaga kerja belum memiliki keterampilan yang khusus sesuai kebutuhan perusahaan	
		Belum Optimalnya Pemanfaatan Investasi Daerah	Lahan belum tersedia	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
			Belum adanya investasi	
			Ketersediaan Pasar daerah masih Pasar Tradisional	
		Belum Optimalnya Pertumbuhan Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Alih Fungsi Lahan pertanian yang masih tinggi	Dinas Pertanian
			masih rendahnya Produksi pangan, perikanan, peternakan	Dinas Pertanian,

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
			Kurangnya ketersediaan pangan	Dinas Perikanan dan Peternakan
			Belum optimal pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian	Dinas Pertanian,Dinas Ketahanan Pangan,Dinas Perikanan dan Peternakan
			Belum optimalnya pemanfaatan teknologi peternakan dan perikanan	Dinas Pertanian
			Belum berkembangnya balai benih induk	Dinas Perikanan dan Peternakan
			Masih rendahnya SDM pelaku pertanian	Dinas Pertanian,Dinas Perikanan dan Peternakan
			Belum maksimalnya pembinaan kelompok tani	Dinas Pertanian
			Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian hama/penyakit tanaman dan ternak Tingginya Konsumsi pangan	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan
		Lambatnya Pergerakan Aktifitas Perekonomian Daerah	Masih rendahnya Inovasi produk	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
			Keterbatasan alat produksi	
			Minimnya modal usaha	
			Jaringan usaha masih lemah	
			Belum tersertifikasinya hasil Produksi	
3.	Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan	Belum Terpenuhinya Layanan Transportasi Yang Berkualitas	Jumlah ruas jalan kabupaten yang sangat panjang, tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan/peningkatan /pemeliaharaan jalan.	Dinas Pekerjaan Umum
		Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah	Pengadaan Lahan yang belum rampung dan anggaran yang masih terbatas	Dinas Pekerjaan Umum
		Belum Optimalnya Rencana Tata Ruang Wilayah Sebagai Acuan Dalam Pembangunan Daerah	Adanya beberapa titik rawan bencana dan dibutuhkan penaangan lebih	Dinas Pekerjaan Umum
		Belum Optimalnya Pemanfaatan dan	Belum maksimalnya identifikasi potensi pertambangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	OPD
		Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Belum optimalnya pengelolaan potensi Tambang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Penertiban Izin pengelolaan sumber daya alam belum maksimal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
			Belum termanfaatkan potensi Energi baru terbarukan limbah kelapa sawit	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Dinas Pertanian
			Belum teridentifikasinya potensi Panas bumi air panas Paringgonan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pemuda , Olah Raga dan Parawisata
4	Belum Optimalnya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Masih Rendahnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya pemanasan global (*global warning)* akibat peningkatan gas rumah kaca yang disebabkan tingginya aktivitas manusia penghasil gas karbon yang berdampak pada perubahan iklim	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Masih Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Masih minimnya Personil penegakan PERDA	Kantor Satuan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
			Masih minimnya ketaatan masyarakat terhadap PERDA	
		Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Belum tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

4.2. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

4.2.1. Isu Internasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbaharui yang merupakan bahan bakar untuk energi.

Isu strategis pada tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Padang Lawas antara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), ancaman krisis ekonomi global, globalisasi ekonomi dunia, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, demokratisasi, serta Hak Asasi Manusia (HAM).

a. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals* (*MDGs*). Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk mensejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals* (*MDGs*) memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas

lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) yang disahkan di sidang umum PBB akhir September di New York, USA. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui *platform* agenda pembangunan dunia *Post*-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable DevelopmentGoals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 23. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 23 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimanapun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;

7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi pengguruan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Padang Lawas, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan awal tahun 2017, tidak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena "Brexit" atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, propoganda Korea Utara, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia-Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Kabupaten Padang Lawas yang berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

c. Globalisasi Ekonomi Dunia

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Betapa mengglobalnya dunia saat ini khususnya mengenai pergerakan orang, barang dan jasa semakin tanpa mengenal batas wilayah, pertimbangan ekonomi adalah alasannya.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah contoh dimana Indonesia tidak bisa lagi mengelak bahwa sebagai bagian dari dunia internasional mau tidak mau harus ikut bergabung demi kelangsungan perjalanan sebuah bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya. MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) merupakan aliansi ekonomi antara negara-negara ASEAN dimana Indonesia adalah salah satu anggotanya. Kebijakan – kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri negara – negara yang menjadi anggota aliansi akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada arah kebijakan ditingkat nasional dan pada gilirannya akan beresonansi ketingkat daerah termasuk di Kabupaten Padang Lawas. Oleh karena ketika merumuskan isu strategis Kabupaten Padang Lawas patut memperhatikan dan

memperhitungkannya sehingga masyarakat kedepannya akan siap beradaptasi.

d. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan peningkatan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. Efek gas rumah kaca juga disebabkan tingginya aktivitas manusia penghasil gas karbon yang berdampak pada perubahan iklim. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Semakin Pesat

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregrat yang signifikan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Kedepannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat alam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala

bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

f. Demokratisasi

Demokratisasi saat ini sudah menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. Proses demokratisasi harus diikuti oleh regulasi dan tatanan yang dapat melindungi semua orang, karena dampak demokratisasi tidak selalu baik jika tidak dilakukan dengan cara-cara yang demokrartis. Namun demikian prosesnya harus dilakukan secara baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang justru tidak sesuai dengan makna demokratisasi itu sendiri. Penyelenggaraan pemilu yang luber di Indonesia menjdi contoh banyak negara berkembang untuk menerapkan pola dan cara-cara Indonesia menjalankan proses demokratisasi.

Indonesia sampai saat ini terhitung sebagai negara yang sukses dalam melakukan proses demokratisasi sehingga tercatat sebagai negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Pencapaian itu terjadi karena prinsip-prinsip demokrasi diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai di level nasional, regional maupun pada tingkat lokal melalui kebijakan otonomi daerah.

g. Hak Azasi Manusia (HAM)

Secara alamiah sebenarnya setiap manusia begitu terlahir di dunia telah memiliki hak-hak dasar sebagai manusia. Delapan belas anggota PBB kemudian membentuk komisi hak asasi manusia (*commission of human right*). Pada tanggal 1 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris keluarlah *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 3 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Indonesia hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Penerapan Hak-hak Azazi Manusia di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4.2.2. Isu Atau Kebijakan Nasional

a. RPJMN 2020-2024

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2020-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2020-2024 sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu perihal dan gotong royong dalam bekerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan selain sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, pembangunan juga merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan

keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, Kelima arahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pencapaian keberhasilan pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pencapaian pembangunan-pembangunan di daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing menjadi modal dasar dan kekuatan utama bangsa dalam membangun kemajuan dan kemandirian. Terkait hal tersebut, pengembangan wilayah menjadi cukup penting dan fundamental dalam mengoptimalkan setiap potensi daerah baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan yang berkualitas dan merata.

Pengembangan setiap wilayah di Negara Republik Indonesia ini tergambar jelas pada misi pembangunan jangka menengah nasional dan

dipertegas melalui agenda prioritas NAWA CITA yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah.

Dalam lima tahun mendatang, transformasi ekonomi di Wilayah Sumatera diarahkan untuk mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan akhir dengan mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan. Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera diarahkan untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor dengan didukung pengembangan hub internasional di Kuala Tanjung sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia Bagian Barat.

b. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam masa penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 memiliki tema "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan". Tema ini mengarah pada arahan RPJPN tahap terakhir, tahapan keempat yaitu "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing".

Dalam perwujudan Indonesia pada tahun 2024, maka dirumuskan 5 (lima) arah kebijakan rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia

a. Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial

Pada pelayanan dasar dan perlindungan sosial memiliki arah kebijakan

- Memperluas pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah;
- Memperkuat intervensi spesifik dan sensitif penurunan stunting terintegrasi pada lokus prioritas;
- Memperkuat pelayanan kesehatan dasar dan upaya promotif dan preventif;

- Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan memberikan keberpihakan terhadap anak dari keluarga kurang mampu dan penanganan anak tidak sekolah;
- Memperkuat penerapan kurikulum berbasis pembelajaran keterampilan abad-21 (*higher-order thinking skills*);
- Memperkuat sistem layanan air minum dan sanitasi berkelanjutan untuk menuntaskan akses universal dan pencapaian akses aman;
- Memperbaiki skema pendanaan, pelaksanaan, dan kelembagaan SJSN;
- Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.

b. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Pada SDM berkualitas dan berdaya saing memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan vokasi selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/ industri (kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana);
- Memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas melalui peningkatan mutu pembelajaran dan sumber daya pendidikan tinggi;
- Meningkatkan akses dan keterampilan kaum muda dalam berwirausaha;
- Memperluas akses dan skema pembiayaan bagi wirausaha;
- Mengembangkan kewirausahaan berbasis teknologi dan sosial;
- Meningkatkan kemudahan berusaha (perijinan, investasi, insentif, dll) melalui OSS *(Online Single Submission);*
- Memperkokoh ketahanan budaya melalui pengembangan seni, nilai tradisi, pendidikan karakter, bahasa, dan perfilman;
- Memperkuat peran Iptek dan Inovasi sebagai pengungkit produktivitas melalui pengembangan bidang riset strategis, penyediaan infrastruktur dan SDM IPTEK, serta pembinaan *technopreneur;*
- Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade;
- Menyediakan fasilitas dan regulasi kerja yang ramah perempuan;
- Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor formal.

2. Pembangunan Ekonomi

a. Pangan dan Pertanian

Pada pangan dan pertanian memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Menstabilkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan;
- Mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu-hilir pangan, pertanian dan perikanan;
- Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
- Meningkatkan kualitas SDM pertanian, perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, & pembudidaya ikan;
- Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/konsumen;
- Optimalisasi fungsi waduk terbangun untuk keperluan irigasi, air baku dan energi;
- Penerapan modernisasi secara bertahap dalam rangka efisiensi air irigasi;
- Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi pemanfaatan waduk yang terbangun.

b. Energi, Mineral dan Pertambangan

Pada energi, mineral dan pertambangan ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan produksi, cadangan migas dan batu bara;
- Akselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- Pemanfaatan batubara dalam negeri yang stagnan di bawah 30 persen dari total produksi;
- Penyediaan energi dan ketenagalistrikan masih kurang memadai baik kualitas maupun kuantitas;
- Optimalisasi distribusi dan pemanfaatan minyak dan gas dalam negeri;
- Peningkatan efisiensi dan konservasi energi;
- Akselerasi peningkatan nilai tambah migas, batu bara dan mineral dalam negeri;
- Pertambangan berkelanjutan;

- Meningkatkan kapasitas kilang dan pembangkit listrik ;
- Peningkatan dan pengembangan listrik.

c. Kelautan dan Kemaritiman

Pada kelautan dan kemaritiman ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penyelarasan tata ruang darat dan laut;
- Pengembangan *cluster* industri perikanan;
- Pemantapan sarpras perikanan termasuk pengembangan sistem rantai dingin;
- Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata bahari di 24 lokasi;
- Optimalisasi pemanfaatan produk kelautan: bioteknologi (*marine bioproduct*);
- Pengembangan konektivitas laut;
- Pengembangan *sustainable fisheries;*
- Pengembangan kawasan konservasi perairan;
- Penanggulangan pencemaran dan sampah laut.

d. Pariwisata

Pada pariwisata, arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut:

- Inovasi produk pariwisata (atraksi, kuliner, akomodasi, dan transportasi) untuk meningkatkan rerata pengeluaran harian wisatawan, terutama wisatawan mancanegara;
- Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan pariwisata terutama di destinasi unggulan;
- Peningkatan pengelolaan destinasi dan layanan pariwisata yang didukung penerapan standar pariwisata berkelanjutan;
- Peningkatan investasi pariwisata dan penguatan rantai pasok industri pariwisata yang didukung optimalisasi sumber daya lokal;
- Peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata yang terampil dan kompeten dengan didukung perbaikan pendidikan dan pelatihan pariwisata serta sertifikasi kompetensi;
- Penguatan citra pariwisata dan perluasan/diversifikasi pemasaran;
- *Meeting*, *Incentives*, *conference*, *exhibition* (MICE), wisata minat khusus (*adventure*, *cruise*, *heritage*, halal), dan *cross border tourism.*

e. Ekonomi Kreatif dan Digital

Pada ekonomi kreatif dan digital ini dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- Pengembangan bakat dan peningkatan kompetensi SDM kreatif khususnya pada generasi muda, yang didukung penguatan seni dan budaya, serta kreativitas konten sebagai substansi dasar pengembangan produk kreatif;
- Pengembangan infrastruktur dan ruang kreatif yang didukung kemudahan berusaha dan penyediaan insentif bagi inovasi dan diklat vokasi;
- Peningkatan akses pembiayaan dan investasi yang sesuai, mudah diakses dan kompetitif;
- Peningkatan dukungan riset dan akses informasi melalui kerjasama *triple helix* (Pemerintah, akademisi, dan swasta) yang didukung peningkatan penerapan HKI;
- Peningkatan kualitas tata kelola usaha kreatif;
- Perluasan akses pasar, jaringan dan kemitraan di dalam dan luar negeri;
- Pengarusutamaan teknologi informasi dalam peningkatan efisiensi di berbagai sektor layanan publik;
- Penguatan industri film, animasi, games, dan musik, yang didukung peningkatan daya saing kuliner, fashion dan kriya.

f. Industri Manufaktur

Pada industri manufaktur ini dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan keterampilan+kompetensi SDM dan tata kelola usaha;
- Inovasi melalui kerja sama *triple helix;*
- Investasi yang berorientasi GPN, teknologi dan ekspor;
- Peningkatan produktivitas dan kualitas produksi sektor primer;
- Ketersediaan infrastruktur, energi dan logistic;
- Peningkatan manfaat FTA dan promosi ekspor;
- Peningkatan *manuservice* dan industri daur ulang;
- Pemanfaatan pengungkit keunggulan kompetitif: *industry* 4.0, ekonomi kreatif dan digital;
- Optimasi permintaan: pasar domestik, industri *halal*, *healthy* and *leisure lifestyle;*

- Perkuatan industri hulu dan antara terutama di subsektor kimia dan logam;
- Peningkatan ekspor subsektor unggulan:

  Sub-sektor berbasis teknologi: otomotif , mesin dan peralatan elektronik;

  Sub-sektor padat karya: tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki;

  Sub-sektor berbasis SDA: makanan minuman, pengolahan ikan;

  CPO dan turunannya.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pada pembangunan infrastruktur ini dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan akses perumahan dan permukiman yang layak;
- Optimalisasi tampungan terbangun untuk akselerasi penyediaan air baku dan air minum;
- Peningkatan akses sanitasi aman;
- Penanganan terpadu keselamatan transportasi;
- Pengelolaan banjir terpadu di lokasi pusat pertumbuhan ekonomi;
- Integrasi pelabuhan dan kawasan industri (termasuk *logistic center*);
- Konektivitas laut melalui integrasi pengelolaan pelabuhan, efisiensi jaringan pelayaran, dan pengembangan *platform e-logistik*;
- Konektivitas transportasi multimoda pada *hinterland* pelabuhan;
- Pengembangan konektivitas transportasi udara;
- Peningkatan peran transportasi masal;
- Pengelolaan air baku, air tanah, air minum, dan sanitasi terpadu;
- Penataan kota berkelanjutan;
- Pemanfaatan TIK dalam pengembangan infrastruktur perkotaan;
- Pemerataan dan peningkatan akses dan infrastruktur TIK;
- Pemanfaatan TIK untuk layanan publik (bantuan sosial, kesehatan *[telemedicine]*, pendidikan *[e-learning]*, pertanian dan perikanan);
- Pemanfaatan TIK untuk sektor industri dan perdagangan;
- Penerapan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) perangkat TIK untuk mendukung industri manufaktur lokal.

4. Pembangunan Politik, Hukum, serta Pertahanan dan Keamanan

Pada pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan implementasi Doktrin Poros Maritim Dunia yang lebih berorientasi keluar, seperti aktif dalam kerjasama negara-negara pesisir Samudera Hindia (IORA);
- Penguatan kepemimpinan pada forum internasional dan regional;
- Mengoptimalkan peran Indonesia di Dewan HAM PBB dan di Dewan Keamanan PBB;
- Penguatan kapasitas mengantisipasi ancaman perang terbuka, narkoba, terorisme, dan bencana alam;
- Memperkuat aktualisasi ideologi Negara;
- Penguatan kapasitas keamanan dalam negeri, termasuk pengamanan perbatasan antar Negara;
- Penguatan lembaga-lembaga demokrasi, mengurangi biaya politik, dan penguatan desentralisasi;
- Penguatan peran serta *stakeholders* dalam kebijakan, perluasan kemitraan pembangunan (Prinsip *No One Left Behind*), dan peningkatan profesionalitas dan netralitas ASN;
- Penguatan penegakan hukum dengan mengoptimalkan *restorative justice;*
- Penguatan kapasitas pencegahan korupsi melalui penguatan pelaksanaan stranas pencegahan korupsi.

5. Pembangunan Kewilayahan

Pada pembangunan kewilayahan ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal;
- Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI dan daerah tertinggal lainnya;
- Peningkatan konektivitas antar-wilayah;
- Optimalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, KSPN);
- Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur);
- Percepatan pemenuhan SPM terutama di daerah tertinggal;
- Peningkatan inovasi pemerintahan daerah;
- Peningkatan kemudahan perizinan;
- Pengembangan kerja sama antar-daerah, kolaborasi multipihak serta meningkatkan kualitas SDM;

- Penataan pola hubungan Pusat dan Daerah;
- Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan;
- Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah.

Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 memiliki perencanaan pembangunan kewilayahan. Salah satu rencana pembangunan wilayah adalah di Pulau Sumatera. Sektor utama pendukung pembangunan wilayah Sumatera 2020-2024 yaitu:

- Pertanian, kehutanan dan perikanan;
  - Sub sektor tanaman perkebunan
- Industri Manufaktur;
  - Sub sektor industri makanan dan minuman;
  - Sub sektor industri karet, barang dari karet, dan plastik.
- Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.
  - Sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor.

Tema pembangunan wilayah Sumatera pada rancangan teknokrat ini adalah “Pusat produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional”. Dalam implementasinya, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang utama diarahkan untuk:

- Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada KEK Arun Lhokseumawe, Galang Batang, Tanjung Api-Api, Tanjung Kelayang;
- Operasionaliasi KI Kuala Tanjung dan Tanggamus;
- Peningkatan investasi di KEK Sei Mangkei;
- Peningkatan peran dan investasi KPBPB Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun terhadap wilayah;
- Pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba;
- Pengembangan kawasan metropolitan Mebidangro; rencana pengembangan kawasan metropolitan Patung Raya Agung.

4.2.3. Isu Atau Kebijakan Daerah

Isu strategis daerah (Provinsi dan Kabupaten) merupakan suatu kondisi yang berpengaruh terhadap kebijakan jangka menengah pembangunan

Kabupaten Padang Lawas dimana isu tersebut merupakan prioritas utama. Isu strategis daerah yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Padang Lawas antara lain telaahan terhadap Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, RPJPD Kabupaten Padang LawasTahun 2005-2025, serta RTRW Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038.

a. Telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Penelaahan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan kebijakan-kebijakan Provinsi yang selaras dan bisa jadi acuan dalam penyusunan PRPJMD Kabupaten Padang Lawas, sehingga dapat memberikan sumbangsih positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara. Perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 memiliki visi pembangunan "Sumatera Utara yang maju, Aman dan Bermartabat".

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah dengan rincian sebagai berikut:

Misi Pertama:

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga yang terjangkau.

Misi Kedua:

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola Pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Misi Ketiga:

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.

Misi Keempat:

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.

Misi Kelima:

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Sumatera Utara periode 2019-2023, maka dirumuskan prioritas pembangunan untuk memajukan daerah dan meraih martabatnya. Prioritas pembangunan yang dirumuskan harus tepat, realistis dan visioner dengan membaca peluang dan memanfaatkan kelebihan khususnya potensi sumber daya yang dimiliki. Berikut prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara:

a. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
b. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;
c. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
d. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas; dan
e. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

Dalam rangka perwujudan visi misi daerah Sumatera Utara berdasarkan norma-norma kehidupan, nilai-nilai agama dan budaya daerah, serta dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

1. *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) yaitu : pengelolahan pemerintahan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang seimbang, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif diantara pemerintah, swasta dan masyarakat;
2. *Integrity* (Integritas) yaitu : suatu kesatuan prilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang di hasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. *Quality and Accountability* (Mutu dan Akuntabilitas) yaitu : Suatu tingkatan kesempurnaan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan tindakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;
4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan yaitu : upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahtraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan

kesenjangan antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah dan besar.

b. Telaahan RTRW Kabupaten Padang Lawas

Ruang wilayah Kabupaten Padang Lawas sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, dilindungi, dikelola dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Sebagai salah satu bentuk sumberdaya alam, ruang tidak mengenal batas wilayah. Namun jika dikaitkan dengan pengaturannya, ruang haruslah mengenal batas dan sistemnya. Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasaran besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan. Berikut diuraikan program pembangunan wilayah dalam RTRW Kabupaten Padang Lawas untuk tahun 2018 – 2038.

Tabel 4.2
Program Utama Pembangunan Wilayah
Berdasarkan RTRW Tahun 2018–2038

No	Program Utama	Lokasi
A	**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**	
1	**Perwujudan Pusat Kegiatan**	
	1.1. Pengembangan dan Penataan PKL Sibuhuan (Kecamatan Barumun)	Sibuhuan
	1.2. Pengembangan dan Penataan PKK Binanga (Kecamatan Barumun Tengah	Binanga
	1.3. Pengembangan dan Penataan PKK Pasar Ujung Batu (Kecamatan Sosa)	Pasar Ujung Batu
	1.4 Pengembangan dan Penataan PPL Sosopan (Kecamatan Sosopan)	Sosopan
	1.5 Pengembangan dan Penataan PPL Pasar Paringgonan (Kecamatan Ulu Barumun)	Pasar Paringgonan
	1.7 Pengembangan dan Penataan PPL Huristak (Kecamatan Huristak)	Huristak
	1.8 Pengembangan dan Penataan PPL Huta Raja Tinggi (Kecamatan Huta Raja Tinggi)	Huta Raja Tinggi

No	Program Utama	Lokasi
	1.9 Pengembangan dan Penataan PPL Pinarik (Kecamatan Batang Lubu Sutam)	Pinarik
	1.10 Perwujudan/ penetapan tata batas wilayah Kabupaten Padang Lawas	Seluruh wilayah perbatasan Kabupaten Padang Lawas
2	**Perwujudan Sistem Prasarana**	
	Program Transportasi Darat	
	2.1 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi	Ruas Jalan Arteri Sekunder (Ring Road) d Perkotaan Sibuhuan
	A. Dukungan Pembangunan Jaringan Jalan Arteri Sekunder (Ring Road) di Perkotaan Sibuhuan	
		Ruas Jalan Arteri Sekunder (Ring Road) di Perkotaan Sibuhuan
	B. Peningkatan Jaringan Jalan Kolektor Primer (K2)	
		Ruas-ruas jalan kolektor primer K2 di Kabupaten Padang Lawas
	C. Peningkatan Jaringan Jalan Kolektor Primer (K4)	
		Ruas-ruas jalan kolektor primer K4 di Kabupaten Padang Lawas
		Kec. Barumun, Kecamatan Lubuk Barumun, Kecamatan Hutaraja Tinggi
	D. Peningkatan Jaringan Jalan Lokal Primer	
		Ruas-ruas jalan Lokal Primer di Kabupaten Padang Lawas
	A. Pengembangan Sistem Jaringan Rel Kereta Api	
		Kec. Barumun, Kec. Lubuk Barumun, Kecamatan Hutaraja Tinggi
		Pasar Lubuk Barumun
		Pasar Latong (Kecamatan Lubuk Barumun)
	B. Dukungan Peningkatan Pelayanan Terminal Penumpang	
		Sibuhuan
	C. Dukungan Pembangunan Terminal Penumpang	
		(kecamatan Sosa) amatan Barumun Tengah)
	D.Dukungan Pembangunan Pelabuhan Udara (Bandar Udara)	
		APBN & APBD Prov/Kab
	2.2 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Energi/Kelistrikan	PLN Cabang Padang Lawas
		Kecamatan Batang Lubu Sutam
		Seluruh Kecamatan
	2.3 Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	PKL , PPK dan PPL
	2.4 Perwujudan Sistem Prasarana Sumber Daya Air	DAS Barumun Bokan
		Pemeliharaan dan Pengelolaan Daerah Irigasi (DI), meliputi: DI Bundar Padang Agk

No	Program Utama	Lokasi
		Siala dan Aek Rappa, 2.000 ha Di Kandis Sala Dalok Desa Siolip, 400 ha Di Perswahan PP Makmur Di Sala Tabang Tonga Di Sala Kanamon Baran Julu Di Desa Aliga Barmanan Di Desa Lubuk Bunut Di Desa Hurang Jae 50 ha Di Desa Tonga Dalo 75 ha Desa Ujung Batu, Danau Gayambang, 5 ha Di Desa Tanjan Nagk
		Semua sungai di Kabupaten Padang Lawas
	2.4 Perwujudan Pengembangan Prasarana Pengelolaan Lingkungan	
	A. Sistem Penyediaan Air Minum	n nga
		Seluruh Kota PPL
		Seluruh kecamatan
	B. Prasarana Pengelolaan Air Limbah	nga
		Seluruh kecamatan
	C. Pengelolaan Persampahan	Seluruh kecamatan
		nga Peringonan ristak nggi
	D. Sistem Jaringan Drainase	Seluruh kecamatan
		Seluruh kecamatan
		Seluruh kecamatan
B	**PERWUJUDAN POLA RUANG**	
1	Perwujudan Kawasan Lindung	
	1.1 Perwujudan Kawasan Hutan Lindung 1.2 Pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	Kecamatan Barumun 2.691 ha. amatan Batang Lubu Sutam 9.168 ha. amatan Sosa 21.036 ha. amatan Sosopan 2.004 ha. amatan Ulu Barumun 554 ha.
		Kecamatan Barumun, Batang Lubu Sutam, Sosa, Sosopan, Ulu Barumun
		amatan Huristak amatan Barumun

No	Program Utama	Lokasi
		Tengah amatan Lubuk Barumun Tengah amatan Ulu Barumun amatan Sosa amatan Huta Raja Tinggi amatan Batang Lubu Sutam
	1.3 Pemantapan Kawasan perlindungan setempat	
	Penetapan dan pemeliharaan & konservasi kawasan perlindungan setempat :	
		seluruh sungai di Kabupaten Padang Lawas
		amatan Barumun amatan Barumun tengah amatan Batang Lubu Sutam amatan Sosa amatan Ulu Barumun
		Seluruh mata air di Kabupaten Padang Lawas
	1.4 Pemantapan fungsi lindung pada Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	
	Pemantapan dan Pelestarian Cagar Alam (CA) & Suaka Alam (SA)	
		amatan Barumun 9,008 Ha amatan Sosopan 9.939 Ha amatan Ulu Barumun 8.261 Ha
		Kawasan Rekreasi Permata Sapihak< desa Binabo, Kec. Barumun Baru Kawasan Prasasti Kerajaan Panai Kawasan Candi Permandian Kec. Huta Raja Tinggi
	1.5 Perlindungan Terhadap Kawasan Rawan Bencana	Kawasan rawan bencana di Kabupaten Padang Lawas
		ecamatan Barumun ecamatan Barumun tengah amatan Batang Lubu Sutam amatan Sosa amatan Ulu Barumun
		Permukiman Pada Kawasan Rawan Banjir
		amatan Barumun amatan Barumun Tengah
		Permukiman Pada Kawasan Rawan Angin Putting Beliung
2	Perwujudan Kawasan Budidaya	
	Penetapan & Pengembangan Kawasan Hutan Produksi	
	2.1 Pengembangan Kawasan Budidaya Kehutanan	
	Penetapan & Pengembangan Kawasan Hutan Produksi	Hutan Produksi Tetap (HP)= 107.106 Ha Kecamatan Barumun Tengah, Batang Lubu Sutam, Huristak, Huta

No	Program Utama	Lokasi
		Raja Tinggi, Lubuk Barumun, Sosa
		Hutan Produksi Terbatas (HPT)= 40.661 Ha Lokasi Tersebar di Kecamatan Barumun Tengah, Lubuk Barumun, Sosopan, Ulu Barumun
	2.2 Pengembangan Kawasan Pertanian	
	A. Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (lahan Basah) sbg Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kab Padang Lawas	
		Tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas
	B. Pengembangan Kawasan Pertanian Holtikultura (Lahan Kering)	
		Tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Lawas
	2.3. Pengembangan Kawasan Perkebunan	Tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Lawas
	2.4. Pengembangan Kawasan Peternakan	Tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Lawas
	2.5 . Pengembangan Kawasan Perikanan	Kecamatan Sosa
	2.6. Pengembangan Kawasan Pertambangan	Tersebar di Kecamatan : Barumun, Sosa, Batang Lubu Sutam, Hutaraja Tinggi, lubuk Barumun, Ulu Barumun, Sosopan, Barunun Tengah, Huristak
		Tersebar di Kecamatan : Huta Raja Tinggi, Sosa, Barumun Tengah
		Tersebar dibeberapa Kecamatan
		Tersebar dibeberapa Kecamatan
		Di Kawasan Industri
	2.7. Pengembangan Kawasan Pariwisata	Tersebar di Kecamatan Barumun, Sosa, Lubuk Barumun, Barumun Tengah
		Tersebar di Kecamatan : Ulu Barumun, Sosopan, Batang Lubu Sutam, Sosa
		Di Obyek wisata budaya dan alam
	2.8. Pengembangan Kawasan Permukiman	Permukiman perkotaan di PKL dan PPK Permukiman perdesaan di PPL
		Permukiman perkotaan di PKL dan PPK Permukiman perdesaan di PPL
C	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten	
1	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Ekonomi	
	1.1. Kawasan Sentra Produksi CPO di Kecamatan Hutaraja Tinggi (Desa Lubuk Bunut, Sosa Jae)	Kecamatan Hutaraja Tinggi
	1.2. Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit	
	1.3. Kawasan Strategis Perdagangan dan Jasa di Kota Sibuhuan	Sibuhuan (Kecamatan Barumun)

No	Program Utama	Lokasi
2	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Sosial Budaya	
	Pengembangan Kawasan Strategis Sosial Budaya di Kabupaten Padang Lawas	a.Kawasan Kuburan Raksasa Permata Sapihak b.Kawasan Peninggalan Prasasti Karajaan Panai c.Kawasan Candi Permainan
3	Dukungan Perwujudan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	
	Dukungan Perwujudan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	Margasatwa

c. Telaahan KLHS Kabupaten Padang Lawas

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya terobosan yang berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (SDG's) sudah diintegrasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pembuat kebijakan, untuk itu dibutuhkan *political will* pembuat KRP untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk memperhatikan kepentingan lingkungan hidup, dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan. KLHS dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah melalui keutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi.

Ruang lingkup wilayah Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Padang Lawas ini terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan

atau bentuk proses konsultasi publik lainnya. Tujuan Identifikasi Pemangku Kepentingan adalah : Menentukan secara tepat pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan KLHS, Menjamin diterapkannya asas partisipasi, Menjamin hasil perencanaan dan evaluasi program memperoleh legitimasi atau penerimaan oleh publik, dan Masyarakat dan pemangku kepentingan mendapatkan akses untuk menyampaikan informasi, saran, pendapat, dan pertimbangan tentang pembangunan.

Terdapat sasaran pembangunan dalam berbagai macam aspek, mulai dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek kesehatan, aspek sosial, aspek gender, dan aspek lingkungan. Dalam pembangunan berkelanjutan aspek lingkungan. Penerapan SDGS ini tidak memasukkan unsur kelautan dan samudera, dikarenakan Kabupaten Padang Lawas terletak di kawasan pegunungan.

KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas disusun untuk menyempurnakan penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024. Dari hasil penyusunan KLHS tersebut, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dilakukan identifikasi dan penampisan terhadap indikator TPB yang relevan sesuai batasan kewenangan, kondisi, karakteriktik geografis dan demografi wilayah Kabupaten Padang Lawas. Hasil identifikasi indikator yang disepakati menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan akan di analisis target dan capaiannya yaitu sebanyak ; 17 tujuan (goal), 169 target dan 194 indikator TPB.

Hasil identifikasi Indikator TPB sebanyak 194 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, jumlah indikator yang memiliki data atau telah dilaksanakan oleh Kabupaten Padang Lawas sebanyak 50 atau sebesar 25,77 persen dan indikator tidak ada data/belum dilaksanakan sebesar 144 indikator atau 74,22 persen dari total indikator TPB Kabupaten Padang Lawas. Pencapaian indikator Tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Padang Lawas yang telah dilaksanakan sebesar 25,77 persen atau sebanyak 50 indikator, meliputi; indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebanyak 22 indikator atau sebesar 11,34 persen dan indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target sebanyak 28 indikator atau sebesar 14,43 persen. Sedangkan, capaian TPB Kabupaten Padang Lawas yang belum terlaksana dan tidak memiliki data sebanyak 144 indikator atau 74,22 persen. Pelaksanaan capaian indikator TPB dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, yaitu Pilar

Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Pada Pilar Pembangunan Sosial, jumlah target atau sasaran TPB Pilar Pembangunan Sosial sebesar 31 target/sasaran, sedangkan jumlah indikator capaian TPB sebesar 90 indikator. Pelaksanaan capaian indikator TPB pilar sosial Kabupaten Padang Lawas dalam rangka mewujudkan sasaran serta tujuan TPB, yaitu:

- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) sebesar 12 indikator atau 13,33 persen;
- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB) sebesar 22 indikator atau 24,44 persen;
- Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (TD) sebesar 56 indikator atau 62,22 persen.

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi, Jumlah target atau sasaran TPB di Kabupaten Padang Lawas sebesar 28 target/sasaran, sedangkan jumlah indikator capaian TPB sebesar 54 indikator. Pelaksanaan capaian indikator TPB pilar ekonomi Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut:

- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) sebesar 5 indikator atau 5,54 persen;
- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB) sebesar 0 indikator atau 0 persen;
- Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (TD) sebesar 49 indikator atau 90,74 persen.

Pada Pilar Pembangunan Lingkungan, jumlah target atau sasaran TPB di Kabupaten Padang Lawas sebesar 34 target/sasaran, sedangkan jumlah indikator capaian TPB sebesar 31 indikator. Pelaksanaan capaian indikator TPB pilar lingkungan Kota Padangsidimpuan, yaitu ;

- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) sebesar 2 indikator atau 6,45 persen;
- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB) sebesar 4 indikator atau 12,90 persen;
- Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (TD) sebesar 25 indikator atau 80,64 persen.

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, jumlah target atau sasaran TPB di Kabupaten Padang Lawas sebesar 8 target/sasaran, sedangkan jumlah indikator capaian TPB sebesar 18 indikator. Pelaksanaan capaian

indikator TPB pilar pembangunan hukum dan tata kelola Kabupaten Padang Lawas dalam rangka mewujudkan sasaran serta tujuan/goal TPB, yaitu ;

- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) sebesar 3 indikator atau 16,66 persen;
- Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB) sebesar 2 indikator atau 11,11 persen;
- Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (TD) sebesar 13 indikator atau 72,22 persen.

Dari capaian tersebut, telah disusun alternatif skenario dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk menyempurnakan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 sehingga dapat melanjutkan pembangunan tanpa memberi dampak negatif pada keberlanjutan lingkungan hidup.

d. Telaahan PRPJPD Kabupaten Padang Lawas

Dengan memperhatikan potensi, karakteristik, peluang, tantangan, sikap dan pandangan hidup bersama, modal dasar pembangunan pada lebih dari 20 tahun yang akan datang, dan tujuan pokok pembangunan yang ingin diwujudkan, serta kemutlakan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka visi pembangunan Kabupaten Padang Lawas tahun 2005–2025 ditetapkan sebagai berikut.

“MEWUJUDKAN KABUPATEN PADANG LAWAS YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA”

Visi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025 ini mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik di masa datang yang selaras dengan tujuan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Visi diatas dapat dapat dijabarkan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. **Religius**, dimaknai masyarakat Padang Lawas dengan ketaatan dan kepercayaan Kepada Allah SWT. Keberhasilan pencapaian harus dicapai dari dua jalan, bekerja keras dan sungguh- sungguh serta harus tetap selalu berdoa meminta kemudahan, kelancaran, kesuksesan, kepada Allah SWT;
2. **Sejahtera**, dimaknai kondisi masyarakat Padang Lawas secara ekonomi berkembang dengan baik dan merata sehingga kondisi pendidikan, kesehatan terus meningkat;

3. **Berbudaya,** dimaknai dengan kearifan lokal dimana budaya daerah dengan segala keberagamannya menjadi satu keunggulan lokal atau kerakteristik daerah yang dapat menjadi satu perekat dan nilai-nilai budaya lainnya menjadi kekayaan tersendiri yang dapat dikembangkan dan dilestarikan.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Padang Lawas tersebut ditempuh berbagai misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, berdaya saing, mandiri dan sejahtera;
2. Memajukan perekonomian bebasis kerakyatan melalui pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)*;
3. Mewujudkan Sistem pemerintahan yang baik *(good governance)* profesional dan berkeadilan;
4. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana penunjang pembangunan masyarakat dan aktivitas Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas;
5. Menjaga sumber daya alam dari kerusakan dan mewujudkan lingkungan hidup yang nyaman, bersih, sehat, asri dan lestari.

- **Prioritas dan Arah Pembangunan PRPJMD ke-4**

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan PRPJMD ke-3, maka pada PRPJMD ke-4 ditargetkan mulai terlihat adanya daya saing perekonomian daerah dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan agribisnis yang makin berperan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah. Sudah terbangun iklim usaha kondusif dan makin berkembangnya peran usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi serta sektor penunjang lainnya terutama jasa dan perdagangan, industri (termasuk industri kecil atau rumah tangga) dan pariwisata (Agrowisata). Produktivitas lahan pertanian dan agroindustri makin ditingkatkan, agribisnis hulu dan hilir mulai dikembangkan.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terus meningkat, ditujukan oleh semakin meningkatnya IPM. Sumber Daya Manusia makin mendukung daya saing perekonomian daerah, penciptaan masyarakat yang dinamis, damai dan demokratis serta pemeliharaan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kinerja aparatur pemerintahan terus meningkat, ditunjang dengan peningkatan sarana dan prasarana yang tersedia, pelayanan publik di berbagai aspek membaik. Kesenjangan pembangunan dan pelayanan publik antar wilayah kecamatan semakin berkurang.

Desa-desa yang belum menikmati listrik, dimasuki kenderaan bermotor, memiliki Sekolah Dasar, dan fasilitas kesehatan sudah semakin sedikit. Kerusakan Sumber Daya Alam (SDA) makin sedikit, upaya restorasi dan rehabilitasi Sumber Daya Alam (SDA) mulai dilakukan. Upaya menciptakan kondisi lingkungan hidup yang aman, nyaman, bersih, asri dan lestari makin meningkat.

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, maka **isu strategis Kabupaten Padang Lawas** adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki *value* dan berketrampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

b. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah

Pembangunan dan Pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontiniu sehingga menimbulkan arus barang. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau

antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan daya dongkrak yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Pembangunan infrastruktur Kabupaten Padang Lawas merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

c. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan

Masalah kemiskinan dewasa ini merupakan *crucial problem*. Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukan angka yang *fluktuatif* dan cenderung meningkat. Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi.Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar.

d. Reformasi Birokrasi

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan

pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN.Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsip dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

e. Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan dan Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan

Kabupaten Padang Lawas memiliki potensi unggulan sumber daya daerah yang sangat kaya. Dari terlihat dari produktivitas hasil pertanian dalam arti luas diharapkan bergerak positif. Dengan hal ini, untuk mempercepat pergerakan perekonomian daerah perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan. Selain itu, optimalisasi industri pengelolaan dan aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi swasta. Dengan adanya peran investasi swasta maka pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal. Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hasil alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampaidimasa yang akan datang.

BAB V

VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi pembangunan daerah dalam PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas, potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu–isu strategis yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas, maka ditetapkan Visi PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 yaitu:

"MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGANKERJA KERAS DAN KERJA CERDAS"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

BERIMAN : Keadaan masyarakat yang memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berinteraksi dengan akhlak mulia, menjunjung toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

CERDAS : Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan intelektualitas, kreatif dan inovatif, memiliki keterampilan dan kompetensi, serta menguasai informasi.

SEHAT : Keadaan masyarakat terpenuhi kebutuhan untuk hidup dengan pola hidup sehat, berstatus gizi baik dan usia harapan hidup tinggi.

SEJAHTERA : Keadaan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara merata. Menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, Meningkat Meningkatnya kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

BERBUDAYA : Suatu keadaan di mana masyarakat dalam interaksinya berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai kearifan lokal. Berkembangnya budaya membentuk masyarakat yang beradab, memiliki martabat kemanusiaan dan harga diri, serta karakter khas masyarakatnya.

KERJA KERAS : Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang bersungguh - sungguh dalam melaksanakan tugas, disiplin dan pemanfaatan waktu yang optimal, beretos kerja, mengutamakan kinerja yang maksimal dan pencapaian target kinerja yang maksimal pula.

KERJA CERDAS : Keadaan mental masyarakat dan pemerintah yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas kinerja, meminimalkan resiko kerja, memanfaatkan peluang dan mencari solusi terbaik, memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, dan akuntabilitas kinerja.

5.2. MISI

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. **Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi,** dengan sistem yang demokrasi dan dengan membuat sistem informasi yang berbasis teknologi dapat membawa perubahan radikal dalam sistem pemerintahan melalui proses menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan agar menjadi lebih bersih, baik, efektif, efisien, dan produktif serta berorientasi kepada publik.
2. **Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata,** karena kedekatan dan kepercayaan hubungan hanya dapat dibina melalui kegiatan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan melakukan pelayanan maksimal terhadap masayarakat dengan menetapkan standar pelayanan publik dan pelayanan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungannya agar pelayanan tepat dan sesuai.

3. **Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah,** karena di daerahnya rata-rata bermata pencaharian bertani dan berkebun harus mendorong peningkatan pengembangan dan nilai lebih sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dan juga produknya dengan memfokuskan pembangunan ekonomi potensial masyarakat daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, mendorong berkembangnya sektor industri dan kreatif lokal daerah yang berdaya saing tinggi, serta dapat menunjang perekonomian masyarakat daerah.
4. **Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang,** karena wilayah memiliki lahan dan ruang yang masih luas dapat meningkatkan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan, yang disesuaikan dengan pemanfaatan ruang, pembangunan peningkatan dan pengelolaan prasarana di permukiman termasuk juga akses peningkatan jalan, pasar, perumahan yang layak, air bersih dan sanitasi serta transportasi publik.
5. **Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal,** dengan melestarikan, menggali, memperkenalkan serta dengan meningkatkan norma dan adat istiadat, tradisi, budayadan kearifan lokal, dan pranata lokal dalam rangka meningkatkan potensi dan daya tarik pariwisata dalam upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat serta kehidupan beragama yang damai dan aman agar nantinya sebagai serambi mekah terwujud.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran dengan target terukur. Kinerja sasaran disusun selama lima tahun dengan target setiap tahun selama periode Tahun 2020–2024, seperti disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

"MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN,CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS"

MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	2020		TARGET			KONDISI AKHIR
								TAHUN 2018	Target	Realisasi	2021	2022	2023	TAHUN 2024
1.	Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	1.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	65	66	65	67	68	69	70
				1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)	Nilai (Predikat)	C	CC	C	C	C	CC	B
						Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (Predikat)	70(Baik)	75(Baik)	75(Baik)	75(Baik)	78(Baik)	80(Baik)	81(Baik)
						Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
						Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	%	50	70	70	80	90	95	100

MISI		TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	2020		TARGET			KONDISI AKHIR
							TAHUN 2018	Target	Realisasi	2021	2022	2023	TAHUN 2024
2.	Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata	2.1	Meningkatkan kualitas daya saing kehidupan masyarakat dan Implementasi Pengarusutamaan gender		IPM	Poin	67,59	67,65	68,25	67,78	68	68,05	68,05
				2.1.1	Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Persen	N/A	66,50	66,22	68,21	70,25	72,36	74,53
				2.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Persen	N/A	70,60	70,15	70,85	71,56	72,28	73,00
				2.1.3	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,25	86,1	85,75	86,55	87	87,45	87,9
3.	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah	3.1	Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi PDRB		Kontribusi PDRB PerKapita	Juta (Rupiah)	N/A	27.346,23	28.097,48	28.298,16	28.497,88	28.703,07	28.909,73
				3.1.1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta (Rupiah)	40,07	41,32	52,96	42,45	43,99	45,15	46,27
4.	Meningkatkan pembangunan	4.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang berwawasan lingkungan		Indeks Infrastruktur	Poin	75	80	75	78	80	84	88

MISI		TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	2020		TARGET			KONDISI AKHIR
							TAHUN 2018	Target	Realisasi	2021	2022	2023	TAHUN 2024
	infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	N/A	71.00	N/A	71,52	72,04	72,6	73,12
			4.1.1	Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur jalan, rumah tangga bersanitasi dan Rumah Layak Huni	Kondisi jalan mantap	Persen	27,89	37	49,96	53	56	59	62
					Persentase rumah tangga bersanitasi	Persen	59	60	N/A	63	68	75	80
					Rasio rumah layak huni	Persen	60,9	61	60.90	62	64	66	66
			4.1.2	Meningkatnya Kualitas Udara dan Air serta kesesuaian terhadap tata ruang Wilayah	Indeks kualitas Udara	Persen	60	62	8,2	63	64	65	66
					Indeks kualitas Air	Persen	80	80,5	80	75	75	75	76
					Persentase konsistensi Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	95	100	95	100	100	100	100
5.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal	5.1	Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan local		Jumlah bidang keagamaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi	Jumlah	N/A	8	5	10	10	12	12
					Jumlah bidang Kebudayaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat	Jumlah	N/A	4	3	5	6	7	7

MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	2020		TARGET			KONDISI AKHIR
						TAHUN 2018	Target	Realisasi	2021	2022	2023	TAHUN 2024
			Provinsi									
		5.1.1	Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Jumlah masyarakat yang berprestasi STQH tingkat Provinsi	Jumlah	N/A	8	5	10	10	12	12
		5.1.2	Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang Kebudayaan	Jumlah masyarakat yang berprestasi di Bidang Seni Tari tingkat Provinsi	Jumlah	N/A	10	5	10	10	10	10

5.4. Sinkronisasi Prpjmd Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah, sehingga dalam penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. Serta berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Lawas yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018-2038, melalui penyelarasan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Keterkaitan tersebut sebagaimana terdapat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 5.2

Perbandingan Visi RPJPN dengan RPJMN, RPJMD Provinsi RPJPD dan PRPJMD Kabupaten Padang Lawas

RPJPN Tahun 2005-2025	Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur
RPJMN Tahun 2020-2024	Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong
RPJMD Provinsi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023	Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat
RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025	Mewujudkan Kabupaten Padang Lawas yang Religius, Sejahtera dan Berbudaya
PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024	Meneruskan Pembangunan Padang Lawas yang Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya (Bercahaya) dengan Kerja Keras dan Kerja Cerdas

Tabel. 5.3

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan NAWACITA

VISI		MISI	NAWACITA
Meneruskan Pembangunan Padang Lawas yang Beriman, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya (Bercahaya) dengan Kerja Keras dan Kerja Cerdas	1	Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Reformasi birokrasi. Kecepatan melayani dan memberi izin, menghapus pola piker linier, monoton dan terjebak di zona nyaman serta adaptif, produktif, inovasi dan kompetitif.
	2	Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata	Pembangunan sumber daya manusia. Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta.
	3	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah	Undang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan. Memangkas hambatan investasi.
	4	Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang	Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan : industry kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan
	5	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal	APBN yang focus dan tepat sasaran. APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 5.4

Keterkaitan Misi RPJMD dengan NAWACITA, RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kabupaten Padang Lawas

NO	MISI	NAWACITA	RPJMN	RPJMD PROVSU	RPJPD KABUPATEN PADANG LAWAS
1	Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Mendukung NAWACITA nomor 1	Mendukung misi RPJMN nomor 4	Mendukung misi RPJMD Provinsi nomor 2	Mendukung Misi RPJPD Kabupaten Padang Lawas nomor 1,3 dan 4
2	Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata	Mendukung NAWACITA nomor 2	Mendukung misi RPJMN nomor 1	Mendukung misi RPJMD Provinsi nomor 1, 2 dan 3	Mendukung Misi RPJPD Kabupaten Padang Lawas nomor 1 dan 4
3	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah	Mendukung NAWACITA nomor 3	Mendukung misi RPJMN nomor 5	Mendukung misi RPJMD Provinsi nomor 1	Mendukung Misi RPJPD Kabupaten Padang Lawas nomor 2
4	Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang	Mendukung NAWACITA nomor 4	Mendukung misi RPJMN nomor 2	Mendukung misi RPJMD Provinsi nomor 5	Mendukung Misi RPJPD Kabupaten Padang Lawas nomor 2, 4 dan 5
5	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal	Mendukung NAWACITA nomor 5	Mendukung misi RPJMN nomor 3	Mendukung misi RPJMD Provinsi nomor 1	Mendukung Misi RPJPD Kabupaten Padang Lawas nomor 1

Dalam tabel keterkaitan Misi antara Dokumen PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 dengan NAWACITA Presiden Jokowi, RPJMN tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 serta RPJPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2005-2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Misi Pertama dalam PRPJMD Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi**, sangat terkait dengan NAWACITA Presiden Jokowi khususnya pada Cita ke 4, yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya sedangkan keterkaitan dengan RPJMN dengan misi nomor 2, 4 dan 5 yaitu mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis, berlandaskan negara hukum, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Sedangkan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara terkait dengan misi 1 yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik. Sedangkan dengan Dokumen RPJPD Kabupaten Padang Lawas misi 1, 3 dan 4 yaitu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, berdaya saing, mandiri dan sejahtera, mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, profesional dan berkeadilan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pembangunan masyarakat dan aktivitas pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
2. **Misi Kedua dalam PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata**, sangat terkait dengan NAWACITA Presiden Jokowi dengan Cita ke 1 yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang tepercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan tepercaya. Sedangkan dengan RPJMN terkait dengan Misi ke 1 dan 4 yaitu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Keterkaitan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan Misi ke 1, 2 dan 3 yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, politik dan pendidikan, sedangkan dengan RPJPD Kabupaten Padang Lawas terkait dengan Misi ke 1 dan 4 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, berdaya saing, mandiri dan sejahtera, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pembangunan masyarakat dan aktivitas pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

3. **Misi Ketiga dalam PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah** dengan NAWACITA Presiden Jokowi terkait dengan Cita ke 5 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, sedangkan RPJMN terkait dengan Misi 4 dan Misi 5 yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dengan Misi ke 4 dan 5 yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan dan lingkungan, sedangkan dengan RPJPD Kabupaten Padang Lawas terkait dengan Misi ke 2 yaitu memajukan perekonomian berbasis kerakyatan melalui pembangunan berkelanjutan.
4. **Misi Keempat dalam PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur** guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan

memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang dengan NAWACITA Presiden Jokowi terkait dengan Cita ke 2 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sedangkan dengan Dokumen RPJMN terkait dengan Misi 4 dan 5 yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Misi ke 5 yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan, sedangkan dengan RPJPD Kabupaten Kabupaten Padang Lawas terkait dengan Misi ke 2, 4 dan 5 yaitu memajukan perekonomian berbasis kerakyatan melalui pembangunan berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pembangunan masyarakat dan aktivitas pemerintah Kabupaten Padang Lawas, menjaga sumber daya alam dari kerusakan dan mewujudkan lingkungan hidup yang nyaman, bersih, sehat, asri dan lestari.

5. **Misi Kelima dalam PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal** dengan NAWACITA Presiden Jokowi terkait dengan Cita ke 3 yaitu memperteguh kebinekaan pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar kewarga negaraan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat. Sedangkan dengan Dokumen RPJMN terkait dengan misi 7 yaitu mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Misi ke 1 yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, sedangkan dengan RPJPD Kabupaten Padang Lawas terkait dengan Misi ke 1 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, berdaya saing, mandiri dan sejahtera.

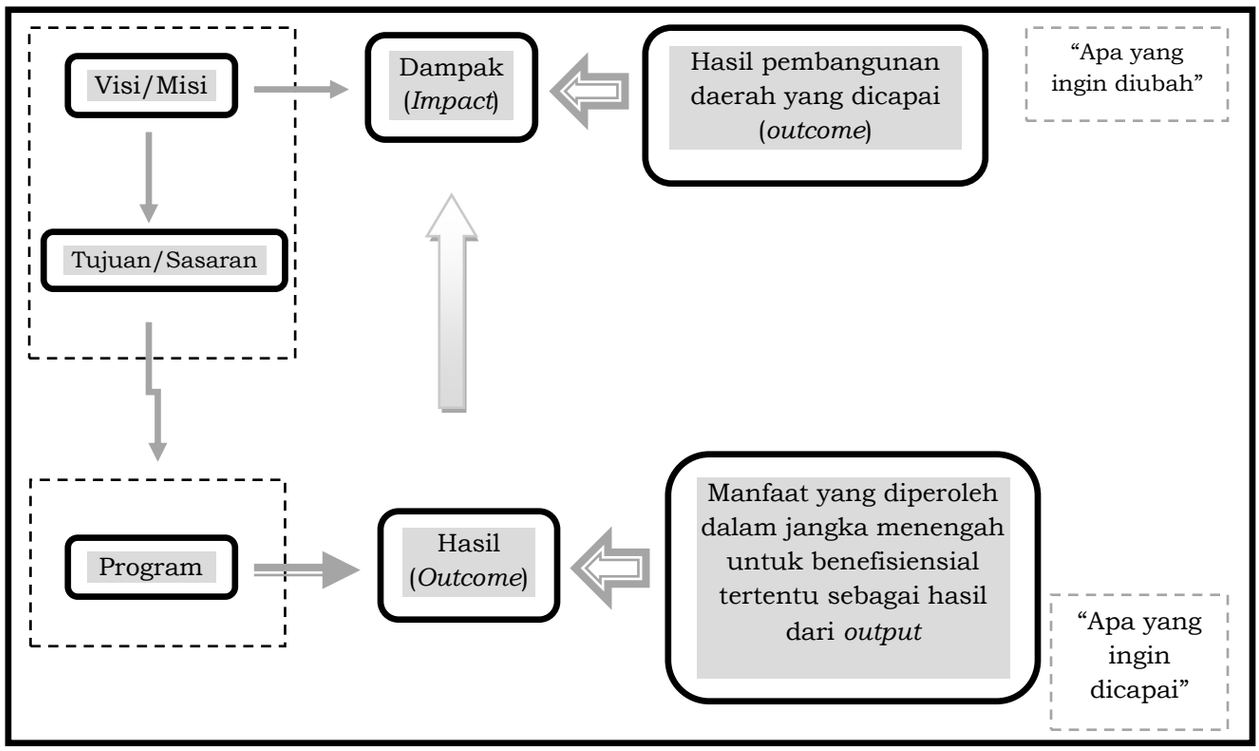
Tabel 5.5
Keterkaitan RTRW Kabupaten Padang Lawas dengan PRPJMD

NO	DOKUMEN RTRW	DOKUMEN PRPJMD
1	Mewujudkan Kabupaten Padang Lawas sebagai Kawasan Agropolitan yang didukung oleh pengembangan industri dalam rangka pemerataan pertumbuhan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.	Program-program RPJMD yang mendukung RTRW ini : Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program Pemanfaatan Ruang; Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; Program Lingkungan Sehat Perumahan; Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman; Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan); Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
	a. Penetapan kawasan pertumbuhan baru untuk pengembangan perkebunan, pertanian, dan industri guna yang berbasis agri bisnis dan industri.	Program-program PRPJMD yang mendukung RTRW ini : Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
	b. Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan untuk mewujudkan Kabupaten Padang Lawas sebagai kawasan agropolitan dan industri.	Program-program PRPJMD yang mendukung RTRW ini : Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.
	c. Peningkatan peran dan fungsi sistem perkotaan yang merata dan berhierarki;	Program-program PRPJMD yang mendukung RTRW ini : Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; Program Penataan Daerah Otonomi Baru; Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
	d. Peningkatan aksesibilitas internal dan eksternal wilayah;	Program-program PRPJMD yang mendukung RTRW ini : Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
	e. Peningkatan pelayanan prasarana dan sarana wilayah;	Program-program PRPJMD yang mendukung RTRW ini : Program Pemberdayaan Penyuluh; Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; Program

NO	DOKUMEN RTRW	DOKUMEN PRPJMD
		Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; Program Penataan Administrasi Kependudukan; Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
	f. Peningkatan perlindungan kawasan lindung dan pelestarian lingkungan;	Program-program PRPJMD yang mendukung RTRW ini : Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air.
	g. Pengembangan kawasan budidaya hutan dan pertanian yang produktif.	Program-program PRPJMD yang mendukung RTRW ini : Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan); Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
	h. Pengembangan sektor pariwisata secara menyeluruh dan terpadu.	Program-program RPJMD yang mendukung RTRW ini : Program perencanaan pembangunan daerah; Program perencanaan social dan budaya; Program Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata; Program Pengembangan Nilai Budaya.

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dan pelaksanaan atas visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan visi dan misi yang menjadi janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih harus diterjemahkan dan dilaksanakan dalam bentuk PRPJMD yang akan dilaksanakan melalui RKPD dan Renstra OPD. Dalam penyusunan PRPJMD, visi dan misi dijabarkan menjadi rumusan tujuan dan sasaran, kemudian tujuan dan sasaran dijabarkan melalui strategi dan arah kebijakan dan dilaksanakan dengan program prioritas pembangunan daerah untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Dalam rangka memperjelas bagaimana mekanisme dari program, dapat memberikan dampak dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran maka disajikan *logical frame work* dalam bentuk arsitektur kinerja dalam mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

Gambar 5.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Padang Lawas mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara efektif dan efisien. Pendekatan komprehensif dalam merencanakan strategi dapat mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak hanya mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung terciptanya layanan masyarakat yang terukur, terarah, dan teratur dalam rangka pengamalan asas-asas keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, dan kekeluargaan, serta musyawarah untuk mufakat.

6.1. Strategi

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup keseluruhan sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Perubahan yang ingin dicapai adalah perubahan menuju kepada keadaan yang lebih baik dan berdampak positif konstruktif pada organisme di dalamnya. Pembangunan dikatakan berhasil jika mampu mengantarkan masyarakat pada kondisi yang sejahtera. Pembangunan dikatakan berhasil ketika kinerja penyelenggaraan pemerintahan optimal dan sesuai target.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah *(strategy focused management)* dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam menciptakan nilai tambah *(value added)* bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dalam batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Rumusan strategi dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan upaya yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang akan dicapai dan kemudian diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya dijadikan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Lawas antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta pokok permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya Pemerintah daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran variable keberhasilan *(key success factor)* dan mengembangkan kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional;
5. Mengevaluasi berbagai alternative strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, maka strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikuti ini.

Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

"MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS"

MISI		TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
1.	Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	1.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah
						Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah di lingkungan pemerintah Daerah
						Peningkatan pembinaan evaluasi terhadap OPD Penyelenggara pelayanan publik
2.	Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata	2.1	Meningkatkan kualitas daya saing kehidupan masyarakat dan Implementasi Pengarusutamaan gender	2.1.1	Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan
						Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
						Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan
				2.1.2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
				2.1.3	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan gender	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Pendidikan terhadap Pembangunan

MISI		TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
						Peningkatan dan Pengembangan Kualitas dan Peoduktivitas Tenaga Kerja
						Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
						Pengembangan dan Pemberdayaan terhadap Penanggulangan Kesehatan
						Peningkatan Kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender Perempuan dan Anak
3.	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah	3.1	Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi PDRB	3.1.1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berdaya Saing
						Peningkatan nilai tambah produk pertanian, kehutanan dan perikanan
						Peningkatan kinerja layanan irigasi optimal untuk mendukung kemandirian
						Peningkatan nilai tambah produk unggulan/kratif lokal
						Stabilisasi harga dan pasokan pangan
				3.1.2	Terciptanya Iklim Investasi dan usaha yang kondusif	Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4.	Meningkatkan	4.1	Meningkatnya	4.1.1	Meningkatkan	Bantuan

MISI		TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
	pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang		Kualitas Infrastruktur yang berwawasan lingkungan		cakupan pelayanan infrastruktur jalan, rumah tangga bersanitasi dan Rumah Layak Huni	rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu
						Pembangunan peningkatan dan pengelolaan prasarana di permukiman
						Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pembinaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
						Pembangunan dan Peningkatan Sambungan Listrik Rumah Tangga Masyarakat
						Pembangunan dan peningkatan Jalan
						Revitalisasi Pasar
						Pembangunan PSU Permukiman bagi masyarakat kurang mampu
				4.1.2	Meningkatnya Kualitas Udara dan Air serta kesesuaian terhadap tata ruang Wilayah	Peningkatan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan Penataan, Pembinaan dan pendampingan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari
5.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penguatan budaya dan kearifan lokal	5.1	Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan lokal	5.1.1	Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama
						Meningkatkan fungsi rumah ibadah sebagai sarana kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan
				5.1.2	Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang Kebudayaan	Penguatan Warisan Budaya Daerah dan meningkatkan potensi dan daya tarik pariwisata

6.2. Arah Kebijakan PRPJMD Kabupaten Padang Lawas

Arah kebijakan adalah penjabaran strategi dalam mencapai sasaran PRPJMD serta jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan. Dengan demikian, arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam mencapai tujuan. Untuk itu, arah kebijakan harus dapat merumuskan tehadap prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran PRPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari suatu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran terhadap lima tahunan dalam PRPJMD.

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaanya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas pembangunan RKPD setiap tahunnya.

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (Tahun 2020)

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2020 memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan pembangunan tahap berikutnya. Untuk itu, arah kebijakan pembangunan tahun pertama ini difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan daya saing daerah melalui pemerataan pembangunan dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur;
2. Peningkatan kualitas SDM;
3. Penciptaan kesempatan kerja dan berusaha;
4. Pembinaan produk unggulan daerah;
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Mendukung kebijakan nasional dan provinsi.

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (Tahun 2021)

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Lawas pada tahun 2021 berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan pembangunan berkelanjutan tahun 2020. Pembangunan Kabupaten Padang Lawas tahun 2021 mulai difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, dengan arah kebijakan:

1. Pengurangan angka pengangguran dengan penciptaan kesempatan kerja dan berusaha;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;
3. Penguatan kapasitas ekonomi rakyat secara berkelanjutan pasca pandemi covid 19;
4. Perwujudan ketahanan pangan dan energi;
5. Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur;
6. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
7. Mendukung kebijakan nasional dan provinsi.

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (Tahun 2022)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing SDM, dengan arah kebijakan :

1. Pengurangan angka pengangguran dengan penciptaan kesempatan kerja dan berusaha;
2. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
3. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan pasca pandemi covid 19;
4. Perwujudan ketahanan pangan dan energi;
5. Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur;
6. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
7. Mendukung kebijakan nasional dan provinsi.

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (Tahun 2023)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada upaya pengoptimalan dan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang beriman, cerdas, sehat,

sejahtera dan berbudaya (bercahaya) khususnya dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

e. Arah Kebijakan Tahun Kelima (Tahun 2024)

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada akselerasi pencapaian program-program prioritas untuk terwujudnya Kabupaten Padang Lawas yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera dan berbudaya (bercahaya).

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan				
Tahun-1 2020	**Tahun-2 2021**	**Tahun-3 2022**	**Tahun-4 2023**	**Tahun-5 2024**
Difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan daya saing daerah melalui pemerataan pembangunan dengan arah kebijakan: 1. Peningkatan kualitas infrastruktur; 2. Peningkatan kualitas SDM; 3. Penciptaan kesempatan kerja dan berusaha; 4. Pembinaan produk unggulan daerah; 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; 6. Mendukung kebijakan nasional dan provinsi.	Difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, dengan arah kebijakan: 1. Pengurangan angka pengangguran dengan penciptaan kesempatan kerja dan berusaha; 2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia; 3. Penguatan kapasitas ekonomi rakyat secara berkelanjutan pasca pandemic covid 19; 4. Perwujudan ketahanan pangan dan energi; 5. Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur;	Difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing SDM, dengan arah kebijakan : 1.Pengurangan angka pengangguran dengan penciptaan kesempatan kerja dan berusaha; 2. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing; 3. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan pasca pandemic covid 19; 4. Perwujudan ketahanan pangan dan energi; 5. Pengurangan kesenjangan wilayah dengan peningkatan kualitas infrastruktur; 6. Pemantapan tata	Difokuskan pada upaya pengoptimalan dan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera dan berbudaya (bercahaya) khususnya dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.	Difokuskan pada akselerasi pencapaian program-program prioritas untuk terwujudnya Kabupaten Padang Lawas yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera dan berbudaya (bercahaya).

Arah Kebijakan				
Tahun-1 2020	**Tahun-2 2021**	**Tahun-3 2022**	**Tahun-4 2023**	**Tahun-5 2024**
	6. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 7. Mendukung kebijakan nasional dan provinsi.	kelola pemerintahan yang baik dan bersih; 7. Mendukung kebijakan nasional dan provinsi.		

6.3. Kegiatan Unggulan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Padang Lawas akan dilaksanakan serangkaian program unggulan yang akan mendorong terjadinya "***lompatan"*** dalam pembangunan Kabupaten Padang Lawas yaitu:

1. ***Prioritas Pembangunan Misi – 1,*** yang diimplementasikan kepada :
    1. Penguatan perencanaan dan penganggaran melalui *e-Planning* dan *e-Budgeting*;
    2. Penerapan SPM urusan wajib pelayanan dasar;
    3. *One stop service* pelayanan publik berbasis elektronik;
    4. Pembangunan basis data *center* (basis data Kabupaten);
    5. Penerapan *e-Government*.
2. ***Prioritas Pembangunan Misi – 2,*** yang diimplementasikan kepada :
    1. Pemberantasan buta huruf (semua bisa baca);
    2. Pendidikan sejak dini melalui PAUD;
    3. Akses sekolah bagi anak usia sekolah (tidak ada anak usia sekolah yang tidak sekolah);
    4. Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan cerdas;
    5. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan;
    6. Peningkatan pelayanan rumah sakit dan puskesmas;
    7. Akreditasi dan standarisasi pelayanan kesehatan;
    8. Pelaksanaan PHBS;
    9. Revitalisasi posyandu;
    10. Peningkatan cakupan jaminan kepesertaan BPJS terutama bagi masyarakat kurang mampu;
    11. Penambahan jumlah dokter di Kabupaten;
    12. Pembentukan desa mandiri pangan;
    13. Pelatihan tenaga kerja dan minat wirausaha;
    14. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;

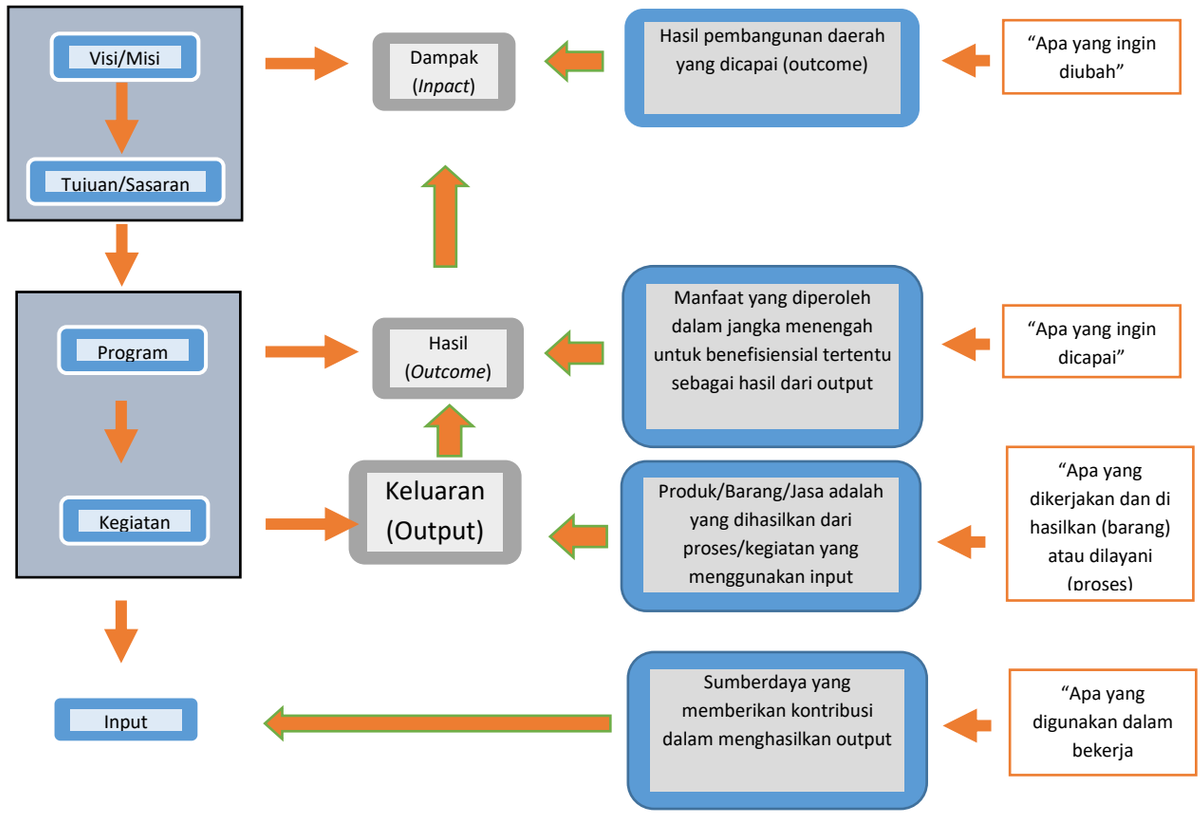
3. ***Prioritas Pembangunan Misi-3,*** yang diimplementasikan kepada :
   1. Area lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai basis ketahanan pangan Kabupaten;
   2. Pembangunan kawasan peternakan;
   3. Pembinaan bina kelompok industri kreatif;
   4. Promosi produk unggulan daerah;
   5. Promosi dan pengembangan *branding* wisata daerah;
   6. Pengembangan Daerah Irigasi.

4. ***Prioritas Pembangunan Misi-4,*** yang diimplementasikan kepada :
   1. Pengembangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah;
   2. Penataan Ibukota kabupaten;
   3. Peningkatan jalan lingkar Kabupaten Ruas Sisupak - Latong;
   4. Peningkatan status jalan kewenangan Provinsi menjadi kewenangan Nasional;
   5. Peningkatan status jalan kewenangan Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi;
   6. Peningkatan Pengolahan Persampahan ;
   7. Revitalisasi pasar tradisional ;
   8. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak, air bersih dan sanitasi.

5. ***Prioritas Pembangunan Misi-5,*** yang diimplementasikan kepada :
   1. Penetapan *event-event* akbar sosial keagamaan sebagai agenda wajib dan ikonik daerah;
   2. Festival seni budaya daerah;
   3. Pembinaan kelompok sanggar seni budaya dan kelompok seni keagamaan;
   4. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah, rumah adat dan budaya;
   5. Pemugaran dan pelestarian cagar budaya daerah.

Gambar 6.1

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Untuk penjabaran program pembangunan daerah yang mengarah langsung pada perwujudan cita-cita daerah yang tertuang dalam visi dan misi tersaji dalam Tabel berikut ini.

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

VISI : MENERUSKAN PEMBANGUNAN PADANG LAWAS YANG BERIMAN, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA (BERCAHAYA) DENGAN KERJA KERAS DAN KERJA CERDAS

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi																
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai (Predikat)	65	65	67		68		69		70		70		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah, Kualitas Pelayanan Publik dan kinerja keuangan daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan (AKIP)		Nilai (Predikat	C	C	CC		CC		B		B		B		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Nilai LAKIP dan Pembangunan Perangkat daerah	%	N/A		100	1.613.466.422		2.107.456.670		2.107.456.670		2.107.456.670	100	7.935.836.432	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan	%	WTP	WTP	WDP	307.742.132.729	WDP	292.976.357.664	WDP	292.976.357.664	WDP	292.976.357.664		1.186.671.205.721	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100		100	1.419.735.744	100	975.208.980	100	975.208.980	100	975.208.980		4.345.362.684	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal/Khusus/ , Kematangan SPIP, Tindaklanjut LHP,Nilai LAKIP	%	68		85	3.553.509.420	90	3.826.029.500	95	3.826.029.500	100	3.826.029.500		15.031.597.920	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Pelaporan LP2P/LHKPN/ LHKASN tepat waktu	%	N/A		100	664.496.430	100	668.105.000	100	668.105.000	100	668.105.000		2.668.811.430	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Konsistensi Antara RKPD dan RPJMD	%	98.16		98,67	3.294.351.548	99	2.084.303.300	99,05	2.084.303.300	99,1	2.084.303.300		9.547.261.448	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Capaian Program Prioritas Pembangunan	%	100		100	1.475.954.658	100	1.298.205.550	100	1.298.205.550	100	1.298.205.550		5.370.571.308	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Hasil Penelitian Yang Dimanfaatkan	%	N/A		50	84.095.990	55,5	31.530.000	60	31.530.000	60	31.530.000		178.685.990	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Indeks kepuasan masyarakat		Nilai (Predikat	70(Baik)	75(Baik)	75(Baik)		78(Baik)		80(Baik)		82(Baik)		82(Baik)		

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	7.08		7.1	29.498.115.820	7.11	20.396.584.470	7.12	20.396.584.470	7.13	20.396.584.470	7.13	90.687.869.230	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIBUHUAN
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100		100		100		100		100		100		
		Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%	101		100		100		100		100		100		
		Cakupan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan nifas	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Neonatus Lengkap	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan kunjungan bayi	%	75.1		75.26		75.35		75.45		75.55		75.55		
		Cakupan pelayanan anak balita	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Puskesmas	%	116.67		118.07		118.27		118.47		118.67		118.67		
		Cakupan Pembantu Puskesmas	%	13.07		13.47		13.67		13.87		14.07		14.07		

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Rumah sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100		100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Jumlah Pasangan Berakte Nikah	%	19,96		31,415	1.151.942.700	35,72	405.100.000,00	36,711	405.100.000	50.00	405.100.000	50.00	2.367.242.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jiwa	149,447		262,846		267		281,236		300.00		300.00		
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Jiwa	104,064		262,846		267		281,236		300.00		300.00		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	7.08		7.1	53.749.497.064	7.11	48.600.165.502	7.12	48.600.165.502	7.13	48.600.165.502	7.13	199.549.993.570	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100		100		100		100		100		100		
		Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%	101		100		100		100		100		100		

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Cakupan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan nifas	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Neonatus Lengkap	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan kunjungan bayi	%	75.1		75.26		75.35		75.45		75.55		75.55		
		Cakupan pelayanan anak balita	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Puskesmas	%	116.67		118.07		118.27		118.47		118.67		118.67		
		Cakupan Pembantu Puskesmas	%	13.07		13.47		13.67		13.87		14.07		14.07		
		Persentase Rumah sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100		100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	51,3		51,7	106.849.992	51.9		52.1		52.5		52.5	106.849.992	DINAS KESEHATAN
		Persentase Anak usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	%	90,2		94		94.5		95		95.5		95.5		

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah		Opini	WDP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan	%	WTP		WDP	307.742.132.729	WDP	292.976.357.664	WDP	292.976.357.664	WDP	292.976.357.664		1.186.671.205.721	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100		100	1.419.735.744	100	975.208.980	100	975.208.980	100	975.208.980		4.345.362.684	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal/Khusus/ , Kematangan SPIP, Tindaklanjut LHP,Nilai LAKIP	%	68		85	3.553.509.420	90	3.826.029.500	95	3.826.029.500	100	3.826.029.500		15.031.597.920	INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Pelaporan LP2P/LHKPN/ LHKASN tepat waktu	%	N/A		100	664.496.430	100	668.105.000	100	668.105.000	100	668.105.000		2.668.811.430	INSPEKTORAT DAERAH
	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		%	50	70	80		90		95		100		100		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Konsistensi Antara RKPD dan RPJMD	%	98.16		98,67	3.294.351.548	99	2.084.303.300	99,05	2.084.303.300	99,1	2.084.303.300		9.547.261.448	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan	%	WTP		WDP	307.742.132.729	WDP	292.976.357.664	WDP	292.976.357.664	WDP	292.976.357.664		1.186.671.205.721	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Online	%	N/A		100	218.359.892	100	198.722.700	100	198.722.700	100	198.722.700		814.527.992	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPDU SATU PINTU
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Baik		Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	5.9		7,45	985.590.248	9,17	979.852.800	7,45	979.852.800	9,17	979.852.800		3.925.148.648	BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		jumlah data center	Jumlah	1		1	447.719.338	1	454.110.000	1	454.110.000	1	454.110.000		1.810.049.338	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Mewujudkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang terjangkau dan merata																
Meningkatkan kualitas daya saing kehidupan masyarakat dan Implementasi Pengarusutamaan gender	IPM		Poin	67.59	68.25	67.78		68		68.05		68.05		68.05		
Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan		N/A	N/A	66.22	68.21		70.25		72.36		74.53		74.53		

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	94.2		94,5	71.860.401.058	94,6	62.020.171.060	94,4	62.020.171.060	94,7	62.020.171.060		257.920.914.238	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	84,2		86,5		86,5		87,5		92,2		92,2		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	98,32		97,76	201.499.430			98,72		98,52			201.499.430	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Guru Yang Berkualifikasi S1/DIV	Nilai	2.941		3.120	90.000.000	3.240	340.569.800	3.365	340.569.800	3.455	340.569.800		1.111.709.400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan		Persen	N/A	70.15	70.85		71.56		72.28		73		73		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	7,08		7,1	53.749.497.064	7,11	48.600.165.502	7,12	48.600.165.502	7,13	48.600.165.502	7,13	199.549.993.570	DINAS KESEHATAN
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100		100		100		100		100		100		
		Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%	101		100		100		100		100		100		

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Cakupan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan nifas	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Neonatus Lengkap	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan kunjungan bayi	%	75,1		75,26		75,35		75,45		75,55		75,55		
		Cakupan pelayanan anak balita	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Puskesmas	%	116,67		118,07		118,27		118,47		118,67		118,67		
		Cakupan Pembantu Puskesmas	%	13,07		13,47		13,67		13,87		14,07		14,07		
		Persentase Rumah sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100		100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	51.3		51.7	106.849.992	51.9		52.1		52,5		52,5	106.849.992	DINAS KESEHATAN
		Persentase Anak usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	%	90.2		94		94,5		95		95.5		95.5		

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	SATUAN	7,08		7,1	29.498.115.820	7,11	20.396.584.470	7,12	20.396.584.470	7,13	20.396.584.470	7,13	90.687.869.230	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIBUHUAN
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100		100		100		100		100		100		
		Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%	101		100		100		100		100		100		
		Cakupan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan pelayanan nifas	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Neonatus Lengkap	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan kunjungan bayi	%	75,1		75,26		75,35		75,45		75,55		75,55		
		Cakupan pelayanan anak balita	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Puskesmas	%	116,67		118,07		118,27		118,47		118,67		118,67		
		Cakupan Pembantu Puskesmas	%	13,07		13,47		13,67		13,87		14,07		14,07		

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Rumah sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	%	100		100		100		100		100		100		
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaa n gender	Indeks Pembangunan Gender		Poin	87.25		86.55		87		87.45		87.9		87.9		
PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah (%)	%	6		40	286.278.034	42	142.066.079	45	142.066.079	47	142.066.079	47	712.476.271	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR (%)	%	0.03		3		6		10		13		13		
		Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta (%)	%	96.5		50		52		54		56		56		
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	49.5		50		50		55		55		55		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	%	N/A		100	18.735.134	100		100		100			18.735.134	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	%	1.89		2	3.576.514.270	3	4.533.767.880	3	4.533.767.880	4	4.533.767.880		17.177.817.910	DINAS SOSIAL
		Persentase PMKS Yang Tertangani (%)	%	0.42		2		3		3		4		4		
		Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%)	%	1.75		2		2		2		2		2		
Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sektor unggulan daerah																
Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi PDRB	Kontribusi PDRB PerKapita		Juta (Rupiah)	N/A	28097.48	28298.16		28497.88		28703.07		28909.73		28909.73		
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		Juta (Rupiah)	40.07	52.96	42.45		43.99		45.15		46.27		46.27		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Kontribusi Sektor Pertanian /Perkebunan Terhadap PDRB	%	34.05		36.50	38.175.000	37.50	144.170.500	38.50	144.170.500	39.50	144.170.500	39.50	470.686.500	DINAS PERTANIAN

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			%				253.009.486		111.652.620		111.652.620		111.652.620		587.967.346	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/Pembudi daya	Kg	3941.4		4.235.35	492.711.500	4362.6	208.440.370	4580.7	208.440.370	4820.2	208.440.370	4820.2	1.118.032.610	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	220		225	0	240		260		300		300		DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pencapaian Skor Pola Pangan harapan (PPH)		%	86.4		74.5	358.915.614	75.5	65.081.688	76.5	65.081.688	77.5	65.081.688	77.5	554.160.678	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Ketersediaan Bahan Pangan		Kg	230.115		447.48		447.83		448.72		448.95		448.95		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penguatan Cadangan Pangan (%)		%	5		22	460.064.568	32	225.065.972	42	225.065.972	52	225.065.972		1.135.262.484	DINAS KETAHANAN PANGAN
Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian dan pelayanan publik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan penataan ruang																

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur		Poin	75	75	78		80		84		88		88		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Persen	N/A	N/A	71.52		72.04		72.6		73.12		73.12		
Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur jalan, rumah tangga bersanitasi dan Rumah Layak Huni	Kondisi jalan mantap		Persen	27.89	49.96	53		56		59		62		62		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	201.52		309.12	62.266.867.600	375.36	61.916.870.000	452.64	70.592.433.480	552	82.088.568.304	552	276.864.739.384	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	Persen	4		3.84		3.75		3.6		3.5		3.5		
		Persentase Jalan Kabupaten Dakam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	Persen	24		28		34		41		3.5		3.5		
		Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	Persen	0.7		0.78		0.85		0.94		1.01		1.01		
	Persentase rumah tangga bersanitasi		Persen	59	N/A	63		68		75		80		80		

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	65		18	6.108.467.993	20	9.381.233.400	22	9.381.233.400	25	9.381.233.400		34.252.168.193	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	Persen	35		15		20		20		25		25		
	Rasio rumah layak huni		Persen	60.9	60.90	62		64		66		66		66		
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Rasio Rumah Layak Huni	Persen	60.90	60.90	62	7.224.362.400	64	3.201.210.000	66	3.201.210.000	66	3.201.210.000	66	16.827.992.400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	12.33		12.18		12.08		11.98		11.88		11.88		
		Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	Persen	150		200		200		200		200		200		
Meningkatnya Kualitas Udara dan Air serta kesesuaian terhadap tata ruang Wilayah	Indeks kualitas Udara		Persen	60	8.2	63		64		65		66		66		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	IKU	80		75	213.253.454	75	126.605.000	75	126.605.000	76	126.605.000		593.068.454	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Indeks kualitas Air		Persen	80	80	75		75		75		76		76		

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	IKA	60		63	213.253.454	75	126.605.000	75	126.605.000	76	126.605.000		593.068.454	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Persentase konsistensi Rencana Pembangunan dengan RTRW		Persen	95	95	100		100		100		100		100		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	Persen	30		32	213.253.454	75	126.605.000	75	126.605.000	76	126.605.000		593.068.454	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan lokal																
Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan lokal	Jumlah bidang keagamaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi		Jumlah	N/A		10		10		12		12		12		
	Jumlah bidang Kebudayaan Masyarakat yang berprestasi di Tingkat Provinsi		Jumlah	N/A		5		6		7		7		7		
Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang keagamaan	Jumlah masyarakat yang berprestasi STQH tingkat Provinsi		Jumlah	N/A		10		10		12		12		12		

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase penilaian wilayah kecamatan	%	N/A		100	5.974.872.476	100	7.356.810.810	100	7.356.810.810	100	7.356.810.810		28.045.304.906	SEKRETARIAT DAERAH
		Rasio produk hukum yang terharmonisasi	%	N/A		100		100		100		100		100		
		Persentase pelaksanaan kegiatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan	%	N/A		100		100		100		100		100		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Kasus Konflik SARA yang tertangani	%	100		100	68.418.740	100	49.999.900	100	49.999.900	100	49.999.900		218.418.440	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Kejadian terkait Konflik Sosial yang ditangani	%	100		100	165.096.040	100	251.382.250	100	251.382.250	100	251.382.250		919.242.790	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Meningkatnya Prestasi masyarakat di bidang Kebudayaan	Jumlah masyarakat yang berprestasi di Bidang Seni Tari tingkat Provinsi		Jumlah	N/A		10		10		10		10		10		

MISI/TUJUAN/ SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2018 TARGET	REALISASI 2020	TARGET CAPAIAN SASARAN								KONDISI PADA AKHIR RPJMD		OPD PENANGGUNG JAWAB
						2021		2022		2023		2024				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	2		2	411.180.235	2	378.325.780	2	378.325.780	2	378.325.780		1.546.157.575	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional diperiode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan di dalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati Padang Lawas. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi Bupati terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program Bupati terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Padang Lawas secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Belanja daerah dibedakan menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024 Kabupaten Padang Lawas

Uraian	Proyeksi			
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan	1.097.733.413.677	1.047.429.030.125	1.076.104.593.605	1.107.600.728.429
Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	-	-	-	-
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	40.000.000.000	34.940.201.878	34.940.201.878	34.940.201.878
Total penerimaan	1.137.733.413.677	1.082.369.232.003	1.111.044.795.483	1.142.540.930.307
Dikurangi:				
Belanja Operasi	659.485.406.726	641.858.294.349	661.858.294.349	681.858.294.349
Pengeluaran Pembiayaan	1.787.358.551	-	-	-
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	478.248.006.951	440.510.937.654	449.186.501.134	460.682.635.958

Sumber : BPPKAD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2021

Berdasarkan kerangka pendanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada tabel 7.1 diatas maka ditetapkanlah pagu indikatif anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas untuk tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7.2

INDIKASI RENCANA PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2020-2024

No	OPD	APBD 2021	Target setelah perubahan			Total
			2022	2023	2024	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	264.900.112.221,00	244.117.876.353	244.117.876.353,00	244.117.876.353,00	997.253.741.280,00
2	DINAS KESEHATAN	106.736.575.564,00	101.995.005.852	101.995.005.852,00	101.995.005.852,00	412.721.593.120,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	49.115.502.352,00	37.351.092.378	37.351.092.378,00	37.351.092.378,00	161.168.779.486,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	134.042.115.210,00	143.518.586.575	152.194.150.055,00	163.690.284.879,00	593.445.136.719,00
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	12.178.939.479,00	7.790.582.854	7.790.582.854,00	7.790.582.854,00	35.550.688.041,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6.700.010.574,00	6.182.856.468	6.182.856.468,00	6.182.856.468,00	25.248.579.978,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.608.457.330,00	3.561.556.633	3.561.556.633,00	3.561.556.633,00	14.293.127.229,00
8	DINAS SOSIAL	7.860.115.070,00	9.579.397.807	9.579.397.807,00	9.579.397.807,00	36.598.308.491,00
9	DINAS TENAGA KERJA	3.943.662.842,00	2.879.551.036	2.879.551.036,00	2.879.551.036,00	12.582.315.950,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.197.726.257,00	2.779.146.222	2.779.146.222,00	2.779.146.222,00	11.535.164.923,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.066.695.600,00	5.832.693.663	5.832.693.663,00	5.832.693.663,00	23.564.776.589,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.588.988.335,00	4.121.274.744	4.121.274.744,00	4.121.274.744,00	16.952.812.567,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA	4.073.293.394,00	4.638.509.437	4.638.509.437,00	4.638.509.437,00	17.988.821.705,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.213.234.395,00	13.365.708.307	13.365.708.307,00	13.365.708.307,00	52.310.359.316,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.682.401.092,00	3.718.491.870	3.718.491.870,00	3.718.491.870,00	14.837.876.702,00

No	OPD	APBD 2021	Target setelah perubahan			Total
			2022	2023	2024	
16	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.023.676.502,00	4.098.303.576	4.098.303.576,00	4.098.303.576,00	16.318.587.230,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.268.022.217,00	3.022.120.456	3.022.120.456,00	3.022.120.456,00	12.334.383.585,00
18	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	7.027.962.329,00	6.548.863.953	6.548.863.953,00	6.548.863.953,00	26.674.554.188,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.195.899.595,00	2.104.436.897	2.104.436.897,00	2.104.436.897,00	8.509.210.286,00
20	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	3.728.263.426,00	4.293.905.009	4.293.905.009,00	4.293.905.009,00	16.609.978.453,00
21	DINAS PERTANIAN	10.196.365.460,00	9.840.862.364	9.840.862.364,00	9.840.862.364,00	39.718.952.552,00
22	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	25.026.495.722,00	25.132.346.897	25.132.346.897,00	25.132.346.897,00	100.423.536.413,00
23	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN	42.958.051.485,00	38.998.351.258	38.998.351.258,00	38.998.351.258,00	159.953.105.259,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.605.681.341,00	8.259.717.929	8.259.717.929,00	8.259.717.929,00	35.384.835.128,00
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	336.497.257.841,00	323.184.481.679	343.184.481.679,00	363.184.481.679,00	1.366.050.702.878,00
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7.190.706.216,00	6.051.098.687	6.051.098.687,00	6.051.098.687,00	25.344.002.277,00
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.256.361.720,00	11.153.298.515	11.153.298.515,00	11.153.298.515,00	42.716.257.265,00
28	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS	11.066.025.881,00	10.945.035.903	10.945.035.903,00	10.945.035.903,00	43.901.133.590,00
29	KECAMATAN BARUMUN	3.973.661.088,00	3.743.341.471	3.743.341.471,00	3.743.341.471,00	15.203.685.501,00
30	KECAMATAN LUBUK BARUMUN	2.232.015.213,00	2.271.036.105	2.271.036.105,00	2.271.036.105,00	9.045.123.528,00
31	KECAMATAN HURISTAK	1.753.093.311,00	1.699.195.027	1.699.195.027,00	1.699.195.027,00	6.850.678.392,00
32	KECAMATAN BARUMUN SELATAN	1.871.421.154,00	1.837.082.830	1.837.082.830,00	1.837.082.830,00	7.382.669.644,00
33	KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM	2.404.391.967,00	2.094.389.070	2.094.389.070,00	2.094.389.070,00	8.687.559.177,00
34	KECAMATAN HUTARAJA TINGGI	3.141.619.299,00	2.584.606.296	2.584.606.296,00	2.584.606.296,00	10.895.438.187,00

No	OPD	APBD 2021	Target setelah perubahan			Total
			2022	2023	2024	
35	KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN	1.940.624.047,00	2.087.120.428	2.087.120.428,00	2.087.120.428,00	8.201.985.331,00
36	KECAMATAN SOSA	3.269.065.699,00	2.463.315.203	2.463.315.203,00	2.463.315.203,00	10.659.011.308,00
37	KECAMATAN BARUMUN TENGAH	2.449.722.176,00	2.159.350.889	2.159.350.889,00	2.159.350.889,00	8.927.774.843,00
38	KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN	1.799.471.846,00	1.654.625.142	1.654.625.142,00	1.654.625.142,00	6.763.347.272,00
39	KECAMATAN ULU BARUMUN	1.818.202.275,00	1.940.215.134	1.940.215.134,00	1.940.215.134,00	7.638.847.677,00
40	KECAMATAN SOSOPAN	1.664.133.874,00	1.619.838.608	1.619.838.608,00	1.619.838.608,00	6.523.649.698,00
41	KECAMATAN BARUMUN BARU	1.754.762.972,00	1.491.562.830	1.491.562.830,00	1.491.562.830,00	6.229.451.462,00
42	KECAMATAN BARUMUN BARAT	1.754.896.263,00	1.524.216.619	1.524.216.619,00	1.524.216.619,00	6.327.546.120,00
43	KECAMATAN SOSA JULU	1.754.874.646,00	1.766.358.389	1.766.358.389,00	1.766.358.389,00	7.053.949.813,00
44	KECAMATAN ULU SOSA	1.754.867.791,00	1.480.152.735	1.480.152.735,00	1.480.152.735,00	6.195.325.996,00
45	KECAMATAN SOSA TIMUR	1.754.826.722,00	1.786.371.316	1.786.371.316,00	1.786.371.316,00	7.113.940.670,00
46	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.905.805.333,00	3.101.300.589	3.101.300.589,00	3.101.300.589,00	12.209.707.100,00
	Total Belanja	**1.135.946.055.126,00**	**1.082.369.232.003,00**	**1.111.044.795.483,00**	**1.142.540.930.307,00**	**4.471.901.012.919,00**

Tabel 7.3

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2020-2024

VISI : KABUPATEN PADANG LAWAS YANG BERCAHAYA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**584.260.299.665,00**		**553.139.619.140,00**		**561.815.182.620,00**		**573.311.317.444,00**		**2.272.526.418.869,00**	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					**264.424.131.986,00**		**243.618.770.573,00**		**243.618.770.573,00**		**243.618.770.573,00**		**995.280.443.705,00**	
1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					**264.424.131.986,00**		**243.618.770.573,00**		**243.618.770.573,00**		**243.618.770.573,00**		**995.280.443.705,00**	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	192.272.231.498,00	100%	181.258.029.713,00	100%	181.258.029.713,00	100%	181.258.029.713,00		736.046.320.637,00	DISDIKBUD

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SMP/MTs, Angka Partipasi pasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Kelulusan (AL), Angka Melanjutkan (AM) dan Fasilitas Pendidikan	%	APM SD/MI 94,7% APS SD/MI 94,2% APS SD/MI Putus Sekolah SD/MI 0,1% AL SD/MI 99% APM SMP/MTs 84,4% APS SMP/MTs 92,6% Putus Sekolah SMP/MTs 0,5% AL SMP/MTs 99,8%	APM SD/MI 94% APS SD/MI 94,2% APS SD/MI 93% Putus Sekolah SD/MI 0,1% AL SD/MI 99% APM SMP/MTs 84,4% APS SMP/MTs 92,6% Putus Sekolah SMP/MTs 0,5% AL SMP/MTs 99,8%	71.860.401.058,00	APM SD/MI 94% APS SD/MI 94,2% APS SD/MI 93% Putus Sekolah SD/MI 0,1% AL SD/MI 99% APM SMP/MTs 84,4% APS SMP/MTs 92,6% Putus Sekolah SMP/MTs 0,5% AL SMP/MTs 99,8%	62.020.171.060,00	APS SD/MI 94,2% APS SD/MI 93% Putus Sekolah SD/MI 0,1% AL SD/MI 99% APM SMP/MTs 84,4% APS SMP/MTs 92,6% Putus Sekolah SMP/MTs 0,5% AL SMP/MTs 99,8%	62.020.171.060,00	APM SD/MI 94% APS SD/MI 94,2% APS SD/MI 93% Putus Sekolah SD/MI 0,1% AL SD/MI 99% APM SMP/MTs 84,4% APS SMP/MTs 92,6% Putus Sekolah SMP/MTs 0,5% AL SMP/MTs 99,8%	62.020.171.060,00	APM SD/MI 94% APS SD/MI 94,2% APS SD/MI 93% Putus Sekolah SD/MI 0,1% AL SD/MI 99% APM SMP/MTs 84,4% APS SMP/MTs 92,6% Putus Sekolah SMP/MTs 0,5% AL SMP/MTs 99,8%	257.920.914.238,00	DISDIKBUD
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah, Siswa dan Guru Yang memilki Buku Bacaan dan Buku Pengayaan	%	100	100	201.499.430,00			100		100		100	201.499.430,00	DISDIKBUD
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Yang Berkualifikasi S1/DIV	Nilai	2941	3.120	90.000.000,00	3.240	340.569.800,00	3.365	340.569.800,00	3.455	340.569.800,00		1.111.709.400,00	DISDIKBUD
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					**155.852.077.916,00**		**139.346.098.230,00**		**139.346.098.230,00**		**139.346.098.230,00**		**573.890.372.606,00**	
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN					**106.736.575.564,00**		**101.995.005.852,00**		**101.995.005.852,00**		**101.995.005.852,00**		**412.721.593.120,00**	
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%		100%	52.880.228.508,00	100%	53.394.840.350,00	100%	53.394.840.350,00	100%	53.394.840.350,00		213.064.749.558,00	DINKES

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	7	7	53.749.497.064,00	7,01	48.600.165.502,00	7,03	48.600.165.502,00	7,05	48.600.165.502,00	7,05	199.549.993.570,00	DINKES
	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	0,2	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		
	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	%	0,01	0,12		0,14		0,16		0,18		0,18		
	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	%	0,24	0,28		0,32		0,36		0,40		0,40		
	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	%	0,1	0,1		0,12		0,14		0,16		0,16		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	70	100		100		100		100		100		
	Jumlah Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup	jumlah	12	12		12		12		12		12		
	Angka Kematian Bayi (AKB) per1.000 kelahiran hidup	%	10,61	10,31		10,01		9,71		9,41		9,41		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	54	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase ibu tersedia mendapatkan pelayanan persalinan	%	38,2	100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	40	100		100		100		100		100		
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15-29 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	86	100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	33	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	6,66	100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	24	100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	71,24	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	15,2	100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diri HIV sesuai standar	%	20,8	100		100		100		100		100		
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	%	26	26	106.849.992,00	38		45		65		65	106.849.992,00	
1.02.0.00.0.00.02.00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH					**49.115.502.352,00**		**37.351.092.378,00**		**37.351.092.378,00**		**37.351.092.378,00**		**161.168.779.486,00**	
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	19.617.386.532,00	100%	16.954.507.908,00	100%	16.954.507.908,00	100%	16.954.507.908,00		70.480.910.256,00	RSUD
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	7,08	7,1	29.498.115.820,00	7,11	20.396.584.470,00	7,12	20.396.584.470,00	7,13	20.396.584.470,00		90.687.869.230,00	RSUD
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100		100		100		100				
	Terpenuhinya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	%	101	100		100		100		100				
	Cakupan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100				
	Cakupan pelayanan nifas	%	100	100		100		100		100				
	Cakupan Neonatus Lengkap	%	100	100		100		100		100				

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Cakupan kunjungan bayi	%	75,1	75,26		75,35		75,45		75,55				
	Cakupan pelayanan anak balita	%	100	100		100		100		100				
	Cakupan Puskesmas	%	116,67	118,07		118,27		118,47		118,67				
	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	13,07	13,47		13,67		13,87		14,07				
	Persentase Rumah sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	%	100	100		100		100		100				
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100		100		100		100				
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**141.043.994.210,00**		**143.518.586.575,00**		**152.194.150.055,00**		**163.690.284.879,00**		**600.447.015.719,00**	
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM					**134.042.115.210,00**		**143.518.586.575,00**		**152.194.150.055,00**		**163.690.284.879,00**		**593.445.136.719,00**	
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	8.209.378.381,00	100%	11.355.090.485,00	100%	11.355.090.485,00	100%	11.355.090.485,00		42.274.649.836,00	PU
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	39	48	18.790.000.000,00	53	13.140.000.000,00	59	13.140.000.000,00	67	13.140.000.000,00	67	58.210.000.000,00	PU
	Rasio Jaringan Irigasi	%	22.50	30,9		35,1		39,3		43,5		43,5		
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	13	18	6.108.467.993,00	20	9.381.233.400,00	22	9.381.233.400,00	25	9.381.233.400,00	25	34.252.168.193,00	PU
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	%	5	15		20		22		25		25		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R (%)	%	N/A	100	3.840.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00		4.590.000.000,00	PU
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	%	7	0.78	-	0,85	4.790.000.000,00	0,94	4.790.000.000,00	1,01	4.790.000.000,00	1,01	14.370.000.000,00	PU
	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	89	35		40		42		45		45		
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio Rumah Layak Huni	%	6090	62	32.162.259.585,00	64	40.694.000.000,00	66	40.694.000.000,00	66	40.694.000.000,00		154.244.259.585,00	PU
	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	1233	1218		1208		1198		1188				
	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	150	200		200		200		200				
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	%	32	75	2.665.141.651,00	78	911.392.690,00	80	911.392.690,00	82	911.392.690,00		5.399.319.721,00	PU
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	KM	163	210	62.266.867.600,00	250	61.916.870.000,00	300	70.592.433.480,00	360	82.088.568.304,00	360	276.864.739.384,00	PU
	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	%	4	384		375		36		35		35		
	Persentase Jalan Kabupaten Dakam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	%	24	19		23		27		33		33		

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	%	32	75	-	78	1.080.000.000,00	80	1.080.000.000,00	82	1.080.000.000,00		3.240.000.000,00	PU
1.04.2.15.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		**%**			**7.001.879.000,00**		**-**		**-**		**-**		**7.001.879.000,00**	
1.03.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Rumah Layak Huni	%	6090	62	7.001.879.000,00								7.001.879.000,00	PERKIMHUB
	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	1233	1218										
	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	150	200										
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**4.771.512.579,00**		**7.332.352.854,00**		**7.332.352.854,00**		**7.332.352.854,00**		**26.768.571.141,00**	
1.04.2.15.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN					**4.771.512.579,00**		**7.332.352.854,00**		**7.332.352.854,00**		**7.332.352.854,00**		**26.768.571.141,00**	
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	4.549.029.179,00	100%	4.049.822.854,00	100%	4.049.822.854,00	100%	4.049.822.854,00		16.698.497.741,00	PERKIMHUB
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Rumah Layak Huni	%	6090	62	222.483.400,00	64	3.201.210.000,00	66	3.201.210.000,00	66	3.201.210.000,00		9.826.113.400,00	PERKIMHUB
	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	1233	1218		1208		1198		1188				
	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	%	150	200		200		200		200				

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Pemukiman yang tertata sesuai PSU	%	N/A	0	-	100	81.320.000,00	100	81.320.000,00	100	81.320.000,00		243.960.000,00	PERKIMHUB
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					**10.308.467.904,00**		**9.744.413.101,00**		**9.744.413.101,00**		**9.744.413.101,00**		**39.541.707.207,00**	
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN					**6.700.010.574,00**		**6.182.856.468,00**		**6.182.856.468,00**		**6.182.856.468,00**		**25.248.579.978,00**	
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	6.045.310.814,00	100%	5.554.951.468,00	100%	5.554.951.468,00	100%	5.554.951.468,00		22.710.165.218,00	SATPOL & DAMKAR
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	606	1.450	580.799.760,00	1.450	541.927.500,00	1.450	541.927.500,00	1.450	541.927.500,00		2.206.582.260,00	SATPOL & DAMKAR
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	%	100	100		100		100		100				
	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100		100		100		100				
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%	100	100	73.900.000,00	100	85.977.500,00	100	85.977.500,00	100	85.977.500,00		331.832.500,00	SATPOL & DAMKAR
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Timee Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	%	> 15	> 15		> 15		> 15		> 15				

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					**3.608.457.330,00**		**3.561.556.633,00**		**3.561.556.633,00**		**3.561.556.633,00**		**14.293.127.229,00**	
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	3.166.387.162,00	100%	3.333.556.633,00	100%	3.333.556.633,00	100%	3.333.556.633,00		13.167.057.061,00	BPBD
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terwujudnya tim penanggulangan bencana yang terampil/ terlatih	%	N/A	80	442.070.168,00	80	228.000.000,00	80	228.000.000,00	80	228.000.000,00		1.126.070.168,00	BPBD
	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap (%)	%	100	100		100		100		100				
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					**7.860.115.070,00**		**9.579.397.807,00**		**9.579.397.807,00**		**9.579.397.807,00**		**36.598.308.491,00**	
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL					**7.860.115.070,00**		**9.579.397.807,00**		**9.579.397.807,00**		**9.579.397.807,00**		**36.598.308.491,00**	
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	3.365.411.577,00	100%	3.954.392.887,00	100%	3.954.392.887,00	100%	3.954.392.887,00		15.228.590.238,00	DINSOS
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah PSKS yang mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan partisipasi dan Peran PSKS	Nilai	2	3	3.576.514.270,00	3	4.533.767.880,00	3	4.533.767.880,00	4	4.533.767.880,00	4	17.177.817.910,00	DINSOS

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Parsentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)	%	10	10	263.638.441,00	10	380.400.760,00	10	380.400.760,00	10	380.400.760,00	10%	1.404.840.721,00	DINSOS
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Parsentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)	%	0,5	0,5	585.962.194,00	0,5	654.036.280,00	0,5	654.036.280,00	0,5	654.036.280,00	0,5	2.548.071.034,00	DINSOS
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	68.588.588,00	100	56.800.000,00	100	56.800.000,00	100	56.800.000,00		238.988.588,00	DINSOS
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**53.095.694.954,00**		**52.492.332.941,00**		**52.492.332.941,00**		**52.492.332.941,00**		**210.572.693.777,00**	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					**3.943.662.842,00**		**2.879.551.036,00**		**2.879.551.036,00**		**2.879.551.036,00**		**12.582.315.950,00**	
2.07.0.00.0.00.01. 0000 DINAS TENAGA KERJA					**3.943.662.842,00**		**2.879.551.036,00**		**2.879.551.036,00**		**2.879.551.036,00**		**12.582.315.950,00**	
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	2.627.422.686,00	100%	2.530.132.036,00	100%	2.530.132.036,00	100%	2.530.132.036,00		10.217.818.794,00	DISNAKER

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KABUPATEN/KOTA														
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang	Orang	48	108	871.144.058,00	620	115.798.000,00	770	115.798.000,00	1.000	115.798.000,00		1.218.538.058,00	DISNAKER
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Orang	204	560	420.097.800,00	148	200.854.000,00	188	200.854.000,00	228	200.854.000,00		1.022.659.800,00	DISNAKER
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	N/A	5	24.998.298,00	5	32.767.000,00	5	32.767.000,00	5	32.767.000,00		123.299.298,00	DISNAKER
	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	%	2	15		10		5		0				
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**770.739.682,00**		**371.825.079,00**		**371.825.079,00**		**371.825.079,00**		**1.886.214.919,00**	
2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**770.739.682,00**		**371.825.079,00**		**371.825.079,00**		**371.825.079,00**		**1.886.214.919,00**	
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah (%)	%	6	40	286.278.034,00	42	142.066.079,00	45	142.066.079,00	47	142.066.079,00		712.476.271,00	DP2KBP3A
	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR (%)	%	3	3		6		10		13				

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta (%)	%	9650	50		52		54		56				
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	4950	50		50		55		55				
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KDRT	%	2	3	207.093.390,00	1		1		0			207.093.390,00	DP2KBP3A
	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100		100		100		100				
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	%	N/A	100	18.735.134,00	100		100		100			18.735.134,00	DP2KBP3A
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur (%)	%	50	17	98.033.124,00	15	36.159.000,00	13	36.159.000,00	10	36.159.000,00		206.510.124,00	DP2KBP3A
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (%)	%	86	100	160.600.000,00	100	193.600.000,00	100	193.600.000,00	100	193.600.000,00		741.400.000,00	DP2KBP3A

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (%)	%	91	100		100		100		100				
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					**3.197.726.257,00**		**2.779.146.222,00**		**2.779.146.222,00**		**2.779.146.222,00**		**11.535.164.923,00**	
2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN					**3.197.726.257,00**		**2.779.146.222,00**		**2.779.146.222,00**		**2.779.146.222,00**		**11.535.164.923,00**	
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	2.378.746.075,00	100%	2.451.245.562,00	100%	2.451.245.562,00	100%	2.451.245.562,00		9.732.482.761,00	KETAPANG
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pencapaian Skor Pola Pangan harapan (PPH)	%	864	745	358.915.614,00	755	65.081.688,00	765	65.081.688,00	775	65.081.688,00		554.160.678,00	KETAPANG
	Jumlah Terbangunya Lumbung Pangan Masyarakat	Desa	2	3		4		5		6		20		
	Ketersediaan Bahan Pangan	Kg	230.115	44748		44783		44872		44895			-	
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penguatan Cadangan Pangan Daerah	%	5	20	460.064.568,00	20	225.065.972,00	20	225.065.972,00	20	225.065.972,00	100	1.135.262.484,00	KETAPANG
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	7,6	8,2	-	8,5		8.75		9,02		9,02	-	KETAPANG

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)	%	0	44,68	-	46,78	37.753.000,00	48,87	37.753.000,00	50,53	37.753.000,00	50,53	113.259.000,00	KETAPANG
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					**6.066.695.600,00**		**5.832.693.663,00**		**5.832.693.663,00**		**5.832.693.663,00**		**23.564.776.589,00**	
2.11.3.28.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					**6.066.695.600,00**		**5.832.693.663,00**		**5.832.693.663,00**		**5.832.693.663,00**		**23.564.776.589,00**	
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	2.994.127.616,00	100%	3.026.620.663,00	100%	3.026.620.663,00	100%	3.026.620.663,00		12.073.989.605,00	DLHK
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah	N/A	1	224.752.000,00	0	-	0	-	1	-		224.752.000,00	DLHK
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah	N/A	3 Desa	213.253.454,00	75	126.605.000,00	75	126.605.000,00	76	126.605.000,00	3 Desa	593.068.454,00	DLHK
	Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan	Jumlah	2	2		2		2		2		8		DLHK
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	49.607.000,00	Ada	188.818.000,00	Ada	188.818.000,00	Ada	188.818.000,00		616.061.000,00	DLHK
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R (%)	%	0.75	9.8	2.584.955.530,00	10.12	2.490.650.000,00	10,25	2.490.650.000,00	10,5	2.490.650.000,00		10.056.905.530,00	DLHK
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**4.588.988.335,00**		**4.121.274.744,00**		**4.121.274.744,00**		**4.121.274.744,00**		**16.952.812.567,00**	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**4.588.988.335,00**		**4.121.274.744,00**		**4.121.274.744,00**		**4.121.274.744,00**		**16.952.812.567,00**	
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	3.437.045.635,00	100%	3.674.174.744,00	100%	3.674.174.744,00	100%	3.674.174.744,00		14.459.569.867,00	CAPIL
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jiwa	149.447	262.846	1.151.942.700,00		405.100.000,00	281.236	405.100.000,00	30.000	405.100.000,00		2.367.242.700,00	CAPIL
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Jiwa	104.064	262.846				281.236		30.000				
PROGRAM PENCATATAN SIPIL							42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00			
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**4.073.293.394,00**		**4.638.509.437,00**		**4.638.509.437,00**		**4.638.509.437,00**		**17.988.821.705,00**	
2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA					**4.073.293.394,00**		**4.638.509.437,00**		**4.638.509.437,00**		**4.638.509.437,00**		**17.988.821.705,00**	
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	2.956.231.744,00	100%	2.606.387.157,00	100%	2.606.387.157,00	100%	2.606.387.157,00		10.775.393.215,00	PEMDES
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	6,00	8,00	216.380.000,00	8,00	1.251.842.300,00	8,00	1.251.842.300,00	9,00	1.251.842.300,00	41,00	3.971.906.900,00	PEMDES
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0,00	0,00	900.681.650,00	1,00	780.279.980,00	1,00	780.279.980,00	2,00	780.279.980,00	0,04	3.241.521.590,00	PEMDES
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA					**11.442.494.713,00**		**12.993.883.228,00**		**12.993.883.228,00**		**12.993.883.228,00**		**50.424.144.397,00**	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BERENCANA														
2.14.2.08.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**11.442.494.713,00**		**12.993.883.228,00**		**12.993.883.228,00**		**12.993.883.228,00**		**50.424.144.397,00**	
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	4.739.356.349,00	100%	5.161.986.228,00	100%	5.161.986.228,00	100%	5.161.986.228,00		20.225.315.033,00	DP2KBP3A
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	%	220	186	52.371.484,00	181	92.574.000,00	176	92.574.000,00	171	92.574.000,00		330.093.484,00	DP2KBP3A
	Total Fertility Rate (TFR) (%)	%	226	37		363		356		349				
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentasi Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi (%)	%	4108	67	6.518.854.162,00	69	7.739.323.000,00	71	7.739.323.000,00	73	7.739.323.000,00		29.736.823.162,00	DP2KBP3A
	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Keluraha n (%)	%	100	100		100		100		100				
	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Di Gedung Kabupaten/Kot a (%)	%	788	100		100		100		100				

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Di Faskes (%)	%	15	100		100		100		100				
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi keluarga (%)	%	75	72	131.912.718,00	73		74		75			131.912.718,00	DP2KBP3A
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					**405.547.900,00**		**458.230.000,00**		**458.230.000,00**		**458.230.000,00**			
1.04.2.15.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN					**405.547.900,00**		**458.230.000,00**		**458.230.000,00**		**458.230.000,00**		**1.780.237.900,00**	
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	251.447.900,00	0	-	0	-	0	-		251.447.900,00	PERKIMHUB
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	2597	2714	154.100.000,00	2775	458.230.000,00	2837	458.230.000,00	29	458.230.000,00		1.528.790.000,00	PERKIMHUB
	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	Jiwa/Unit	17.558.198	18.350.025		18.759.230		19.177.561		19.605.221				
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**3.649.640.992,00**		**3.686.176.870,00**		**3.686.176.870,00**		**3.686.176.870,00**		**14.708.171.602,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**3.649.640.992,00**		**3.686.176.870,00**		**3.686.176.870,00**		**3.686.176.870,00**		**14.708.171.602,00**	
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	2.540.953.822,00	100%	2.644.444.870,00	100%	2.644.444.870,00	100%	2.644.444.870,00		10.474.288.432,00	KOMINFO

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan layanan Telekomunikasi (%)	%	53	75	660.967.832,00	85	587.622.000,00	85	587.622.000,00	100	587.622.000,00		2.423.833.832,00	KOMINFO
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	jumlah data center	Jumlah	1	1	447.719.338,00	1	454.110.000,00	1	454.110.000,00	1	454.110.000,00		1.810.049.338,00	KOMINFO
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					**2.163.430.763,00**		**2.728.062.576,00**		**2.728.062.576,00**		**2.728.062.576,00**		**10.347.618.491,00**	
2.17.3.31.3.30.01.0000 DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					**2.163.430.763,00**		**2.728.062.576,00**		**2.728.062.576,00**		**2.728.062.576,00**		**10.347.618.491,00**	
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	1.943.830.763,00	100%	2.480.515.296,00	100%	2.480.515.296,00	100%	2.480.515.296,00		9.385.376.651,00	DISKOPERINDAG
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatkan Koperasi yang berkualitas	Jumlah	15 koperasi	15 koperasi	9.600.000,00	15 koperasi	30.000.980,00	15 koperasi	30.000.980,00	15 koperasi	30.000.980,00	15 koperasi	99.602.940,00	DISKOPERINDAG
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif (%)	%	0.09	1.03	-	1.67	30.000.000,00	2.6	30.000.000,00	2.66	30.000.000,00	3.6	90.000.000,00	DISKOPERINDAG
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN														DISKOPERINDAG
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah	20 UKM	20 UKM	210.000.000,00	20 UKM	187.546.300,00	20 UKM	187.546.300,00	20 UKM	187.546.300,00	20 UKM	772.638.900,00	DISKOPERINDAG
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					**3.268.022.217,00**		**3.022.120.456,00**		**3.022.120.456,00**		**3.022.120.456,00**		**12.334.383.585,00**	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					**3.268.022.217,00**		**3.022.120.456,00**		**3.022.120.456,00**		**3.022.120.456,00**		**12.334.383.585,00**	
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	2.834.663.185,00	100%	2.657.851.256,00	100%	2.657.851.256,00	100%	2.657.851.256,00		10.808.216.953,00	DPMPPTSP
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Bersekala Nasional PMDN/PMA	%	3	10	70.099.140,00	15	39.811.500,00	20	39.811.500,00	20	39.811.500,00		189.533.640,00	DPMPPTSP
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Online	%	N/A	100	218.359.892,00	100	198.722.700,00	100	198.722.700,00	100	198.722.700,00		814.527.992,00	DPMPPTSP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Baik	Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik				
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	%	N/A	100	144.900.000,00		125.735.000,00	100	125.735.000,00	100	125.735.000,00		522.105.000,00	DPMPPTSP
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					**6.820.812.329,00**		**6.345.001.953,00**		**6.345.001.953,00**		**6.345.001.953,00**		**25.855.818.188,00**	
2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA					**6.820.812.329,00**		**6.345.001.953,00**		**6.345.001.953,00**		**6.345.001.953,00**		**25.855.818.188,00**	
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	2.293.617.765,00	100%	2.341.480.953,00	100%	2.341.480.953,00	100%	2.341.480.953,00		9.318.060.624,00	DISPORAPAR
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi pemuda (OKP) yang aktif	%	1	100	2.030.290.000,00	100	1.938.142.000,00	100	1.938.142.000,00	100	1.938.142.000,00		7.844.716.000,00	DISPORAPAR
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	%	1	5	2.496.904.564,00	5	2.065.379.000,00	5	2.065.379.000,00	5	2.065.379.000,00		8.693.041.564,00	DISPORAPAR

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
KEOLAHRAGAAN														
	Persentase Sarana dan Prasarana yang kondisi baik	%	N/A	100		100		100		100				
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					**27.578.510,00**		**24.470.000,00**		**24.470.000,00**		**24.470.000,00**		**100.988.510,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**27.578.510,00**		**24.470.000,00**		**24.470.000,00**		**24.470.000,00**		**100.988.510,00**	
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral	%	N/A	100	27.578.510,00	100	24.470.000,00	100	24.470.000,00	100	24.470.000,00		100.988.510,00	DISKOMINFO
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					**5.181.590,00**		**7.845.000,00**		**7.845.000,00**		**7.845.000,00**		**28.716.590,00**	
2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**5.181.590,00**		**7.845.000,00**		**7.845.000,00**		**7.845.000,00**		**28.716.590,00**	
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	jumlah opd yang memiliki kegiatan (Aplkas) yang disandikan	OPD	N/A	0	5.181.590,00	1	7.845.000,00	2	7.845.000,00	3	7.845.000,00		28.716.590,00	DISKOMINFO
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					**475.980.235,00**		**499.105.780,00**		**499.105.780,00**		**499.105.780,00**		**1.973.297.575,00**	
1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					**475.980.235,00**		**499.105.780,00**		**499.105.780,00**		**499.105.780,00**		**1.973.297.575,00**	
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyelengaraan Fstival Seni dan Budaya	Kegiatan	2	2	411.180.235,00	2	378.325.780,00	2	378.325.780,00	2	378.325.780,00		1.546.157.575,00	DISDIKBUD
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	Lokasi	3	5	64.800.000,00		120.780.000,00	5	120.780.000,00	5	120.780.000,00		427.140.000,00	DISDIKBUD

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN													-	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					**2.063.385.423,00**		**2.031.797.897,00**		**2.031.797.897,00**		**2.031.797.897,00**		**8.158.779.114,00**	
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					**2.063.385.423,00**		**2.031.797.897,00**		**2.031.797.897,00**		**2.031.797.897,00**		**8.158.779.114,00**	
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	1.869.389.455,00	100%	1.939.061.647,00	100%	1.939.061.647,00	100%	1.939.061.647,00		7.686.574.396,00	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Pengunjung Perpustakan Per Tahun (orang)	Nilai	111.909	2.677	193.995.968,00	4.685	92.736.250,00	7.730	92.736.250,00	14.160	92.736.250,00	14.160	472.204.718,00	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					**132.514.172,00**		**72.639.000,00**		**72.639.000,00**		**72.639.000,00**			
2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					132.514.172,00		72.639.000,00		72.639.000,00		72.639.000,00			
2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	55.402.794,00	100%	68.592.500,00	100%	68.592.500,00	100%	68.592.500,00		261.180.294,00	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	14	6	68.288.624,00	10	4.046.500,00	10	4.046.500,00	10	4.046.500,00	10	80.428.124,00	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	%	N/A	15	8.822.754,00	20	0,00	25	0,00	25	0,00	25	8.822.754,00	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**15.992.024.625,00**		**15.708.870.373,00**		**15.708.870.373,00**		**15.708.870.373,00**		**63.118.635.744,00**	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					**2.888.138.476,00**		**2.807.162.249,00**		**2.807.162.249,00**		**2.807.162.249,00**		**11.309.625.223,00**	
3.25.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN					**2.888.138.476,00**		**2.807.162.249,00**		**2.807.162.249,00**		**2.807.162.249,00**		**11.309.625.223,00**	
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	2.339.327.396,00	100%	2.598.721.879,00	100%	2.598.721.879,00	100%	2.598.721.879,00		10.135.493.033,00	PETERNAKAN DAN PEREIKANAN
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman (%)	%	70		56.099.580,00			0		0			56.099.580,00	PETERNAKAN DAN PEREIKANAN
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/Pembudidaya	Kg	3941,4	423535	492.711.500,00	43626	208.440.370,00	45807	208.440.370,00	48202	208.440.370,00		1.118.032.610,00	PETERNAKAN DAN PEREIKANAN
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	220	225	-	240		260		300			-	PETERNAKAN DAN PEREIKANAN
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					**207.150.000,00**		**203.862.000,00**		**203.862.000,00**		**203.862.000,00**		**818.736.000,00**	
2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA					**207.150.000,00**		**203.862.000,00**		**203.862.000,00**		**203.862.000,00**		**818.736.000,00**	
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan Wisata	Jumlah	750	1.000	-	1.000	158.862.000,00	1.000	158.862.000,00	1.000	158.862.000,00		476.586.000,00	DISPORAPAR
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	2000000	2.500.000	207.150.000,00	3.000.000	45.000.000,00	3.000.000	45.000.000,00	3.500.000	45.000.000,00		342.150.000,00	DISPORAPAR
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					**11.036.490.410,00**		**11.327.605.124,00**		**11.327.605.124,00**		**11.327.605.124,00**		**45.019.305.782,00**	
3.25.3.27.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN					**840.124.950,00**		**1.486.742.760,00**		**1.486.742.760,00**		**1.486.742.760,00**		**5.300.353.230,00**	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase populasi ternak yang ditingkatkan	%	N/A	80	686.829.790,00	82	1.426.752.760,00	85	1.426.752.760,00	90	1.426.752.760,00		4.967.088.070,00	PETERNAKAN DAN PEREIKANAN
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		%	N/A		55.898.760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		55.898.760,00	PETERNAKAN DAN PEREIKANAN
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penyakit Ternak yang Diatasi	%	N/A	100	97.396.400,00	100	59.990.000,00	100	59.990.000,00	100	59.990.000,00		277.366.400,00	PETERNAKAN DAN PEREIKANAN
3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN					**10.196.365.460,00**		**9.840.862.364,00**		**9.840.862.364,00**		**9.840.862.364,00**		**39.718.952.552,00**	
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	8.967.865.974,00	100%	8.955.976.014,00	100%	8.955.976.014,00	100%	8.955.976.014,00		35.835.794.016,00	PERTANIAN
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	%	3405	3650	38.175.000,00	3750	144.170.500,00	3850	144.170.500,00	3950	144.170.500,00		470.686.500,00	PERTANIAN
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi sektor pertanian (Rp)	Rp		4.500.000	253.009.486,00	4.600.000	111.652.620,00	4.700.000	111.652.620,00	4.800.000	111.652.620,00	4.800.000	587.967.346,00	PERTANIAN
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani		16	25	11.030.000,00	30	0,00	35	0,00	40	0,00	40		
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Nilai tukar petani	Nilai	102,7	106,65	926.285.000,00	107,84	629.063.230,00	109,13	629.063.230,00	110,42	629.063.230,00	110,42	2.813.474.690,00	PERTANIAN
	Cakupan bina kelompok petani	%	16	25		30		35		40		40		
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					**1.810.245.743,00**		**1.340.361.000,00**		**1.340.361.000,00**		**1.340.361.000,00**		**5.831.328.743,00**	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.17.3.31.3.30.01. 0000 DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					**1.810.245.743,00**		**1.340.361.000,00**		**1.340.361.000,00**		**1.340.361.000,00**		**5.831.328.743,00**	
3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	674.333.513,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		674.333.513,00	DISKOPERINDAG
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Revitalisasi Pasar tradisional	%	0,07	2,25	462.649.352,00	7,25	629.999.000,00	7,35	629.999.000,00	7,37	629.999.000,00		2.352.646.352,00	DISKOPERINDAG
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase temuan produk yang terpantau	%	N/A	100	40.667.878,00	100	195.000.000,00	100	195.000.000,00	100	195.000.000,00		625.667.878,00	DISKOPERINDAG
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor	%	N/A	100	299.995.000,00	100	299.722.000,00	100	299.722.000,00	100	299.722.000,00		1.199.161.000,00	DISKOPERINDAG
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Mempromosikan produk yang dihasilkan para pengrajin serta meningkatkan daya saing	Event	1 Event	1 Event	332.600.000,00	1 Event	215.640.000,00	1 Event	215.640.000,00	1 Event	215.640.000,00	1 Event	979.520.000,00	DISKOPERINDAG
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					**49.999.996,00**		**29.880.000,00**		**29.880.000,00**		**29.880.000,00**			
2.17.3.31.3.30.01. 0000 DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					**49.999.996,00**		**29.880.000,00**		**29.880.000,00**		**29.880.000,00**			

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan IKM dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri IKM dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%	N/A	100	49.999.996,00	100	29.880.000,00	100	29.880.000,00	100	29.880.000,00		139.639.996,00	DISKOPERINDAG
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					**67.984.547.207,00**		**64.130.698.155,00**		**64.130.698.155,00**		**64.130.698.155,00**		**260.376.641.672,00**	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					**25.026.495.722,00**		**25.132.346.897,00**		**25.132.346.897,00**		**25.132.346.897,00**		**100.423.536.413,00**	
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN					**25.026.495.722,00**		**25.132.346.897,00**		**25.132.346.897,00**		**25.132.346.897,00**		**100.423.536.413,00**	
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	100	100	17.438.156.824,00	100	15.668.079.417,00	100	15.668.079.417,00	100	15.668.079.417,00		64.442.395.075,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penilaian wilayah kecamatan	%	N/A	100	5.974.872.476,00	100	7.356.810.810,00	100	7.356.810.810,00	100	7.356.810.810,00		28.045.304.906,00	SEKRETARIAT DAERAH
	Rasio produk hukum yang terharmonisasi	%	N/A	100		100		100		100				
	Persentase pelaksanaan kegiatan hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan	%	N/A	100		100		100		100				
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pembangunan Perangkat Daerah	%	100	100	1.613.466.422,00	100	2.107.456.670,00	100	2.107.456.670,00	100	2.107.456.670,00		7.935.836.432,00	SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02 SEKRETARIAT DPRD					**42.958.051.485,00**		**38.998.351.258,00**		**38.998.351.258,00**		**38.998.351.258,00**		**159.953.105.259,00**	
4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN					**42.958.051.485,00**		**38.998.351.258,00**		**38.998.351.258,00**		**38.998.351.258,00**		**159.953.105.259,00**	
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	28.193.624.069,00	100%	33.566.724.258,00	100%	33.566.724.258,00	100%	33.566.724.258,00		128.893.796.843,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	%			14.764.427.416,00		5.431.627.000,00		5.431.627.000,00		5.431.627.000,00		31.059.308.416,00	SEKRETARIAT DPRD
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					**363.550.007.118,00**		**348.648.596.810,00**		**368.648.596.810,00**		**388.648.596.810,00**		**1.469.495.797.548,00**	
5.01 PERENCANAAN					**10.521.585.351,00**		**8.228.187.929,00**		**8.228.187.929,00**		**8.228.187.929,00**		**35.206.149.138,00**	
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					**10.521.585.351,00**		**8.228.187.929,00**		**8.228.187.929,00**		**8.228.187.929,00**		**35.206.149.138,00**	
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	5.751.279.145,00	100%	4.845.679.079,00	100%	4.845.679.079,00	100%	4.845.679.079,00		20.288.316.382,00	BAPPEDA
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Antara RKPD dan RPJMD	%	98,16	98,67	3.294.351.548,00	99	2.084.303.300,00	99,05	2.084.303.300,00	99,1	2.084.303.300,00		9.547.261.448,00	BAPPEDA
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Prioritas Pembangunan	%	100	100	1.475.954.658,00	100	1.298.205.550,00	100	1.298.205.550,00	100	1.298.205.550,00		5.370.571.308,00	BAPPEDA
5.02 KEUANGAN					**343.687.964.057,00**		**329.235.580.366,00**		**349.235.580.366,00**		**369.235.580.366,00**		**1.391.394.705.155,00**	
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH					**336.497.257.841,00**		**323.184.481.679,00**		**343.184.481.679,00**		**363.184.481.679,00**		**1.366.050.702.878,00**	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	27.335.389.368,00	100%	29.232.915.035,00	100%	49.232.915.035,00	100%	69.232.915.035,00		175.034.134.473,00	BPKAD
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan	%	WTP	WDP	307.742.132.729,00	WDP	292.976.357.664,00	WDP	292.976.357.664,00	WDP	292.976.357.664,00		1.186.671.205.721,00	BPKAD
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	1.419.735.744,00	Ada	975.208.980,00	Ada	975.208.980,00	Ada	975.208.980,00	Ada	4.345.362.684,00	BPKAD
	Bidang Tanah Yang Bersertifikat	%		100		100		100		100		100		
	Persentase Aset Yang Digunakan	%		85		90		97		100		100		
5.02.0.00.0.00.02.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH					**7.190.706.216,00**		**6.051.098.687,00**		**6.051.098.687,00**		**6.051.098.687,00**		**25.344.002.277,00**	
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	6.205.115.968,00	100%	5.071.245.887,00	100%	5.071.245.887,00	100%	5.071.245.887,00		21.418.853.629,00	PENDAPATAN
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	%	59	63,33	985.590.248,00	86,24	979.852.800,00	93,22	979.852.800,00	98,92	979.852.800,00	98,92	3.925.148.648,00	PENDAPATAN
5.03 KEPEGAWAIAN					**6.278.105.720,00**		**6.726.031.515,00**		**6.726.031.515,00**		**6.726.031.515,00**		**26.456.200.265,00**	
5.03.5.04.0.00.03.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					**6.278.105.720,00**		**6.726.031.515,00**		**6.726.031.515,00**		**6.726.031.515,00**		**26.456.200.265,00**	
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	4.512.134.564,00	100%	4.677.860.515,00	100%	4.677.860.515,00	100%	4.677.860.515,00	100	18.545.716.109,00	BKPSDM
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Peningkatan Pelayanan administrasi Kepegawaian	%	1	100%	1.765.971.156,00	100%	2.048.171.000,00	100%	2.048.171.000,00	100%	2.048.171.000,00	100	7.910.484.156,00	BKPSDM

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**2.978.256.000,00**		**4.427.267.000,00**		**4.427.267.000,00**		**4.427.267.000,00**		**16.260.057.000,00**	
5.03.5.04.0.00.03.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					**2.978.256.000,00**		**4.427.267.000,00**		**4.427.267.000,00**		**4.427.267.000,00**		**16.260.057.000,00**	
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN)	%	50	100%	2.978.256.000,00	100	4.427.267.000,00	100	4.427.267.000,00	100	4.427.267.000,00	100	16.260.057.000,00	BKPSDM
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					**84.095.990,00**		**31.530.000,00**		**31.530.000,00**		**31.530.000,00**			
5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					**84.095.990,00**		**31.530.000,00**		**31.530.000,00**		**31.530.000,00**			
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian Yang Dimanfaatkan	%	N/A	50	84.095.990,00	55,5	31.530.000,00	60	31.530.000,00	60	31.530.000,00		178.685.990,00	BAPPEDA
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					**11.066.025.881,00**		**10.945.035.903,00**		**10.945.035.903,00**		**10.945.035.903,00**		**43.901.133.590,00**	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH					**11.066.025.881,00**		**10.945.035.903,00**		**10.945.035.903,00**		**10.945.035.903,00**		43.901.133.590,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS					**11.066.025.881,00**		**10.945.035.903,00**		**10.945.035.903,00**		**10.945.035.903,00**		**43.901.133.590,00**	
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	100	100	6.848.020.031,00	100	6.450.901.403,00	100	6.450.901.403,00	100	6.450.901.403,00		26.200.724.240,00	INSPEKTORAT
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal/Khusus/, Kematangan SPIP, Tindaklanjut LHP,Nilai LAKIP	%	68	85	3.553.509.420,00	90	3.826.029.500,00	95	3.826.029.500,00	100	3.826.029.500,00		15.031.597.920,00	INSPEKTORAT

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pelaporan LP2P/LHKPN/ LHKASN tepat waktu	%	N/A	100	664.496.430,00	100	668.105.000,00	100	668.105.000,00	100	668.105.000,00		2.668.811.430,00	INSPEKTORAT
7 UNSUR KEWILAYAHAN					**37.091.650.343,00**		**34.202.778.092,00**		**34.202.778.092,00**		**34.202.778.092,00**		**139.699.984.619,00**	
7.01 KECAMATAN					**37.091.650.343,00**		**34.202.778.092,00**		**34.202.778.092,00**		**34.202.778.092,00**		**139.699.984.619,00**	
7.01.0.00.0.00.01.00 KECAMATAN BARUMUN					**3.973.661.088,00**		**3.743.341.471,00**		**3.743.341.471,00**		**3.743.341.471,00**		**15.203.685.501,00**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	2.545.652.672,00	100%	2.301.188.721,00	100%	2.301.188.721,00	100%	2.301.188.721,00		9.449.218.835,00	KEC.BARUMUN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik	%	1	100%	137.509.588,00	100%	129.779.250,00	100%	129.779.250,00	100%	129.779.250,00		526.847.338,00	KEC.BARUMUN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	1	100%	1.290.498.828,00	100%	1.312.373.500,00	100%	1.312.373.500,00	100%	1.312.373.500,00		5.227.619.328,00	KEC.BARUMUN
7.01.0.00.0.00.02.00 KECAMATAN LUBUK BARUMUN					**2.232.015.213,00**		**2.271.036.105,00**		**2.271.036.105,00**		**2.271.036.105,00**		**9.045.123.528,00**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	2.221.751.737,00	100%	2.252.533.605,00	100%	2.252.533.605,00	100%	2.252.533.605,00		8.979.352.552,00	KEC.LUBUK BARUMUN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	1	100%	10.263.476,00	100%	18.502.500,00	100%	18.502.500,00	100%	18.502.500,00		65.770.976,00	KEC.LUBUK BARUMUN
7.01.0.00.0.00.03.00 KECAMATAN HURISTAK					**1.753.093.311,00**		**1.699.195.027,00**		**1.699.195.027,00**		**1.699.195.027,00**		**6.850.678.392,00**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	1.708.942.701,00	100%	1.618.423.527,00	100%	1.618.423.527,00	100%	1.618.423.527,00		6.564.213.282,00	KEC.HURISTAK

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik	%	1	100%	20.349.810,00	100%	62.844.000,00	100%	62.844.000,00	100%	62.844.000,00		208.881.810,00	KEC.HURISTAK
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	1	0	-	100%	17.927.500,00	100%	17.927.500,00	100%	17.927.500,00		53.782.500,00	KEC.HURISTAK
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	%	1	100%	23.800.800,00			100%		100%			23.800.800,00	KEC.HURISTAK
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BARUMUN SELATAN					**1.871.421.154,00**		**1.837.082.830,00**		**1.837.082.830,00**		**1.837.082.830,00**		**7.382.669.644,00**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	1.769.067.448,00	100%	1.725.718.330,00	100%	1.725.718.330,00	100%	1.725.718.330,00		6.946.222.438,00	KEC.BARUMUN SELATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik	%	1	100%	22.270.322,00	100%	92.849.500,00	100%	92.849.500,00	100%	92.849.500,00		300.818.822,00	KEC.BARUMUN SELATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	1	100%	80.083.384,00	100%	18.515.000,00	100%	18.515.000,00	100%	18.515.000,00		135.628.384,00	KEC.BARUMUN SELATAN
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BATANG LUBU SUTAM					**2.404.391.967,00**		**2.094.389.070,00**		**2.094.389.070,00**		**2.094.389.070,00**		**8.687.559.177,00**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	2.297.110.847,00	100%	1.995.007.570,00	100%	1.995.007.570,00	100%	1.995.007.570,00		8.282.133.557,00	KEC.BATANG LUBU SUTAM
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik	%	1	100%	7.600.000,00	100%	10.638.000,00	100%	10.638.000,00	100%	10.638.000,00		39.514.000,00	KEC.BATANG LUBU SUTAM

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	%	1	100%	99.681.120,00	100%	88.743.500,00	100%	88.743.500,00	100%	88.743.500,00		365.911.620,00	KEC.BATANG LUBU SUTAM
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN HUTARAJA TINGGI					**3.141.619.299,00**		**2.584.606.296,00**		**2.584.606.296,00**		**2.584.606.296,00**		**10.895.438.187,00**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	3.041.458.305,00	100%	2.476.858.296,00	100%	2.476.858.296,00	100%	2.476.858.296,00		10.472.033.193,00	KEC.HUTARAJA TINGGI
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik	%	1	100%	16.055.700,00	100%	25.501.000,00	100%	25.501.000,00	100%	25.501.000,00		92.558.700,00	KEC.HUTARAJA TINGGI
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	%	1	100%	84.105.294,00	100%	82.247.000,00	100%	82.247.000,00	100%	82.247.000,00		330.846.294,00	KEC.HUTARAJA TINGGI
7.01.0.00.0.00.07.00 KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN					**1.940.624.047,00**		**2.087.120.428,00**		**2.087.120.428,00**		**2.087.120.428,00**		**8.201.985.331,00**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	1.876.009.297,00	100%	2.061.127.428,00	100%	2.061.127.428,00	100%	2.061.127.428,00		8.059.391.581,00	KEC.AEK NABARA BARUMUN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik	%	1	100%	46.752.250,00			100%		100%			46.752.250,00	KEC.AEK NABARA BARUMUN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	1	100%	8.012.500,00			100%		100%			8.012.500,00	KEC.AEK NABARA BARUMUN
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	1	100%	9.850.000,00	100%	25.993.000,00	100%	25.993.000,00	100%	25.993.000,00		87.829.000,00	KEC.AEK NABARA BARUMUN
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN SOSA					**3.269.065.699,00**		**2.463.315.203,00**		**2.463.315.203,00**		**2.463.315.203,00**		**10.659.011.308,00**	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	3.163.049.107,00	100%	2.365.054.203,00	100%	2.365.054.203,00	100%	2.365.054.203,00		10.258.211.716,00	KE.CSOSA
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik	%	1	100%	106.016.592,00	100%	98.261.000,00	100%	98.261.000,00	100%	98.261.000,00		400.799.592,00	KEC.SOSA
7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BARUMUN TENGAH					**2.449.722.176,00**		**2.159.350.889,00**		**2.159.350.889,00**		**2.159.350.889,00**		**8.927.774.843,00**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	2.351.649.194,00	100%	2.038.611.889,00	100%	2.038.611.889,00	100%	2.038.611.889,00		8.467.484.861,00	KEC.BARUMUN TENGAH
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik	%	1	100%	12.845.688,00	100%	5.400.000,00	100%	5.400.000,00	100%	5.400.000,00		29.045.688,00	KEC.BARUMUN TENGAH
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	1	100%	20.592.240,00	100%	24.780.000,00	100%	24.780.000,00	100%	24.780.000,00		94.932.240,00	KEC.BARUMUN TENGAH
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	%	1	100%	64.635.054,00	100%	80.590.000,00	100%	80.590.000,00	100%	80.590.000,00		306.405.054,00	KEC.BARUMUN TENGAH
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	1	0	-	100%	9.969.000,00	100%	9.969.000,00	100%	9.969.000,00		29.907.000,00	KEC.BARUMUN TENGAH
7.01.0.00.0.00.10.00 KECAMATAN SIHAPAS BARUMUN					**1.799.471.846,00**		**1.654.625.142,00**		**1.654.625.142,00**		**1.654.625.142,00**		**6.763.347.272,00**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	1.700.894.286,00	100%	1.581.260.642,00	100%	1.581.260.642,00	100%	1.581.260.642,00		6.444.676.212,00	KEC.SIHAPAS BARUMUN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	1	0	-	100%	12.494.500,00	100%	12.494.500,00	100%	12.494.500,00		37.483.500,00	KEC.SIHAPAS BARUMUN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	%	1	100%	98.577.560,00	100%	60.870.000,00	100%	60.870.000,00	100%	60.870.000,00		281.187.560,00	KEC.SIHAPAS BARUMUN
7.01.0.00.0.00.11. 0000 KECAMATAN ULU BARUMUN					**1.818.202.275,00**		**1.940.215.134,00**		**1.940.215.134,00**		**1.940.215.134,00**		**7.638.847.677,00**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	1.701.620.057,00	100%	1.821.957.884,00	100%	1.821.957.884,00	100%	1.821.957.884,00		7.167.493.709,00	KEC.ULU BARUMUN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik	%	1	100%	92.066.582,00	100%	91.164.250,00	100%	91.164.250,00	100%	91.164.250,00		365.559.332,00	KEC.ULU BARUMUN
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	1	100%	24.515.636,00	100%	27.093.000,00	100%	27.093.000,00	100%	27.093.000,00		105.794.636,00	KEC.ULU BARUMUN
7.01.0.00.0.00.12. 0000 KECAMATAN SOSOPAN					**1.664.133.874,00**		**1.619.838.608,00**		**1.619.838.608,00**		**1.619.838.608,00**		**6.523.649.698,00**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	1.554.348.124,00	100%	1.587.967.608,00	100%	1.587.967.608,00	100%	1.587.967.608,00		6.318.250.948,00	KEC.SOSOPAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik	%	1	100%	109.785.750,00			100%		100%			#VALUE!	KEC.SOSOPAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	1	0	-	100%	8.360.000,00	100%	8.360.000,00	100%	8.360.000,00		25.080.000,00	KEC.SOSOPAN
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	%	1	0	-	100%	12.256.000,00	100%	12.256.000,00	100%	12.256.000,00		36.768.000,00	KEC.SOSOPAN

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	1	0	-	100%	11.255.000,00	100%	11.255.000,00	100%	11.255.000,00		33.765.000,00	KEC.SOSOPAN
7.01.0.00.0.00.13.00 KECAMATAN BARUMUN BARU					**1.754.762.972,00**		**1.491.562.830,00**		**1.491.562.830,00**		**1.491.562.830,00**		**6.229.451.462,00**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	1.684.236.972,00	100%	1.413.126.830,00	100%	1.413.126.830,00	100%	1.413.126.830,00		5.923.617.462,00	KEC.BARUMUN BARU
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	1	100%	10.226.000,00	100%	9.697.000,00	100%	9.697.000,00	100%	9.697.000,00		39.317.000,00	KEC.BARUMUN BARU
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	%	1	100%	60.300.000,00	100%	68.739.000,00	100%	68.739.000,00	100%	68.739.000,00		266.517.000,00	KEC.BARUMUN BARU
7.01.0.00.0.00.14.00 KECAMATAN BARUMUN BARAT					**1.754.896.263,00**		**1.524.216.619,00**		**1.524.216.619,00**		**1.524.216.619,00**		**6.327.546.120,00**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	1.641.311.693,00	100%	1.428.334.619,00	100%	1.428.334.619,00	100%	1.428.334.619,00		5.926.315.550,00	KEC.BARUMUN BARAT
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik	%	1	100%	88.813.800,00	100%	68.936.000,00	100%	68.936.000,00	100%	68.936.000,00		295.621.800,00	KEC.BARUMUN BARAT
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	1	100%	14.690.250,00	100%	13.946.000,00	100%	13.946.000,00	100%	13.946.000,00		56.528.250,00	KEC.BARUMUN BARAT
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	%	1	0	-	100%		100%		100%			-	KEC.BARUMUN BARAT
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	1	100%	10.080.520,00	100%	13.000.000,00	100%	13.000.000,00	100%	13.000.000,00		49.080.520,00	KEC.BARUMUN BARAT
7.01.0.00.0.00.15.					**1.754.874.646,00**		**1.766.358.389,00**		**1.766.358.389,00**		**1.766.358.389,00**		**7.053.949.813,00**	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
00 KECAMATAN SOSA JULU														
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	1.692.474.646,00	100%	1.680.320.889,00	100%	1.680.320.889,00	100%	1.680.320.889,00		6.733.437.313,00	KE.CSOSA JULU
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik	%	1	100%	15.000.000,00			100%		100%			15.000.000,00	KEC.SOSA JULU
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	1	100%	30.650.000,00	100%	4.622.500,00	100%	4.622.500,00	100%	4.622.500,00		44.517.500,00	KEC.SOSA JULU
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	%	1	100%	16.750.000,00	100%	81.415.000,00	100%	81.415.000,00	100%	81.415.000,00		260.995.000,00	KEC.SOSA JULU
7.01.0.00.0.00.16.00 KECAMATAN ULU SOSA					**1.754.867.791,00**		**1.480.152.735,00**		**1.480.152.735,00**		**1.480.152.735,00**		**6.195.325.996,00**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	1.690.426.291,00	100%	1.386.901.485,00	100%	1.386.901.485,00	100%	1.386.901.485,00		5.851.130.746,00	KEC.ULU SOSA
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	1	100%	12.504.000,00	100%	10.608.000,00	100%	10.608.000,00	100%	10.608.000,00		44.328.000,00	KEC.ULU SOSA
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	%	1	100%	51.937.500,00	100%	82.643.250,00	100%	82.643.250,00	100%	82.643.250,00		299.867.250,00	KEC.ULU SOSA
7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN SOSA TIMUR					**1.754.826.722,00**		**1.786.371.316,00**		**1.786.371.316,00**		**1.786.371.316,00**		**7.113.940.670,00**	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1	100%	1.655.004.284,00	100%	1.730.909.316,00	100%	1.730.909.316,00	100%	1.730.909.316,00		6.847.732.232,00	KEC.SOSA TIMUR
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik	%	1	0	-	100%	49.334.000,00	100%	49.334.000,00	100%	49.334.000,00		148.002.000,00	KEC.SOSA TIMUR

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan	%	1	100%	50.421.420,00	100%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00		68.421.420,00	KEC.SOSA TIMUR
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	%	1	100%	14.972.800,00			100%		100%			#VALUE!	KEC.SOSA TIMUR
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	1	100%	18.836.250,00			100%		100%			#VALUE!	KEC.SOSA TIMUR
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	1	100%	15.591.968,00	100%	128.000,00	100%	128.000,00	100%	128.000,00		15.975.968,00	KEC.SOSA TIMUR
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					**2.905.805.333,00**		**3.101.300.589,00**		**3.101.300.589,00**		**3.101.300.589,00**		**12.209.707.100,00**	
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**2.905.805.333,00**		**3.101.300.589,00**		**3.101.300.589,00**		**3.101.300.589,00**		**12.209.707.100,00**	
8.01.0.00.0.00.01.0000 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**2.905.805.333,00**		**3.101.300.589,00**		**3.101.300.589,00**		**3.101.300.589,00**		**12.209.707.100,00**	
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan OPD	%	1		1.223.111.838,00		1.571.330.549,00		1.571.330.549,00		1.571.330.549,00		5.937.103.485,00	KESBANGPOL
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rasio Masyarakat yang memperoleh Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan	%			259.916.580,00		9.996.800,00		9.996.800,00		9.996.800,00		289.906.980,00	KESBANGPOL
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI	Persentase Partai Politik yang Tertib Administrasi	%	1	100%	1.033.696.005,00	100%	1.033.590.990,00	100%	1.033.590.990,00	100%	1.033.590.990,00		4.134.468.975,00	KESBANGPOL

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	APBD 2021		TARGET SETELAH PERUBAHAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
						2022		2023		2024				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang berperan aktif terhadap pembangunan daerah	%	1	100%	155.566.130,00	100%	185.000.100,00	100%	185.000.100,00	100%	185.000.100,00		710.566.430,00	KESBANGPOL
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kasus Konflik SARA yang tertangani	%	1	100%	68.418.740,00	100%	49.999.900,00	100%	49.999.900,00	100%	49.999.900,00		218.418.440,00	KESBANGPOL
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kejadian terkait Konflik Sosial yang ditangani	%	1	100%	165.096.040,00	100%	251.382.250,00	100%	251.382.250,00	100%	251.382.250,00		919.242.790,00	KESBANGPOL
Total Belanja					**1.135.946.055.126,00**		**1.082.369.232.003,00**		**1.111.044.795.483,00**		**1.142.540.930.307,00**		**4.471.901.012.919,00**	

TABEL 7.4
REALISASI RPJMD
KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN 2020
VISI : PADANG LAWAS BERCAHAYA

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					2020		2020	
					K	Rp	K	Rp
		URUSAN WAJIB DENGAN PELAYANAN DASAR						
1		**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	100%	100%	3.313.693.686	97,38	2.776.475.382
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	100%	100%	1.239.052.814	97,03	281.969.849
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	100%	100%	24.000.000	-	-
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	*Nilai LAKIP Perangkat Daerah*	B	B	140.010.300	99,91	109.859.910
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	*Jumlah APK PAUD*	100%	100%	5.226.984.340	92,52	263.701.100
			APM PAUD	100%	100%			
			Jumlah TBM	100%	100%			
			Jumlah PKBM	100%	100%			
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	*APK SD/MI*	100%	100%	55.796.220.528	91,92	16.068.176.262
		Program Pendidikan Non Formal	*Angak Melek huruf,Jumlah penduduk usia sekolah 0-6 Tahun*	Angka melek huruf 92,12%,	100%	2.975.459.430	93,31	46.840.230
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	*Jumlah Guru Kualifikasi S1/DIV.Rasio Guru dan Murid,Jumlah Guru yang bersertifikat*	Guru bersertifikat 885 Guru, Jumlah Guru 1510 Guru, Rasio Guru dan siswa 29,43	100%	1.623.259.100	93,11	554.362.510
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	*Persentase Sekolah yang Memilliki Ruang Perpustakaan*	100%	100%	244.311.952	98,03	19.900.000
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	*Indek Pembangunan Manusia (IPM)*	100%	100%	853.399.240	99,59	153.666.700
		Program Pengembangan Nilai Budya	*Jumlah Cagar Budaya Daerah, Jumlah gorup seni budaya,jumlah cagar budaya yang dipugar*	7 Cagar Budaya, 5 Seni Lukis, 8 Seni Kriya, 192 Tari	100%	398.915.360	99,91	114.383.100

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun 2020		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020 2020	
					K	Rp	K	Rp
				Kerasi, 18 TarI Tradisional, 6 Seni Musik,15 Cagar Budaya yang dipugar				
2		**DINAS KESEHATAN**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	100	100	3.404.041.170	90,06	4.493.010.340
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	100	100	650.840.000	96,20	492.394.099
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	100	100	100.000.000	99,62	2.938.101.846
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	12	12	255.764.830	87,01	18.229.633.726
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	*Persentase pemenuahan ketersediaan alat kesehatan dan obat pada fasilitas kesehatan*	1	1	3.096.672.600	-	-
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	*Cakupan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya*	1	1	25.437.466.236	97,85	6.710.384.000
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	*Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)*	1	1	173.580.061	11,33	17.647.000
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	*Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah 5 Tahun*	1	1	255.227.700	88,55	11.162.234.353
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	*Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)*	1	1	2.270.999.000	95,36	205.181.000
3		**Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	10.609.100.168	90,70	10.533.099.471
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	577.810.000	97,59	690.775.000
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	1	1	100.000.000	1 Thn	-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	1	1	424.552.000	1 Thn	-
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	*Cakupan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya*	1	1	20.880.000.000	17,81	3.718.461.515
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	*Cakupan Standar Pelayanan Kesehatan*	1	0	150.000.000	1 Thn	-
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana	*Cakupan Kualitas dan Kuantitas Sarana*	1	1	42.817.033.180	96,13	38.374.754.215

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					2020		2020	
					K	Rp	K	Rp
		dan Prasarana rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru Paru/ Rumah Sakit mata	*dan Prasarana Pelayanan Kesehatan*					
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	*Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan*	1	1	1.091.899.000	83,18	1.011.221.941
4		**Dinas Pekerjaan Umum**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	95	100	3.787.092.500	81,51	2.847.787.005
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	97	100	1.746.699.510	37,37	304.609.600
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	100	100	400.000.000	0,00	-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	98	100	345.800.000	0	-
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	*Nilai LAKIP Perangkat Daerah*	B	B	1.019.468.000	49,98	220.921.000
		Program Peningkatan Jalan & Jembatan	*Persentase Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap*	52	97	55.151.513.684	42,63	15.597.195.000
		Program pembangunan jalan dan jembatan	*Persentase Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik*	21	97	19.152.359.970	19,85	11.840.999.254
		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	*Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat*	16	97	5.089.942.248	49,48	1.830.747.500
		Program pembangunan turap/talud/bronjong	*Persentase Longsoran yang Tertangani*	20	97	8.355.191.625	63,92	6.200.241.600
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	*Persentase Panjang Jalan dan Jembatan yang Terpelihara*	52	98	4.981.541.894	74,38	2.529.073.320
		Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	*Persentase tersedianya informasi dan rincian mengenaiJalan dan Jembatan*	100	100	369.800.000	41,46	128.517.750
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	*Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan*	65	100	389.909.000	84,06	315.215.000
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	*Irigasi Permukaan dan rawa dalam Kondisi Baik*	15	97	17.357.763.330	47,58	8.019.763.590
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	*Cakupan Akses Minum Perpipaan*	33	97	7.577.476.704	90,28	5.026.643.236
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	*Penataan dan pengembangan sarana prasarana permukiman pada Kawasan Strategis*	1	97	35.402.914.777	13,12	3.534.380.619
		Program Perencanaan Tata Ruang	*Persentase kesesuaian antara rencana tata*	1	1	315.000.000	0	-

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					2020		2020	
					K	Rp	K	Rp
			ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah					
		Program Pemanfaatan Ruang	*Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah*	5	100	1.069.883.470	49,98	77.463.000
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	*Persentase Ruang Terbuka Hijau yang tertangani*	30	98	500.000.000	49,97	199.897.000
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	*Terbina dan terkelolanya Ketenagalistrikan*	76	97	3.096.824.000	76,42	2.743.382.767
5		**Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	100%	100%	2.430.934.452	97,80	2.116.343.119
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	100%	100%	305.672.000	90,48	222.282.000
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	100%	100%	32.500.000	0,00	-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	100%	100%	49.616.000	83,63	41.495.000
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	*Cakupan Wilayah Perumahan dan Lingkungan yang Sehat*	100%	100%	540.000.000	91,67	597.287.500
		Program pengelolaan areal pemakaman	*Jumlah areal pemakaman yang dikelola*	100%	0%	497.247.344	93,62	380.159.850
		Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	*Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan*	100%	100%	737.658.000	93,00	570.310.000
		Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*	100%	100%	3.391.301.400	99,45	3.108.861.400
		Program Penuntasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	*Capaian Penuntasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh*	100%	100%	300.000.000	71,56	99.800.000
		Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Daerah	*Persentase Pembangunan Sanitasi Permukiman Daerah*	100%	100%	731.300.000	100,00	26.600.000
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	*Persentase Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan*	100%	100%	291.454.160	82,08	20.520.000
		Pogram peningkatan pelayanan angkutan	*Persentase Pogram peningkatan pelayanan angkutan*	100%	100%	133.640.080	95,97	110.936.000
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	*Persentase Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas*	100%	100%	579.999.280	99,60	105.940.000
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	*Persentase Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan*	100%	100%	50.000.000	13,80	6.900.000

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					2020		2020	
					K	Rp	K	Rp
6		**Dinas Sosial**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	100%	100%	911.342.630	98,74	1.013.970.526
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	100%	100%	188.922.100	96,96	191.055.977
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	100%	100%	18.000.000	0,00	0,00
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai LAKIP Perangkat Daerah*	B	B	4.500.000	100,00	4.500.000
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	*Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya*	100%	100%	624.299.120	97,53	604.678.600
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	*Persentase PMKS yang tertangani*	34	34	593.854.030	99,96	25.686.000
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	*persentase Eks Penyandang Penyakit sosial ditangani dan dibina*	100%	100%	31.028.350	55,52	17.227.400
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	*persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kabupaten Padang Lawas mendapat pembinaan*	30	30	34.840.484	0,00	0,00
		Program pelayanan pendataan jaminan bantuan sosial	*Cakupan jaminan bantuan sosial*	100%	100%	177.468.400	100,00	151.628.400
7		**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	2.001.150.180	110,53	2.267.519.801
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	391.710.000	320,28	1.254.580.881
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	1	1	11.277.000	0,00	-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	1	1	58.500.000	0,00	-
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	*Persentase keluhan masyarakat dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan serta ketentraman, ketertiban umum*	1	1	257.958.000	53,23	165.975.000
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	*Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, kententraman, dan Keindahan)*	1	1	38.676.000	52,73	26.925.000
		Program peningkatan pemberantasan	*Persentase kasus penyakit masyarakat*	1	1	196.242.000	93,05	155.484.000

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					2020		2020	
					K	Rp	K	Rp
		penyakit masyarakat (pekat)	*yang ditangani*					
8		**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	100%	100%	1.117.312.192	99,76	906.196.881
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	100%	100%	144.952.000	99,97	144.904.500
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	100%	100%	63.081.120	0,00	-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	100%	100%	36.000.000	0,00	-
		Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	*Persentase pelayanan Masyarakat*	100%	100%	30.148.060	0,00	-
		Program Kedaruratan Penanggulangan Bencana	*Penanggulangan Bencana di Setiap Wilayah*	100%	100%	41.250.000	0,00	-
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
9		**Dinas Tenaga Kerja**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	100	100	861.777.624	177,69	1.531.266.223
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	10	10	647.809.498	#REF!	93.144.380
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	100	100	61.623.100	0,00	-
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	*Penetapan upah minimum kabupaten*	1 Dokumen	1	11.219.140	85,29	9.569.000
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	*Jumlah pencari kerja yang yang mengikuti pelatihan*	20	20	70.178.490	91,45	64.178.200
		Program Penciptaan Wirausaha Baru	*Persentase Penciptaan Wirausaha Baru*	1	1	146.850.250	96,30	141.422.450
10		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	100%	100%	857.504.460	98,68	974.726.731
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	100%	100%	111.949.000	99,39	248.225.462
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	100%	100%	40.000.000	0,00	0,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	100%	100%	18.000.000	0,00	0,00

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun 2020		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020 2020	
					K	Rp	K	Rp
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	*Cakupan penerbitan kartu keluarga, cakupan penerbitan kartu tanta penduduk (ktp) cakupan penerbitan akta kelahiran*	84%	98%	920.086.000	97,90	900.723.536
11		**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	1.875.487.326	96,99	1.563.490.850,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	0	1	225.816.860	92,27	208.354.500,00
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	0	1	#REF!	0,00	0,00
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	*Persentase penyelenggaraan pemerintah desa, keterampilan berusaha masyarakat perdesaan dan akses masyarakat terhadap informasi serta menguatnya lembaga dan organisasi berbasis masyarakat*	1	1	481.150.980	18,31	45.925.500,00
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	*Persentase Kapasitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung Daerah Padang Lawas*	1	1	714.169.230	0,00	0,00
		Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	*Persentase Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)*	1	1	285.095.000	0,00	0,00
12		**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	1.083.604.756	82,23	891.082.516
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	140.104.890	74,84	104.856.500
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	1	1	64.753.700	0,00	-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	1	1	81.000.000	0,00	-
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	0	0	-	0,00	-
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	*Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat*	0	0	-	0,00	-
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	*Penataan Peraturan Perundang-Undangan*	0	0	-	0,00	-
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi	0	0	-	0,00	-

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					2020		2020	
					K	Rp	K	Rp
		Realisasi						
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	*Pemenuhan dan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi di Bidang Penanaman Modal*	1	1	327.120.320	0,00	130.299.000
		Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Terpadu	*Pemenuhan Pelayanan Terhadap Masyarakat*	1	1	171.387.430	48,40	82.953.000
13		**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	981.343.300	97,25	826.869.550
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	179.242.260	88,94	156.744.700
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	1	0	56.100.000	0,00	0,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	100	0	67.500.000	0,00	0,00
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	*Cakupan pelayanan persampahan*	0	0	2.297.464.019	99,63	2.033.462.300
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	*Peningkatan kualitas lingkungan hidup dari udara , air dan tutupan lahan*	0	0	566.640.564	64,73	224.462.500
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam	*Persentase luas wilayah konservase sumber daya alam*	0	0	199.500.000	98,63	106.445.000
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	*Jumlah kualitas akses dan informasi sumber daya alam*	10	2	135.602.523	96,67	713.318.500
		Program Pengadaan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	*Persentase jumlah kawasan yang dikendalikan*	1	1	1.114.014.300	100	28.400.000
		Program Penanaman Bambu Pada Kanan dan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA)	*Jumlah bangunan konservasi tanah dan air*	3	3	678.803.145	99,93	191.697.000
14		**DINAS KETAHANAN PANGAN**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	518.845.772	1 Tahun	428.444.279
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	44.990.430	1 Tahun	44.989.450
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	0	1	34.200.000	0,00	-
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	*1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)*	69	86	465.755.687	12,00	209.646.100
			2. Penguatan cadangan pangan daerah	1	1		12,00	209.646.100
			3. Jumlah desa mandiri pangan	5	5		0	-
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil	*Persentase Promosi hasil hasil pertanian dan*	1	1	57.989.400	0,00	-

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun 2020		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					K	Rp	K	Rp
		Produksi Pertanian/Perkebunan	*perkebunan*					
15		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	100%	100	763.788.661	99,81	768.716.187
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	9 Kegiatan	9	150.903.210	99,91	228.460.539
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	100%	100	60.000.000	100,00	28.000.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	100%	100	49.500.000	99,41	34.356.000
		Progam Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	*Terlaksananya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan*	6 Kegiatan	6	80.623.053	0,00	-
		Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	*Jumlah Dokumen Arsip Daerah*	3 Kegiatan	3	4.461.177	96,09	4.082.470
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	*Persentase penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah*	13	13	44.093.406	98,93	11.549.910
		Progam Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Terlaksananya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100%	100%	-	0,00	-
		Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase kualitas pelayanan informasi	100%	100%	-	0,00	-
		Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	100%	100%	-	26,60	5.400.000
16		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	1.155.900.095	98,69	860.057.101
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	161.842.150	95,95	155.282.570
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	1	1	2.490.440	0,00	0,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	1	1	72.000.000	100,00	36.000.000
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	*Nilai LAKIP Perangkat Daerah*	B	B	26.268.630	99,90	4.264.500
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	*Terwujudnya kepastian legal yg menjamin hak-hak masyarakat mendapatkan informasi yang diperlukan (right to know) dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat (obligation to*	36	1	1.871.722.260	0,00	0,00

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					2020		2020	
					K	Rp	K	Rp
			tell)					
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	*Peningkatan SDM Bidang Persandian*	N/A	1	60.637.479	100,00	7.457.750
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	*Pelaksanaan Diseminasi Informasi Publik*	0	0	292.478.802	96,38	137.825.000
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	*Persediaan Data Sektoral Skala Kabupaten*	0	5	92.227.800	98,89	32.691.500
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	*Pelaksanaan pelayanan pemerintah berbasis Tegnologi Informasi dan Komunikasi*	0	1	1.238.334.605	83,00	1.081.202.500
17		**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**						
		Program pengembangan pemasaran pariwisata	*Jumlah Kegiatan pemasaran pariwisata*	2	2			
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	100	100	669.828.080	99,53	731.165.705
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	2	2	34.000.000	99,27	90.797.000
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	100	100%	16.900.000	0,00	0,00
		Program Peringatan Hari-Hari Nasional	*Persentase Pelaksanaan peringatan hari-hari nasional*	100%	100%	113.960.000	0,00	0,00
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	*Persentase keikut sertaan Kepemudaan*	2	2	114.640.000	45,63	50.940.000
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	*Persentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga*	2	2	233.450.000	24,31	83.200.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	*Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana olah raga*	4	4	343.517.750	97,29	824.556.749
		Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	*Jumlah Pelajar yang mengikuti seleksi dan pelatihan paskibra tingkat kabupaten*	1	1	323.793.600	0,00	0,00
		Program peringatan hari besar olahraga	*Jumlah Atlit, Pelatih yang mendapat dana pelatihan*	1	1	114.780.000	0,00	0,00
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata	*Jumlah sarana dan Prasarana Pariwisata*	4	4	236.661.300	97,94	39.176.500
18		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	2.098.329.080	0,00	2.905.614.603

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun 2020		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	43	44	72.253.020	0,00	72.228.460
		Program Keluarga Berencana	Terbentuknya Program Keluarga Berencana	100%	100%	6.305.351.590	0,00	5.772.667.312
		Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Terbentuknya Program Peningkatan Peran Serta dan Kesertaan Gender Dalam Pembangunan				-	-
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Terbentuknya Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100%	100%	243.371.839	0,00	150.200.000
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terwujudnya Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	2	2	44.146.700	0,00	-
		Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	*Partisipasi angkatan kerja perempuan*	1	1	324.125.540		
19		**DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	100%	100%	733.118.242	99,7254	671.511.699
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	100%	100%	123.837.950	99,9829	123.816.750
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	100%	100%	26.000.000	100	26.000.000
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	*Jumlah Koperasi Aktif*	360	362	151.480.833	99,8449	10.392.000
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	*Peningkatan output kegiatan hasil kerajinan daerah*	8	8	171.992.609	100,00	392.843.000
		Program Pengembangan Efesiensi Perdagangan dalam negeri	*Berkembangnya Efesiensi Perdagangan dalam negeri*	100%	100%	353.679.123	100	122.400.000
		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	*Adanya iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif*	100%	100%		100	136.000.000
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	*Mempromosikan produk yang dihasilkan para pengrajin serta meningkatkan daya saing*	1	1	495.715.500	0,00	-
		URUSAN PILIHAN						
20		**DINAS PERTANIAN**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Adm. Perkantoran	1	100%	1.545.705.290	80,32	1.241.516.062

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun 2020		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	1	100%	193.321.110	14,51	137.579.395
		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	1	100%	120.748.800		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Profesionalita Aparatur	1	100%	36.000.000		
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Terlaksananya Program Ketahanan Pangan	1	100%	39.200.000	12,24	20.200.000
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya Produksi Pertanian	1	100%	326.798.170	0,00	-
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya Produksi Pertanian	1	100%	1.987.496.950	0,00	765.595.000
		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Pemberdayaan Tenaga Penyuluh	1	100%	489.601.880	11,58	392.152.000
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Program peningkatan produksi hasil peternakan				100	285.767.050
21		**Dinas Perikanan dan Peternakan**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	955.167.580	12 bln	2.143.726.033
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	101.165.566	12 bln	228.727.517
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	1	1	55.000.000	12 bln	50.000.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*	1	1		12 bln	-
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Jumlah Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan*	1	1		12 bln	-
		Program Peningkatan penerapan teknonologi pertanian/perkebunan	*Peningkatan penerpan teknonologi pertanian/perkebunan*	0	0	135.056.000	12 bln	-
		Program pengembangan budidaya perikanan	*Peningkatan produksi benih dan produksi perikanan*	0	0	215.001.920	12 bln	550.588.310
		Program Peningkatan produksi hasil peternakan	*Program Peningkatan produksi hasil peternakan*	0	0	360.645.138	12 bln	284.769.050
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	*Adanya peningkatan pemasaran hasil produksi*	1	1		12 bln	-
		Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	*Adanya peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan*	1	1	188.445.079	12 bln	18.206.374
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)	*Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Produksi Perikanan*	1	1	26	12 bln	25.008.910
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (DAK)	*Tersedianya sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan*	1	1		12 bln	-

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					2020		2020	
					K	Rp	K	Rp
		Program pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (UPTD Kabupaten / Kota)	*Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (UPTD Kabupaten / Kota)*	N/A	1	110.000.000	12 bln	219.773.000
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	*Cakupan Penataan Daerah Otonomi Baru*	N/A	1	174.475.090	0%	-
		URUSAN PENUNJANG						
22		**Sekretariat Daerah**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	90%	90%	6.518.383.244	28,67	1.627.234.292
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	90%	90%	1.556.587.180	27,73	632.039.000
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	90%	90%	271.120.000	95,42	115.225.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	90%	90%	498.125.415	13,05	78.390.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai LAKIP Perangkat Daerah*	B	B	443.274.725	24,33	144.391.000
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	*Cakupan Kinerja Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH*	90%	90%	1.228.454.653	26,51	169.932.800
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	*Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan*	100%	100%	491.351.835	7,39	26.361.200
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	*Permintaan informasi yang bersifat terbuka dan Positif* *persen* *difasilitasi* *dengan SOP* *penyelengga raan acara kedinasan yang sesuai* *dengan SOP*	100%	100%	730.031.496	58,44	497.325.000
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	*Cakupan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun.*	90%	90%	557.707.396	17,79	76.226.022
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	*Cakupan pengembangan kapasitas otonomi daerah.*	85%	85%	1.036.220.193	22,30	216.244.200
		Program Peningkatan Fungsi Pembinaan Aparatur	*Pembinaan Aparatur Semakin Meningkat*	90%	90%	645.215.867	36,28	311.886.260
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	*Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*	90%	90%	68.411.900		

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun 2020		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					K	Rp	K	Rp
			ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota					
		Program Peringatan Hari-Hari Besar	*Cakupan perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan*	100%	100%	1.558.562.747	4,09	67.500.000
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	*Perencanaan Pembangunan Daerah*	90%	90%	690.905.459		
		Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan	*Meningkatnya fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan*	N/A	0%	-	34,63	119.500.000
		Program Layanan Pengadaan Daerah	*Cakupan Layanan Pengadaan Daerah*	N/A	0%	-	13,32	158.470.000
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejateraan Sosial	*Capaian pelayanan kegiatan kemasyarakatan.*	100%	100%	3.594.321.045	10,72	433.124.620
		Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	*Cakupan perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan*	80%	0%	-	23,60	23.604.000
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	*Capaian analisis kebijakan yang dijadikan kebijakan*	100%	0%	-	0,00	-
22		**Sekretariat Daerah**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	6.518.383.244	99,69	4.683.788.619
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	1.556.587.180	99,50	2.313.009.400
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	1	1	271.120.000	99,57	120.225.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	1	1	498.125.415	99,91	116.740.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai LAKIP Perangkat Daerah*	B	B	443.274.725	99,97	317.683.320
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	*Cakupan Kinerja Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH*	1	1	1.228.454.653	99,81	519.924.700
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	*Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan*	1	1	491.351.835	99,99	247.873.000,00
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	*Permintaan informasi yang bersifat terbuka dan Positif persen difasilitasi dengan SOP*	1	1	730.031.496	99,99	526.900.000

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					2020		2020	
					K	Rp	K	Rp
			penyelengga raan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP					
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	*Cakupan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun.*	1	1	557.707.396	310,26	73.495.522
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	*Cakupan pengembangan kapasitas otonomi daerah.*	1	1	1.036.220.193	11,37	49.891.522
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	*Pembinaan Aparatur Semakin Meningkat*	1	1	645.215.867	32,79	98.834.200
		Program Peningkatan Fungsi Pembinaan Aparatur	*Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota*	1	1	68.411.900	99,66	456.136.260
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	*Cakupan perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan*	1	1	1.558.562.747	0,00	0,00
		Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan	*Perencanaan Pembangunan Daerah*	1	1	690.905.459	176,80	396.083.492,00
		Program Peringatan Hari-Hari Besar	*Meningkatnya fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan*	N/A	0	-	20,88	172.083.492,00
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejateraan Sosial	*Cakupan Layanan Pengadaan Daerah*	N/A	0	-	3,98	40.990.880,00
		Program Layanan Pengadaan Daerah	*Capaian pelayanan kegiatan kemasyarakatan.*	1	1	3.594.321.045	99,92	1.208.121.508,00
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	*Capaian analisis kebijakan yang dijadikan kebijakan*	1	0	-	0,00	0,00
24		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	100%	100%	2.402.468.395	99,10	2.538.004.197
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	100%	100%	730.634.440	99,33	1.019.802.203
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	100%	100%	581.248.000	99,81	401.908.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	100%	100%	400.000.000	100,00	399.980.000
		Program pengembangan data/informasi	*Jumlah dokumen data/informasi*	100%	100%	1.708.124.985	99,89	2.072.556.500
		Program perencanaan pembangunan daerah	*Persentase usulan masyarakat yang diakomodir OPD*	100%	100%	1.159.485.835	94,96	723.954.000
		Program perencanaan pembangunan	*Persentase konsistensi program Renstra*	100%	100%	736.447.210	95,20	323.784.500

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun 2020		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					K	Rp	K	Rp
		ekonomi	*dengan Renja OPD bidang ekonomi*					
		Program perencanaan sosial dan budaya	*Persentase konsistensi program Renstra dengan Renja OPD bidang Sosbud*	100%	100%	723.314.415	96,99	452.496.000
		Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	*Persentase konsistensi program Renstra dengan Renja OPD bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam*	100%	100%	524.381.825	99,21	190.859.500
25		**Badan Pendapatan Daerah**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi		0,00	-	93,87	2.221.739.115
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				95,42	902.794.888
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*		0,00	-	98,49	56.486.430
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*		0,00	-	0,00	-
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Meningkatnya Kulitas Pengelolaan Keuangan Daerah*		0,00	-	96,56	651.113.109
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota	*Jumlah Rapat dan Dokumen Penataan Peraturan Perundang-Undangan*		0,00	-	64,26	148.145.088
								Rata-rata capaian kinerja (%)
								Predikat kinerja
26		**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	3.939.590.341	98,09	3.118.714.739,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	6.013.721.112	99,88	5.579.254.514,00
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	1	1	266.000.000	0,00	0,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	1	1	188.880.000	11,68	8.760.900,00
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai LAKIP Perangkat Daerah*	B	B	222.686.580	80,54	53.503.900,00
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Meningkatnya Kulitas Pengelolaan Keuangan Daerah*	1	1	2.667.667.475	97,28	1.183.942.235,00
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota	*peresentase Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang baik dan benar*	1	1	229.450.767	0,00	0,00
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota	*Jumlah Rapat dan Dokumen Penataan Peraturan Perundang-Undangan*	1	1	22.500.000	0,00	0,00
		Program Peningkatan Sistem Pelaporan	*Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan*	1	1	476.800.333		436.146.710,00

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun 2020		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					K	Rp	K	Rp
		Pengadaan Asset Daerah	*Pengadaan Asset Daerah*					
27		**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					82,41	2.487.895.396
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	1.212.598.455	99,75	1.091.158.240
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	79.853.500	92,59	58.311.723
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	1	0	-	94,47	652.218.600
		Program Peningkatan Fungsi Pembinaan Aparatur	*Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis*	1	1	1.742.018.000	58,56	686.206.833
		Program Bimbingan Mental dan Rohani bagi PNS Kabupaten Padang Lawas	*Nilai LAKIP Perangkat Daerah*	B	B	-	0,00	-
		Program Pelaksanaan dalam Rangka HUT Korpri	*Adanya Peningkatan fungsi Aparatur*	1	1	235.393.165	0,00	-
28		**INSPEKTORAT**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	889.492.440	94,32	1.086.311.630
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	1.354.985.410	12 bulan	620.674.008
		Program peningkatan disiplin aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	-	1	61.415.440		43.660.000
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Persentase Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	1	1	100.000.000	94,30	643.459.800
		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	*Nilai LAKIP Perangkat Daerah*	B	B	295.015.310	72,47	244.845.000
		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	*Persentase Penyelesaian TLHP, Pengawasan Kepada Obrik/ Penurunan Jumlah Temuan Pemeriksaan, Pengaduan Masyarakat.*	1	1	1.744.689.580	98,48	1.776.244.200
29		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	519.098.302	99,89	543.324.580
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	105.299.740	93,19	32.617.340

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					2020		2020	
					K	Rp	K	Rp
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	*Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, kententraman, dan Keindahan)*	1	1	83.109.600		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Tingkat Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	1	1	-	0,00	-
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	*Pengembangan Wawasan Kebangsaan*	1	1	265.838.960		
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	*Tingkat Disiplin Aparatur*	1	1	-	0,00	-
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	*Meningkatnya wawasan kebangsaan*	1	1	341.354.402	100,00	178.007.440
		Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	*Persentase penanganan konflik ipaleksosbud-hamkan*	1	1	208.261.004		
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kesbang	*Meningkatnya kemitraan wawasan kesbang*	1	1	279.130.908	97,11	117.736.050
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	*Persentase kasus penyakit masyarakat yang ditangani*	1	1	110.145.000	100,00	24.899.480
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	*Persentase Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)*	1	1	86.868.243	100,00	8.755.910
30		**Kecamatan Barumun**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	1.254.289.660	99,99	176.970.750
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	75.081.000	99,93	62.677.603
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	*Terciptanya hubungan baik pada masyarakat dalam Bentuk - bentuk pealayanan dan kegiatan publik*	1	1	167.083.110	99,82	43.993.463
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	*Kualitas hidup perempuan pedesaan dapat meningkat dengan baik*	1	1	14.960.000	100,00	14.279.600
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tercapainya PeningkatanSarana Prasaran Kelurahan	1	1	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000
		Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Sibuhuan	*Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Sibuhuan*	1	1	100.000.000	100,00	100.000.000
31		**Kecamatan Lubuk Barumun**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	100%	100%	144.043.970	96,58	138.752.128
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	25.370.550	99,96	25.361.350

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					2020		2020	
					K	Rp	K	Rp
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	Terciptanya hubungan baik pada masyarakat dalam Bentuk - bentuk pealayanan dan kegiatan publik	100%	100%	150.512.528	71,41	45.555.798
32		**KECAMATAN ULU BARUMUN**					99,74	269.310.567
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	157.364.940	99,67	211.038.602
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	21.677.330	100,00	19.723.825
		Program Dsiplin Aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	1	1	14.400.000	0,00	0,00
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	*Terciptanya hubungan baik pada masyarakat dalam Bentuk - bentuk pealayanan dan kegiatan publik*	1	1	140.491.960	100,00	28.420.340
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	*Kualitas hidup perempuan pedesaan dapat meningkat dengan baik*	1	1	10.127.800	100,00	10.127.800
33		**Kecamatan Hutaraja Tinggi**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	262.033.445	99,94	278.460.201
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	67.285.030	99,92	29.977.220
		Program Dsiplin Aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	1	1	19.000.000	0,00	0,00
		Program Peringatan Hari-Hari Besar	*Terlaksanya Peringatan Hari-hari Nasional*	1	1	34.843.150	99,98	34.836.800
		Program Peningkatan Fungsi Pembinaan Aparatur	*Tercapainya Peningkatan Fungsi Pembinaan Aparatur*	1	1	13.300.000	100,00	13.300.000
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	*Terciptanya hubungan baik pada masyarakat dalam Bentuk - bentuk pealayanan dan kegiatan publik*	1	1	191.694.920	99,98	77.939.410
34		**Kecamatan Sosopan**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	100%	100%	149.926.555	90,55	145.898.211
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	100%	100%	44.948.210	99,97	44.933.750
		Program Dsiplin Aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	100%	100%	12.888.000	0,00	-
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	*Terciptanya hubungan baik pada masyarakat dalam Bentuk - bentuk pealayanan dan kegiatan publik*	100%	100%	163.737.850	71,56	41.034.270
		Program Peningkatan Kualitas Hidup	*Kualitas hidup perempuan pedesaan dapat*	100%	100%	#REF!	0,00	-

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun 2020		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					K	Rp	K	Rp
		Perempuan	*meningkat dengan baik*					
35		**Kecamatan Batang Lubu Sutam**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	170.196.720	98,18	153.908.984
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	25.611.820	100,00	25.611.820
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Nilai LAKIP Perangkat Daerah*	B	B	1.500.000	0,00	-
		Program Peringatan Hari-Hari Nasional	*Terselenggaranya Peringatan Hari-Hari Nasional*	1	1	31.335.000	92,19	18.300.000
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	*Terciptanya hubungan baik pada masyarakat dalam Bentuk - bentuk pealayanan dan kegiatan publik*	1	1	170.300.000	41,46	40.410.000
36		**Kecamatan Sosa**					98,75	368.856.199
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	238.239.320	99,26	254.477.299
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	28.979.600	90,67	26.275.410
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	*Persentase Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*	1	1		0,00	-
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	*Terciptanya hubungan baik pada masyarakat dalam Bentuk - bentuk pealayanan dan kegiatan publik*	1	1	176.692.235	99,92	80.337.460
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	*Kualitas hidup perempuan pedesaan dapat meningkat dengan baik*	1	1	12.768.630	99,97	7.766.030
37		**KECAMATAN HURISTAK**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	100%	100%	178.659.930	95,86	180.295.085
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	100%	100%	57.470.000	98,81	40.272.068
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	*Terciptanya hubungan baik pada masyarakat dalam Bentuk - bentuk pealayanan dan kegiatan publik*	100%	100%	196.437.818	33,25	27.155.620

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun 2020		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020 2020	
					K	Rp	K	Rp
38		**KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	1	1	161.228.030	100,00	71.287.203,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	65.012.420	100,00	8.866.900,00
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	*Terciptanya hubungan baik pada masyarakat dalam Bentuk - bentuk pealayanan dan kegiatan publik*	1	1	140.752.028	100,00	42.269.800,00
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	*Kualitas hidup perempuan pedesaan dapat meningkat dengan baik*	1	1	10.027.500	0,00	0,00
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	*Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	1	1	-	0,00	0,00
39		**KECAMATAN BARUMUN TENGAH**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	224.619.360	97,08	197.122.538,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	1	1	24.468.900	98,84	19.362.180,00
		Program Peningkatan Dsiplin Aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	1	1	16.000.000	-	-
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	*Meningkatnya Pelayanan Publik*	1	1	153.484.149	71,12	50.366.570,00
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	*Kualitas hidup perempuan pedesaan dapat meningkat dengan baik*	1	1	164.721.036	0,00	0,00
40		**kecamatan sihapas barumun**						
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	100%	100%	156.867.850	95,81	132.808.156
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	100%	100%	48.535.280	98,29	31.869.600
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	*Terciptanya hubungan baik pada masyarakat dalam Bentuk - bentuk pealayanan dan kegiatan publik*	100%	100%	223.073.500	85,51	102.699.450
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	*Kualitas hidup perempuan pedesaan dapat meningkat dengan baik*	100%	100%	15.273.330	99,98	6.825.000
41		**Kecamatan Barumun Selatan**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	1	1	120.004.275	96,14	159.687.830
		Program Peningkatan Sarana dan	*Persentase sarana dan prasarana dalam*	1	1	33.792.780	96,44	32.590.780

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					2020		2020	
					K	Rp	K	Rp
		Prasarana Aparatur	*kondisi baik*					
		Program Dsiplin Aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	1	1	32.500.000	100,00	12.500.000
		Program Peringatan Hari-Hari Besar	*Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Nasional*	1	1	16.264.020	100,00	16.264.020
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	*Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah*	1	1	11.130.700	99,98	11.128.597
		Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan	*Meningkatnya Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan*	-	1	131.733.960		-
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	*Terciptanya hubungan baik pada masyarakat dalam Bentuk - bentuk pealayanan dan kegiatan publik*	1	1	125.437.130	0,00	-
42		**Kecamatan Barumun Barat**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	0%	100%	65.912.491	84,62	82.853.956
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	0%	100%	27.498.500	95,21	61.407.550
		Program Dsiplin Aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	-	-	-	0,00	-
		Program Peringatan Hari-Hari Nasional	*Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Nasional*	-	-	17.931.082	99,96	8.996.140
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	*Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah*	-	-	-	0,00	-
		Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan	*Meningkatnya Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan*	-	-	-	0,00	-
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	*Terciptanya hubungan baik pada masyarakat dalam Bentuk - bentuk pealayanan dan kegiatan publik*	-	-	-	0,00	-
43		**KECAMATAN BARUMUN BARU**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	0%	100%	65.912.491	99,73	163.472.406
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	0%	100%	27.498.500	100,00	60.498.500
		Program Dsiplin Aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	-	-	-	0,00	-
		Program Peringatan Hari-Hari Nasional	*Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Nasional*	-	-	17.931.082	100,00	9.000.000
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	*Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah*	-	-	-	0,00	-
		Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan	*Meningkatnya Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan*	-	-	-	0,00	-
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	*Terciptanya hubungan baik pada*	-	-	-	0,00	-

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun 2020		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020 2020	
					K	Rp	K	Rp
			masyarakat dalam Bentuk - bentuk pealayanan dan kegiatan publik					
44		**Kecamatan sosa Timur**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	0	1	65.912.491	98,60	167.527.454
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	0	1	27.498.500	99,89	67.420.974
		Program Dsiplin Aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	0	0	-	0,00	-
		Program Peringatan Hari-Hari Nasional	*Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Nasional*	0	0	-	0,00	-
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	*Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah*	0	0	-	0,00	-
		Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan	*Meningkatnya Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan*	0	0	-	0,00	-
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	*Terciptanya hubungan baik pada masyarakat dalam Bentuk - bentuk pealayanan dan kegiatan publik*	0	0	-	0,00	-
45		**KECAMATAN ULU SOSA**					97,26	227.013.886
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	0	1	65.912.491	96,19	157.665.486
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	0	1	27.498.500	99,75	60.348.400
		Program Dsiplin Aparatur	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	0	0	-	0,00	-
		Program Peringatan Hari-Hari Nasional	*Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Nasional*	0	0	-	100,00	9.000.000
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	*Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah*	0	0	-	0,00	-
		Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan	*Meningkatnya Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan*	0	0	-	0,00	-
		Program Peningkatan Pelayanan Publik	*Terciptanya hubungan baik pada masyarakat dalam Bentuk - bentuk pealayanan dan kegiatan publik*	0	0	-	0,00	-
46		**Kecamatan Sosa Julu**						
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi*	0	0	65.912.491,00	100,00	65.912.491
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	*Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik*	0	0	27.498.500,00	100,00	27.498.500,00

No.	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD Tahun 2020	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKPD Kabupaten/kotaTahun		Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke 2020	
					2020		2020	
					K	Rp	K	Rp
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	*Persentase tingkat kedisiplinan aparatur*	0	0		0,00	
		Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	*Terlaksananya Peringatan Hari-Hari Nasional*	0	0		0,00	
		Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	*Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah*	0	0		0,00	
		Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan	*Meningkatnya Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan*	0	0			
Faktor pendorong pencapaian kinerja:								
Faktor penghambat:								
Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:								
Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya:								

TABEL 7.5

PROYEKSI PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN PADANG LAWAS

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Pencapaian	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2020		Proyeksi							
						Target	Realisasi	2021		2022		2023		2024	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	**Pendidikan**														
	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Warga Negara 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	100%	67.12%	100%	71.860.401.058,00	100%	62.020.171.060,00	100%	62.020.171.060,00	100%	62.020.171.060,00
	Pendidikan Dasar		Jumlah Warga Negara yang berusia 7-15 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun	100%	92.84%	100%		100%		100%		100%	
	Pendidikan Kesetaraan		Jumlah Warga Negara yang berusia 7-18 Tahun Yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	Setiap Tahun	100%	1.54%	100%		100%		100%		100%	
II	**Kesehatan**														

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Pencapaian	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2020		Proyeksi							
						Target	Realisasi	2021		2022		2023		2024	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	54%	100%	48.600.165.502,00	100%	52.002.177.087,14	100%	52.002.177.087,14	100%	52.002.177.087,14
	Pelayanan kesehatan ibu Bersalin		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	38.2%	100%		100%		100%		100%	
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	52.2%	100%		100%		100%		100%	
	Pelayanan kesehatan balita		Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	40%	100%		100%		100%		100%	
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%		100%		100%		100%	
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	85%	100%		100%		100%		100%	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Pencapaian	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2020		Proyeksi							
						Target	Realisasi	2021		2022		2023		2024	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	33%	100%		100%		100%		100%	
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		Jumlah Warga Negara penderita hiipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	6.66%	100%		100%		100%		100%	
	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus		Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	24%	100%		100%		100%		100%	
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	71.24%	100%		100%		100%		100%	
	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis		Jumlah Warga Negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	15.2%	100%		100%		100%		100%	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Pencapaian	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2020		Proyeksi							
						Target	Realisasi	2021		2022		2023		2024	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodefici ency virus)		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	20.8%	100%		100%		100%		100%	
III	**Pekerjaan Umum**														
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	Setiap Tahun	100%	N/A	100%	6.108.467.993,00	100%	9.381.233.400,00	100%	9.381.233.400,00	100%	9.381.233.400,00
	Penyediaan layanan pengolahan air limbah Domestik		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestik	100%	Setiap Tahun	100%	N/A	100%		100%		100%		100%	
IV	**Perumahan Rakyat**														
	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Program Kawasan Permukiman	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	100%	N/A	100%	7.224.362.400,00	100%	3.201.210.000,00	100%	3.201.210.000,00	100%	3.201.210.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Pencapaian	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2020		Proyeksi							
						Target	Realisasi	2021		2022		2023		2024	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kab/kota		Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	100%	N/A	100%		100%		100%		100%	
V	**Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindugan Masyarakat**														
	Pelayanan Ketentraman Dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun	100%	98%	100%	580.799.760,00	100%	541.927.500,00	100%	541.927.500,00	100%	541.927.500,00
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	100%	N/A	100%	442.070.168,00	100%	228.000.000,00	100%	228.000.000,00	100%	228.000.000,00
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun	100%	N/A	100%		100%		100%		100%	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Pencapaian	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2020		Proyeksi							
						Target	Realisasi	2021		2022		2023		2024	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	100%	97%	100%	73.900.000,00	100%	85.977.500,00	100%	85.977.500,00	100%	85.977.500,00
VI	**Sosial**														
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	0%	100%	585.962.194,00	100%	654.036.280,00	100%	654.036.280,00	100%	654.036.280,00
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	80%	100%		100%		100%		100%	
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%		100%		100%		100%	
	Rehabiltasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti		Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	0%	100%		100%		100%		100%	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Indikator Pencapaian	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2020		Proyeksi							
						Target	Realisasi	2021		2022		2023		2024	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Perlindugan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/kota	Program Penanganan Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	68.588.588,00	100%	56.800.000,00	100%	56.800.000,00	100%	56.800.000,00

TABEL 7.6

PROGRAM PENDANAAN UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DESEASE 19*
KABUPATEN PADANG LAWAS

No	Program	Kegiatan	Sumber Pendanaan	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)	OPD Pelaksana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (Recofusing)	1.142.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah
2	Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (Recofusing)	7.305.032.020,00	Rumah Sakit Umum Daerah
3	Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (Recofusing)	5.662.875.334,00	Dinas Kesehatan
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (Recofusing)	9.825.974.042,00	Dinas Kesehatan
Total				**23.935.881.396,00**	

TABEL 7.7

PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK PENCAPAIAN SDG's KABUPATEN PADANG LAWAS

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
1	MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	585.962.194,00	654.036.280,00	654.036.280,00	654.036.280,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Sosial
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.576.514.270,00	4.533.767.880,00	4.533.767.880,00	4.533.767.880,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Sosial
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	216.380.000,00	1.251.842.300,00	1.251.842.300,00	1.251.842.300,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	900.681.650,00	780.279.980,00	780.279.980,00	780.279.980,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Proporsi jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan peserta PBI	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	585.962.194,00	654.036.280,00	654.036.280,00	654.036.280,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Sosial

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.576.514.270,00	4.533.767.880,00	4.533.767.880,00	4.533.767.880,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Sosial
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	263.638.441,00	380.400.760,00	380.400.760,00	380.400.760,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Sosial
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	585.962.194,00	654.036.280,00	654.036.280,00	654.036.280,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Sosial
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.576.514.270,00	4.533.767.880,00	4.533.767.880,00	4.533.767.880,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Sosial
		Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15 - 49 Tahun yang Proses Melahirkannya di Fasilitas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.498.115.820,00	20.396.584.470,00	20.396.584.470,00	20.396.584.470,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Rumah Sakit Umum Daerah
		Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.498.115.820,00	20.396.584.470,00	20.396.584.470,00	20.396.584.470,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Rumah Sakit Umum Daerah
		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.518.854.162,00	7.739.323.000,00	7.739.323.000,00	7.739.323.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	131.912.718,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.224.362.400,00	3.201.210.000,00	3.201.210.000,00	3.201.210.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.665.141.651,00	911.392.690,00	911.392.690,00	911.392.690,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	32.162.259.585,00	40.694.000.000,00	40.694.000.000,00	40.694.000.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.224.367.400	3.201.210.000,00	3.201.210.000,00	3.201.210.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.665.141.651,00	911.392.690,00	911.392.690,00	911.392.690,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	32.162.259.585,00	40.694.000.000,00	40.694.000.000,00	40.694.000.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
		Pengurangan luas kawasan kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.224.367.400	3.201.210.000,00	3.201.210.000,00	3.201.210.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.665.141.651,00	911.392.690,00	911.392.690,00	911.392.690,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	32.162.259.585,00	40.694.000.000,00	40.694.000.000,00	40.694.000.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71.860.401.058,00	62.020.171.060,00	62.020.171.060,00	62.020.171.060,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71.860.401.058,00	62.020.171.060,00	62.020.171.060,00	62.020.171.060,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.151.942.700,00	405.100.000,00	405.100.000,00	405.100.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
		Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	68.588.588,00	56.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Sosial
		Wilayah Rawan Bencana (IRB)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	442.070.168,00	228.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	73.900.000,00	85.977.500,00	85.977.500,00	85.977.500,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	585.962.194,00	654.036.280,00	654.036.280,00	654.036.280,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Sosial
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.576.514.270,00	4.533.767.880,00	4.533.767.880,00	4.533.767.880,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Sosial
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	216.380.000,00	1.251.842.300,00	1.251.842.300,00	1.251.842.300,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	900.681.650,00	780.279.980,00	780.279.980,00	780.279.980,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan dan kesehatan) sebagai	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	201.499.430,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
		persentase dari total belanja pemerintah.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71.860.401.058,00	62.020.171.060,00	62.020.171.060,00	62.020.171.060,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	90.000.000,00	340.569.800,00	340.569.800,00	340.569.800,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	106.849.992,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.498.115.820,00	20.396.584.470,00	20.396.584.470,00	20.396.584.470,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Rumah Sakit Umum Daerah
2	MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	358.915.614,00	65.081.688,00	65.081.688,00	65.081.688,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	460.064.568,00	225.065.972,00	225.065.972,00	225.065.972,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Ketahanan Pangan

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	926.285.000,00	629.063.230,00	629.063.230,00	629.063.230,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pertanian
		Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.518.854.162,00	7.739.323.000,00	7.739.323.000,00	7.739.323.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	131.912.718,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	358.915.614,00	65.081.688,00	65.081.688,00	65.081.688,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	460.064.568,00	225.065.972,00	225.065.972,00	225.065.972,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Ketahanan Pangan

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	106.849.992,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	98.033.124,00	36.159.000,00	36.159.000,00	36.159.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	106.849.992,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	98.033.124,00	36.159.000,00	36.159.000,00	36.159.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
		Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	492.711.500,00	208.440.370,00	208.440.370,00	208.440.370,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	686.829.790,00	1.426.752.760,00	1.426.752.760,00	1.426.752.760,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Perikanan dan Peternakan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	55.898.760,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Perikanan dan Peternakan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	492.711.500,00	208.440.370,00	208.440.370,00	208.440.370,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
			3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	38.175.000,00	144.170.500,00	144.170.500,00	144.170.500,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pertanian
			3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	253.009.486,00	111.652.620,00	111.652.620,00	111.652.620,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pertanian
3	MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA	Angka Kematian Ibu (AKI).	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	207.093.390,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	106.849.992,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.498.115.820,00	20.396.584.470,00	20.396.584.470,00	20.396.584.470,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Rumah Sakit Umum Daerah
		Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	106.849.992,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.498.115.820,00	20.396.584.470,00	20.396.584.470,00	20.396.584.470,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Rumah Sakit Umum Daerah
		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	106.849.992,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	106.849.992,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	106.849.992,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
		Persentase kacamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	106.849.992,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
		Prevalensi HIV dari total populasi dewasa.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	106.849.992,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	106.849.992,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
		Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	263.638.441,00	380.400.760,00	380.400.760,00	380.400.760,00	APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Sosial
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	580.799.760,00	541.927.500,00	541.927.500,00	541.927.500,00	APBD Kab. Padang Lawas	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.518.854.162,00	7.739.323.000,00	7.739.323.000,00	7.739.323.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) dan Total Fertility Rate (TFR).	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	207.093.390,00				APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	52.371.484,00	92.574.000,00	92.574.000,00	92.574.000,00	APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	286.278.034,00	142.066.079,00	142.066.079,00	142.066.079,00	APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	18.735.134,00				APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	98.033.124,00	36.159.000,00	36.159.000,00	36.159.000,00	APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	160.600.000,00	193.600.000,00	193.600.000,00	193.600.000,00	APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	106.849.992,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.498.115.820,00	20.396.584.470,00	20.396.584.470,00	20.396.584.470,00	APBD Kab. Padang Lawas	Rumah Sakit Umum Daerah
		Jumlah Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (ASN)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.749.497.064,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	48.600.165.502,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	106.849.992,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.765.971.156,00	2.048.171.000,00	2.048.171.000,00	2.048.171.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.978.256.000,00	4.427.267.000,00	4.427.267.000,00	4.427.267.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
4	MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INSKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA	Persentase SD/MI dan SMP/MTS berakreditasi minimal B.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	201.499.430,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71.860.401.058,00	62.020.171.060,00	62.020.171.060,00	62.020.171.060,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	90.000.000,00	340.569.800,00	340.569.800,00	340.569.800,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SMP/MTS sederajat.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	201.499.430,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	201.499.430,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di SD/MI/ SMP/MTS sederajat.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71.860.401.058,00	62.020.171.060,00	62.020.171.060,00	62.020.171.060,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	207.093.390,00				APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	18.735.134,00				APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	286.278.034,00	142.066.079,00	142.066.079,00	142.066.079,00	APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	207.093.390,00				APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	52.371.484,00	92.574.000,00	92.574.000,00	92.574.000,00	APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	286.278.034,00	142.066.079,00	142.066.079,00	142.066.079,00	APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	18.735.134,00				APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	98.033.124,00	36.159.000,00	36.159.000,00	36.159.000,00	APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen pemerintah daerah.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	286.278.034,00	142.066.079,00	142.066.079,00	142.066.079,00	APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	18.735.134,00				APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.518.854.162,00	7.739.323.000,00	7.739.323.000,00	7.739.323.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	207.093.390,00				APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	98.033.124,00	36.159.000,00	36.159.000,00	36.159.000,00	APBD Kab. Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
6	MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.108.467.993,00	9.381.233.400,00	9.381.233.400,00	9.381.233.400,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.224.367.400	3.201.210.000,00	3.201.210.000,00	3.201.210.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.108.467.993,00	9.381.233.400,00	9.381.233.400,00	9.381.233.400,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
		Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	106.849.992,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.224.367.400	3.201.210.000,00	3.201.210.000,00	3.201.210.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
		Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	106.849.992,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
8	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	871.144.058,00	115.798.000,00	115.798.000,00	115.798.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah wisatawan mancanegara.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	207.150.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	207.150.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
9	MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI	Persentase Jalan Kabupaten Dakam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	62.266.867.600,00	61.916.870.000,00	70.592.433.480,00	82.088.568.304,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
		Cakupan layanan Telekomunikasi	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	660.967.832,00	587.622.000,00	587.622.000,00	587.622.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	MENGURANGI KESENJANGAN INTRA- DAN ANTAR NEGARA	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	585.962.194,00	654.036.280,00	654.036.280,00	654.036.280,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Sosial

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.576.514.270,00	4.533.767.880,00	4.533.767.880,00	4.533.767.880,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Sosial
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	216.380.000,00	1.251.842.300,00	1.251.842.300,00	1.251.842.300,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	900.681.650,00	780.279.980,00	780.279.980,00	780.279.980,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	216.380.000,00	1.251.842.300,00	1.251.842.300,00	1.251.842.300,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	900.681.650,00	780.279.980,00	780.279.980,00	780.279.980,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah Desa Tertinggal.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	216.380.000,00	1.251.842.300,00	1.251.842.300,00	1.251.842.300,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	900.681.650,00	780.279.980,00	780.279.980,00	780.279.980,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
11	MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	32.162.259.585,00	40.694.000.000,00	40.694.000.000,00	40.694.000.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.224.367.400	3.201.210.000,00	3.201.210.000,00	3.201.210.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
		Persentase pengguna transportasi umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	154.100.000,00	458.230.000,00	458.230.000,00	458.230.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
		Wilayah Rawan Bencana (IRB)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	442.070.168,00	228.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	3.840.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.584.955.530,00	2.490.650.000,00	2.490.650.000,00	2.490.650.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.665.141.651,00	911.392.690,00	911.392.690,00	911.392.690,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	32.162.259.585,00	40.694.000.000,00	40.694.000.000,00	40.694.000.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pekerjaan Umum
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	442.070.168,00	228.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
12	MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN	Jumlah OPD yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.974.872.476,00	7.356.810.810,00	7.356.810.810,00	7.356.810.810,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Sekretariat Daerah
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.613.466.422,00	2.107.456.670,00	2.107.456.670,00	2.107.456.670,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Sekretariat Daerah
13	MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	442.070.168,00	228.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dokumen Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	224.752.000,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	213.253.454,00	126.605.000,00	126.605.000,00	126.605.000,00		
14	MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	56.099.580,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Perikanan dan Peternakan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	492.711.500,00	208.440.370,00	208.440.370,00	208.440.370,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	56.099.580,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	492.711.500,00	208.440.370,00	208.440.370,00	208.440.370,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Perikanan dan Peternakan
15	MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	213.253.454,00	126.605.000,00	126.605.000,00	126.605.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Dokumen Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	224.752.000,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16	MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	52.371.484,00	92.574.000,00	92.574.000,00	92.574.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
	MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.518.854.162,00	7.739.323.000,00	7.739.323.000,00	7.739.323.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	131.912.718,00				APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Nilai peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	307.742.132.729,00	292.976.357.664,00	292.976.357.664,00	292.976.357.664,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.419.735.744,00	975.208.980,00	975.208.980,00	975.208.980,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
		Nilai Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/kota	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.974.872.476,00	7.356.810.810,00	7.356.810.810,00	7.356.810.810,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Sekretariat Daerah
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.613.466.422,00	2.107.456.670,00	2.107.456.670,00	2.107.456.670,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
		Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.613.466.422,00	2.107.456.670,00	2.107.456.670,00	2.107.456.670,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Sekretariat Daerah
		Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	307.742.132.729,00	292.976.357.664,00	292.976.357.664,00	292.976.357.664,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.419.735.744,00	975.208.980,00	975.208.980,00	975.208.980,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.974.872.476,00	7.356.810.810,00	7.356.810.810,00	7.356.810.810,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Sekretariat Daerah
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.613.466.422,00	2.107.456.670,00	2.107.456.670,00	2.107.456.670,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Sekretariat Daerah
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.294.351.548,00	2.084.303.300,00	2.084.303.300,00	2.084.303.300,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.475.954.658,00	1.298.205.550,00	1.298.205.550,00	1.298.205.550,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.553.509.420,00	3.826.029.500,00	3.826.029.500,00	3.826.029.500,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Inspektorat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	664.496.430,00	668.105.000,00	668.105.000,00	668.105.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Inspektorat Daerah
		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.765.971.156,00	2.048.171.000,00	2.048.171.000,00	2.048.171.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.978.256.000,00	4.427.267.000,00	4.427.267.000,00	4.427.267.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.151.942.700,00	405.100.000,00	405.100.000,00	405.100.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran		1.151.942.700,00	405.100.000,00	405.100.000,00	405.100.000,00		
17	MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELAN JUTAN	Persentase PAD tehadap Pendapatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	985.590.248,00	979.852.800,00	979.852.800,00	979.852.800,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Pendapatan Daerah
		Penetapan APBD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	307.742.132.729,00	292.976.357.664,00	292.976.357.664,00	292.976.357.664,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.419.735.744,00	975.208.980,00	975.208.980,00	975.208.980,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
		Jumlah Layanan Publik yang di selenggarakan secara online dan	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	660.967.832,00	587.622.000,00	587.622.000,00	587.622.000,00	APBD Kabupaten Padang	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan	Indikator	Program	Indikatif Alokasi Anggaran Program (Rp)				Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
				2021	2022	2023	2024		
		terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	27.578.510,00	24.470.000,00	24.470.000,00	24.470.000,00	Lawas	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	5.181.590,00	7.845.000,00	7.845.000,00	7.845.000,00		
		Cakupan layanan Telekomunikasi	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	660.967.832,00	587.622.000,00	587.622.000,00	587.622.000,00	APBD Kabupaten Padang Lawas	Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa akhir jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program *(outcomes)* terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupati tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan OPD. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran atau *(output)* yang dilaksanakan OPD.

Indikator kinerja juga dapat menggambarkan tentang prestasi yang diharapkan dimasa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapain kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond,* dan *contously improve (SMART-C).* Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi.

Perumusan indikator kinerja utama Bupati yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK),

Indikator Kinerja lain nya yang digunakan Pemerintah dan diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi, serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isus trategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD.

8.1. INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

Penyesuaian target indikator makro dilakukan mulai Tahun 2021 sampai dengan 2024 sebagai respon terhadap perkembangan keadaan akibat Covid-19. Selain itu, ditambahkan indikator Pendapatan Per Kapita (PDRB ADHK Per Kapita) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, sebagaimana berikut ini:

Tabel 8.1

Penetapan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020		Target Sebelum Perubahan				Target Setelah Perubahan			
			Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	IPM	Poin	67,65	68,25	67.78	68	68.05	68.05	67.78	68	68.65	68.65
2.	Persentase Kemiskinan	Persen	8,25	8,37	8,00	7,75	7,50	7,25	8,00	7,75	7,50	7,25
3.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,00	1.18	6,50	6,50	6,50	6,75	6,50	6,50	6,50	6,75
4.	Indeks Gini	Poin	0.2585	0,2653	0.2385	0.2185	0.1985	0.1985	0,2385	0,2185	0,1985	0,1985
5.	Tingkat pengangguran Terbuka	Persen	5.5	4.11	5.35	5.20	5.05	4.90	5.35	5.20	5.05	4.90
6.	PDRB Perkapita (ADHK)	Nilai	27 346,23	28 097,48	28.298,16	28.497,88	28.703,07	28.909,73	28.298,16	28.497,88	28.703,07	28.909,73

8.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas 2019-2024 sebagai berikut Tabel berikut ini.

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Padang Lawas
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020		Target sebelum perubahan				Target sesudah perubahan			
			Target	Realisasi	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini	66,00	65	67,00	68,00	69,00	70,00	67,00	68,00	69,00	70,00
2.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	86,10	85,75	86,55	87,00	87,45	87,90	86,55	87,00	87,45	87,90
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	71,00	71,00	71,52	72,04	72,60	73,12	71,52	72,04	72,60	73,12
4.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	80	80	85	90	95	100	85	90	95	100
5.	Indeks kepuasan masyarakat	Predikat	Baik	100	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
6.	Angka Rata-rata Lama Sekolah jenjang Pendidikan	Tahun	9,35	9,01	9,55	9,75	9,95	10,15	9,55	9,75	9,95	10,15
7.	Indeks Resiko Bencana	Poin	155	68,5	150	145	140	135	150	145	140	135

8.3. Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai indikator Kinerja Utama *(key performance indicator)*. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarakan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah;
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Padang Lawas tahun 2020-2024, yang merupakan indikator program prioritas pembangunan daerah. Indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.3
Proyeksi Capian Indikator Sasaran Tahun 2021-2024
Pemerintah kabupaten Padang Lawas

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	7536296,2	8864971,97	9307863,89	9750755,82	10193647,74	10193647,74
2	PDRB Per Kapita	Rupiah	35.931.148	42.001.113	44.024.435	46.047.757	48.071.078	48.071.078
3	Indeks Gini	Point	0,2985	0,2385	0,2185	0,1985	0,1985	0,1985
4	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	Persen	91,59	89,95	89,13	88,31	87,49	87,49
5	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	Persen	1,07	1,05	1,04	1,03	1,02	1,02
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,59	67,78	68	68,05	68,05	68,05
7	Angka Melek Huruf	Persen	99	99	99	99	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
8	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15	8,15
9	Angka Usia Harapan Sekolah	Tahun	12,5	13,07	13,15	14,05	14,15	14,15
10	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
11	Prevalensi Balita Gizi Kurang	Persen	0	2	1	1	1	1
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	80,2	86,2	89,2	92,2	95,2	95,2
13	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	-	13,09	13,48	13,88	14,29	14,29
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71,78	76,53	78,82	81,18	83,61	83,61
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,1	5,35	5,2	5,05	4,9	4,9
16	Rasio Penduduk Yang Bekerja	Persen	95,9	97,02	97,25	98,25	98,7	98,7

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
17	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 tahun Ke Atas	Persen	-	125395	129,156	133,03	137,02	137,02
18	Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I	Ribuan	50,086	25778	20,132	18,15	18,15	18,15
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Niai Index	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
20	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	5,73	7,45	8,31	9,17	10,03	10,03
21	Skor Pola Pangan harapan (PPH) Konsumsi	Persen	68,7	87	88	89	90	90
22	Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Persen	-	20	20	20	20	100
23	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	7,6	8,2	8,5	8.75	9,02	9,02
24	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	34.05	36.50	37.50	38.50	39.50	39.50
25	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	Persen	3.49	4.25	4.35	4.45	4.55	4.55

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
26	**Produksi Sektor Pertanian**							
26,1	Produksi Sektor Pertanian	Rupiah	4.300.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
26.2	Produksi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	Persen	42,26	47,26	49,26	51,26	53,26	53,26
26.3	Kosntribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	Persen	1.54	1.61	1.64	1.67	1.70	1.70
27	**Produksi Sektor Perkebunan**							
27,1	Produksi Sektor Perkebunan	Rupiah	3.350.000	3.550.000	3.650.000	3.750.000	3.850.000	3.950.000
27,2	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	Persen	1,54	1,61	1,64	1,67	1,7	1,7
27,3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	Persen	5,73	6,1	6,17	6,28	6,28	6,28
27,4	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	Persen	0,52	0,56	0,42	0,45	0,45	0,45

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
27,5	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Persen	0,29	0,35	0,82	0,87	0,99	0,99
27,6	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	7,14	2,25	7,25	7,35	7,37	7,37
27,7	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	14,89	18,37	19,25	20,57	20,57	20,57
27,8	Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri	Persen	17,16	21	21,05	22	22,16	22,16
27,9	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,59	6,48	6,71	6,93	7,16	7,16
B.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	Persen	7.325.000	8.467.000	8.668.000	8.876.000	9.000.000	9.000.000
2	Nilai Tukar Petani	Nilai	100.00	100,15	100,20	100,25	100,30	100,30
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkpita	Persen	10,34	14,56	15,65	16,78	17,87	17,87

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
4	Ketersediaan Pangan Utama	Jumlah	230.115	240.431,34	245.239,96	250.114,76	255.147,66	255.147,66
5	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Energi	energi = 2000 kkl/kap/hr; protein = 52,06 gr/kap/hr	energi = 2030 kkl/kap/hr; protein = 58,00 gr/kap/hr	energi = 2315 kkl/kap/hr; protein = 63,00 gr/kap/hr	energi = 2420 kkl/kap/hr; protein = 72,00 gr/kap/hr	energi = 2650 kkl/kap/hr; protein = 78,00 gr/kap/hr	energi = 2650 kkl/kap/hr; protein = 78,00 gr/kap/hr
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)	Persen	-	44,68	46,78	48,87	50,53	50,53
7	Rasio Ketergantungan	Persen	68,99	67,42	67,12	67	66	66
C.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
	Layanan Urusan Wajib Dasar							
1	**Pendidikan**							
I	**Meningkatkan pelayanan pendidikan secara merataTabel**							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
	Angka melek huruf (%)	%	116,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
	Angka rata-rata lama sekolah (RLS/Tahun)	%	98,00	8,10	8,20	8,20	8,20	8,20
	Rasio guru/murid per sekolah rata-rata SMP/MTs9,1	%	9,10	58,00	57,00	57,00	57,00	56,00
II	**Meningkatnya akses terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**							
	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah	113	135	135	136	136	138
	Rasio Guru Murid PAUD	Jumlah	389	895	923	942	57	966
	Persentase Tenaga Pendidik Yang Memilki Kualifikasi S1/DIV	Jumlah	175	197	205	214	234	234
III	**Meningkatnya akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas**							
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		103	94,7	94,5	94,6	94,4	94,7

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		114	84,4	86,5	86,5	87,5	92,2
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/ MI/ Paket A		100	94,2	93,6	97,2	98,8	98,8
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/ MTs/ Paket B		88,8	92,6	92,4	92,3	92,7	92,7
	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	%	1,2	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	%	99,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	%	99,95	99,80%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	0,895	0,989	0,989	0,989	0,929	0,929
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	87,35%	92,50%	93,30%	94,50%	94,50%	94,50%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
	Meningkatnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan							
	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Jumlah	1.675	1.826	1.856	1.886	1.896	1.896
	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Jumlah	894	972	992	1.012	1.032	1.032
	Rasio guru/murid SD/MI	Jumlah	356	412	432	462	421	421
	Rasio guru/murid SMP/MTs	Jumlah	887	852	931	976	977	977
	Ketersedian Sarana dan Prasarana Pendidikan							
	Ruang kelas pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah	645	952	972	992	962	973
	Ruang kelas pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Jumlah	146	272	287	302	320	347
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI		49	55	56	56	56	56

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs		125	57	57	57	57	57
	Rasio guru/murid per sekolah rata-rata SD/MI		49	50	52	52	52	52
	Rasio guru/murid per sekolah rata-rata SMP/MTs		125	58	57	57	57	57
2	**Kesehatan**							
	Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	7%	7%	7, 01 %	7, 03 %	7, 05 %	7, 05 %
	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	%	0,01	0,12	0,14	0,16	0,18	0,8
	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	%	0,24	0,28	0,32	0,36	0,4	0,42
	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	%	0,01	0,01	0,12	0,14	0,16	0,18

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup	Jumlah	12	12	12	12	12	12
	Angka Kematian Bayi (AKB) per1.000 kelahiran hidup	%	10,61	10,31	10,01	9,71	9,41	9,11
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	54%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase ibu tersedia mendapatkan pelayanan persalinan	%	38,20%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	%	15,7	15,9	16,1	16,3	15,5	16,7
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	52,20%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	40%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
	Prevalensi Stunting	%	10,90%	10,90%	9,90%	8,90%	7,90%	7,90%
	Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	%	26%	26%	38%	45%	65%	65%
	menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase orang usia 14-29 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	33%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	6,66%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	24%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	71,24%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	15,20%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi diri HIV sesuai standar	%	20,80%	100%	100%	100%	100%	100%
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
3,1	**Pekerjaan Umum**							
3.1.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	KM	163	210	250	300	360	360
3.1.2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	Persen	4	3,84	3,75	3,6	3,5	3,5
3.1.3	Persentase Jalan Kabupaten Dakam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	Persen	15	19	23	27	33	33
3.1.4	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase/Saluran Pembuangan Air	Persen	0	0,78	0,85	0,94	1,01	1,01
3.1.5	Tersedianya Infrastruktur Bangunan Umum	Persen	35	38	44	51	63	63

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
3.1.6	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen	39	48	53	59	67	67
3.1.7	Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun	Nilai	23,78	34,35	36,88	37,65	38,82	38,82
3.1.8	Persentase Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung Dan Aliran Sungai Rawan Longsor	Persen	63,29	69,69	73,2	76,71	79,91	79,91
3.1.9	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat	Persen	25	35	40	42	45	45
3.1.10	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	22,5	30,9	35,1	39,3	43,5	43,5
3.1.11	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	13	18	20	22	25	25
3.1.12	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	Persen	5	15	20	22	25	25
3,2	**Penataan Ruang**							
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	Persen	32	38,9	42,35	45,8	49,25	49,25

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
4	**Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman**							
4,1	rasio rumah layak huni	Persen	60,9	62,00	63,86	65,78	67,75	
4,2	rasio permukiman layak huni	Persen	12,33	12,18	12,55	12,92	13,31	
4,3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Unit	150	200,00	206,00	212,18	218,55	
4,4	Persentase Permukiman yang tertata	Persen	N/A	97,66	100,59	103,60	106,71	
4,5	Persentase Permukiman Kumuh	Persen	N/A	2,34	2,41	2,49	2,56	
4,6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	N/A	0,33	0,34	0,35	0,36	
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat**							
5,1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Jiwa	606	1450	1450	1450	1450	1450

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
5,2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	100
5,3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100
5,4	Tingkat Waktu Tanggap *(Response Timee Rate)* Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	Persen	> 15	>15	>15	>15	>15	>15
5,5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100	100	100	100	100	100
6	**Sosial**							
6.1	Parsentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)	Jumlah	1	3	3	3	3	3
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	Jumlah	0	30	60	60	60	240
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1	**Tenaga Kerja**							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
1,1	Jumlah Penganggurann yang terlatih	Jumlah	48	68	88	88	108	108
1,2	Persentase Lulusan bersertifikat pelatihan	Persen	_	_	30	35	45	45
1,3	Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI)/ calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang di berikan pelatihan	Jumlah	_	_	10	20	30	50
1,4	Jumlah pelatihan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) / Calon tenaga kerja Indonesia (CTKI)	Jumlah	_	_	2	4	10	20
2	**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**							
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	Jumlah	5	5	5	7	9	9
2	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Jumlah	2	4	4	5	5	5
3	Jumlah media massa (cetak,elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah	2	2	2	2	3	3
4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Jumlah	2	2	2	2	2	2

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
5	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani anak yang terlayani	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Jumlah	1	2	2	2	2	2
7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Jumlah	1	2	2	2	2	2
8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Jumlah	5	5	5	7	9	9
9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Jumlah	25	120	120	120	150	150
10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Jumlah	0	5	5	7	9	9
11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah	0	8	8	8	9	9
12	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada dievaluasi perangkat daerah yang sudah	Jumlah	1	1	1	1	1	1
13	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Jumlah	2	2	2	2	2	2

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Persen	100	100	100	100	100	100
3	**Pangan**							
3,1	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan	Persen	30	10	100	100	100	100
3,2	Coefisien Variasi (CV) Harga Pangan di Tingkat Produsen dan Konsumen	Persen	8.45	8,9	9,2	9,98	10,03	10,03
3,3	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Penurunan Stunting (Desa)	Desa	10	15	20	25	30	30
4	**Pertanahan**							
4,1	Penyelesaian Izin Lokasi	Izin	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	**Lingkungan Hidup**							
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (%)	persen	n/a	75	76	77	78	**78**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (%)	persen	n/a	70	71	72	73	**73**
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	persen	n/a	67	67	67	67	**67**
5,1	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Ditertibkan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota (%)	persen	100	80	80	80	80	**80**
5,2	Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota	Nilai	Tidak ada	0	1	1	0	**2**
5,3	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Nilai	Tidak ada	0	0	1	0	**1**
5,4	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	Nilai	Tidak ada	0	0	0	100	**100**
5,5	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Nilai	2	1	2	2	2	**8**
5,6	Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup (penghargaan)	Nilai	Tidak ada	0	1	1	1	**3**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
5,7	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/ Kota (%)	persen	100	11,11	11,11	11,11	11,11	**11,11**
5,8	Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R (%)	persen	0,75	9,8	10,12	10,25	10,5	**10,5**
5,9	Persentase Cakupan Area Pelayanan (%)	persen	5,3	5,88	5,88	5,88	11,76	**11,76**
6	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**							
6,1	Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	Persen	54,69	92	94,01	96,74	98	98
6,2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Persen	77,44	92	95,05	97,04	98	98
6,3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Persen	19,96	31,415	35,72	36,711	50	50,01
6,4	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Prrovinsi	Ada / Tidak Ada						Ada Tersedia
6,5	Penetapan KTP Nasonal Berbasis Nik	Ada / Tidak Ada						Sudah

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
6,6	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jiwa	149,447	262,846	267	281,236	300	300,01
6,7	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Jiwa	104,064	262,846	267	281,236	300	300,01
7	**Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**							
7,1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	6	8	8	8	9	41
7,2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	0%	0	1	1	2	4
8	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**							
1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		25	25	25	25	25	25
3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		84	82	82	80	78	78

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		90,94	91	91	96	98	98
5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		25	25	25	25	25	25
6	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP		100	100	100	100	100	100
7	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		18,85	20,5	20,5	22	25	25
8	Pemerintah Daerah yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		547	547	547	547	547	547
9	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan		0	10	10	13	15	15
10	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		41,58	38	38	36	25	25
11	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)		55,79	60	60	62	65	65
9	**Perhubungan**							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
9,1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Ornag	14.303.00	14.948,00	15.396,44	15.858,33	16.334,08	16.334,08
9,2	Rassio Ijin Trayek	Persen	0,00114	0,00116	0,00	0,00	0,00	0,00
9,3	Jumlah Kir Angkutan Umum	Kir	3,85	4,02	4,14	4,27	4,40	4,40
9,4	Jumlah Pelabuhan/Terminal	unit	27172	-	-	-	-	-
9,5	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	25,97	28.397,47	29.249,40	30.126,88	31.030,69	31.030,69
9,6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	persen	50	27,14	27,96	28,79	29,66	29,66
9,7	Pemasangan Rambu-rambu	unit	4,05	52,25	53,82	55,44	57,10	57,10
9,8	Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan	persen	16.944.974.500	4,23	4,36	4,49	4,63	4,63
9,9	Jumlah Orang/Barang yang terangkut Angkutan Umum	orang		18.350.025,00	18.900.525,75	19.467.541,52	20.051.567,77	20.051.567,77

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
10	**Komunikasi Dan Informatika**							
10,1	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan (%)	Persen	12	12	15	20	30	30
10,2	Cakupan layanan Telekomunikasi (%)	Persen	53	75	85	85	100	100
10,3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon (%)	Persen	28	38	43	48	53	53
10,4	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet (%)	Persen	14	24	29	34	39	39
10,5	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi (%)	Persen	12	22	27	32	37	37
10,6	jumlah KIM	Unit	36	38	45	52	60	60
10,7	jumlah Kelurahan/Desa di Kabupaten Padang Lawas	Desa/Kelurahan	303	303	303	303	303	303
10,9	Jumlah Kantor OPD yang terkoneksi jaringan fiber optik sewa	Unit	10	6	4	2	0	0

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
10,1	jumlah kantor OPD d Kabupaten Padang Lawas yang terkoneksi jaringan radiolink	Unit	19	19	25	40	43	43
10,11	jumlah SMP di ibu kota kecamatan terkoneksi jaringan	Unit	-	8	12	12	12	12
10,12	jumlah Puskemas di ibukota kecamatan terkoneksi jaringan	Unit	-	8	12	12	12	12
10,13	kapasitas bandwidth internet berlangganan (mbps)	Mbps	150	150	197	236	244	244
10,14	jumlah data center	Unit	1	1	1	1	1	1
10,15	jumlah comand center	Unit	-	1	1	1	1	1
10,16	jumlah kantro OPD, Puskesmas di ibukota kecamatan dan SLTP ibu kota kecamatan	Unit	64	69	69	69	69	69
10,17	Jumalh OPD yang menggunakan data statistika dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Unit	43	43	43	43	43	43
10,18	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah (%)	Unit	-	-	10	20	30	30

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
10,19	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang di sediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	81,4	75	85	85	100	100
10,2	Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persen	30	30	35	38	45	45
10,23	Jumlah Layanan Publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	86,67	86,67	85	90	95	95
11	**Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**							
11,1	Persentase Usaha Miko Dan Kecil	Persen	81,25	81,65	81,8	81,95	90	90,56
11,2	persentasi koperasi aktif	Persen	0,09	1,67	2,6	2,66	3,6	3,7
11,3	Meningkatkan pengetahuan,kemampuan dan persaingan yang sehat diantara koperasi	Jumlah	10 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi	10 Koperasi
11,4	Adanya Akta Koperasi, SK Badan Hukum, SK Susunan Pengurus	Jumlah	20 Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi
11,5	Terjalinnya kerjasama atau kemitraan dalam bidang pengembangan produk dan sumber daya manusia	Masyarakat, Koperasi, dan UMKM	Masyarakat, Koperasi, dan UMKM	Masyarakat, Koperasi, dan UMKM	Masyarakat, Koperasi, dan UMKM	Masyarakat, Koperasi, dan UMKM	Masyarakat, Koperasi, dan UMKM	Masyarakat, Koperasi, dan UMKM

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
11,6	Meningkatnya jumlah koperasi yang kembali aktif	Jumlah	15 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi	15 Koperasi
11,7	.Meningkatnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah	20 Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi
11,8	Meningkanya output kegiatan hasil kerajinan daerah	Jumlah	8 Pengrajin	8 Pengrajin	8 Pengrajin	8 Pengrajin	8 Pengrajin	8 Pengrajin
11,9	Mempromosikan produk yang dihasilkan para pengrajin serta meningkatkan daya saing	1event	1event	1event	1event	1event	1event	1event
12	**Penanaman Modal**							
12,1	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Rupiah	306.232.855.67 1.60 (PMDN)	506.232.855.67 1.60 (PMDN)	606.232.855.67 1.60 (PMDN)	706.232.855.67 1.60 (PMDN)	506.232.855.67 1.60 (PMDN)	506.232.855.6 71.60 (PMDN)
12,2	Jumlah Nilai Investastor (PMDN/PMA)	US	US 1.276.822.55 (PMA)	US 1.376.822.55 (PMA)	US 1.426.822.55 (PMA)	US 1.476.822.55 (PMA)	US 1.376.822.55 (PMA)	US 1.376.822.55 (PMA)
12,3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Persen	1,85	2,05	2,15	2,25	2,05	2,05
12,4	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Rupiah	32,65	32,65	32,65	32,65	32,65	32,65

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
13	**Kepemudaan Dan Olahraga**							
13,1	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%)	Persen	100	100	100	100	100	100
13,2	Cakupan Pembinaan Olahraga	Jiwa	4	10	12	12	14	14
13,3	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat	Jiwa	5	12	14	14	16	16
13,4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Jiwa	5	11	13	13	15	15
13,5	Jumlah Atlet Berprestasi	Jiwa	5	10	10	10	12	12
13,6	Jumlah Prestasi Olahraga	Jiwa	3	11	15	15	17	17
14	**Statistik**							
14,1	Jumlah OPD yang menggunakan data statistika dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
14,2	Jumlah OPD yang menggunakan data statistika dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
15	**Persandian**							
15,1	Persentase sistim elektronik/asset informasi yang telah di audit dengan resiko kategori rendah	Persen	_	-	5	5	10	10
16	**Kebudayaan**							
	Meningkatkan penguatan budaya dan kearifan lokal							
16.1	Jumlah grup kesenian	Jumlah	2	2	2	2	2	2
16.2	Jumlah gedung	Jumlah	1	1	1	1	1	1
16.3	Penyelenggaraan festival seni dan Budaya	Jumlah	1	2	2	2	2	2
16.4	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah	6	6	10	10	10	10
17	**Perpustakaan**							
17,1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (orang)	Jiwa	69461	10,909	20	20,1	20,3	20,3

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
17,2	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah (%)	Unit	60	90	92	95	100	100
17,3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk (%)	Persen	1,98	3,2	3,25	3,27	3,33	3,33
17,4	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun (orang)	Jiwa	5789	9,002	9,045	9,1	9,5	9,5
17,5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan (examplar)	Unit	1413	27,157	20,9	20,95	30	30
17,6	Jumlah Perpustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat (orang)	Jiwa	0	2	3	4	5	5
18	**Kearsipan**							
18,1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku (%)	Persen	13	15	16	17	18	18
18,2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (kegiatan)	Kegiatan	1	7	6	8	10	10
	Layanan Urusan Pilihan							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
1	Kunjungan Wisata	Hari	750	1000	1000	1000	1000	1000
1,1	Lama Kunjungan Wisata (hari)	Hari	1	1	1	1	1	1
1,2	PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
2	**Pertanian**							
2,1	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	34,05	36,5	37,5	38,5	39,5	39,5
2,2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	Persen	3,49	4,25	4,35	4,45	4,55	4,55
2,3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	Persen	42.26	47.26	49.26	51.26	53.26	53.26
2,4	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	Persen	1,54	1,61	1,64	1,67	1,7	1,7
2,5	Cakupan Bina Kelompok Petani	Kelompok	16	25	30	35	40	40

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
26.4	Produktivitas padi Sawah per hektar	Hektar	49	51	52	53	54	55
	Produktivitas padi gogo per hektar	Hektar	34	36	37	38	39	40
	Alat mesin pertanian (Unit)	Unit	220	250	300	350	400	400
	Saluran Irigasi	Meter	400	600	700	800	900	900
	Embung	Unit	2	2	2	2	2	2
3	**Energi Dan Sumber Daya Mineral**							
3,1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	75,6	79,2	79,2	79,2	81,9	81,9
3,2	Rasi Ketersediaan Daya Listrik	Persen	67,98	77,32	77,32	77,32	91,33	91,33
3,3	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	Persen	34,56	21,96	21,96	21,96	0,06	0,06

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
4	**Perdagangan**							
4,1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Persen	63,33	16,38	17,2	18,06	18,96	18,97
4,2	Revitalisasi Pasar tradisional	Unit	5	0	2	2	2	3
5	**Perindustrian**							
5,1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Kelompok	0,02	15,63	17,39	31,25	37,5	42,5
6	**Perikanan dan Peternakan**							
6,1	Produksi Perikanan (Ton)	Ton	4138,45	4345,35	4562,6	4790,7	5030,2	5030,2
6,2	Konsumsi Ikan (Kg/kapita/thn)	Kg/kapita/thn	39,8	40	40,2	40,5	40,1	40,1
6,3	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan (Kel)	Jumlah Kelompok	210	225	240	260	300	300
6,4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan / Pembudidaya (ton)	Ton	3.010,52	4.235,35	4.362,60	4.580,70	4.820,20	4.820,20

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
6,5	Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman (%)	Persen	70	70	70	70	70	70
6,6	Jumlah benih budidaya air tawar yang diproduksi (ekor)	ekor	36.626	38.454	40.376	42.394	44.514	44.514
6,7	**Populasi ternak (Ekor)**	**ekor**	**62.950**	**63.755**	**64.610**	**65.505**	**66.420**	**66.420**
	Kerbau (Ekor)	ekor	10.200	10.225	10.240	10.265	10.300	10.300
	Sapi (Ekor)	ekor	9.200	9.250	9.310	9.350	9.400	9.400
	Kambing (Ekor)	ekor	14.800	14.950	15.100	15.300	15.500	15.500
	Domba (Ekor)	ekor	7.900	8.100	8.300	8.500	8.750	8.750
	Ayam (Ekor)	ekor	1.750	1.830	1.910	1.990	2.070	2.070
	Itik (Ekor)	ekor	19.100	19.400	19.750	20.100	20.400	20.400
6,7	**Konsumsi Daging (Kg)**	**Kg**	**9,90**	**10,10**	**10,30**	**10,60**	**11,05**	**11,05**
	Konsumsi Ternak Besar (Kg)	Kg	2,90	3,00	3,10	3,30	3,50	3,50
	Konsumsi Ternak Kecil (Kg)	Kg	3,2	3,25	3,3	3,4	3,45	3,45
	Konsumsi Ternak Unggas (Kg)	Kg	3,8	3,85	3,9	3,9	4,1	4,1
	Penunjang Urusan							
1	**Perencanaan Pembangunan**							
1,1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
1,2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1,3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1,4	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1,5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Persen	98,16	98,67	99,00	99,05	99,10	99,10
1,6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	Persen	98,16	100	100	100	100	100
1,7	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	Persen	95	100	100	100	100	100
2	**Keuangan**							
2,1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2,3	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	5	4,15	4,17	4,15	4,12	4,12

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
2,4	Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah	Persen	59	63,33	86,24	93,22	98,92	98,92
2,5	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	-	5,5	6,6	7,6	8,6	8,6
2,6	Persentase Peningkatan PAD	Persen	-	153,8	89	107	107	107
2,7	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6
2,8	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	11,16	12	11	11	10	10
2,9	Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	-	12	12	12	12	12
3	Bagi Hasil Kabupaten/kota dan Desa	Rupiah	54.862.126.800 ,00	63.432.864.716 ,61	64.050.224.485 ,81	64.693.789.048 ,49	65.333.619.773 ,50	65.333.619.77 3,25
3,1	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3,2	Akses Publik Terhadap Keungan Daerah	Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
3,3	Manajemen Aset	Ada / Tidak Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3,4	Bidang Tanah Yang Bersertifikat	Persen	-	100	100	100	100	100
3,5	Persentase Aset Yang Digunakan	Persen	-	85	90	97	100	100
3	**Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan**							
3,1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	Bulan	+ 4 Bulan	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP	20 JP
3,2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal (%)	Persen	0,05	8	9	10	10	0,1
3,3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural (%)	Persen	0,08	8	8	9	10	0,1
3,4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instasi Pemerintah	Jabatan	32	33	33	33	33	33
3,5	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instasi Pemerintah	Jabatan	151	162	162	162	162	162

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
3,6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instasi Pemerintah	Orang	2497	2572	2918	3264	3610	3610
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		600	665	740	840	950	950
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		6	9,4	26,1	32	38,6	38,6
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		60	69	27,1	31,2	33,6	33,6
4	**Pengawasan**							
4,1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	68	85	90	95	100	100
4,2	Jumlah Temuan BPK	Point	112	Mengacu pada LHP BPK	Mengacu pada LHP BPK	Mengacu pada LHP BPK	Mengacu pada LHP BPK	Mengacu pada LHP BPK
5	**Sekretariat Dewan**							
5,1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	ada

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kondisi Kinerja Pada Awal Priode RPJMD	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	
-1	-2		-3	-10	-11	-12	-13	-14
5,2	Tersusun Dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	ada	ada	Ada	ada
5,3	Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Perda, Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	ada	ada	ada	Ada	ada

*) Untuk Indikator Dengan Target Penjumlahan, Tidak Menggunakan Rumus Tetapi Langsung Menentukan Jumlah Yang Dicapai
*) Indikator Diatas Dapat Disesuaikan/Ditambah Sesuai Dengan Kebutuhan

8.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak di peroleh setiap warga negara secara minimal. SPM di tetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Mekanisme penerapan spm tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator spm dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1. Mengumpulkan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan target indikator standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten Padang Lawas Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8.4

Standart Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Padang Lawas

No		Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2020		Proyeksi			
					Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024
I	**Pendidikan**									
	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	100%	67.12%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara yang berusia 7-15 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun	100%	92.84%	100%	100%	100%	100%
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara yang berusia 7-18 Tahun Yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	Setiap Tahun	100%	1.54%	100%	100%	100%	100%
II	**Kesehatan**									
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	54%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	38.2%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	52.2%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	40%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	85%	100%	100%	100%	100%

No		Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2020		Proyeksi			
					Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	33%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hiipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	6.66%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	24%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	71.24%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	15.2%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodeficiency virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	100%	20.8%	100%	100%	100%	100%
III	**Pekerjaan Umum**									
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	Setiap Tahun	100%	N/A	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan layanan pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestik	100%	Setiap Tahun	100%	N/A	100%	100%	100%	100%
IV	**Perumahan Rakyat**									

No		Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2020		Proyeksi			
					Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024
	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	100%	N/A	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kab/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	100%	N/A	100%	100%	100%	100%
V	**Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindugan Masyarakat**									
	Pelayanan Ketentraman Dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun	100%	98 %	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	100%	N/A	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun	100%	N/A	100%	100%	100%	100%
	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	100%	97%	100%	100%	100%	100%
VI	**Sosial**									
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	0	100%	100%	100%	100%

No		Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	2020		Proyeksi			
					Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024
	diluar panti									
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	80%	100%	100%	100%	100%
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rehabiltasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	100%	0%	100%	100%	100%	100%
	Perlindugan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 8.5
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Padang Lawas 2020

PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
TUJUAN 1 MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN	1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Sosial	Persen	90,77	91,59	89,95	89,13	88,31	87,49	Proksi
	1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin	1.3.1.(a)	Proporsi jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan peserta PBI	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	37,90	43,70	45,78	80,24	82,75	85,18	Proksi
		1.3.1.(c)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	dan rentan.	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Sosial	Jiwa	8.162	8.157	8.170	8.150	8.130	8.012	
	1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	42,60	38,20	42,67	51,03	58,42	67,80	
		1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	64,10	75	75,10	75,30	75,50	75,70	
		1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Poin	48,50	50	52	55	58	60	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
		1.4.1.(d)	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Pekerjaan Umum	Persen	5	10	15	20	22	25	Proksi
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan	Persen	30	35	40	45	50	55	
		1.4.1.(f)	Pengurangan luas kawasan kumuh	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan	Ha	0,40	0,39	0,50	0,55	0,60	0,70	Proksi
		1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	94,20	94,20	94,50	94,60	94,40	9,47	
		1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	82,58	84,20	86,50	86,50	87,50	92,20	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
		1.4.1.(j)	Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Persen	97,20	82,06	95	97	99	100	
	1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1.(a)	Wilayah Rawan Bencana (IRB)	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Poin	154	154	154	145	140	135	Proksi
		1.5.1.(b)	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	Proksi
		1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0	0	0	1	1	1	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Persen	55,03	57,75	58,93	60,11	61,27	62,42	Proksi
		1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan dan kesehatan) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Persen	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	Proksi
							11,16	11,16	12	11	11	10	Proksi
TUJUAN 2 MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN	2.1 Pada tahun 2030,menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan ya ng aman, bergizi, dan cukup sepanjang	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Ketahanan Pangan	Persen	76,54	73,30	73,00	72,96	72,30	71,15	
		2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Balita	17	16	15	14	13	12	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	tahun.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Ketahanan Pangan	Persen	15,13	15,13	15,23	15,05	14,95	14,7	
	2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	10,90	10,90	10,90	9,90	8,90	7,90	
		2.2.1.(a)	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	20,75	24,10	21,10	18,40	16	14	
		2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	7,29	8,10	7,80	7,50	7,30	7,10	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
		2.2.2.(a)	Jumlah anemia pada ibu hamil.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Jumlah	48	45	42	39	36	33	Proksi
		2.2.2.(b)	Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Jumlah	1.173	1.427	1.422	1.386	1.183	1.028	Proksi
		2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Perikanan dan Peterbakan	Kg/Perkapita/Tahun	38,50	39,80	40	40,20	40,50	40,70	
	2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar	2.5.1*	Jumlah varietas unggul hewan untuk pangan yang dilepas.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Perikanan dan Peterbakan	Limosin (ekor)	20	23	25	27	30	32	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan inter-nasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sum- ber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.					Simental (ekor)	15	17	20	22	25	27	Proksi
TUJUAN 3 MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAA	3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Jiwa	27	70	70	70	70	70	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
N SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA	hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	53,90	100	100	100	100	100	
		3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	42,60	100	100	100	100	100	
	3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup)	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Balita	20	25	25	25	25	25	
		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	Indikator nasional yang sesuai dengan iIndikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Jiwa	13	17	12	12	12	12	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	dan Angka Kematian Balita 25 Per 1.000.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Bayi	8,30	10,30	10,01	9,71	9,41	9,11	
		3.2.2.(b)	Persentase kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	90	93,50	94,00	94,50	95	95,50	Proksi
	3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
		3.3.3.(a)	Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Jumlah	12	17	17	17	17	17	Proksi
	3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur £18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	0	100	100	100	100	100	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	5	6	7	8	9	10	
		3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ³18 tahun.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	2	2	2	2	1	1	
		3.4.2.(a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Jumlah	17	17	17	17	17	17	Proksi
	3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1(a)	Jumlah penyalahgunaan narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Sosial	Orang	13	18	10	8	5	3	Proksi
		3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Sosial	Orang	1	0	1	2	3	4	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Poin	48,50	50	52	55	58	60	
		3.7.1.(b)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Jumlah	30	25	30	35	40	45	Proksi
		3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	53,90	49,10	48,86	47,13	45	40	
		3.7.2.(a)	*Total Fertility Rate (TFR)*	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Persen	2,96	2,26	3,70	3,63	3,56	3,49	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Persentase penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran Perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	58	45	50	55	60	65	Proksi
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	58,80	66,30	69,96	70,25	71,68	73,74	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai *the Doha Declaration* tentang *the TRIPS Agreement and Public Health*, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Jumlah Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (ASN)	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Jumlah	790	756	795	1.120	1.176	1.235	Proksi
TUJUAN 4 MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INSKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA	4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	63,,90	65,05	66,97	68,06	69,25	70,85	
		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	51,85	63,41	68,48	72,94	73,37	75,3	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
		4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	BPS	Persen	97,43	95,25	95,75	96,46	97,14	98,36	
		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	BPS	Persen	24,52	27,94	30,86	35,84	39,26	45,98	
		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun	8,70	9,01	9,55	9,75	9,95	10,15	
	4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	BPS	Persen	29,82	30	33,02	35,96	38,96	40,36	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	pendidikan dasar.												
	4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di SD	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	BPS	Persen	2,52	2,50	2,50	2,52	2,54	2,56	
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di SMP .	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	BPS	Persen	1,45	1,50	2,00	2,20	2,50	2,50	
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki Di Perguruan Tinggi	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	BPS	Persen	2	2	2	2	2	2	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ³15 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	95	96	96	97	97	98	
		4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	93	94	94	95	95	96	
	4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Jumlah Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah	2.950	2.941	3.120	3.240	3.365	3.455	
TUJUAN 5 MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN	5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Jumlah	28	29	29	30	30	30	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Persen	0	0	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	
		5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Persen	0,020	0,017	0,015	0,013	0,010	0,090	
		5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Persen	0	0	0,00003	0,00003	0,00004	0,00004	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
		5.2.2.(a)	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan pada unit P2TP2A	DPPKBPPPA	DPPKBPPPA	Persen	15	20	25	30	35	40	Proksi
	5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Persen	13	15	13	12	10	8	
		5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25- 49 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Tahun	25	25	25	25	25	25	
		5.3.1.(b)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Persen	75	75	78	75	73	70	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen pemerintah daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Persen	0,,033	0,033	0,033	0,033	0,066	0,099	Proksi
	5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	Indikator nasional yang sesuai dengan Indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Persen	15	15	20	25	30	35	Proksi
		5.6.1.(a)	*Cakupan PUS Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)*	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Persen	18	18	20	18	16	14	Proksi
		5.6.1.(b)	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Persen	30	35	40	45	50	55	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
		5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Peraturan	1	1	1	1	1	1	
	5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Komunikasi dan Informarika	Persen	28	28	38	43	48	53	Proksi

PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
TUJUAN 7 MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA	7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Provinsi Sumatera Utara	Persen	99,9	100	100	100	100	100	PM
		7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Provinsi Sumatera Utara	KWH/Kapita	4,244	5,307	6,496	6,546	6,683	6,729	PM
TUJUAN 8 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA	8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan Ekonomi	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Badan Pusat Statistika	Persen	5,64	1,18	6,50	6,50	6,50	6,75	Proksi
		8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Badan Pusat Statistika	Juta Rupiah	40,44	41,86	42,01	44,11	46,05	48,01	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat penganggu ran terbuka	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Tenaga Kerja	Persen	4,24	4,11	3,90	3,70	3,50	3,20	Proksi
	8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatk an Pelatihan Berbasis Kompetens i	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Tenaga Kerja	Jiwa	20	48	108	148	188	228	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	8.8 Melindungi hak- hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.	8.8.1.(a)	Keselamatan Dan Perlindungan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Tenaga Kerja	Persen	98	98	98	98	100	100	Proksi
	8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjuta	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	4 Destinasi	0	0	2 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	
		8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	2 Jenis	-	-	-	15	20	25	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	n yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	4 Jenis	750	1.000	1.000	1.500	1.500	2.000	
		8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Rupiah	-	6.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	
		8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	4 Jenis	-	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	
	8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	UMKM	117	173	204	249	294	339	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
TUJUAN 9 MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI	9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1.(a)	Persentase Jalan Kabupaten Dakam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pekerjaan Umum	Persen	15	24	19	23	27	33	Proksi
	9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030,	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di dalam lampiran pepres).	Badan Pusat Statistika	Persen	14,52	14,50	13,89	14,20	14,50	15	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Badan Pusat Statistika	Persen	6,29	1,05	3,39	3,80	4,26	4,99	
		9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Indikator nasional yang sesuai dengan global (tidak ada di lampiran pepres).	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Jiwa	1.811	2.451	2.981	3.714	4.594	5.622	
	9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan	9.c.1.(a)	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	28	32	38	43	48	53	Proksi
		9.c.1.(b)	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	14	20	24	29	34	39	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.												
TUJUAN 10 MENGURANGI KESENJANGAN INTRA-DAN ANTAR NEGARA	10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Indeks Gini	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Badan Pusat Statistika	Poin	0,294	0,289	0,2385	0,2185	0,1985	0,1985	Proksi
		10.1.1.(a)	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Sosial	Persen	90,77	91,59	89,95	89,13	88,31	87,49	Proksi
		10.1.1.(b)	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persen	6	7	8	8	8	9	Proksi
		10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Desa	190	177	163	153	147	139	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
		10.1.1.(d)	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persen	0	0	1	1	1	2	Proksi
		10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persen	28,42	26,70	25	24	23	21	
	10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(c)	Jenis pelayanan penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan dan anak terutama kekerasan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Jenis	2	2	2	2	2	2	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Persen	35,37	36,64	37,31	37,99	38,68	39,36	Proksi
TUJUAN 17 MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Persentase PAD tehadap Pendapatan	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Persen	6,59	6,59	7,45	8,31	9,17	10,03	Proksi
		17.1.2*	Penetapan APBD	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	TA	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	17.6 Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan	17.6.2.(a)	Jumlah Layanan Publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	86,67	86,67	86,67	85	90	95	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.												
	17.8 Mengoperasi-onalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi	17.8.1*	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	14	20	24	29	34	39	Proksi
		17.8.1.(a)	Cakupan layanan Telekomunikasi	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	53	60	75	85	85	100	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.												

PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
TUJUAN 6 MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA	6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Pekerjaan Umum	Persen	5	10	15	20	22	25	Proksi
		6.1.1.(b)	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Pekerjaan Umum	Persen	25	30	35	40	42	45	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
		6.1.1.(c)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Pekerjaan Umum	Persen	13	15	18	20	22	25	Proksi
	6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan	Persen	30	35	40	45	50	55	
		6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	60	47	50	55	60	65	
		6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free (ODF)*/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada dalam lampiran perpres).	Dinas Kesehatan	Persen	61	61	55	50	40	30	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(g)	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai	2	1	1	2	2	2	Proksi
	6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis	Indikator nasional sebagai proksi Indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ha	22032.30	22032.30	22032.30	22030.15	22029.17	22028.10	Proksi
TUJUAN 11 MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN	11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan	11.1.1.(a)	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan	Unit	150	200	200	200	200	200	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.												
	11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada	11.2.1.(a)	Persentase pengguna transportasi umum	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan	Persen	0,0565	0,0568	0,0568	0,0568	0,0568	0,0568	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.												
	11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus	11.5.1.(a)	Wilayah Rawan Bencana (IRB)	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pion	154	154	154	145	140	135	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.												
	11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persen	0,75	6,75	9,8	10,12	10,25	10,5	Proksi
	11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman,	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Pekerjaan Umum	Persen	32	35,45	38,9	42,35	45.8	49.25	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.		dan kota sedang.										
		11.7.2.(a)	Persentase korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA / POLRI	Persen	0,00000020	0,00000020	0,00000010	0,00000010	0,00000010	0,00000010	Proksi
	11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan	11.b.1*	Proporsi pemerintah dalam penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	0	0	0	5	10	15	Proksi
		11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0	0	0	1	1	1	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030.												
TUJUAN 12 MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN	12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka	12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peserta	2	2	2	2	2	2	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.												
	12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah	3	3	3	3	3	3	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	pelaporan mereka.												
	12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah OPD yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM)	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	SETDA	OPD	8	8	8	8	8	8	Proksi
TUJUAN 13 MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA	13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0	0	0	1	1	1	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	negara.												
	13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1.(a)	Dokumen Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Proksi
TUJUAN 14 MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahananny	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Perikanan dan Peternakan	Desa	6	6	7	7	8	8	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	a, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.												
	14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Perikanan dan Peternakan	KM	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.												
	14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ha	170.85	170.85	170.85	170.85	170.85	170.85	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
TUJUAN 15 MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persen	N/A	0	67	67	67	67	Proksi
	15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang	15.3.1.(a)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persen	N/A	0	67	67	67	67	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	terkena penggurunan, kekeringandan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.												
	15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup belum sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8	5	2	2	1	0	0	Proksi
	15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaraga	15.9.1.(a)	Dokumen Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
	man hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.c.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup belum sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8	5	2	2	1	0	0	Proksi

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
TUJUAN 16 MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL,	16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Persentase kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA / POLRI	Persen	0	0,0000001	0,0000001	0,0000001	0,0000001	0,0000001	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
DAN INKLUSIF DI SEMUA													
		16.1.2.(a)	Persentase Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA / POLRI	Persen	0	0,0000001	0,0000001	0,0000001	0,0000001	0,0000001	Proksi
		16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA / POLRI	Persen	0	0,0000001	0,0000001	0,0000001	0,0000001	0,0000001	Proksi
		16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat	DPPKBPPPA / POLRI	Persen	0	0,0000001	0,0000001	0,0000001	0,0000001	0,0000001	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
			sendirian di area tempat tinggalnya.	tinggalnya.									
	16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Persen	0,017	0,016	0,016	0,015	0,014	0,013	
		16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Persen	0,017	0,017	0,016	0,015	0,014	0,013	
		16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Persen	0,074	0,072	0,07	0,068	0,05	0,045	

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
			seksual sebelum umur 18 tahun.										
	16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(a)	Persentase korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA / POLRI	Persen	0,00000020	0,00000020	0,00000010	0,00000010	0,00000010	0,00000010	Proksi
		16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Sosial	Orang	19	22	20	20	20	20	
	16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Nilai peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Kabupaten	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Kategori	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
			/Kota).										
		16.6.1.(b)	Nilai Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten /kota	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Sekretariat Daerah	Nilai	C	C	B	B	B	B	Proksi
		16.6.1.(c)	Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Sekretariat Daerah	Persen	0,7	0,75	0,85	0,9	0,93	0,95	
		16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Kabupaten /Kota).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Sekretariat Daerah	Persen	60	65	67	68	69	70	Proksi
		16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan	Indikator nasional sebagai proksi indikator	Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
			Peraturan Pemerintah terhadap Pelayanan Publik	global (ada di dalam lampiran perpres).									
	16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Proksi
		16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Badan Kepegawaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persen	20	21	21	21	21	21	
	16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Persentase Penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Persen	97,20	82,06	95	97	99	100	Proksi
		16.9.1.(b)	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Jiwa	101,364	104,064	262,846	267	281,236	300	Proksi

TUJUAN	TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE (2019)	PROYEKSI PENCAPAIAN					KETERANGAN
								2020	2021	2022	2023	2024	
				lampiran perpres).									
	16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.1.(b)	Jenis pelayanan penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan dan anak terutama kekerasan	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).	DPPKBPPPA	Jenis	2	2	2	2	2	2	Proksi

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (PRPJMD) Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah yang akan dicapai selama masa jabatan Bupati Padang Lawas Tahun 2020-2024. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

9.1 Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah berakhirnya PRPJMD periode 2020-2024, maka dokumen PRPJMD Tahun 2020-2024 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan pembangunan yang belum dapat ditangani secara tuntas sampai dengan akhir periode PRPJMD, serta untuk mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan baru yang muncul pada tahun pertama masa pemerintahan Kepala Daerah yang baru. Untuk target pembangunan yang telah tercapai pada periode sebelumnya, maka TAPD perlu merumuskan kembali serta menetapkan besaran target baru yang akan dicapai pada masa transisi dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya, dokumen RKPD masa transisi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen PRPJMD periode selanjutnya.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi OPD dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra OPD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam PRPJMD Tahun 2020-2024 dengan sebaik-baiknya;

2. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada dokumen PRPJMD Tahun 2020-2024;

3. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas wajib menjamin konsistensi antara PRPJMD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas;

4. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas wajib menjamin konsistensi antara dokumen PRPJMD Tahun 2020-2024, dengan Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas;

5. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PRPJMD Tahun 2020-2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Padang Lawas wajib melakukan penyelarasan antara penjabaran PRPJMD Tahun 2020-2024 ke dalam Rencana Strategis OPD, dan melakukan harmonisasi program dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen PRPJMD Tahun 2020-2024;

6. Bagi program prioritas Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun prioritas nasional, dimana terdapat kemungkinan bahwa Pemerintah Daerah tidak mampu mengalokasikan anggaran terhadap program tersebut, maka dalam hal pembiayaannya dapat dilakukan melalui berbagai macam skema, antara lain melalui kerjasama dengan Badan Usaha *(Public Private Partnership), Corporate Social Responbility (CSR),* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maupun Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga

Non Pemerintah, baik dalam negeri maupun lembaga-lembaga internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sibuhuan, Desember 2021

PLT. BUPATI PADANG LAWAS

drg. H. AHMAD ZARNAWI PASARIBU, CHT, MM, M.Si

Diploidal dengan CamScanner